

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-7
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-10
1.4 Maksud dan Tujuan.....	I-11
1.4 Sistematika Dokumen RKPD.....	I-11
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah.....	II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-6
2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-6
2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial	II-11
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum	II-20
2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib.....	II-20
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan Dan Realisasi RPJMD	II-99
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah	II-194
2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	II-194
2.4 Pokok – Pokok Pikiran DPRD	II-202
2.5 Isu Strategis Daerah	II-203
2.6 Isu Strategis Nasional.....	II-203
2.6.1 Sembilan Ageda Pembangunan.....	II-204
2.6.2 Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)	II-204
2.7 Penetapan Kawasan Strategis.....	II-203

2.7.1 Kawasan Strategis Ekonomi	II-208
2.7.2 Kawasan Strategis Sosial Budaya	II-209
2.7.2 Kawasan Strategis Lingkungan Hidup	II-210

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.1.1 Analisa Ekonomi Daerah	III-3
3.1.1.1 Kondisi Makro Ekonomi Kota Pangkalpinang pada Tahun 2016 dan Perkiraan pada Tahun 2018	III-4
3.1.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Kota Pangkalpinang Tahun 2018 dan Tahun 2019.....	III-7
3.1.1.3 Arah Kebijakan Perekonomian Kota Pangkalpinang Tahun 2018 dan Tahun 2019	III-9
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	III-9
3.3 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan	III-12

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Pangkalpinang	IV-1
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2019	IV-2
4.3 Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan SDGs	IV-12

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah	V-1
--	-----

BAB VI KINERJA PELAYANAN PEMERINTAH DAERAH

6.1 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	VI-1
6.1.1 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	VI-1
6.1.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	VI-2

BAB VII PENUTUP

7.1 Penutup.....	VII-1
------------------	-------

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah kelurahan dan jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Kota Pangkalpinang sampai dengan Semester II Tahun 2017	II.5
Tabel 2.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Pangkalpinang Tahun 2014-2016	II.7
Tabel 2.3	Laju Inflasi Kota Pangkalpinang Tahun 2014 – 2016	II.7
Tabel 2.4	Angka Kriminalitas Kota Pangkalpinang Tahun 2013-2016	II.10
Tabel 2.5	Fokus Kesejahteraan Sosial Bidang Pendidikan Kota Pangkalpinang Tahun 2013 – 2016	II.11
Tabel 2.6	Fokus Kesejahteraan Sosial Bidang Kesehatan Kota Pangkalpinang Tahun 2013- 2016	II.14
Tabel 2.7	Persentase Balita Gizi Buruk	II.17
Tabel 2.8	Perkembangan seni, budaya dan olahraga tahun 2013-2016 ...	II.18
Tabel 2.9	Perkembangan Seni, Budaya dan Olah Raga Menurut Kecamatan Kota Pangkalpinang Tahun 2016	II.18
Tabel 2.10	Angka Putus Sekolah Kota Pangkalpinang Tahun 2014-2016 .	II.23
Tabel 2.11	Angka Putus Sekolah Kota Pangkalpinang Tahun 2014-2016 .	II.24
Tabel 2.12	Jumlah Posyandu dan Balita menurut kecamatan Tahun 2011-2016 Kota Pangkalpinang	II.26
Tabel 2.13	Rasio Posyandu, Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Kota Pangkalpinang Tahun 2012-2016	II.27
Tabel 2.14	Cakupan Pelayanan Puskemas di Kota Pangkalpinang Tahun 2014-2016	II.30
Tabel 2.15	Panjang jaringan jalan berdasarkan kondisi Tahun 2012-2016	II.32
Tabel 2.16	Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Menurut Kecamatan tahun 2016 Kota Pangkalpinang	II.32
Tabel 2.17	Rasio tempat ibadah Kota Pangkalpinang tahun 2013 – 2015.	II.33

Tabel 2.18	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kota pangkalpinang Tahun 2012-2016	II.34
Tabel 2.19	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Menurut kecamatan Tahun 2016	II.34
Tabel 2.20	Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk Tahun 2015 -2016 Kota Pangkalpinang	II.35
Tabel 2.21	Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2016	II.36
Tabel 2.22	Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2012 -2016	II.37
Tabel 2.23	Realisasi Ijin Trayek Kota Pangkalpinang Tahun 2014 -2016	II.40
Tabel 2.24	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis tahun 2012 - 2016	II.41
Tabel 2.25	Jumlah volume sampah dan produksi sampah Kota Pangkalpinang Tahun 2013 - 2016	II.42
Tabel 2.26	Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga Menurut Kecamatan Kota Pangkalpinang Tahun 2016	II.50
Tabel 2.27	Rasio Akseptor KB Menurut Kecamatan Tahun 2015 Kota Pangkalpinang	II.51
Tabel 2.28	Cakupan Peserta KB Aktif di Kota Pangkalpinang Tahun 2015 Per Kecamatan	II.52
Tabel 2.29	Keluarga Pra-sejahtera dan keluarga sejahtera I menurut Kecamatan Kota Pangkalpinang Tahun 2014	II.54
Tabel 2.30	Sarana Sosial di Kota Pangkalpinang Tahun 2016	II.54
Tabel 2.31	Sengketa Pemutusan Hubungan Kerja Pada Perusahaan di Kota Pangkalpinang Tahun 2010	II.59
Tabel 2.32	Angka Sengketa Pengusaha pekerja, Jumlah Perusahaan, dan Angka Sengketa Pengusaha Per Pekerja Tahun 2010	II.60
Tabel 2.33	Perkembangan Investasi (PMTB) di Kota Pangkalpinang Tahun 2008-2011	II.66
Tabel 2.34	Benda, Situs, dan Cagar Budaya yang Ditetapkan Di Kota Pangkalpinang Tahun 2016	II.68

Tabel 2.35	Jumlah Organisasi Pemuda di Kota Pangkalpinang Tahun 2016	II.70
Tabel 2.36	Jumlah Lapangan Olahraga Tahun 2016	II.72
Tabel 2.37	Jumlah LSM aktif Kota Pangkalpinang Tahun 2012-2016	II.74
Tabel 2.38	Ketersediaan Pangan Kota Pangkalpinang Tahun 2012-2016	II.80
Tabel 2.39	Jumlah Layanan Telepon Seluler Kota Pangkalpinang Tahun 2016	II.84
Tabel 2.40	Jumlah Jaringan Telepon Terpasang Kota Pangkalpinang Tahun -2016	II.85
Tabel 2.41	Kontribusi Sektor Pertanian/perkebunan Terhadap PDRB Tahun 2012-2016	II.88
Tabel 2.42	Kontribusi Sektor Tanaman Pangan Terhadap PDRB	II.88
Tabel 2.43	Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB	II.89
Tabel 2.44	Alat Tangkap Ikan Di Kota Pangkalpinang tahun 2016	II.92
Tabel 2.45	Perkembangan Produksi Perikanan Budidayadi Kota Pangkalpinang Tahun 2013- 2016	II.93
Tabel 2.46	Kontibusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	II.95
Tabel 2.47	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB	II.97
Tabel 2.49	Tabel Pengendalian dan Evaluasi RKPD Tahun Lalu	II.100
Tabel 2.48	Prioritas Pembangunan Pada Tahap 5 Tahun Ketiga Kota Pangkalpinang	II.194
Tabel 2.50	Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	II.195
Tabel 3.1	Sasaran Ekonomi Nasional RPJMN Tahun 2015-2019	III.2
Tabel 3.2	Indikator Ekonomi Makro Kota Pangkalpinang Realisasi Tahun 2015-2016 dan Proyeksi Tahun 2017-2018	III.4
Tabel 3.3	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Pangkalpinang Tahun 2015 S.D 2019	III.15
Tabel 3.4	Realisasi Dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2015 S.D 2019	III.16
Tabel 3.5	Realisasi Dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2015 S.D 2019	III.17

Tabel 4.1	Target Sasaran Pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun 2018	IV.2
Tabel 4.2	Keselarasan Target Indikator Pembangunan Makro Antara Target Nasional, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dan Kota Pangkalpinang Tahun 2019	IV.7
Tabel 4.3	Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah Dengan Nasional Dan Provinsi	IV.9
Tabel 4.4	Korelasi Prioritas Kota Pangkalpinang dalam Merespon Program <i>SGDs</i>	IV.12
Tabel 5.1	Arah Kebijakan Pemerintah Kota Pangkalpinang	V.2
Tabel 5.2	Prioritas Pembangunan 5 Tahun Ketiga	V.3
Tabel 5.3	Urusan Wajib Program Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2019	V.5
Tabel 5.4	Pagu Indikatif OPD Belanja Langsung TA 2019 RAPBD Kota Pangkalpinang	V.18
Tabel 5.5	Pagu Program Prioritas RKPD Belanja Langsung Ta. 2019 RAPBD Kota Pangkalpinang	V.20
Tabel 5.6	Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Tahun 2019 Kota Pangkalpinang	V.21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari tahapan yang bersifat jangka panjang, menengah, dan tahunan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.

Penyusunan RKPD sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 3 ayat (2), dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan secara terpadu sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan yang wajib disusun oleh Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia. Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah Kota Pangkalpinang juga memiliki kewajiban dalam menyusun RKPD dimaksud.

Dalam menyusun RKPD Tahun 2019, Pemerintah Kota Pangkalpinang mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan menerapkan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down), dan bawah-atas (bottom-up).

Pendekatan politik bermakna bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan. Hal ini dikarenakan rakyat pemilih dalam menentukan pilihannya didasari oleh program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan oleh Kepala Daerah

pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah yang disepakati bersama DPRD.

Perencanaan melalui pendekatan teknokratis dilaksanakan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang dilaksanakan oleh lembaga atau perangkat daerah yang secara fungsi memiliki tugas untuk itu.

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan (stakeholder) terhadap pembangunan, di mana pelibatan para pihak tersebut dimaksudkan untuk menjaring aspirasi dan menumbuhkan kebanggaan rasa memiliki.

Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa.

Disamping pendekatan-pendekatan tersebut di atas dan selaras dengan RKP 2019, Penyusunan RKPD 2019 dengan prinsip *money follows program* menggunakan pendekatan Holistik-Tematik, Integratif, dan Spasial dengan penajaman substansi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi.

Penguatan implementasi *Money Follow Programme* dilakukan melalui penajaman kesinambungan prioritas pembangunan, pengendalian pelaksanaan program dengan penerapan standarisasi kegiatan yang mendukung pencapaian indikator program, dan penajaman integrasi sumber pendanaan.

Sedangkan penguatan pendekatan Tematik-Holistik, Integratif dan Spasial dilakukan dengan memperhatikan pada pengendalian perencanaan, penguatan perencanaan dan perencanaan, penguatan perencanaan berbasis kewilayahan dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing wilayah, dan penguatan integrasi sumber pendanaan pembangunan.

Dengan penerapan seluruh pendekatan perencanaan tersebut di dalam penyusunannya, maka diharapkan dokumen RKPD Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2019 dapat menjadi dokumen perencanaan yang memenuhi prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan dan kesinambungan kemajuan dan kesatuan Nasional.

Selain hal tersebut, sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diantaranya sebagai berikut:

1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.
2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).
3. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

Memperhatikan posisi strategis dokumen RKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka diharapkan dapat dihasilkan suatu dokumen perencanaan yang berkualitas dengan mempedomani peraturan perundangan yang berlaku, terutama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RKPD ditetapkan agar dapat memberikan acuan yang efektif bagi pembangunan.

Beberapa hal yang harus menjadi perhatian dalam penyusunan dokumen RKPD, antara lain adalah:

1. RKPD tahun rencana disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya.

2. Program prioritas dalam RKPD harus sesuai dengan prioritas sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJPD, RKP dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat serta dengan memperhatikan visi dan misi Kepala Daerah terpilih.
3. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus konsisten dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) untuk program dan indikator kinerja keluaran (output) untuk kegiatan, yang bersifat realistis dan terukur.
5. Program dan kegiatan dalam RKPD harus dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

RKPD disusun melalui tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan RKPD (Pasal 73) meliputi :
 - a. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
 - b. Orientasi mengenai RKPD;
 - c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD; dan
 - d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.
2. Penyusunan rancangan awal RKPD (Pasal 79) meliputi :
 - a. Perumusan rancangan awal RKPD dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Analisis gambaran umum kondisi daerah;
 - 2) Analisis rancangan kerangka ekonomi daerah;
 - 3) Analisis kapasitas riil keuangan daerah;
 - 4) Penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah;
 - 5) Perumusan permasalahan pembangunan daerah;
 - 6) Penelaahan terhadap sasaran RPJMD;
 - 7) Penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;
 - 8) Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional;

- 9) Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
- 10) Perumusan prioritas pembangunan daerah; dan
- 11) Perumusan rencana kerja program dan pendanaan.

b. Penyajian rancangan awal RKPD.

Rancangan awal RKPD disajikan dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:

- 1) Pendahuluan;
- 2) Gambaran umum kondisi daerah;
- 3) Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
- 4) Sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
- 5) Arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota;
- 6) Rancangan kerja dan pendanaan daerah;
- 7) Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah;
- 8) Penutup.

3. Penyusunan rancangan RKPD (Pasal 85)

Penyusunan rancangan RKPD adalah proses penyempurnaan rancangan awal RKPD provinsi berdasarkan :

- a. Rancangan awal Rencana Kerja seluruh Perangkat Daerah provinsi yang telah diverifikasi; dan
- b. Hasil penelaahan terhadap rancangan awal RKP dan program strategis nasional.

4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD. Musrenbang RKPD dilakukan dalam rangka penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD yang mencakup:

- 1) Menyepakati permasalahan pembangunan Daerah;
- 2) Menyepakati prioritas pembangunan Daerah;
- 3) Menyepakati arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota lingkup provinsi;
- 4) Menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi;
- 5) Penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan nasional; dan
- 6) Klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan provinsi dengan program dan kegiatan kabupaten/kota yang diusulkan berdasarkan hasil musrenbang Kabupaten/kota.

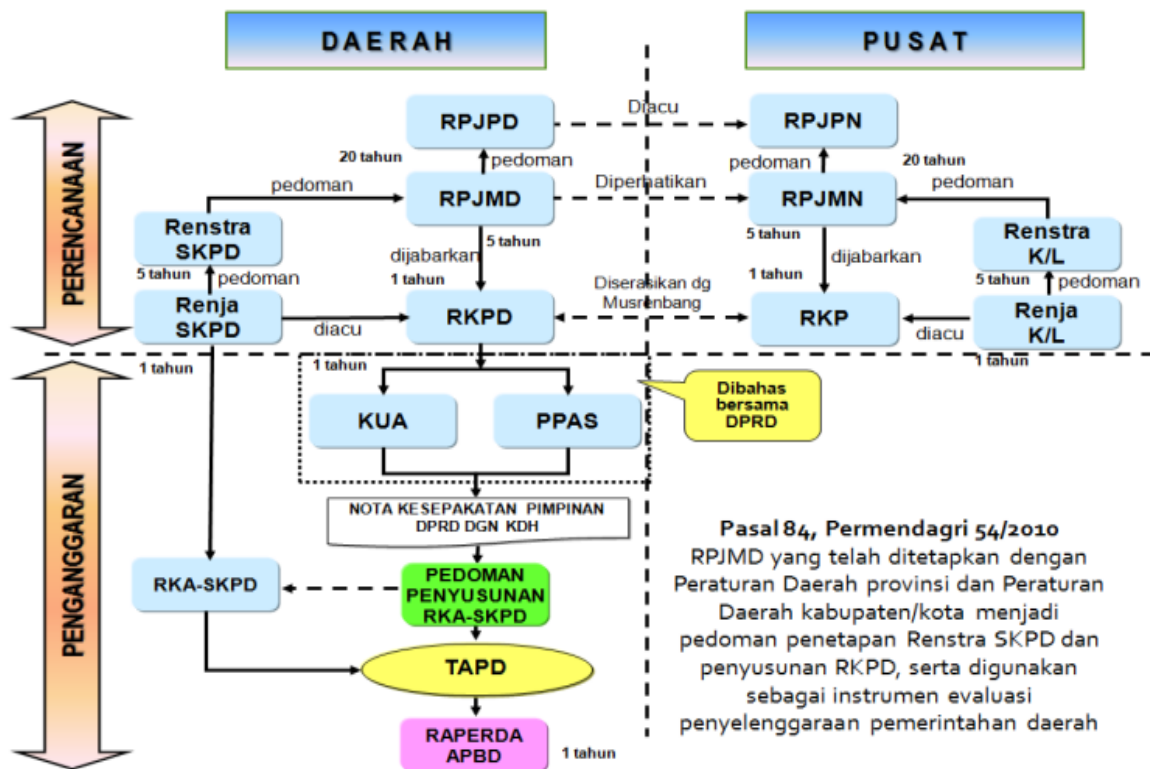
5. Perumusan rancangan akhir RKPD.

Perumusan rancangan akhir RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan RKPD menjadi rancangan akhir RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD dan bertujuan untuk memastikan program dan kegiatan Perangkat Daerah telah diakomodir dalam rancangan akhir RKPD serta sebagai bahan penyusunan Perkada tentang RKPD.

6. Penetapan RKPD.

- 1) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan dijadikan sebagai :
 - a. Pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - b. Pedoman penyelarasan prioritas pembangunan provinsi dengan kabupaten/kota; dan
 - c. Pedoman penyusunan rancangan kebijakan umum APBD Provinsi serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara provinsi.
- 2) Rancangan kebijakan umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disampaikan gubernur kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan APBD.

Penyusunan RKPD Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2019 memiliki makna yang strategis karena merupakan penjabaran tahap ketiga dari RPJPD 2007-2025 dan juga merupakan tahun kelima dari pelaksanaan RPJMN 2015-2019. RKPD yang telah ditetapkan digunakan sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



Sumber: Permendagri No 54 Tahun 2010

Gambar 1.1 Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

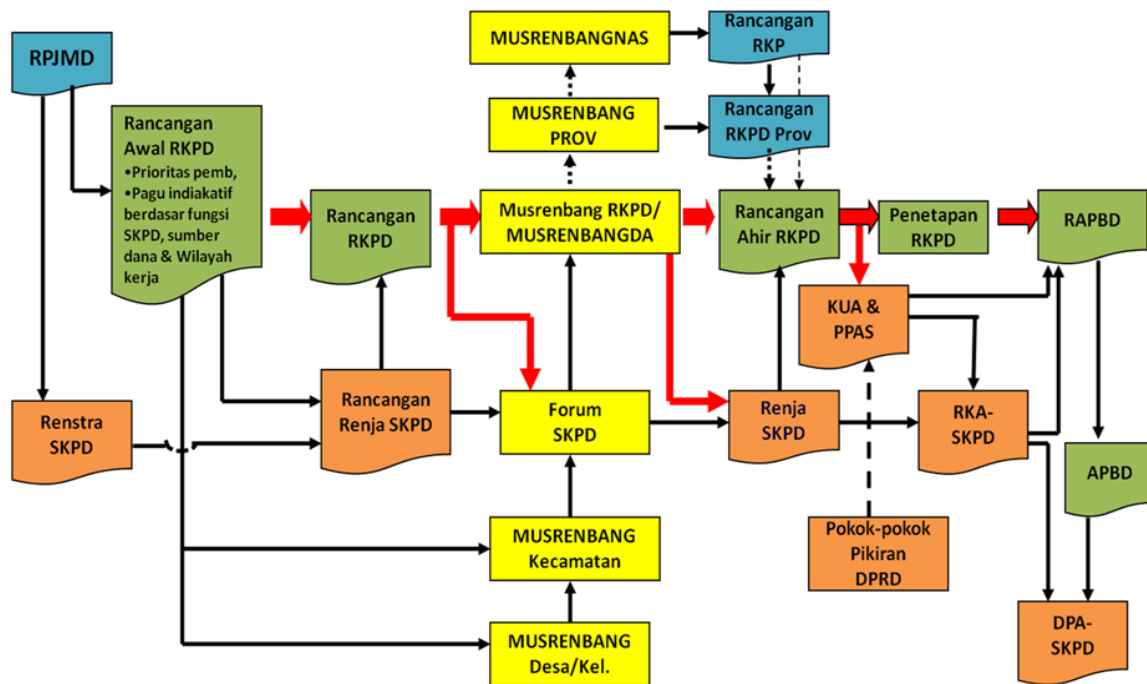
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
16. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 07, Seri E Nomor 03), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2015 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 04 Seri E);

18. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02, Seri D Nomor 01);
19. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2012 Nomor 01);
20. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);
21. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2017 Nomor 10).
22. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 57);

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada dasarnya mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan nasional menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. RKPD merupakan satu kesatuan yang utuh dari manajemen pembangunan khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan.

RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2019 merupakan RKPD tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk perencanaan jangka waktu 5 (lima) tahun 2019-2023, dan merupakan penjabaran dari visi, misi dan program yang tercantum dalam RPJPD Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2025. RKPD menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. RKPD dan RKA-Perangkat Daerah inilah yang selanjutnya disusun menjadi Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) setiap tahunnya. Hubungan antar dokumen perencanaan dijelaskan lebih lanjut sebagaimana Gambar I.2



Gambar 1.2 Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.4 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun dengan maksud untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki guna peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan. Adapun tujuannya adalah sebagai acuan bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Kota Pangkalpinang dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Tahun Anggaran 2019.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika penyusunan RKPD Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Berisi penjelasan gambaran umum kondisi daerah dari berbagai aspek, hasil evaluasi RKPD tahun lalu dan tahun berjalan dan realisasi RPJMD serta permasalahan pembangunan daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH;

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD, identifikasi masalah ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta pendanaan.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 sebagai penutup kabinet kerja sehingga tema dan prioritas nasional RKP Tahun 2019 lebih terfokus. Prioritas nasional di bidang ekonomi masuk dalam Prioritas Nasional 3, yaitu Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif, dengan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan ekspor dan nilai tambah pertanian melalui peningkatan produktivitas, kualitas, serta dukungan kelembagaan dan sarana prasarana.
2. Mendorong percepatan peningkatan nilai tambah industri pengolahan melalui perbaikan iklim usaha, peningkatan investasi, penguatan rantai pasok/ nilai, dan pemanfaatan inovasi.
3. Meningkatkan nilai tambah jasa produktif antara lain melalui pengembangan destinasi wisata, ekonomi kreatif dan digital, peningkatan ekspor terutama produk hilirisasi, dan penguatan kemitraan.
4. Mendorong percepatan peningkatan keahlian tenaga kerja melalui penguatan vokasi dan kompetensi, pengembangan kerja sama dunia usaha dan kewirausahaan.
5. Mengembangkan iptek dan inovasi untuk peningkatan produktivitas antara lain melalui peningkatan SDM iptek, pengembangan litbang keilmuan strategis, dan pengembangan teknologi frontier.

Kebijakan ekonomi daerah merupakan pondasi dalam membangun kemandirian dan mengurangi ketergantungan daerah dengan pemerintah pusat. Kebijakan ekonomi daerah dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek ekonomi dan aspek keuangan.

Aspek ekonomi salah satunya dapat dilihat dari kondisi ekonomi makro suatu daerah. Kebijakan ekonomi makro ini akan mempengaruhi arah pembangunan sehingga perlu adanya sinergisitas antara kebijakan ekonomi makro pemerintah daerah dengan kebijakan ekonomi makro pemerintah pusat.

Arah Kebijakan ekonomi yang termaktub dalam RPJMN Tahun 2015-2019 adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan pemerataan pendapatan, menjaga tingkat inflasi, meningkatkan investasi, meningkatkan pembangunan manusia, menurunkan pengangguran dan angka kemiskinan dengan sasaran antara lain dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1 Sasaran Ekonomi Nasional RPJMN Tahun 2015-2019

INDIKATOR MAKRO	2014 (Baseline)	2015	2016	2017	2018*	Sasaran Akhir RPJMN 2019*
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,0	4,8	5,3	5,3	5,6	8
Pengangguran (%)	5,94	6,18	5,61	5,6	5,4	4,0-5,0
Angka Kemiskinan (%)	10,96	11,13	10,7	10,5	9,5	7,0-8,0
Gini Ratio (indeks)	0,41	0,41	0,39	0,39	0,38	36
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73.8	74.8	70,19	70,38	71,38	76.3
Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMAS)	55	n.a	n.a	n.a	n.a	meningkat

Sumber : RPJMN Tahun 2015-2019

Pengelolaan keuangan pemerintah Kota Pangkalpinang dilakukan dengan mengacu pada batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam:

- (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 *juncto* Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- (5) Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan perundangan yang mendasari pengelolaan keuangan daerah tersebut memberikan tekanan perlunya efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Kerangka pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang secara garis besar terdiri dari penyusunan anggaran daerah, penatausahaan dan pertanggungjawaban, yang kesemuanya mengacu pada prinsip-prinsip efisiensi dan efektifitas seperti yang dimaksud dalam peraturan di atas. Sedangkan, Arah kebijakan pembangunan ekonomi Kota Pangkalpinang yang menjadi prioritas pembangunan Tahun 2019 (merupakan masa transisi) akan difokuskan pada beberapa tujuan sesuai dengan fokus yang termasuk dalam RPJPD Kota Pangkalpinang, yaitu:

1. Daya dukung utilitas
2. Kelayakan dan kesinambungan program dan alokasi anggaran
3. Mengurangi dampak eksternalitas pembangunan
4. Penanganan lingkungan hidup

3.1.1. Analisa Ekonomi Daerah

Analisa ekonomi daerah bertujuan untuk menilai sejauh mana realisasi pembangunan dapat mempengaruhi kinerja ekonomi dan sejauh mana indikator makro ekonomi sesuai dengan yang diasumsikan dalam RPJMD.

Dalam rangka memperoleh gambaran kondisi ekonomi riil suatu daerah pada tahun lalu, tahun berjalan dan tahun rencana, yang merupakan langkah penting dalam merumuskan kebijakan ekonomi daerah maka dilakukan analisis asumsi umum/makro ekonomi daerah tahun lalu, tahun berjalan dan tahun rencana. Hal ini dimaksudkan

untuk mengumpulkan fakta dan permasalahan yang dihadapi daerah sebagai pertimbangan dalam analisa keuangan dan perumusan kerangka ekonomi.

3.1.1.1. Kondisi Makro Ekonomi Kota Pangkalpinang Pada Tahun 2016 dan Perkiraan Pada Tahun 2018

Gambaran kondisi makro ekonomi Kota Pangkalpinang pada Tahun 2015-2016 dan perkiraan Tahun 2017-2018 dapat dilihat antara lain dari laju pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, jumlah penduduk miskin, tingkat pengangguran dan pendapatan perkapita penduduk. Berikut ini beberapa indikator ekonomi makro Tahun 2014-2015 dan proyeksi tahun 2016-2017:

Tabel 3.2 Indikator Ekonomi Makro Kota Pangkalpinang Realisasi Tahun 2015-2016 dan Proyeksi Tahun 2017-2018

No	Indikator Makro	Satuan	Realisasi		Bertambah / Berkurang	Proyeksi	
			2015	2016		2017	2018
1.	PDRB (Harga Berlaku)	Rp.juta	10.214.674,00	11.673.989,55	856.069,00	12.325.369,75	13.281.061,88
2.	PDRB (Harga Konstan)	Rp.juta	7.551.391,00	7.949.211,87	303.894,00	8.300.712,35	8.652.212,84
3.	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB Harga Berlaku tahun tertentu	persen	9,15	14,29	(2,07)	5,58	7,75
4.	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB Harga Konstan tahun tertentu	persen	3,40	5,27	(0,87)	4,42	4,23
5.	Tingkat Inflasi	persen	4,66	5,26	(2,15)	4,80	4,35
6.	PDRB ADHB	Rp.juta	10.214.674,00	11.673.989,55	856.069,00	12.325.369,75	13.281.061,88
	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Rp.juta	509.466,00	569.779,18	42.997,00	600.787,82	643.695,09
	Pertambangan dan Penggalian	Rp.juta	-	-	-	-	-
	Industri Pengolahan	Rp.juta	1.927.461,00	2.156.671,30	(15.115,00)	2.249.478,46	2.365.847,02
	Pengadaan Listrik dan Gas	Rp.juta	6.203,00	6.569,06	927,00	7.133,46	7.840,25
	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Rp.juta	3.412,00	3.646,83	484,00	3.858,47	4.132,31
	Konstruksi	Rp.juta	1.097.449,00	1.318.321,13	94.963,00	1.392.591,07	1.519.546,20
	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil	Rp.juta	2.700.093,00	2.993.245,61	291.260,00	3.159.135,78	3.389.999,24
	Transportasi dan Pergudangan	Rp.juta	633.748,00	728.666,56	81.533,00	771.993,32	839.709,70
	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Rp.juta	348.920,00	402.226,38	34.386,00	425.197,79	460.386,43
	Informasi dan Komunikasi	Rp.juta	287.429,00	317.946,81	18.373,00	334.385,32	355.966,05
	Jasa Keuangan dan Asuransi	Rp.juta	462.969,00	585.526,81	31.063,00	615.004,32	673.968,23
	Real Estate	Rp.juta	548.373,00	664.721,61	47.509,00	700.497,63	764.630,52
	Jasa Perusahaan	Rp.juta	52.960,00	63.141,32	3.986,00	66.645,18	72.462,54
	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Rp.juta	728.049,00	858.141,91	91.732,00	907.292,95	991.507,01
	Jasa Pendidikan	Rp.juta	532.163,00	622.509,39	88.776,00	659.594,51	724.369,62
	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Rp.juta	197.349,00	230.448,06	21.464,00	243.809,32	265.234,68
	Jasa lainnya	Rp.juta	178.631,00	207.239,05	20.659,00	219.619,74	239.333,50
7.	PDRB ADHK	Rp.juta	7.551.391,00	7.949.211,87	303.894,00	8.300.712,35	8.652.212,84

No	Indikator Makro	Satuan	Realisasi		Bertambah / Berkurang	Proyeksi	
			2015	2016		2017	2018
	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Rp.juta	372.760,00	384.947,60	12.571,00	396.876,34	408.805,09
	Pertambangan dan Penggalian	Rp.juta	-	-	-	-	-
	Industri Pengolahan	Rp.juta	1.548.903,00	1.592.651,13	9.443,00	1.619.146,50	1.645.641,88
	Pengadaan Listrik dan Gas	Rp.juta	4.666,00	5.010,80	222,00	5.394,74	5.778,69
	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Rp.juta	2.244,00	2.230,53	107,00	2.269,30	2.308,08
	Konstruksi	Rp.juta	766.416,00	829.052,73	25.438,00	876.481,56	923.910,39
	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil	Rp.juta	2.020.103,00	2.123.017,47	80.159,00	2.213.670,70	2.304.323,92
	Transportasi dan Pergudangan	Rp.juta	444.032,00	469.193,47	24.964,00	493.502,84	517.812,21
	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Rp.juta	250.327,00	259.196,73	17.651,00	271.292,28	283.387,82
	Informasi dan Komunikasi	Rp.juta	265.440,00	280.704,33	16.383,00	296.718,76	312.733,19
	Jasa Keuangan dan Asuransi	Rp.juta	342.470,00	382.880,93	10.047,00	410.366,39	437.851,85
	Real Estate	Rp.juta	390.064,00	422.255,00	15.391,00	448.346,14	474.437,29
	Jasa Perusahaan	Rp.juta	37.566,00	40.256,40	1.202,00	42.420,23	44.584,06
	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Rp.juta	488.711,00	508.751,07	41.303,00	536.583,90	564.416,72
	Jasa Pendidikan	Rp.juta	340.861,00	356.555,87	28.591,00	377.637,50	398.719,12
	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Rp.juta	148.653,00	157.073,53	11.963,00	166.666,30	176.259,08
	Jasa lainnya	Rp.juta	128.175,00	135.435,53	8.457,00	143.340,30	151.245,08
7.	Jumlah Penduduk	jiwa	196.339,10	200.725,43	4.345,10	204.767,27	208.965,36
8.	Jumlah Penduduk Miskin	ribu jiwa	7,06	7,02	(0,75)	6,76	6,51
9.	Tingkat Pengangguran	persen	10,64	9,47	1,80	9,2	9
10.	Pendapatan Perkapita (Harga Berlaku)	Rp.ribu	53.873,45	59.248,41	5.099,45	62.984,02	67.456,75
11.	Pendapatan Perkapita (Harga Konstan)	Rp.ribu	39.106,91	40.325,78	1.358,35	41.410,15	42.556,24

a. Perkembangan PDRB, Pertumbuhan Ekonomi, dan Struktur Ekonomi

Perkembangan PDRB baik PDRB Harga Berlaku dan PDRB Harga Konstan selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. PDRB Harga Berlaku Tahun 2015 adalah Rp10,2 triliun dan meningkat ditahun berikutnya 2016 menjadi Rp11,6 triliun atau naik sebesar 14,29persen. Prediksi PDRB Harga Berlaku untuk tahun 2017 dan tahun 2018 adalah masing-masing sebesar Rp12,3 triliun dan Rp13,2 triliun. Demikian juga, untuk PDRB Harga Konstan di Tahun 2015 sebesar Rp7,5triliun dan naik menjadi Rp7,9 triliun di Tahun 2016 atau naik sebesar 5,27 persen. Perkembangan PDRB Harga Konstan adalah pertumbuhan riil dari PDRB yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi. Prediksi PDRB Harga Konstan untuk tahun 2017 dan tahun 2018 masing-masing adalah Rp8,3triliun dan Rp8,6 triliun. Estimasi pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2017 dan 2018 masing-masing sebesar 4,42 persen dan 4,23 persen.

Struktur ekonomi Kota Pangkalpinang masih didominasi oleh sektor perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan sektor Industri Pengolahan sebagai penyumbang terbesar PDRB Kota Pangkalpinang.

b. Laju Inflasi

Indikator pembangunan ekonomi yang baik tidak hanya diukur dengan besaran PDRB, laju pertumbuhan ekonomi, dan transformasi struktural perekonomian, namun juga dapat disinergikan dengan besaran perkembangan harga di tingkat konsumen yang diindikasikan dengan laju inflasi. Kajian terhadap perkembangan laju inflasi cukup penting mengingat tingkat inflasi mempengaruhi daya beli (*purchasing power*) masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan membawa dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kalau tingkat kenaikan harga tinggi. Bila daya beli masyarakat meningkat berarti terdapat peningkatan kesejahteraan masyarakat yang mencerminkan berkembangnya sektor produksi dan distribusi barang dan jasa. Selanjutnya kondisi tersebut akan mendorong (*feedback linkage*) pertumbuhan ekonomi.

Sebagai salah satu indikator makro ekonomi yang berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi, inflasi sesungguhnya merupakan gabungan dari sumbangan beberapa jenis barang dan jasa yang mengalami fluktuasi harga.

Tingkat inflasi untuk Kota Pangkalpinang sangat perfluktuasi. Nilai inflasi Kota Pangkalpinang untuk tahun 2015 mencapai 4,66 persen dan mengalami kenaikan di tahun 2016 menjadi sebesar 5,26 persen. Angka inflasi diestimasikan turun pada tahun 2017 adalah sebesar 4,80 persen dan diharapkan kembali menurun pada tahun 2018 sebesar 4,35 persen.

c. Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Kota Pangkalpinang pada tahun 2015 menjadi 7060 jiwa. Jumlah ini mengalami penurunan pada tahun 2016 sebesar 7020 jiwa, sehingga diharapkan untuk tahun 2017 menjadi 6760 jiwa dan 6510 jiwa di tahun 2018 dengan asumsi adanya stabilitas ekonomi yang lebih baik pada tahun-tahun berikutnya.

d. Tingkat Pengangguran

Tingkat pengangguran di Kota Pangkalpinang Tahun 2016 sebesar 9,47persen. Harapan untuk tahun 2018 tingkat pengangguran dapat ditekan hingga 9 persen. Proyeksi sebesar ini mempertimbangkan pertambahan jumlah penduduk di Kota Pangkalpinang yang begitu pesat dengan dengan migrasi masuk sangat tinggi juga mempertimbangkan gejolak harga timah dunia. Kedua faktor ini saling keterkaitan dan merupakan bagian dari beberapa faktor lain yang meningkatkan jumlah pengangguran di Kota Pangkalpinang.

e. Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita penduduk harga berlaku Kota Pangkalpinang Tahun 2016 mencapai Rp59,24 juta meningkat dari tahun sebelumnya Rp53,8 juta sedangkan pendapatan perkapita penduduk harga konstan adalah sebesar Rp39,10 juta di tahun 2015 dan mengalami kenaikan di tahun 2016 menjadi Rp40,3 juta. Proyeksi kedepan, pendapatan perkapita penduduk harga berlaku Kota Pangkalpinang untuk tahun 2017 adalah sebesar Rp62,98 juta dan Tahun 2018 sebesar Rp67,45 juta. Untuk pendapatan perkapita harga konstan di proyeksikan pada tahun 2017 mencapai Rp41,41 juta dan Rp42,55 juta pada tahun 2018.

3.1.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Kota Pangkalpinang Tahun 2018 dan Tahun 2019

Kajian spesifik terhadap perkembangan PDRB menjadi indikator perkembangan perekonomian daerah. Demikian juga analisis terhadap pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran mengenai dampak kebijakan ekonomi terhadap pembangunan yang dilaksanakan.

Secara empiris pertumbuhan ekonomi merupakan indikator turunan yang diperoleh dari perkembangan PDRB ADHK. Dari sisi pengeluaran (*expenditure*), PDRB (Y) merupakan hasil penjumlahan dari konsumsi rumah tangga (C), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), perubahan inventori, belanja pemerintah (G) dan netto ekspor-impor (X-M). Dengan demikian, terdapat hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dengan besaran belanja pemerintah. Makin besar belanja pemerintah memberikan kontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, demikian pula

sebaliknya. Proyeksi (prospek) pertumbuhan ekonomi Kota Pangkalpinang Tahun 2018 diperkirakan tumbuh pada kisaran 4,00 – 4,50 persen.

Secara global, perekonomian dunia perlahan-lahan membaik dan kebanyakan negara-negara berkembang menjaga stabilitas pertumbuhan dengan berhati-hati terhadap gejolak perekonomian baik bidang moneter maupun fiskal yang mungkin akan terjadi. Hal yang perlu diantisipasi dalam perencanaan pembangunan Tahun 2018 adalah peningkatan inflasi ini diperkirakan sebagai dampak dari rencana pemerintah pusat untuk melakukan pembatasan subsidi Bahan Bakar Minyak, dampak melemahnya harga minyak dunia, menurunnya harga timah, perubahan iklim dan melemahnya kurs rupiah yang berimbas kepada ekspektasi masyarakat dan dunia usaha terhadap keinginan berinvestasi menurun. Faktor lain seperti bertambah jumlah penduduk terutama migrasi masuk yang mungkin akan menjadi faktor menambah tingkat pengangguran terbuka dikarenakan meningkatnya jumlah angkatan kerja tidak terdidik dan terlatih.

Peran Pemerintah dalam membuat kebijakan moneter dan fiskal dan fokus pemerintah pusat untuk meningkatkan daya saing daerah terutama bagi sumber daya manusia, menggalakkan investasi melalui perbaikan iklim investasi merupakan hal positif terhadap perekonomian kedepan. Pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk yang diharapkan mengalami peningkatan juga tingkat inflasi dan pengangguran yang lebih terkendali diharapkan akan menggerakkan peningkatan investasi di Kota Pangkalpinang pada Tahun 2017-2018.

3.1.1.3. Arah kebijakan Perekonomian Kota Pangkalpinang Tahun 2018 dan Tahun 2019

Berdasarkan gambaran perkembangan, tantangan dan prospek perekonomian makro Kota Pangkalpinang adalah beberapa poin yang menjadi arah kebijakan perekonomian pada tahun 2018-2019 yaitu;

1. Meningkatkan peran UMKM dan Koperasi untuk menggeliatkan ekonomi kerakyatan, ekonomi kreatif dan berorientasi pariwisata.
2. Meningkatkan daya saing daerah terutama peningkatan sumber daya manusia melalui pengembangan, pelatihan dan pendidikan terhadap angkatan kerja, meningkatkan program pendidikan dan kesehatan.
3. Memperluas lapangan pekerjaan, menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat serta menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui regulasi di bidang investasi, peningkatan pelayanan perizinan, meningkatkan peran lembaga yang berhubungan dengan investasi.
4. Meningkatkan kemitraan antara pemerintah dan swasta melalui program CSR.
5. Meningkatkan belanja pemerintah di bidang infrastruktur dan fasilitas publik.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, dengan komponen pokoknya adalah pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Meningkatnya tuntutan kebutuhan dana sebagai konsekuensi penyerahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, melalui otonomi daerah, menuntut berbagai upaya penyesuaian manajemen keuangan daerah termasuk arah pengelolaan pendapatan dan belanja daerah.

Penyusunan APBD sesuai dengan peraturan perundangan diawali dengan proses musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang hasilnya dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), selanjutnya dipergunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan

Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Daerah adalah salah satu wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab serta sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penyusunan APBD harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah yang dinamis diseimbangkan dengan prioritas pembangunan yang relevan berdasarkan kemampuan keuangan daerah, sinkronisasi dan integrasi kebijakan pemerintah pusat, provinsi sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Kebijakan dalam pengelolaan APBD memegang peranan yang sangat strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah karena APBD merupakan salah satu instrument penting kebijakan fiskal daerah. Kebijakan Desentralisasi Fiskal Daerah mengandung tiga misi utama yaitu :

- 1) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya;
- 2) meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat;
- 3) serta memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Sedangkan tiga fungsi utama kebijakan fiskal yaitu sebagai alat stabilisasi ekonomi, alat distribusi pendapatan, dan alat alokasi anggaran. Sebagai alat stabilisasi ekonomi, kebijakan fiskal memainkan perannya dalam menjaga stabilitas nilai tukar dan laju inflasi yang pada gilirannya berpengaruh positif dalam pencapaian ekspansi ekonomi tinggi. Sebagai alat distribusi pendapatan, fungsi kebijakan fiskal tercermin sebagai media dalam penarikan pajak dari masyarakat dimana orang kaya akan membayar pajak lebih tinggi dibandingkan orang miskin. Sedangkan, fungsi kebijakan fiskal sebagai alat alokasi anggaran tercermin dari kualitas anggaran dalam APBD.

Selain terus memprioritaskan pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal, pemerintah hendaknya juga mendukung dan melaksanakan kebijakan reformasi dalam administrasi keuangan daerah, dimana antara lain tercermin dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja, sebagai salah satu langkah perubahan dalam upaya membangun sebuah pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu

pengelolaan APBD harus melalui tiga tahapan penting yaitu mulai dari penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan/pengendalian.

Dalam paradigma baru dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah, perencanaan harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- 1) Berorientasi pada kepentingan publik / masyarakat luas;
- 2) Disusun berdasarkan pendekatan kinerja;
- 3) Mempunyai keterkaitan yang erat antara pengambil kebijakan (decisionmaker) di DPRD dengan perencanaan operasional oleh Pemerintah Daerah dan penganggaran pada unit kerja (PD);
- 4) Terdapat upaya-upaya untuk mensinergikan hubungan antara APBD, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, lembaga pengelola keuangan daerah dan unit-unit pengelola layanan publik dalam pengambilan keputusan.

Pengelolaan keuangan di daerah meliputi mobilisasi pendapatan, penetapan alokasi belanja daerah, dan mobilisasi pembiayaan. Untuk memenuhi sufficient condition bagi pengelolaan keuangan daerah yang baik, maka daerah perlu memahami dan menggali potensi/keunggulan daerah serta mengidentifikasi pokok-pokok permasalahan yang ada. Daerah juga perlu menentukan arah pembangunannya dalam rencana tahunan, jangka menengah hingga jangka panjang yang masing-masing dituangkan ke dalam RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang), RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) daerah, RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah). Selain ketersediaan sumber-sumber pembiayaan yang ideal, alokasi belanja daerah sangat ditentukan oleh prioritas-prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam ketiga dokumen perencanaan tersebut.

Dalam upaya untuk mencapai seluruh rencana tindak yang ada pada dokumen perencanaan lima tahunan dan satu tahunan, perlu ditetapkan arah pengelolaan keuangan daerah. Arah pengelolaan ini dimaksudkan agar seluruh sumber daya keuangan daerah dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan efisien. Arah pengelolaan tersebut meliputi arah pengelolaan pendapatan daerah, arah pengelolaan belanja daerah dan arah pengelolaan pembiayaan daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta dalam rangka mendukung upaya percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemantapan stabilitas ekonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta pelayanan umum kepada masyarakat, maka kebijakan keuangan (anggaran) Kota Pangkalpinang pada tahun 2019 diarahkan untuk :

- 1) Memberikan dorongan terhadap pertumbuhan perekonomian daerah dengan melanjutkan dan memantapkan langkah-langkah konsolidasi fiskal daerah, guna mewujudkan APBD yang sehat dan berkelanjutan (fiscalsustainability) dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan karakteristik, kondisi obyektif dan isu-isu strategis di daerah, di samping memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- 2) Langkah konsolidasi fiskal daerah tersebut, antara lain ditempuh melalui optimalisasi pengumpulan sumber-sumber pendapatan daerah, peningkatan efisiensi dan efektifitas belanja daerah serta peningkatan dan perbaikan manajemen keuangan daerah;
- 3) Memantapkan kondisi ketahanan fiskal daerah yang berkelanjutan dengan cara :
 - ✓ melanjutkan langkah-langkah konsolidasi fiskal dengan menjaga tingkat defisit yang terkendali dari aspek pembiayaan daerah,
 - ✓ peningkatan manajemen keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien;
- 4) Menyelesaikan masalah-masalah mendasar yang menjadi prioritas pembangunan tahun 2017-2022.

3.3. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Pendapatan daerah menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 1 ayat 13 merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan di atas, dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas :

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi

- Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- 2) Dana Perimbangan yang meliputi : Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus;
 - 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, meliputi : Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus, Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi/Kabupaten/Kota Lainnya, Lain-lain Penerimaan, Dana Transfer Pusat dan Dana Insentif Daerah. Sedangkan penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pendapatan Daerah menurut Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan dikelompokkan atas : a) PAD, yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD pada umumnya terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang Sah; b) Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Hibah, Dana Darurat, DBH Pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, Dana Penyesuaian dan Otsus, serta Bantuan Keuangan dari provinsi atau dari pemda lainnya.

Dari berbagai komponen Pendapatan Daerah, sumber utama penerimaan Daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok. Hal ini sebagai pertanda bahwa perlu segera dilakukan upaya-upaya terobosan untuk mencari sumber-sumber alternatif pendapatan lainnya yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi sumber penerimaan daerah, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan dari pajak daerah yang bersifat “limitative”. Hal yang sama juga terjadi pada penerimaan dana perimbangan yang menunjukkan kecenderungan menurun.

Hal ini, antara lain disebabkan oleh hilangnya potensi komponen Dana Bagi Hasil Pajak bersumber dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan yang diserahkan kepada Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan serta prospek perekonomian di Kota Pangkalpinang sebagaimana telah diuraikan pada sub bab sebelumnya, maka dapat disajikan analisa dan proyeksi sumber sumber pendapatan daerah sebagaimana tertuang di dalam Tabel Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah pada Tabel T-C.20, Tabel Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah pada Tabel T-C.21 dan Tabel Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah pada Tabel T-C.22 berikut ini :

Tabel 3.3
TABEL T.C.20 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan
KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2015 s.d 2019

NO	URAIAN	Jumlah				
		Realisasi tahun (n-3)	Realisasi tahun (n-2)	Realisasi tahun (n-1)	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana (n)	Proyeksi/Target pada Tahun (n+1)
1	2	3	4	5	6	7
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	135,305,782,559.87	136,257,398,973.11	147,701,073,151.00	163,003,375,710.00	
1.1.1	Pajak Daerah	57,078,721,282.23	65,953,671,740.50	84,180,560,848.58	73,471,200,000.00	
1.1.2	Restribusi daerah	16,933,544,425.66	14,368,849,102.52	12,611,409,222.78	14,853,975,710.00	
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	4,314,667,852.53	6,079,642,892.25	6,175,994,513.15	6,000,000,000.00	
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	56,978,849,029.45	49,855,235,237.84	44,733,108,566.49	68,678,200,000.00	
1.2	DANA PERIMBANGAN	538,208,270,454.00	741,810,521,719.00	530,406,970,952.00	669,634,285,000.00	
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	55,506,991,454.00	49,745,083,917.00		60,329,163,000.00	
1.2.2	Dana alokasi umum	419,863,119,000.00	451,406,721,000.00	443,476,956,000.00	443,476,956,000.00	
1.2.3	Dana alokasi khusus	62,838,160,000.00	240,658,816,802.00	86,930,014,952.00	165,828,166,000.00	
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	124,305,685,774.41	100,302,763,552.96		57,622,765,000.00	
1.3.1	Hibah	-	23,955,982,961.00			
1.3.2	Dana darurat	-				

1.3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah yang lainnya	63,365,681,774.41	36.044.446.191.,96		50,000,000,000.00	
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	43,423,684,000.00				
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya	17,516,320,000.00	40,302,307,400.00		7,622,765,000.00	
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1+1.2+1.3)		797,819,738,788.28	978,370,657,245.07	678,108,044,103.00	890,260,425,710.00	

Tabel 3.4

**TABEL T.C.21 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah
KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2015 s.d 2019**

NO	URAIAN	Jumlah				
		Realisasi tahun (n-3)	Realisasi tahun (n-2)	Realisasi tahun (n-1)	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana (n)	Proyeksi/Target pada Tahun (n+1)
1	2	3	4	5	6	7
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG					
2.1.1	Belanja Pegawai	350,939,207,975.00	362,907,498,330.00	308,963,409,277.00	330,601,773,683.00	
2.1.2	Belanja bunga					
2.1.3	Belanja subsidi					
2.1.4	Belanja hibah	9,917,564,500.00	13,484,777,132.00	15,662,685,000.00	30,472,008,000.00	
2.1.5	Belanja bantuan sosial	760,952,900.00	424,301,000.00	119,450,000.00	200,000,000.00	
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa					
2.1.7	Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa	514.231.573.,00	763,656,167.00	787,147,000.00	1,384,319,683.00	
2.1.8	Belanja tidak terduga	4,233,614.00	962,347,500.00	548,547,705.00	4,000,000,000.00	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	362,136,190,562.00	378,542,580,129.00	326,081,238,982.00	366,658,101,366.00	
2.2	BELANJA LANGSUNG					
2.2.1	Belanja pegawai	57,974,681,427.00	90,188,184,250.00	86,983,506,011.00	106.743.971.322,00	
2.2.2	Belanja barang dan jasa	191,810,707,763.64	184,563,224,181.63	128,657,215,128.65	257.663.753.133,00	
2.2.3	Belanja modal	196,105,837,101.00	336,343,181,795.55	128,657,215,128.65	194.194.599.889,00	
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	445,891,226,291.64	611,094,590,227.23	460,983,061,573.81	558.602.324.344,00	
	TOTAL JUMLAH BELANJA	808,027,416,853.64	989,637,170,356.23	787,064,300,555.81	925,260,425,710.00	

Tabel 3.5

TABEL T.C.22 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah **KOTA PANGKALPINANG** **TAHUN 2015 s.d 2019**

No.	URIAN	Jumlah				
		Realisasi tahun (n-3)	Realisasi tahun (n-2)	Realisasi tahun (n-1)	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana (n)	Proyeksi/Target pada Tahun (n+1)
1	2	3	4	5	6	7
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	147,823,263,031.81	130,101,195,419.45	99,115,143,180.29	35,000,000,000.00	
	Pencairan dana cadangan					
	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan					
	Penerima pinjaman daerah					
	Penerimaan kembali pemberian pinjaman					
	Penerimaan piutang daerah					

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	147,823,263,031.81	130,101,195,419.45	99,115,143,180.29	35,000,000,000.00	
	Pengeluaran pembiayaan					
	Pembentukan dana cadangan					
	Penyertaan modal (investasi) daerah	7,000,000,000.00	18,955,982,961.00			
	Pembayaran pokok utang					
	Pemberian pinjaman daerah					
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7,000,000,000.00	18,955,982,961.00			
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	140,823,263,031.81	111,145,212,458.45	99,115,143,180.29		
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAN	156,879,907,399.89	99,115,143,180.29	140,582,045,283.35	35,000,000,000.00	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD.....	I-7
Gambar 1.2 Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan lain	I-7
Gambar 2.1 Keterkaitan Karakteristik Lokasi dan Wilayah Administrasi dengan Pengembangan Wilayah	II-1
Gambar 2.2 Grafik Posisi Relative Indeks Kedalaman Kemiskinan (Indeks) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015	II-9
Gambar 2.3 Grafik Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Pangkalpinang Tahun 2013-2016.....	II-9
Gambar 2.4 Grafik Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Pangkalpinang Tahun 2013-2016	II-10
Gambar 2.5 Grafik Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Kota Pangkalpinang Tahun 2012-2016	II-15
Gambar 2.6 Grafik Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Pangkalpinang	II-17
Gambar 2.7 Grafik Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2014-2016	II-20
Gambar 2.8 Grafik Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah di Kota Pangkalpinang Tahun 2012-2016	II-21
Gambar 2.9 Grafik Rasio Jumlah Guru dan Murid Kota Pangkalpinang Tahun 2012-2016	II-22
Gambar 2.10 Grafik Jumlah Guru dengan Ijazah dan memasuki kualifikasi S1/D-IV Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2016 (Persen) ...	II-25
Gambar 2.11 Grafik Rasio Posyandu per satuan Balita Tahun 2011-2016	II-26
Gambar 2.12 Grafik Jumlah Rasio Puskesmas Per Jumlah Penduduk, Rasio Pustu Per Jumlah Penduduk, dan Rasio Poliklinik Per Jumlah Penduduk Tahun 2012-2016.....	II-27
Gambar 2.13 Grafik Jumlah Rasio Rumah Sakit Persatuan Penduduk Tahun 2012-2016.....	II-28
Gambar 2.14 Grafik Jumlah Rasio Tenaga Dokter Per Jumlah Penduduk Tahun 2011-2016.....	II-29

Gambar 2.15 Grafik Jumlah Rasio Tenaga Medis Per Jumlah Penduduk Tahun 2012-2016.....	II-30
Gambar 2.16 Grafik Cakupan Puskesmas Layanan Pembantu (PUSTU) di Kota Pangkalpinang Tahun 2012-2016.....	II-32
Gambar 2.17 Grafik Jumlah Rasio Tenaga Medis Per Jumlah Penduduk Tahun 2012-2016.....	II-31
Gambar 2.18 Grafik Cakupan Rumah tangga bersanitasi Kota Pangkalpinang Tahun 2012-2017	II-37
Gambar 2.19 Grafik Arus Penumpang Angkutan Umum Kapal Laut Di Kota Pangkalpinang Tahun 2009-2014	II-39
Gambar 2.20 Grafik Arus Penumpang Angkutan Umum Bis di Kota Pangkalpinang Tahun 2012-2016	II-40
Gambar 2.21 Grafik Persentase penduduk berakses air minum	II-42
Gambar 2.22 Grafik Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan Kota Pangkalpinang Tahun 2010-2015.. ..	II-47
Gambar 2.23 Grafik Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2012.....	II-47
Gambar 2.24 Grafik Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2012	II-48
Gambar 2.25 Grafik Rata-rata Anak Per Keluarga Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2016.....	II-50
Gambar 2.26 Grafik Rasio Akseptor KB di Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2016	II-51
Gambar 2.27 Grafik Cakupan Peserta KB Aktif di Kota Pangkalpinang Tahun 2010-2015.....	II-52
Gambar 2.28 Grafik Persentase keluarga prasejahtera dan sejahtera I Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2012	II-53
Gambar 2.29 Grafik Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Kota Pangkalpinang Tahun 2013-2016.....	II-57
Gambar 2.30 Grafik Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Pangkalpinang Tahun 2008-2012	II-57
Gambar 2.31 Grafik Partisipasi Angkatan Kerja Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2015.....	II-59

Gambar 2.32 Grafik Rasio pencari kerja di Kota Pangkalpinang Tahun 2009 – 2014	II-61
Gambar 2.33 Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2015.....	II-62
Gambar 2.34 Grafik Persentase Perusahaan di Kota Pangkalpinang yang menerapkan K3 Tahun 2008 -2012.....	II-63
Gambar 2.35 Grafik Persentase Koperasi Aktif di Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2015.....	II-64
Gambar 2.36 Grafik Persentase Usaha Mikro dan Kecil terhadap UMKM Kota Pangkalpinang Tahun 2012-2016	II-65
Gambar 2.37 Grafik Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2016	II-67
Gambar 2.38 Grafik Sebaran Pamong Praja di Kota Pangkalpinang Tahun 2012 (Personil).....	II-75
Gambar 2.39 Grafik Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal per Hektar Kota Pangkalpinang Tahun 2012-2016	II-86
Gambar 2.40 Grafik Kunjungan Wisata Kota Pangkalpinang terhadap Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2012-2016.....	II-90
Gambar 2.41 Grafik Kontribusi Sektor Parawisata terhadap PDRB di Kota Pangkalpinang Tahun 2013-2016	II-91
Gambar 2.42 Grafik Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap di Kota Pangkalpinang Tahun 2012-2016	II-92
Gambar 2.43 Grafik Jumlah Konsumsi Ikan di Kota Pangkalpinang Tahun 2012-2016.....	II-94
Gambar 2.44 Grafik Kontribusi Sektor Perdagangan (Berdasarkan Harga Berlaku) Tahun 2007-2012	II-95
Gambar 2.45 Grafik Nilai Ekspor dan Impor Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2011	II-96
Gambar 2.46 Grafik Nilai Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2011	II-98

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari tahapan yang bersifat jangka panjang, menengah, dan tahunan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.

Penyusunan RKPD sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 3 ayat (2), dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan secara terpadu sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan yang wajib disusun oleh Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia. Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah Kota Pangkalpinang juga memiliki kewajiban dalam menyusun RKPD dimaksud.

Dalam menyusun RKPD Tahun 2019, Pemerintah Kota Pangkalpinang mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan menerapkan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down), dan bawah-atas (bottom-up).

Pendekatan politik bermakna bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan. Hal ini dikarenakan rakyat pemilih dalam menentukan pilihannya didasari oleh program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan oleh Kepala Daerah

pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah yang disepakati bersama DPRD.

Perencanaan melalui pendekatan teknokratis dilaksanakan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang dilaksanakan oleh lembaga atau perangkat daerah yang secara fungsi memiliki tugas untuk itu.

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan (stakeholder) terhadap pembangunan, di mana pelibatan para pihak tersebut dimaksudkan untuk menjaring aspirasi dan menumbuhkan kebanggaan rasa memiliki.

Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa.

Disamping pendekatan-pendekatan tersebut di atas dan selaras dengan RKP 2019, Penyusunan RKPD 2019 dengan prinsip *money follows program* menggunakan pendekatan Holistik-Tematik, Integratif, dan Spasial dengan penajaman substansi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi.

Penguatan implementasi *Money Follow Programme* dilakukan melalui penajaman kesinambungan prioritas pembangunan, pengendalian pelaksanaan program dengan penerapan standarisasi kegiatan yang mendukung pencapaian indikator program, dan penajaman integrasi sumber pendanaan.

Sedangkan penguatan pendekatan Tematik-Holistik, Integratif dan Spasial dilakukan dengan memperhatikan pada pengendalian perencanaan, penguatan perencanaan dan perencanaan, penguatan perencanaan berbasis kewilayahan dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing wilayah, dan penguatan integrasi sumber pendanaan pembangunan.

Dengan penerapan seluruh pendekatan perencanaan tersebut di dalam penyusunannya, maka diharapkan dokumen RKPD Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2019 dapat menjadi dokumen perencanaan yang memenuhi prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan dan kesinambungan kemajuan dan kesatuan Nasional.

Selain hal tersebut, sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diantaranya sebagai berikut:

1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.
2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).
3. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

Memperhatikan posisi strategis dokumen RKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka diharapkan dapat dihasilkan suatu dokumen perencanaan yang berkualitas dengan mempedomani peraturan perundangan yang berlaku, terutama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RKPD ditetapkan agar dapat memberikan acuan yang efektif bagi pembangunan.

Beberapa hal yang harus menjadi perhatian dalam penyusunan dokumen RKPD, antara lain adalah:

1. RKPD tahun rencana disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya.

2. Program prioritas dalam RKPD harus sesuai dengan prioritas sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJPD, RKP dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat serta dengan memperhatikan visi dan misi Kepala Daerah terpilih.
3. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus konsisten dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) untuk program dan indikator kinerja keluaran (output) untuk kegiatan, yang bersifat realistis dan terukur.
5. Program dan kegiatan dalam RKPD harus dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

RKPD disusun melalui tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan RKPD (Pasal 73) meliputi :
 - a. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
 - b. Orientasi mengenai RKPD;
 - c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD; dan
 - d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.
2. Penyusunan rancangan awal RKPD (Pasal 79) meliputi :
 - a. Perumusan rancangan awal RKPD dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Analisis gambaran umum kondisi daerah;
 - 2) Analisis rancangan kerangka ekonomi daerah;
 - 3) Analisis kapasitas riil keuangan daerah;
 - 4) Penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah;
 - 5) Perumusan permasalahan pembangunan daerah;
 - 6) Penelaahan terhadap sasaran RPJMD;
 - 7) Penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;
 - 8) Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional;

- 9) Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
- 10) Perumusan prioritas pembangunan daerah; dan
- 11) Perumusan rencana kerja program dan pendanaan.

b. Penyajian rancangan awal RKPD.

Rancangan awal RKPD disajikan dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:

- 1) Pendahuluan;
- 2) Gambaran umum kondisi daerah;
- 3) Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
- 4) Sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
- 5) Arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota;
- 6) Rancangan kerja dan pendanaan daerah;
- 7) Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah;
- 8) Penutup.

3. Penyusunan rancangan RKPD (Pasal 85)

Penyusunan rancangan RKPD adalah proses penyempurnaan rancangan awal RKPD provinsi berdasarkan :

- a. Rancangan awal Rencana Kerja seluruh Perangkat Daerah provinsi yang telah diverifikasi; dan
- b. Hasil penelaahan terhadap rancangan awal RKP dan program strategis nasional.

4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD. Musrenbang RKPD dilakukan dalam rangka penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD yang mencakup:

- 1) Menyepakati permasalahan pembangunan Daerah;
- 2) Menyepakati prioritas pembangunan Daerah;
- 3) Menyepakati arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota lingkup provinsi;
- 4) Menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi;
- 5) Penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan nasional; dan
- 6) Klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan provinsi dengan program dan kegiatan kabupaten/kota yang diusulkan berdasarkan hasil musrenbang Kabupaten/kota.

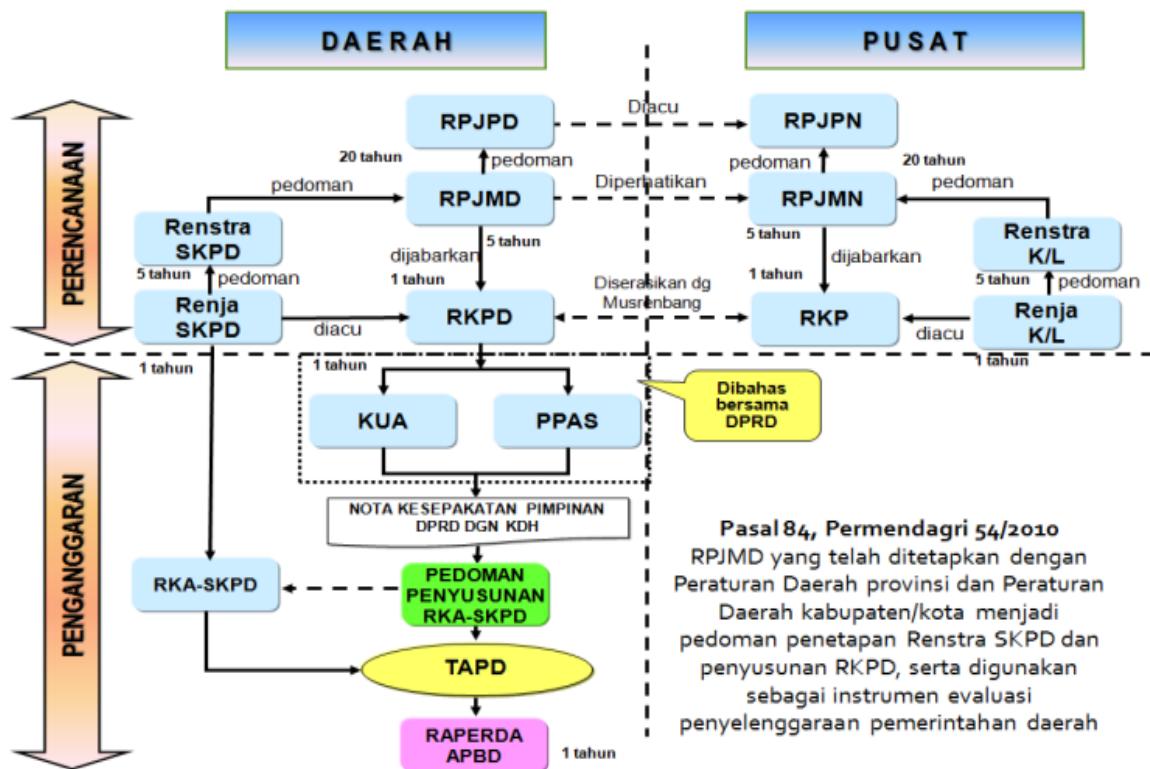
5. Perumusan rancangan akhir RKPD.

Perumusan rancangan akhir RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan RKPD menjadi rancangan akhir RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD dan bertujuan untuk memastikan program dan kegiatan Perangkat Daerah telah diakomodir dalam rancangan akhir RKPD serta sebagai bahan penyusunan Perkada tentang RKPD.

6. Penetapan RKPD.

- 1) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan dijadikan sebagai :
 - a. Pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - b. Pedoman penyelarasan prioritas pembangunan provinsi dengan kabupaten/kota; dan
 - c. Pedoman penyusunan rancangan kebijakan umum APBD Provinsi serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara provinsi.
- 2) Rancangan kebijakan umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disampaikan gubernur kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan APBD.

Penyusunan RKPD Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2019 memiliki makna yang strategis karena merupakan penjabaran tahap ketiga dari RPJPD 2007-2025 dan juga merupakan tahun kelima dari pelaksanaan RPJMN 2015-2019. RKPD yang telah ditetapkan digunakan sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



Sumber: Permendagri No 54 Tahun 2010

Gambar 1.1 Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKP

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
16. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 07, Seri E Nomor 03), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2015 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 04 Seri E);

18. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02, Seri D Nomor 01);
19. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2012 Nomor 01);
20. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);
21. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2017 Nomor 10).
22. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 57);

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada dasarnya mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan nasional menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. RKPD merupakan satu kesatuan yang utuh dari manajemen pembangunan khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan.

RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2019 merupakan RKPD tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk perencanaan jangka waktu 5 (lima) tahun 2019-2023, dan merupakan penjabaran dari visi, misi dan program yang tercantum dalam RPJPD Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2025. RKPD menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. RKPD dan RKA-Perangkat Daerah inilah yang selanjutnya disusun menjadi Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) setiap tahunnya. Hubungan antar dokumen perencanaan dijelaskan lebih lanjut sebagaimana Gambar I.2

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Berisi penjelasan gambaran umum kondisi daerah dari berbagai aspek, hasil evaluasi RKPD tahun lalu dan tahun berjalan dan realisasi RPJMD serta permasalahan pembangunan daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH;

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD, identifikasi masalah ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta pendanaan.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

BAB II

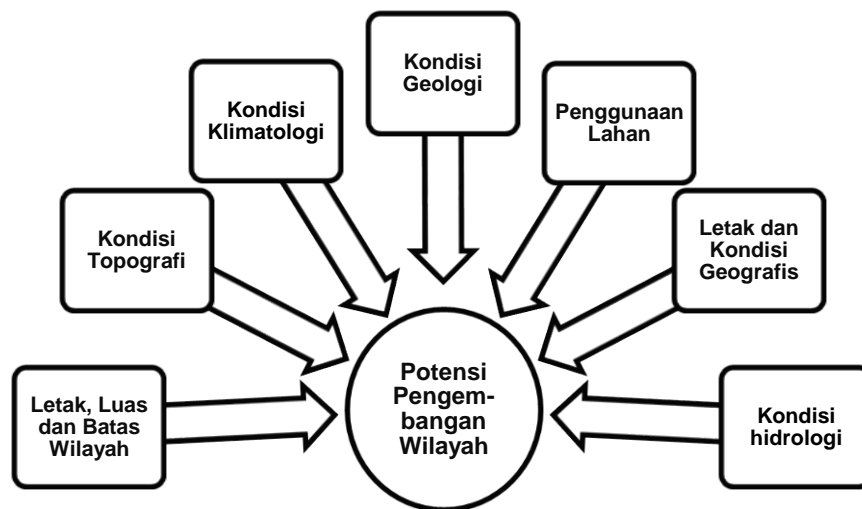
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

a. Karakteristik Lokasi dan Wilayah Administrasi

Karakteristik lokasi dan wilayah administrasi Kota Pangkalpinang dilihat dari aspek luas dan batas wilayah administrasi, letak dan kondisi geografis, topografi, geologi, hidrologi, klimatologi dan data penggunaan lahan. Aspek tersebut menjadi penting karena dapat menjadi pertimbangan utama bagi pemerintah untuk menyusun rencana pengembangan wilayah dengan gambaran keterkaitan sebagai berikut:



Gambar II.1. Keterkaitan Karakteristik Lokasi dan Wilayah Administrasi dengan Pengembangan Wilayah

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH**b. Luas dan Batas Wilayah Administrasi**

Kota Pangkalpinang adalah Ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1984 memiliki luas wilayah 89,4 Km², dengan batas-batas wilayah pada saat itu meliputi:

- Sebelah utara berbatasan dengan Desa Selindung Lama Kecamatan Pangkalan Baru
- Desa Dul Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka.
- Sebelah timur berbatasan dengan Laut China Selatan.
- Sebelah barat berbatasan dengan Desa Air Duren Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka.

Seiring perkembangan pemerintahan dan bergabungnya Desa Selindung dengan Kota Pangkalpinang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2007, maka luas wilayah Kota Pangkalpinang menjadi 118,4 Km², dengan batas wilayah pemekaran meliputi:

- Sebelah utara berbatasan dengan Desa Pagarawan Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Dul Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka.
- Sebelah timur berbatasan dengan Laut China Selatan.
- Sebelah barat berbatasan dengan Desa Air Duren Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka.

c. Letak dan Kondisi Geografis

Kota Pangkalpinang terletak di tengah Pulau Bangka dan mempunyai posisi astronomis pada garis 106° 4' sampai dengan 106° 7' bujur timur dan garis 2° 4' sampai dengan 2° 10' lintang selatan. Secara geografis, sebelah timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan dan merupakan jalur perairankeluar masuk barang dari pulau lain. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bangka Tengah. Sebelah utara dan barat berbatasan dengan Kabupaten Bangka. Posisi ini membentuk Kota Pangkalpinang berada di tengah-tengah Pulau Bangka dan menjadipusat kegiatan lokal, pusat kegiatan kewilayahan, dan pusat pemerintahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

d. Topografi

Kondisi topografi wilayah Kota Pangkalpinang pada umumnya bergelombang dan berbukit, dengan ketinggian 20–50 m dari permukaan laut dan kemiringan 0–25 persen. Secara morfologi, daratan Kota Pangkalpinang berbentuk cekung dimana bagian pusat kota berada di daerah rendah. Daerah-daerah yang berbukit mengelompok di bagian barat dan selatan seperti Bukitirimaya dan Bukit Menara.

e. Geologi

Struktur bebatuan di wilayah Kota Pangkalpinang mempunyai struktur utama berupa depresi lipatan geantiklin. Dilihat dari proses pembentukannya dapat dibedakan dalam tiga jenis, yaitu (1) endapan permukaan yang membentuk struktur batuan alluvium (Qa); (2) batuan endapan (sedimen) yang membentuk struktur Formasi Tanjunggending (TRt); dan (3) batuan malihan (metamorfosis) yang membentuk struktur Formasi Pemali Kompleks (CPp).

Batuan alluvium (Qa) merupakan endapan permukaan berupa endapan/sedimen klastik atau endapan yang terbentuk oleh proses mekanik. Alluvium (Qa) merupakan endapan batuan klastik yang terjadi pada zaman/berumur *Holosen*. Endapan alluvial tersebut berupa bongkah, kerakal, kerikil, pasir, dan lumpur. Sebaran alluvial (Qa) terletak di dataran pantai dan dataran banjir sungai-sungai yang menyebar hampir merata di Kecamatan Pangkalbalam, Kecamatan Rangkui, Kecamatan Taman Sari, Kecamatan Bukit Intan, dan Kecamatan Gerunggang.

Batuan endapan yang membentuk Formasi Tanjunggending (TRt) merupakan batuan sedimen yang terbentuk dari hasil pemisahan atau penguraian batuan asal. Formasi Tanjunggending (TRt) berupa batupasir (*sandstone*) dan batu liat (*shale*), yang terbentuk karena pemisahan dan atau penguraian disebabkan oleh pengaruh fisik alam dan atau kimia alam. Tanjunggending (TRt) berdasarkan tekstur dan komposisi mineralogisnya berupa sedimen klastik. Formasi ini merupakan punggung gunung/perbukitan bersisi terjal diatas endapan tufa, dan dataran endapan bertufa perbukitan, terletak di Kecamatan Pangkalbalam, Kecamatan Gerunggang, dan Kecamatan Bukit Intan.

Formasi Pemali Kompleks (CPp) merupakan batuan malihan (metamorfosis) yang terbentuk karena pengaruh tekanan besar (kuat) dan temperatur tinggi, sehingga batuan mengalami perubahan bentuk (pemalihan/metamorfosa). Formasi Pemali Kompleks

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

(CPp) terletak perbukitan tidak teratur dan perbukitan berurutan dengan lembah sangat curam dan lereng sangat terjal di atas batu beku asam. Mineral timah yang sudah berbentuk remah ikut terbawa air sungai, yang sering ditambang oleh masyarakat. Formasi ini ada di Kecamatan Bukit Intan dan Kecamatan Rangkui.

f. Hidrologi

Wilayah Kota Pangkalpinang termasuk ke dalam bagian hilir Daerah Aliran Sungai (DAS) Batu Rusa. Kota Pangkalpinang juga memiliki beberapa sungai dimana pada umumnya terdiri dari sungai-sungai kecil yang bermuara ke Sungai Rangkui. Anak Sungai Rangkui merupakan kanal pengairan dari pintu air kolong Kacang Pedang ke Sungai Rangkui. Selain Sungai Rangkui terdapat juga Sungai Pedindang di bagian selatan, dimana kedua sungai ini berfungsi sebagai saluran utama pembuangan air hujan kota yang mengalir ke Sungai Baturusa dan berakhir di Laut Cina Selatan. Sungai-sungai ini selain berfungsi sebagai saluran utama pembuangan air hujan kota, juga berfungsi sebagai prasarana transportasi sungai dari pasar ke Sungai Baturusa dan terus ke laut.

Sumber air untuk air bersih pada umumnya berasal dari air tanah dan kolong. Kolong adalah danau yang terbentuk sebagai akibat dari penambangan timah di darat. Kolong yang ada di Kota Pangkalpinang diantaranya Kolong Kacang Pedang, Pedindang, Teluk Bayur, Bacang, Akit, Kepuh, Ijo, dan Aik Nangka.

Berdasarkan morfologinya, Kota Pangkalpinang berbentuk cekung dengan pusat kota yang berada di tengah-tengah. Hal ini memungkinkan terjadinya banjir setiap musim hujan di titik tertentu atau adanya pengaruh dari pasang surut air laut yang menyebabkan sebagian daerah tergenang air. Sedangkan daerah Timur yang berbatasan dengan Sungai Rangkui dengan Laut Cina Selatan dan bagian tengah kota yang dilalui oleh Sungai Rangkui sering tergenang oleh air pasang. Daerah yang tergenang tersebut terutama Kecamatan Rangkui, Pangkalbalam dan Tamansari. Adapun daerah yang tidak pernah tergenang adalah sebelah utara, barat, dan selatan Kota Pangkalpinang.

Selain sungai, Kota Pangkalpinang juga terdiri dari daerah rawa-rawa. Rawa-rawa tersebut baik yang masih asli maupun yang sudah dialihfungsikan menjadi tambak atau kolam memiliki luas 2.049 hektar. Rawa tersebut berada di sepanjang Sungai Baturusa dan Selindung, bagian tengah dan hilir Sungai Rangkui, dan sepanjang Sungai Pasir Padi.

g. Klimatologi

Iklim daerah Kota Pangkalpinang tergolong tropis basah tipe A dengan rata-rata curah hujan 149,6 mm per bulan selama tahun 2012, dengan jumlah hari hujan rata-rata 17 hari setiap bulannya dimana bulan terkering jatuh pada bulan Juli.

Hawa di daerah ini dipengaruhi oleh laut, baik angin maupun kelembabannya. Suhu udara selama tahun 2012 bervariasi antara 24,0° C sampai dengan 34° C, sedangkan kelembabannya berkisar antara 66,0 sampai 83,6 persen.

Angin bergerak setiap hari dengan arah dari Timur pada siang hari dan dari Barat pada malam hari. Rata-rata kecepatan angin cukup bervariasi setiap bulannya misalnya 2,4 knot pada bulan April, sementara bulan Juni 4,4 knot, dan yang terendah tercatat pada Maret (bulan terbasah) yaitu sebesar 2,0 knot.

h. Demografi

Jumlah penduduk Kota Pangkalpinang sampai dengan Semester II tahun 2017 berdasarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang adalah sebanyak 209.362 jiwa. Persentase laju pertumbuhan penduduk tersebut merupakan angka yang cukup tinggi bagi wilayah perkotaan dan apabila tidak disertai dengan perluasan wilayah maka kepadatan penduduk akan semakin meningkat.

Perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan di Kota Pangkalpinang menunjukkan sex ratio sebesar 103,7. Ini artinya, di antara 100 penduduk perempuan Kota Pangkalpinang terdapat 104 penduduk laki-laki. *Sex ratio* ini bervariasi pada seluruh kecamatan, seperti Kecamatan Gerunggang sebesar 105, Bukit Intan 105, Tamansari 104, Pangkalbalam 105 dan Kecamatan Rangkui yaitu sebesar 102. Adapun jumlah penduduk kota pangkalpinang menurut kecamatan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel halaman berikut ini :

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Tabel 2.1 Jumlah kelurahan dan jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Kota Pangkalpinang sampai dengan Semester II Tahun 2017

NO	KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK		
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Rangkui	8	19.884	19.530	39.414
2	Bukit Intan	7	18.854	17.976	36.830
3	Girimaya	5	9.854	9.717	19.571
4	Pangkalbalam	5	11.722	11.149	22.871
5	Gabek	6	14.697	14.272	28.969
6	Taman Sari	5	11.055	10.704	21.759
7	Gerunggang	6	20.415	19.533	39.948
	Jumlah	42	106.481	102.881	209.362

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir dari pelaksanaan pemerintahan. Untuk menganalisa pencapaian kesejahteraan masyarakat maka difokuskan pada kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus pada kesejahteraan sosial, dan pelaksanaan urusan wajib dan pilihan pemerintahan.

Pada fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, komponen yang ditekankan adalah perkembangan indikator ekonomi makro, diantaranya PDRB (atas dasar harga konstan dan harga berlaku) dan inflasi.

a. Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan PDRB merupakan salah satu indikator dalam analisa kinerja fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. Pertumbuhan dari tahun 2014 sampai dengan 2016 hanya mengalami penurunan pada tahun 2015 yaitu mencapai 4,24 persen dari tahun sebelumnya yaitu 4,27 persen. Pada Tahun 2016 mengalami kenaikan mencapai 5,17 persen.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Tabel 2.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Pangkalpinang Tahun 2014-2016

No	Keterangan	REALISASI			TARGET RPJMD	
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Pertumbuhan PDRB	4,27	4,24	5,17	6,7	7
2	PDRB per kapita (Rp juta)	48.750	52.164	55.567	59.447	63.547
4	PDRB ADHK (Rp juta)	7.247,50	7.554,90	7.945,80	8.307,447	8.698,459
5	PDRB ADHB (Rp juta)	9.359,70	10.234,70	11.131,60	12.150,49	1.3250,79

Sumber : BPS Kota Pangkalpinang

b. Perkembangan Inflasi

Selain indikator PDRB, indikator lain yang turut berperan dalam perekonomian secara makro adalah inflasi. Inflasi pada tabel dibawah terlihat bahwa selalu mengalami fluktuasi dan pada tahun 2016 merupakan angka inflasi yang tertinggi mencapai 7,88 persen.

Tabel 2.3 Laju Inflasi Kota Pangkalpinang Tahun 2014-2016

No	Keterangan	REALISASI				TARGET RPJMD
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Laju inflasi	6,81%	4,66%	7,78%	2.66%	5,50%

Sumber : BPS Kota Pangkalpinang

c. Kemiskinan

Jumlah persentase penduduk miskin di Kota Pangkalpinang mengalami perkembangan secara fluktuatif dilihat dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, dimana pada tahun 2012 jumlah penduduk miskin 8.027 orang (4,29%) menurun di tahun 2013 sebesar 0,14 poin di angka 4,15% atau sebanyak 7.840 orang, menurun di tahun 2014 sebesar 0,11 poin di angka 4,04% atau sebanyak 7.800 orang. Di tahun 2015 jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan sebesar 0,93 poin di angka 4,97% atau sebanyak 10.000 orang dan tahun 2016 kembali meningkat sebesar 0,05 poin atau sebanyak 10.120 orang. Ini berarti jumlah penduduk miskin meningkat mulai dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, hal ini dikarenakan jumlah penduduk produktif lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk kurang produktif. Selain itu faktor pendukung lainnya adalah dari sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) masih

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

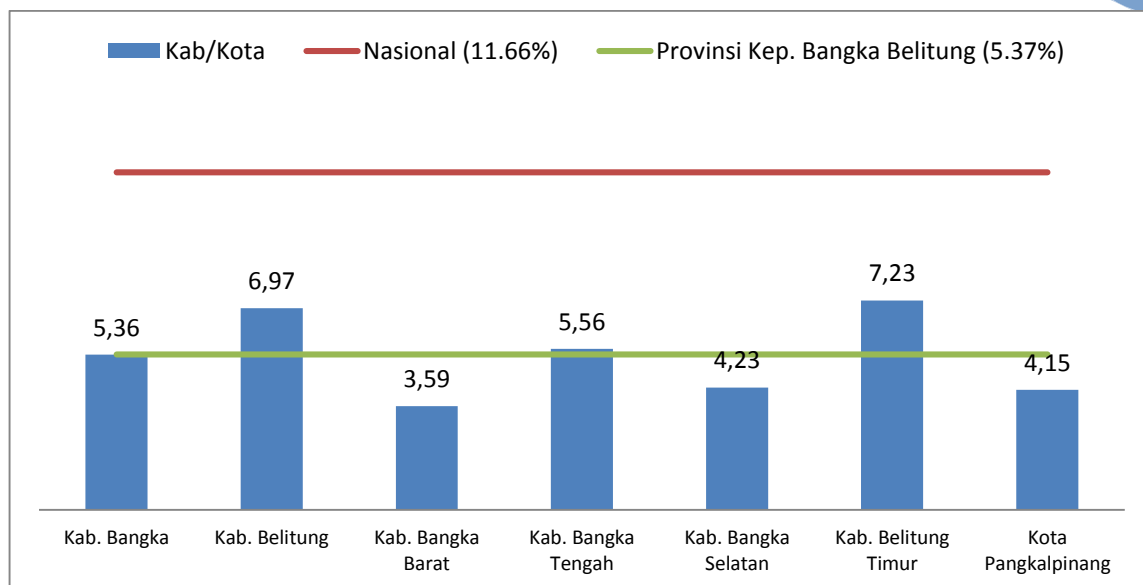
kesulitan mendapatkan biaya modal awal dan pelatihan lanjutan bagi para pelakunya. Sehingga perlu program yang strategis dalam penanganannya.

Dengan tingkat kemiskinan sebesar 4,04% pada tahun 2014 dan 5,37% di tahun 2015, jumlah penduduk miskin di Kota Pangkalpinang mencapai angka 10.000 jiwa dari total penduduk sebanyak 196.202 jiwa. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2015 sejumlah 74.100 jiwa. Dengan demikian, kemiskinan di Kota Pangkalpinang memberikan kontribusi sebesar 13,50% terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2015.

Pada Tahun 2012 Jumlah Penduduk miskin di Kota Pangkalpinang sebanyak 8.027 jiwa dari total jumlah penduduk sebanyak 185.830 jiwa. Selama kurun waktu 2012-2014 jumlah penduduk miskin di Kota Pangkalpinang memiliki tren yang menurun, akan tetapi terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin ditahun 2015 menjadi 10.000 jiwa.

Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan gambaran selisih (dalam persen terhadap garis kemiskinan) rata-rata pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Jumlah seluruh populasi digunakan untuk menghitung rata-rata dengan menganggap selisih sama dengan 0 (nol) bagi penduduk yang berada di atas garis kemiskinan. Indeks ini menggambarkan kedalaman kemiskinan (the depth of proverty). Perkembangan angka P1 dari waktu ke waktu yang semakin kecil menunjukkan terjadinya perbaikan. Indeks kedalaman kemiskinan di Kota Pangkalpinang pada tahun 2013 sebesar 0,62%, kemudian terus mengalami penurunan dari tahun 2014 sebesar 0,42% hingga tahun 2015 mencapai angka 0,47 % dan pada tahun 2016 sebesar 0,70 %. Nilai Indeks ini kurang baik karena di diatas nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 0,67%. Ini menunjukan bahwa penduduk miskin di Kota Pangkalpinang semakin mendekati garis kemiskinan (semakin membaik)

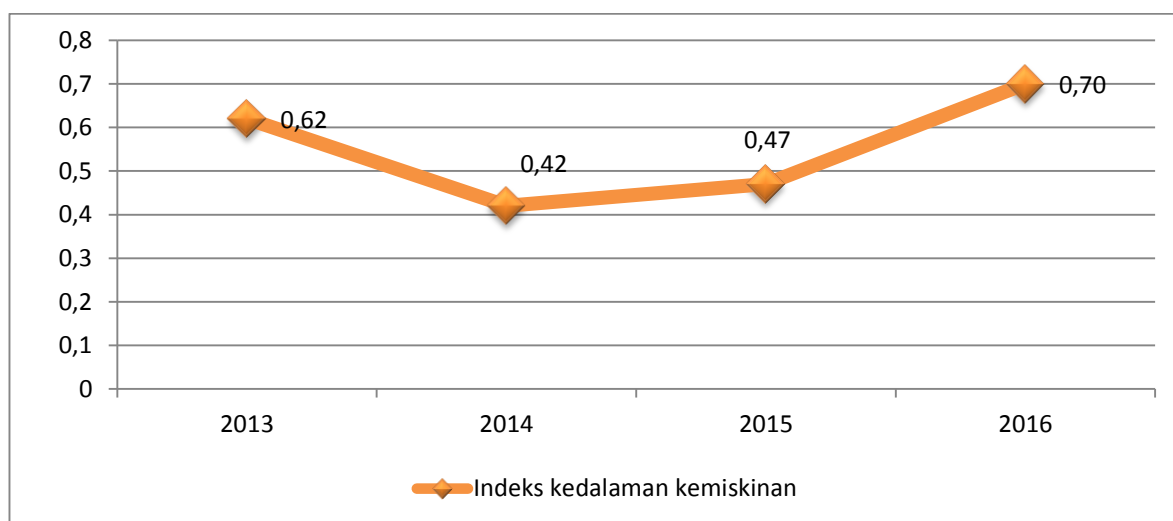
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH



Gambar 2.2 Grafik Posisi Relative Indeks Kedalaman Kemiskinan (Indeks) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015

Sumber : Publikasi BPS

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kota Pangkalpinang mengalami perkembangan yang fluktuatif. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) turun 0.15 % pada tahun 2014 dan pada tahun 2015 naik 0,05 menjadi 0,47%, kemudian di tahun 2016 mengalami kenaikan hingga mencapai angka dan 0,70%. Untuk lebih jelas bisa dilihat pada gambar di bawah ini;



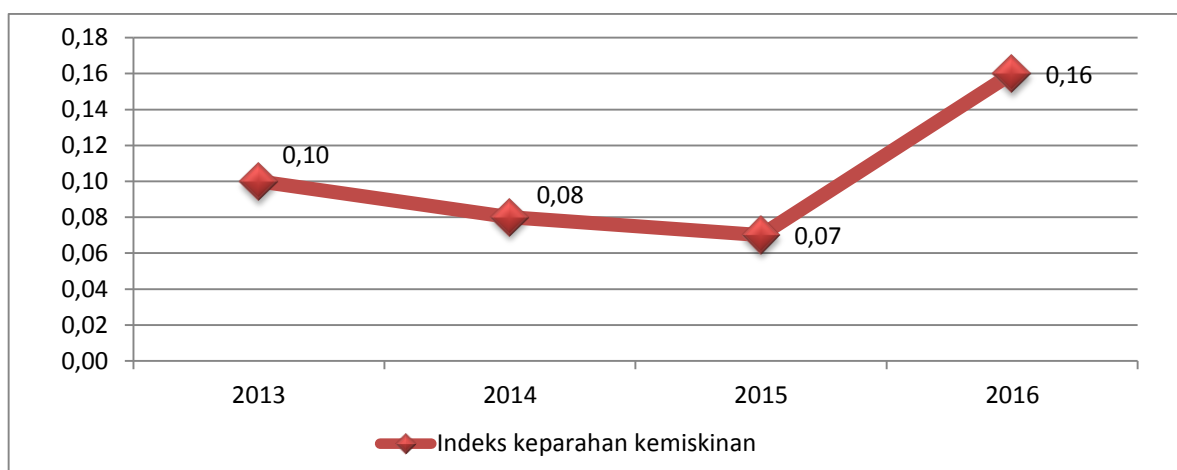
Gambar 2.3 Grafik Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kota Pangkalpinang Tahun 2013-2016

Sumber : Publikasi BPS

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan ukuran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin besar ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kota Pangkalpinang mengalami penurunan, akan tetapi pada tahun 2016 mengalami kenaikan. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada tahun 2013 sebesar 0,10%, pada tahun 2014 sebesar 0,08%, kemudian ditahun 2015 mengalami penurunan ke angka 0,07% dan mengalami kenaikan hingga ke angka 0,16% pada tahun 2016. Ini menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin di Kota Pangkalpinang tidak terlalu jauh. Untuk lebih jelas perkembangan indeks keparahan kemiskinan (P2) di Kota Pangkalpinang bisa dilihat di gambar di bawah ini.



Gambar 2.4 Grafik Indeks keparahan kemiskinan (P2) Kota pangkalpinang
Tahun 2013-2016

Sumber : Publikasi BPS

d. Angka Kriminalitas yang tertangani.

Angka kriminalitas Kota Pangkalpinang secara keseluruhan dari tahun 2013 – 2016 jumlahnya mengalami penurunan sehingga angka kasus yang tertangani juga secara signifikan mengalami penurunan juga. Kasus tertinggi yang dilaporkan pada tahun 2016 adalah pencurian dengan pemberatan yaitu 37 kasus dan telah ditangani sebanyak 8 kasus.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Tabel 2.4 Angka Kriminalitas Kota Pangkalpinang Tahun 2013- 2016

No	Jenis kasus	2013		2014		2015		2016	
		jumlah	tertangani	jumlah	tertangani	jumlah	tertangani	jumlah	tertangani
1	Pembunuhan	4	3	1	0	0	0	1	1
2	Penganiayaan Berat	63	44	87	59	20	14	4	3
3	Penculikan	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Pencurian dengan Kekerasan	15	5	16	4	7	2	5	0
5	Pencurian dengan Pemberatan	112	35	140	39	117	32	37	8
6	Pencurian Ranmor	29	15	52	21	39	14	12	2
7	Pencurian Kawat Telepon	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Pemeriksaan	1	1	1	1	3	3	1	0
9	Pembakaran	4	3	7	7	4	3	0	0
10	Senpi/Handak	1	1	0	0	1	1	0	0
11	Pemeriksaan	1	0	1	1	4	2	2	1
12	Penyelundupan	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kejahatan Terhadap Kepala Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	230	107	305	132	195	71	62	15

Sumber : Kapolres Kota Pangkalpinang Tahun 2017

Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah. Pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga kuantitas dan kualitas kriminalitas dapat diminimalisir.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Angka kriminalitas yang tertangani adalah penanganan kriminal oleh aparat penegak hukum. Di kota Pangkalpinang angka kriminalitas yang terjadi berdasarkan data dari Polres kota pangkalpinang, pada tahun 2016 sebanyak 62 kasus dan yang paling tinggi pada tahun 2014 yakni 305 kasus.

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap beberapa aspek diantaranya aspek pendidikan masyarakat, aspek kesehatan masyarakat, dan aspek kemampuan daya beli masyarakat.

A. Pendidikan

Tabel 2.5 Fokus Kesejahteraan Sosial Bidang Pendidikan Kota Pangkalpinang Tahun 2013- 2016

No	Keterangan	REALISASI			TARGET RPJMD	
		2014	2015	2016	2017	2018
	Fokus Kesejahteraan Sosial					
1.2.1	Pendidikan					
1.2.1.1	Angka melek huruf	97,6	97,63	97,63	100,00%	100,00%
1.2.1.2	Angka rata-rata lama sekolah	9,52	9,67	9,9	12	12
1.2.1.3	APK SD	122,78	121,55	124,92%	100,00%	100,00%
1.2.1.4	APK SLTP	107,45	107,45	113,71	100,00%	100,00%
1.2.1.5	APK SLTA	97,59%	105,39%	108,23%	100,00%	100,00%
1.2.1.6	Angka Pendidikan yang ditamatkan:					
1.2.1.6.1	SD/MI		99,58%	100%	100,00%	100,00%
1.2.1.6.2	SMP/MTs		100%	100%	100,00%	100,00%
1.2.1.6.3	SMA/SMK/MA		99,89%	100%	100,00%	100,00%
1.2.1.7	APM SD	101,37	101,00	103,14	98,90%	98,99%
1.2.1.8	APM SLTP	75,78	66,90	75,94	76,00%	77,00%
1.2.1.9	APM SLTA	55,24	62,99	63,42	75,00%	76,00%

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang

1) Angka Melek Huruf (AMH)

Untuk melihat keberhasilan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial disuatu daerah dapat dilihat dari pembangunan pendidikan dengan indikator jumlah penduduk yang melek huruf atau Angka Melek Huruf (AMH).

Angka melek huruf di Kota Pangkalpinang sudah cukup tinggi dan berada diatas rata-rata nasional yang mentargetkan Angka melek huruf pada tahun 2014 sebesar 2 %, sedangkan rata-rata persentase Angka melek huruf untuk Kota Pangkalpinang dalam 5tahun terakhir meningkat 0,01 % pada tahun 2015Angka melek huruf tersebut meningkat dari tahun sebelumnya, hal diduga sebagai dampak dari membaiknya perekonomian yang ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kota Pangkalpinang serta komitmen yang kuat pemerintah daerah melalui program kegiatan pengentasan buta huruf terbukti pada tahun 2016 angka AMH mengalami kenaikan mencapai 99,41 persen.

2) Angka Rata-rata Lama Sekolah (*Man Years of School/MYS*)

Angka rata-rata lama sekolah merupakan indikator pembangunan pendidikan untuk melihat seberapa lama waktu yang ditempuh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menyelesaikan pendidikan di semua jenjang pendidikan formal. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani. Capaian pada tahun 2016 dicatat bahwa angka rata-rata lama sekolah mencapai 9,9 tahun.

3) Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Hal ini dikarenakan, APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada setiap jenjang pendidikan. APK dihitung dengan membagi jumlah penduduk yang sedang bersekolah atau jumlah siswa tanpa memperhitungkan umur pada setiap jenjang pendidikan dengan jumlah penduduk kelompok usia yang di jenjang pendidikan yang sama.

Nilai ideal APK adalah 100 persen. Apabila nilai APK telah mencapai 100 persen maka tingkat partisipasi penduduk pada suatu jenjang pendidikan dinyatakan tuntas.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Namun, adakalanya nilai APK lebih dari 100 persen. Hal ini bisa saja terjadi karena adanya pengaruh dari pembilang rumus APK itu sendiri.

Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SD/MI/SDLB/Paket A dalam beberapa tahun ini selalu diatas 100%, tingginya APK ini disebabkan banyaknya penduduk dari daerah sekitar Pangkalpinang atau daerah lain yang bersekolah di Pangkalpinang atau menunjukkan terdapat anak-anak yang bersekolah di SD tersebut usia lebih tua/muda dibanding usia standar SD (didas 12 Tahun).

Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/MTs/SMPLB/Paket B dalam beberapa tahun ini selalu diatas 100%, tingginya APK ini disebabkan banyaknya penduduk dari daerah sekitar Pangkalpinang atau daerah lain yang bersekolah di Pangkalpinang, ini dapat dilihat pada tabel diatas dimana Jumlah penduduk kelompok **usia 13-15 tahun** lebih sedikit dari Jumlah siswa/warga belajar di SMP/MTs/SMPLB/Paket B. Jika dilihat dari APK, maka dapat disimpulkan bahwa penduduk **Usia 13-15 tahun** yang ada di Kota Pangkalpinang sudah bersekolah semuanya, hal inilah yang mendasari tuntasnya **Wajar 9 tahun** di Kota Pangkalpinang.

Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMA/MAN/SMK/Paket C Mengalami kenaikan pada tahun 2016 yaitu diatas 100%. Jika dilihat dari APK, maka dapat disimpulkan bahwa penduduk Usia 16-18 tahun yang ada di Kota Pangkalpinang sudah bersekolah semuanya, hal inilah yang mendasari tuntasnya Wajar 12 tahun dan dicanangkanya Wajar 15 tahun di Kota Pangkalpinang.

4) Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah variabel yang mengindikasikan seberapa besar suatu jenjang pendidikan menyerap penduduk per kelompok usia sekolah yang sesuai. Besaran APM yang semakin meningkat mengindikasikan hampir tercapainya target pendidikan di Kota Pangkalpinang. Nilai APM akan berkisar dari 0 sampai dengan 100. Nilai APM tidak lebih dari 100 dikarenakan komponen perhitungan APM yaitu jumlah siswa (pembilang) merupakan bagian dari jumlah penduduk usia tertentu (penyebut).

Secara total nilai APM Kota Pangkalpinang dari SD sampai SMA ada yang mengalami penurunan dan kenaikan. Nilai APM SD Tahun 2016 sebesar 103,14 persen artinya bahwa dari 100 penduduk usia 7 sampai dengan 12 tahun, sebesar 103 orang bersekolah dibangku SD. Demikian juga dengan APM SMP sebesar 75,95 persen dapat

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

dimaknai bahwa dari 100 penduduk usia 13 samapi 15 tahun, sejumlah 75 orang duduk dibangku SMP. APM SMU sebesar 63,42 persen untuk usia 16 sampai 18 tahun, sebanyak kurang lebih 63 orang diantaranya duduk dibangku SMU.

B. Kesehatan

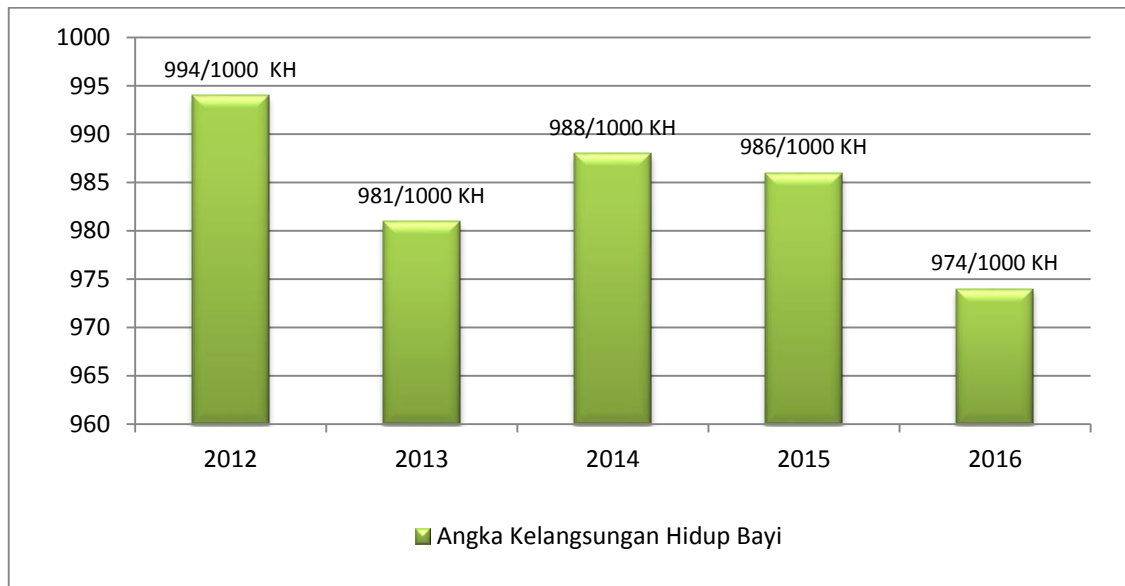
Tabel 2.6 Fokus Kesejahteraan Sosial Bidang Kesehatan Kota Pangkalpinang
Tahun 2013- 2016

No	Keterangan	REALISASI			TARGET RPJMD	
		2014	2015	2016	2017	2018
	Fokus Kesejahteraan Sosial					
1.2.2	Kesehatan					
1.2.2.1	AKB/1000 KH	12	14	26	7	7
	Angka kematian balita	3,16	7	6	7	7
	Kematian ibu	49	97	122	110	100
	Penderita Penyakit malaria	0,31%	5,90%	1,34%	0,32%	0,30%
	Prevelensi HIV	0,07%	0,05%	0,03%	0,02%	0,02%
	Penderita DBD	11/100000	77/100000	51/100000	47/100000	46/100000
1.2.2.2	Angka Usia Harapan Hidup	72,31	72,51	72,57	72,79	73
1.2.2.3	Persentase Balita Gizi Buruk	0,18	0,09	0,10	< 1.5	<1

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang.

1) Angka Kematian Bayi dan Angka Kelangsungan Hidup bayi

Angka kematian bayi di Kota Pangkalpinang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir cenderung mengalami kenaikan. Angka kematian bayi di Kota Pangkalpinang tahun 2016 sebesar 26 per 1.000 kelahiran hidup. Hubungan dengan angka kelangsungan hidup bayi adalah tiap 1000 kelahiran yang hidup 974 jiwa maka Angka kematian adalah 26 angka kematian bayi. Angka kematian bayi dan angka kelangsungan Hidup bayi di Kota Pangkalpinang selama tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel halaman berikut ini:



Gambar2.5 Grafik Angka Kelangsungan Hidup Bayi Di Kota Pangkalpinang Tahun 2012–2016

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang Tahun 2017

Dari data di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2012 s/d 2016 angka kelangsungan hidup bayi terus menurun hal ini juga berarti bahwa tiap tahunnya Angka Kematian Bayi di Kota Pangkalpinang meningkat. Walaupun Pada tahun 2016 dari setiap 1000 Kelahiran Hidup (KH) terdapat 26 kasus kematian bayi capaian tersebut diatas target MDG's untuk angka kematian bayi dan balita yakni 23 per 1000 kelahiran hidup. Untuk itu diharapkan agar terus melakukan peningkatan pelayanan terutama emergensi saat persalinan dan bayi baru lahir serta meningkatkan sistem rujukan bisa membantu pemerintah mengurangi angka kematian ibu dan bayi.

2) Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan salah satu indikator yang cukup signifikan dalam aspek kesehatan masyarakat. AHH merupakan besaran yang mencerminkan usia rata-rata hidup yang dapat dicapai penduduk dalam suatu wilayah. Semakin tinggi AHH maka semakin baik pula tingkat kesehatan masyarakat, dengan asumsi bahwa angka kematian penduduk sebagian besar disebabkan oleh masalah kesehatan. Hal ini dikarenakan, kesehatan berperan sangat besar dalam mempengaruhi lamanya kelangsungan hidup seseorang.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Angka harapan hidup (AHH) masyarakat Kota Pangkalpinang Tahun 2016 adalah sebesar 72,57. Ini berarti bahwa seseorang yang lahir pada tahun 2016 diperkirakan akan menempuh hidup rata-rata sepanjang 73 Tahun. AHH Kota Pangkalpinang dari Tahun 2010 sampai dengan 2016 peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya peningkatan tingkat kesejahteraan dibidang kesehatan di Kota Pangkalpinang.

3) Data Gizi Buruk

Status gizi anak balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan. Apabila berat badan menurut umur sesuai dengan standar, anak gizi baik. Kalau sedikit dibawah standar disebut anak gizi kurang. Apabila jauh dibawah standar dikatakan gizi buruk. Penghitungan berat badan menurut panjang badan lebih memberikan arti klinis.

Berdasarkan data yang ada di Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang Tahun 2017, ditemukan 21 bayi yang tergolong gizi buruk di Kota Pangkalpinang. Berikut disajikan tabel persentase kasus gizi buruk di Kota Pangkalpinang dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.

Tabel II.7 Persentase Balita Gizi Buruk

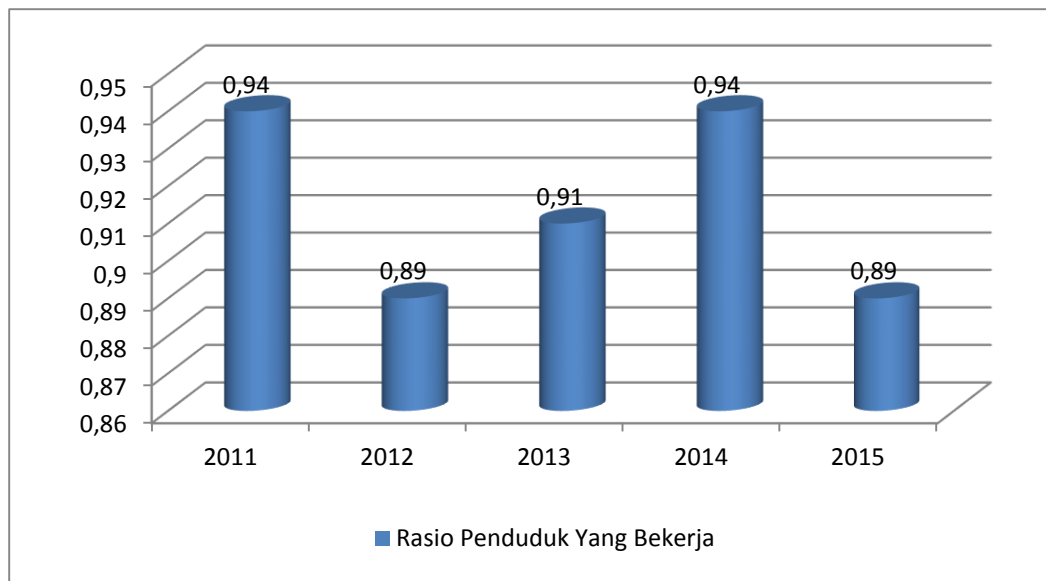
NO.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah balita gizi buruk	30	21	3	10	21
2	Jumlah Balita	19.314	19.146	16,745	21,378	20,027
3	% Balita Gizi Buruk	0,1	0,11	0,18	0,09	0,10

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang Tahun 2017

Dari data di atas dapat diketahui bahwa terdapat kasus balita gizi buruk dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Hal ini disebabkan adanya perubahan indikator penilaian kesehatan terhadap balita gizi buruk yakni berdasarkan berat badan/umur tanpa gejala klinis. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka menurunkan kejadian kasus gizi buruk diantaranya melakukan surveilans gizi/ deteksi dini tumbuh kembang balita agar apabila ditemukan balita gizi kurang dapat segera ditangani agar tidak menjadi gizi buruk. Untuk itu diperlukan peran serta masyarakat secara aktif bukan hanya dari petugas kesehatan saja terutama para kader posyandu.

4) Rasio Penduduk yang bekerja

Pada tahun 2015, jumlah penduduk angkatan kerja Kota Pangkalpinang berjumlah 88.302 orang. rasio penduduk bekerja adalah sebesar 0,89 yang artinya sebagian dari jumlah angkatan kerja tersebut telah bekerja sebanyak 78.588 orang atau 90 persen. Berikut data rasio penduduk yang bekerja Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2015.



Gambar 2.6 Grafik Rasio Penduduk Yang Bekerja Kota Pangkalpinang

Tahun 2011-2016

Sumber : Data diolah, BPS, Pangkalpinang Dalam Angka 2016.

Pada tabel diatas menunjukkan jumlah angkatan kerja di Kota Pangkalpinang dari tahun 2011 sampai dengan 2015 yang telah bekerja rata-rata mencapai 90 persen dan sisanya masih menganggur.

C.Seni Budaya dan Olahraga.

Analisis kinerja pada fokus seni budaya dan olah raga dilakukan terhadap beberapa aspek diantaranya indikator jumlah grup kesenian, jumlah klub olah raga dan jumlah gedung kesenian. Berikut ini analisa dari beberapa indikator kinerja pada fokus seni budaya dan olah raga yaitu :

Tabel 2.8 Perkembangan seni, budaya dan olahraga tahun 2013-2016

No	CAPAIAN PEMBANGUNAN	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk	62	63	63	51
2	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk	1	1	1	1
3	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk	10	10	10	10
4	Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk	1	1	1	1

Sumber :Dinas Pariwisata Tahun 2017.

Tabel 2.9Perkembangan seni, budaya dan olah raga menurut kecamatan Kota Pangkalpinang Tahun 2016

No	KECAMATAN	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk	Jumlah gedung olah raga per 10.000 penduduk
1	Rangkui	12	-	8	5
2	Bukit Intan	9	-	7	4
3	Girimaya	2	-	8	2
4	Pangkal Balam	7	-	2	3
5	Gabek	9	-	6	6
6	Taman Sari	4	1	11	3
7	Gerunggang	22	-	8	4
8	jumlah	65	1	7	28

Sumber : Dinas Pariwisata. Tahun 2017

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Analisa atas aspek pelayanan umum dilaksanakan dengan menganalisa 26 urusan wajib dan 6 urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pangkalpinang. Berikut ini analisa kedua urusan tersebut:

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

Analisa kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan yang dibagi menjadi beberapa urusan, diantaranya:

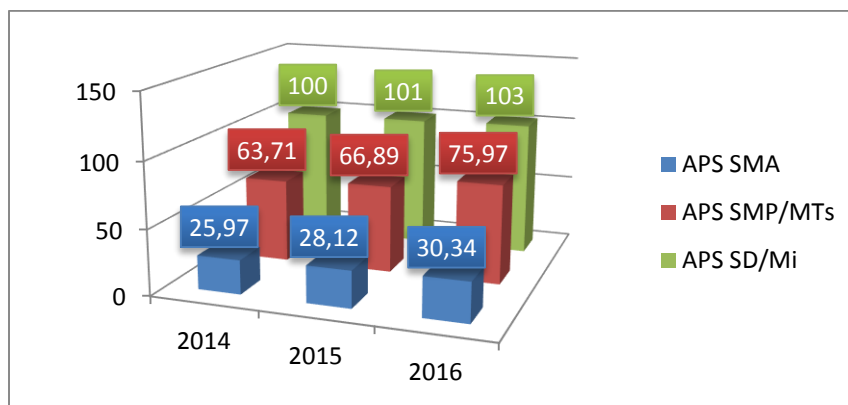
A. Pendidikan

Kinerja pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan dapat diukur dari perkembangan indikator-indikator capaian yang digunakan untuk penilaian. Adapun indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja urusan pendidikan adalah sebagai berikut:

1) Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi sekolah (APS) merupakan variabel yang digunakan untuk mengukur berapa banyak penduduk di usia sekolah yang masih bersekolah. Atau dengan kata lain, APS merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Umumnya APS berada pada rentang di bawah atau sama dengan 100 persen. Namun pada daerah tertentu, bisa jadi APS mencapai di atas 100 persen. Hal ini misalnya terjadi pada daerah perkotaan, yang menjadi magnet pertumbuhan ekonomi bagi daerah sekitarnya, dan menjadi daya tarik utama di bidang pendidikan. Banyaknya penduduk dari desa atau kabupaten yang bersekolah di kota menjadikan angka APS melonjak melebihi 100 persen. Hal ini dikarenakan penduduk dari luar kota tersebut tidak terdata sebagai penduduk kota, melainkan terdata sebagai penduduk tempat asalnya. Kondisi ini biasa terjadi, mengingat komponen perhitungan APS adalah jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan tertentu dibandingkan dengan jumlah total penduduk wilayah yang bersangkutan.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH



Gambar 2.7 Grafik Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Tahun 2014– 2016

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang Tahun 2017

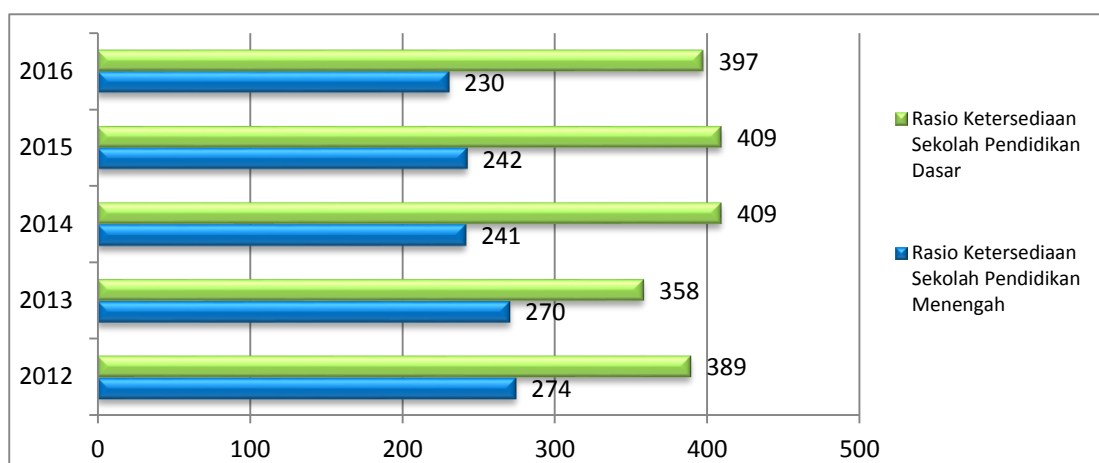
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Dasar usia 7-12 tahun telah mencapai angka rata-rata diatas 100 % dalam 5 tahun terakhir, ini artinya jika dibandingkan penduduk usia 7-12 tahun di Kota Pangkalpinang dengan siswa usia 7-12 tahun yang bersekolah di Kota Pangkalpinang, terlihat bahwa lebih banyak siswa dibanding dengan jumlah penduduk pada jenjang usia 7-12 tahun, hal ini dipengaruhi oleh banyaknya siswa diluar kota Pangkalpinang yang bersekolah di Kota Pangkalpinang. Begitu juga APS usia 13-15 tahun secara keseluruhan cukup tinggi dalam beberapa tahun terakhir ini meskipun nilainya berfluktuasi dan terlihat rendah pada tahun 2013, namun secara keseluruhan kondisi APS pada jenjang usia 13-15 tahun ini masih cukup baik.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah usia 16-18 tahun berada di angka 25,97 % di tahun 2016, ini artinya jika dibandingkan penduduk usia 16-18 tahun di Kota Pangkalpinang dengan siswa usia 16-18 tahun yang bersekolah di Kota Pangkalpinang, terlihat bahwa lebih banyak penduduk dibanding dengan jumlah siswa pada jenjang usia 16-18 tahun, hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh adanya siswa pada usia 17 tahun keatas yang telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang SMA/MA/SMK, dalam hal ini pendataan yang dilakukan tidak menjangkau usia pada perguruan tinggi, jadi tidak dapat diketahui secara pasti berapa usia siswa yang mampu menyelesaikan pendidikan pada usia kurang dari 18 tahun.

2) Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah adalah untuk mengukur seberapa besar kemampuan sekolah yang tersedia pada jenjang pendidikan tertentu untuk menampung penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan dimaksud.

Semakin besar rasio menunjukkan semakin berkurangnya ketersediaan sekolah karena harus menampung begitu banyaknya penduduk usia sekolah. Satu sekolah dengan murid yang begitu banyak tentunya tidak efektif dan efisien dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Rasio yang semakin kecil menunjukkan ketersediaan sekolah sudah hampir cukup karena dapat dalam menampung jumlah penduduk usia sekolah yang ada dengan jumlah tamping yang memadai.



Gambar 2.8 Grafik Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah di Kota Pangkalpinang Tahun 2012-2016

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang Tahun 2017

Dengan jumlah Sekolah pada jenjang SD/MI + SMP/MTs sebanyak 133 sekolah, maka jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pada jenjang usia sekolah diperoleh angka rata-rata sebanyak 453 siswa dapat dilayani pada setiap sekolah. Jika dikaitkan dengan jumlah ketersediaan lokal (ruang kelas), pada jenjang SD/MI terdapat 715 ruang kelas dengan jumlah sekolah 88 sekolah yang berarti setiap ruang kelas mampu menampung siswa sebanyak rata-rata 27 siswa, sementara SMP/MTs terdapat 308 ruang kelas dan 27 sekolah maka setiap kelas rata-rata mampu menampung sebanyak 32 siswa.

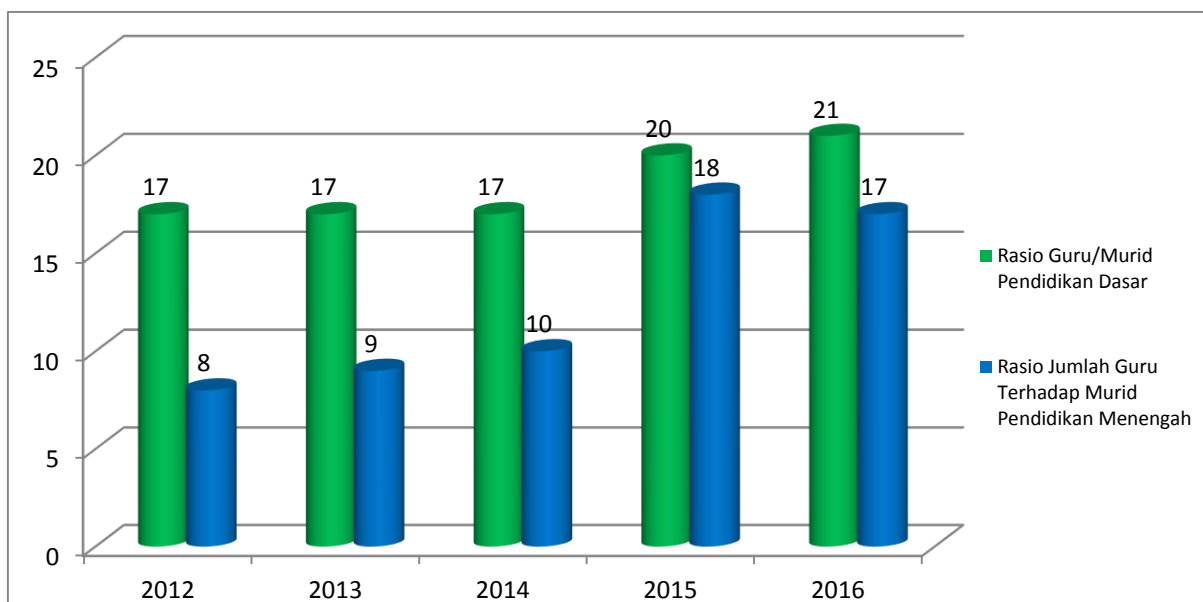
Pada jenjang SMA/MA/SMK dengan jumlah sekolah sebanyak 22 sekolah dapat menampung sebanyak rata-rata 210 siswa per sekolah, dengan jumlah lokal (ruang

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

kelas) sebanyak 328 buah pada jenjang ini, maka jumlah siswa yang dapat ditampung perkelasnya rata-rata 32 siswa, angka ini masih cukup ideal jika dikaitkan dengan standar pelayanan minimal jumlah siswa perkelas sebanyak 36 siswa seperti yang di persyaratkan.

3) Rasio Guru per Murid

Rasio jumlah guru terhadap murid adalah perbandingan antara jumlah guru terhadap murid pada jenjang pendidikan tertentu. Semakin tinggi rasio mengindikasikan semakin banyaknya jumlah murid yang harus dilayani oleh satu orang guru. Semakin tinggi rasio juga dapat diinterpretasikan kurangnya ketersediaan guru di jenjang pendidikan tersebut. Berikut ini disajikan data mengenai rasio jumlah guru dan murid di Kota pangkalpinang pada tahun 2012-2016 :



Gambar 2.9 Grafik Rasio Jumlah Guru dan Murid Kota Pangkalpinang Tahun 2012-2016

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang Tahun 2017

Berdasarkan rasio ketersediaan Guru terhadap Murid, maka rasio ketersediaan Guru terhadap murid di Kota Pangkalpinang sudah memenuhi rasio meskipun rasionya sangat tinggi yaitu mencapai rata-rata 17 siswa dilayani oleh seorang guru, dengan rasio ini mengindikasikan bahwa di Kota Pangkalpinang saat ini tidak kekurangan guru. Sementara jika dilihat rasio guru terhadap murid pada masing-masing jenjang

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

pendidikan, untuk SD/MI rasio rata-rata 48, SMP/MTs rasio rata-rata 58 siswa dilayani oleh seorang guru.

Sementara di pendidikan menengah jumlah guru hingga tahun 2015 603 dan jumlah murid sebanyak 9.032 dengan demikian Rasio ketersediaan Guru terhadap Murid pada jenjang ini berkisar di angka 67, artinya pada jenjang ini seorang guru dapat melayani sebanyak lebih kurang 67 murid, dengan rasio ini mengindikasikan bahwa di Kota Pangkalpinang saat ini tidak kekurangan guru pada jenjang pendidikan SMA/MA/SMK.

4) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pada tahun 2011, jumlah anak yang berusia 4 – 6 tahun adalah 10.223 anak dan jumlah yang mengikuti pendidikan PAUD adalah 3.533 anak yang artinya jumlah serapan PAUD terhadap anak yang berusia antara 4 – 6 tahun sebesar 34,56 persen.

Pada Pendidikan PAUD prosentase anak usia 4-6 tahun yang terserap baru mencapai angka rata-rata 43,8 % dalam 5 tahun terakhir, dimana pada tahun 2014 persentase anak yang mengikuti PAUD lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu 39,15 %, hal ini mengindikasikan masih banyak anak usia 4-6 tahun yang tidak mengikuti PAUD, angka ini dapat mempengaruhi keterserapan siswa dalam mengikuti pendidikan pada jenjang selanjutnya apabila ketentuan untuk mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya harus melalui PAUD terlebih dahulu.

5) Angka Putus Sekolah (APS) Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Pangkalpinang

Tabel 2.10Angka Putus Sekolah Kota Pangkalpinang Tahun 2014-2016

No	Keterangan	REALISASI			TARGET RPJMD	
		2014	2015	2016	2017	2018
1	SD/MI	0,09%	0,18%	0,07%	0,09%	0,00%
2	SMP/MTs	0,63%	0,53%	0,60%	0,33%	0,00%
3	SMA/SMK/MA	1,32%	0,38%	0,47%	0,43%	0,00%

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang Tahun 2017

Angka Putus Sekolah (APS) pada jenjang SD/MI di Kota Pangkalpinang secara keseluruhan dalam 5 tahun terakhir cukup rendah dan berada diatas target Kemendikbud

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

yang mentargetkan Angka Putus Sekolah (APS) jenjang ini pada tahun 2018 sebesar 0%.

Angka Putus Sekolah (APS) pada jenjang SMP/MTs di Kota Pangkalpinang pada tahun 2016 Angka Putus Sekolah 0,60 persen mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya sebesar 0,53 persen. Begitu pula pada Jenjang SMK/SMA/MA Angka Putus Sekolah (APS) di Kota Pangkalpinang juga mengalami kenaikan. Tahun 2016 APS SMA/SMK/MA berada pada angka 0,47 persen.

Rendahnya angka putus sekolah SMK berhubungan dengan tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya menuntaskan pendidikan dasar sebagai bekal untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

6) Angka Kelulusan

Tabel 2.11 Angka Putus Sekolah Kota Pangkalpinang Tahun 2014-2016

No	Keterangan	REALISASI			TARGET RPJMD	
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	SD/MI	99,21%	99,44%	95,59%	100,00%	100,00%
2.	SMP/MTs	89,16%	100%	98,26%	98,50%	99,00%
3.	SMA/SMK/MA	106,15	99,89%	100,00%	99,08%	99,09%

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang Tahun 2017

Angka Kelulusan (AL) pada jenjang SD/MI berdasarkan data diatas menunjukkan tingkat kelulusan siswa pada jenjang pendidikan tersebut dalam beberapa tahun terakhir sangat tinggi dimana angka rata-rata diatas 99 %, tahun 2015 angka kelulusan pada jenjang ini mencapai 99, 44 % jika dilihat dari jumlah siswa yang lulus pada tahun 2015 hanya 10 siswa yang tidak lulus dari 3.293 siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun sebelumnya.

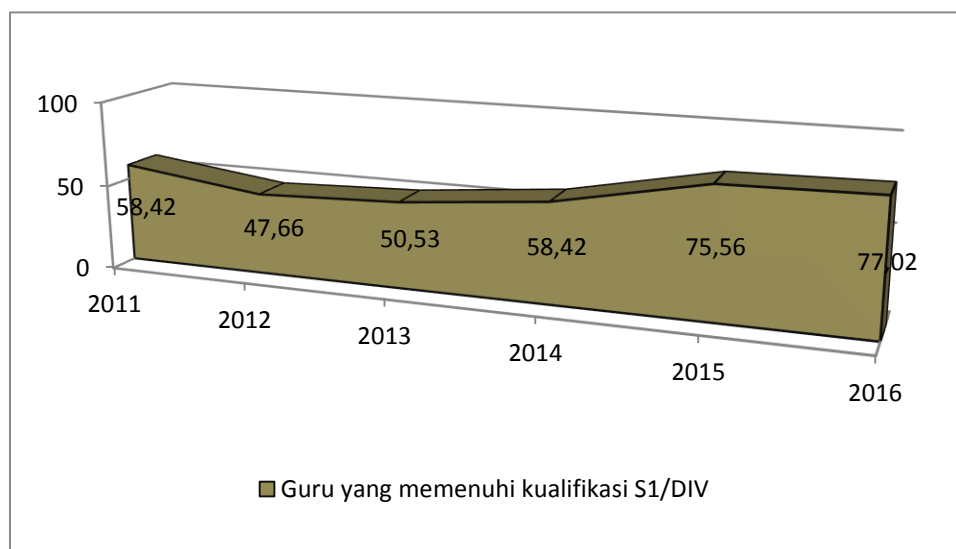
Pada jenjang pendidikan SMP/MTs, Angka Lulusan dalam dua tahun terakhir terjadi peningkatan yang cukup berarti, ada kenaikan persentase kelulusan sebesar lebih dari 5 % dari tahun sebelumnya, hal ini menandakan usaha yang dilakukan untuk mendongrak Angka Kelulusan pada tingkat ini sangat berhasil dimana Angka Kelulusan tahun 2015 mencapai 100 % dan merupakan tertinggi dalam 5 tahun terakhir.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Angka Lulusan pada jenjang SMK/SMA/MA pada tahun 2016 mencapai 100 % dalam beberapa tahun terakhir angka lulusan pada jenjang ini merupakan yang tertinggi dibandingkan tahun 2015 sebesar 99,89 %. Meningkatnya Angka Kelulusan yang sudah berkisar diatas 90an, merupakan suatu kondisi yang sangat baik pada jenjang pendidikan.

7) Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Guru yang berijazah S1/DIV dari tahun ketahun terus terjadi peningkatan dimana sebelum tahun 2010 angka rata-rata masih dibawah 50 % guru yang berijazah S1/DIV, mulai tahun 2010 keatas angka rata-rata guru berijazah S1/DIV sudah diatas 50%. Kebanyakan guru yang berijazah S1/DIV adalah guru-guru tingkat sekolah menengah atas. Diharapkan pada tahun-tahun selanjutnya persentase ini terus meningkat hingga seluruh guru di Kota Pangkalpinang minimal berpendidikan S1/DIV sebagai syarat Standar Nasional Pendidikan.



Gambar 2.10 Grafik Jumlah Guru Dengan Ijazah dan Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2016 (Persen)

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang Tahun 2017

B. Kesehatan

Pelaksanaan urusan kesehatan merupakan bagian internal pembangunan nasional. Pembangunan urusan kesehatan dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain faktor demografi/kependudukan, keadaan dan pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

masyarakat, dan keadaan dan perkembangan fisik serta biologik. Indikator keberhasilan pelaksanaan urusan kesehatan dapat dilihat dalam penjelasan berikut ini:

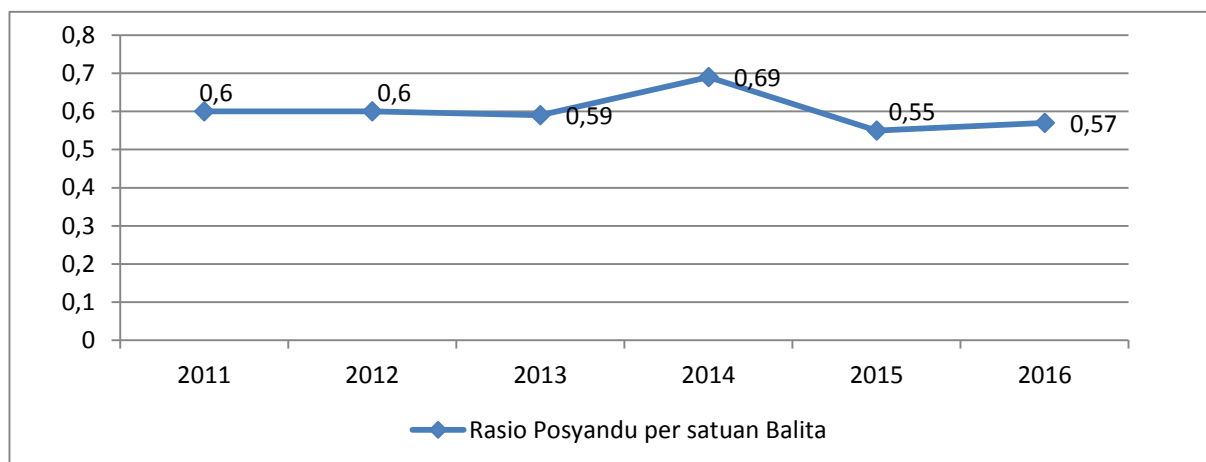
1) Rasio Posyandu per Satuan Balita

Rasio posyandu per satuan balita adalah untuk mengetahui perbandingan jumlah posyandu dan jumlah balita yang ada di Kota Pangkalpinang. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang, jumlah posyandu dan balita adalah sebagai berikut:

Tabel 2.12 Jumlah Posyandu dan Balita menurut kecamatan Tahun 2011-2016 Kota Pangkalpinang

No.	INDIKATOR	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Posyandu	111	113	114	116	117	115
2	Jumlah Balita	18,221	19.314	19.146	16.745	21.378	20.027
3	Rasio Posyandu Per Satuan Balita	0.6	0,6	0,59	0,69	0,55	0,57

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang 2017



Gambar 2.11 Rasio Posyandu per satuan Balita Tahun 2011-2016

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang Tahun 2017

Dari data di atas dapat diketahui bahwa jumlah posyandu dari tahun 2011s/d tahun 2016 mengalami Fluktuasi, ini menandakan bahwa menurunnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya posyandu serta menurunnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan posyandu terutama para kader posyandu. Berdasarkan rasio jumlah posyandu per balita pada tahun 2016 dapat diinterpretasikan sebanyak 57 posyandu yang ada melayani 10.000 atau 1 posyandu melayani \pm 155 balita di Kota Pangkalpinang. Terdapat

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

penurunan jumlah posyandu namun rasio posyandu dan balita yang ada pada tabel diatas menunjukkan masih kurangnya ketersediaan posyandu untuk melayani kebutuhan balita yang idealnya 1 posyandu melayani 100 balita.

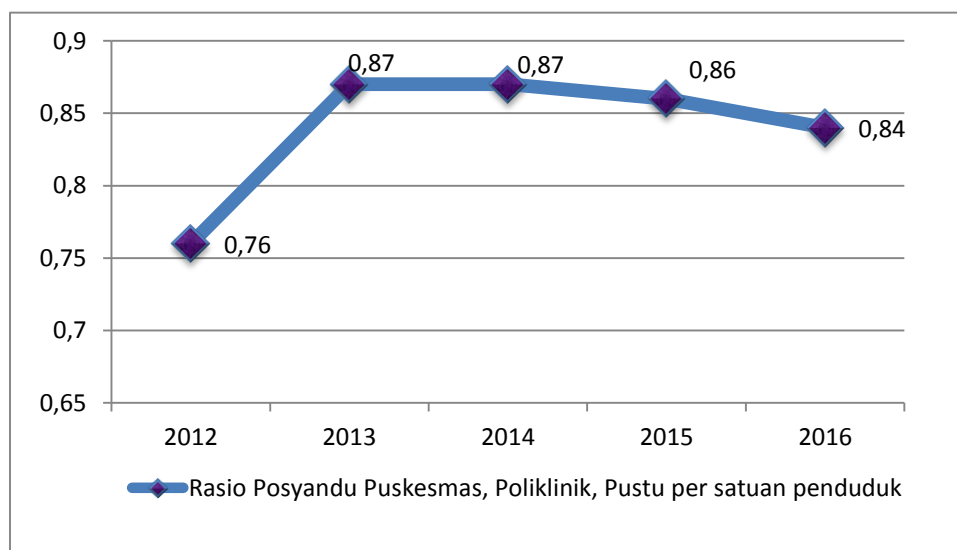
2) Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu Per Satuan JumlahPenduduk

Rasio puskesmas, poliklinik, dan pustu per jumlah penduduk dihitung untuk melihat kemampuan puskesmas, poliklinik, dan pustu dalam melayani penduduk Kota Pangkalpinang. Berikut ini rasio puskesmas, poliklinik, dan pustu per jumlah penduduk:

Tabel 2.13 Rasio Posyandu, Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Kota Pangkalpinang Tahun 2012-2016

No	INDIKATOR	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Posyandu puskesmas, poliklinik, pustu	142	168	168	168	168
2	Jumlah penduduk	185.831	191.454	191.994	196.202	200.326
3	Rasio Posyandu Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk	0.76	0.87	0.87	0.86	0.84

Sumber : Dinas kesehatan kota Pangkalpinang Tahun 2017



Gambar 2.12 GrafikJumlah Rasio Puskesmas Per Jumlah Penduduk, Rasio PustuPer JumlahPenduduk, dan Rasio Poliklinik Per Jumlah PendudukTahun 2012-2016

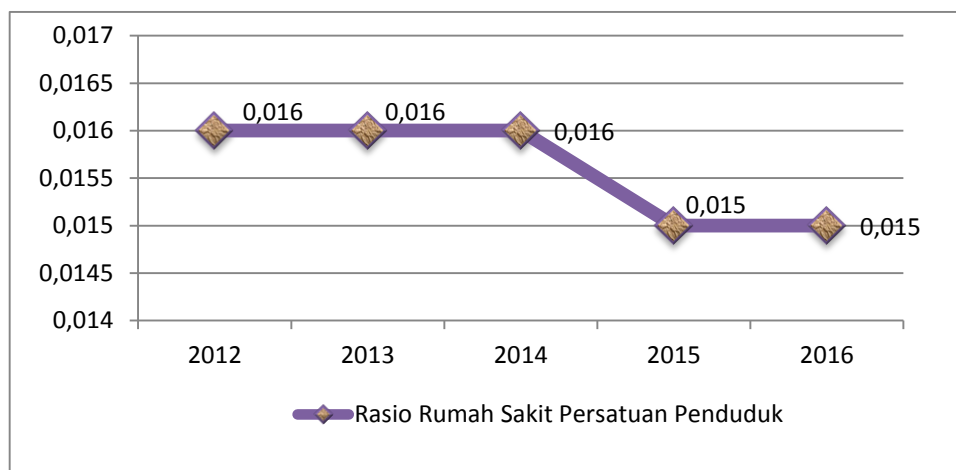
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang Tahun2017

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Dari data di atas dapat diketahui bahwa Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di kota Pangkalpinang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Bila dilihat dari rasio tempat pelayanan kesehatan per 1000 penduduk hal ini masih kurang memadai, dan juga berarti bahwa fasilitas pelayanan kesehatan masih kurang untuk itu kedepannya perlu ditambahkan lagi agar masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu merata dan terjangkau sehingga masyarakat bisa mendapatkan derajat kesehatan yang optimal.

3) Rasio Rumah Sakit Persatuan Penduduk

Jumlah rumah sakit yang dipublikasikan adalah jumlah rumah sakit pemerintah dan swasta yang ada di Kota Pangkalpinang. Berikut ini rasio rumah sakit per satuan jumlah penduduk.

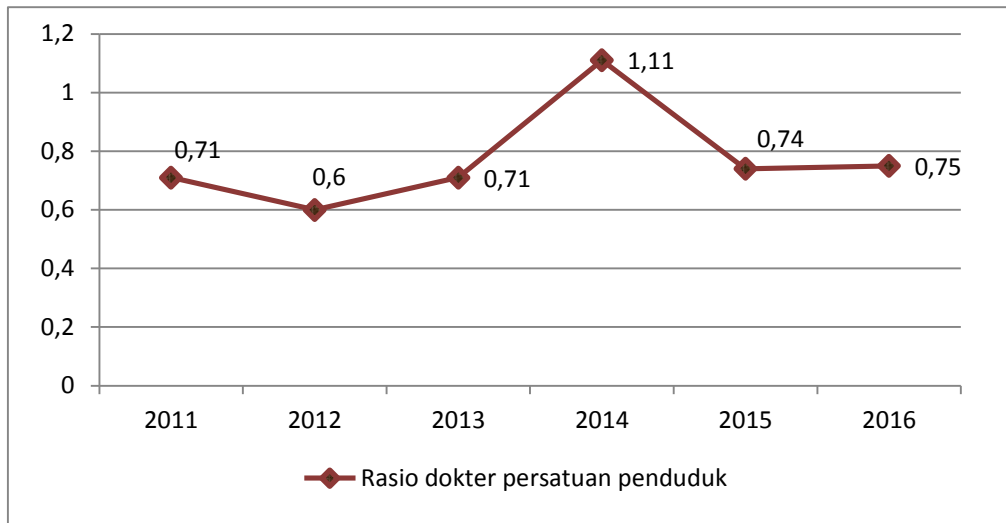


Gambar 2.13 Grafik Jumlah Rasio Rumah Sakit Persatuan Penduduk Tahun 2012-2016

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang tahun 2017

Dari data di atas dapat diketahui bahwa jumlah Rumah Sakit dari tahun 2012 s/d tahun 2016 belum ada penambahan Rumah Sakit. Bila dilihat dari rasio Rumah Sakit per satuan penduduk yaitu 0,019, ini berarti 1 Rumah Sakit baru melayani 100.000 orang penduduk, hal ini menunjukkan masih kurangnya ketersediaan Rumah Sakit untuk melayani masyarakat di kota Pangkalpinang.

4) Rasio Dokter per satuan penduduk



Gambar 2.14 Grafik Jumlah Rasio Tenaga Dokter Perjumlah Penduduk Tahun 2011-2016

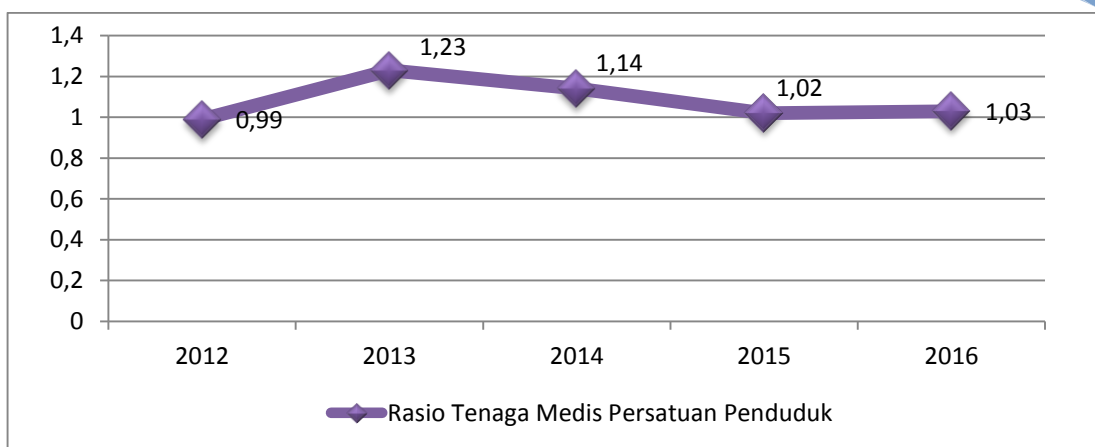
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang tahun 2017

Dari data di atas dapat diketahui bahwa jumlah tenaga dokter pada tahun 2011 -2014 mengalami peningkatan dan pada tahun 2015-2016 mengalami penurunan tetapi hanya sedikit. Rasio dokter per satuan penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk hal ini berarti di kota Pangkalpinang untuk rasio dokter telah mencukupi akan kebutuhan tenaga dokter per jumlah penduduk.

5) Rasio Tenaga Medis Persatuan Penduduk

Tenaga medis yang di publikasikan adalah tenaga medis dokter (dokter spesialis, dokter umum, dan dokter gigi) dan tenaga paramedis perawat dan non keperawatan. Berikut ini rasio tenaga medis per jumlah penduduk di Kota Pangkalpinang:

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH



Gambar 2.15 Grafik Jumlah Rasio Tenaga Medis Perjumlah Penduduk Tahun 2012-2016

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang tahun 2017

Dari data di atas dapat diketahui bahwa jumlah tenaga medis terus mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir. Rasio tenaga medis per jumlah penduduk menunjukkan ketersediaan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada penduduk. Pada tahun 2016 dapat dilihat rasio tenaga medis per jumlah penduduk sebesar 1,03 yang artinya sebanyak 103 orang tenaga medis melayani 10.000 penduduk.

6) Cakupan Puskesmas

Untuk cakupan pelayanan Puskesmas di Kota Pangkalpinang dapat dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabelll.13. Cakupan Pelayanan Puskemas di Kota Pangkalpinang

Tahun 2014-2016 (persen)

Keterangan	REALISASI			TARGET RPJMD	
	2014	2015	2016	2017	2018
Cakupan Puskesmas	128,6%	128,6%	128,6%	100%	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang tahun 2017

Cakupan Puskesmas Kota Pangkalpinang telah mencapai lebih dari 100 %. Idealnya 1 kecamatan terdapat 1 Puskesmas, sedangkan di Kota Pangkalpinang ada 2 Kecamatan yang mempunyai 2 Puskesmas yaitu di kecamatan Bukit Intan terdapat dua Puskesmas yaitu puskesmas Pasir putih dan Puskesmas Air Itam. Puskesmas Air Itam adalah satu-satunya puskesmas keperawatan di Kota Pangkalpinang berdasarkan Surat

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang Nomor 440/04.a/KEP/DINKES/I/2011 tanggal 03 Januari 2011. Sedangkan di Kecamatan Taman sari terdapat dua puskesmas yaitu Puskesmas Kacang Pedang dan Puskesmas Tamansari. Di Kecamatan Pangkalbalam terdapat satu puskesmas yaitu Puskesmas Pangkalbalam dan kecamatan Gabek Puskesmas Selindung. Kecamatan Rangkui terdapat satu puskesmas yaitu Puskesmas Melintang.

7) Cakupan Puskesmas Pembantu (PUSTU)

Selain Puskesmas, di Kota Pangkalpinang terdapat beberapa Puskesmas Pembantu (Pustu), dimana Pustu ini melayani masyarakat untuk tingkat kelurahan. Mengenai cakupan pelayanan Pustu dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



Gambar 2.16 Grafik Cakupan Puskesmas Layanan Pembantu (PUSTU) di Kota Pangkalpinang Tahun 2012-2016

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang Tahun 2017

Dari data diatas dapat diketahui bahwa cakupan Pustu di kota Pangkalpinang masih berkisar 50%, ini berarti belum semua kelurahan terdapat Pustu. Kedepannya diharapkan adanya penambahan sarana Pustu agar bisa membantu meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

C. Urusan pekerjaan Umum

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pekerjaan umum salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

1) Proporsi jaringan jalan berdasarkan kondisi

Prasarana jaringan jalan yang baik akan dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat, sehingga jangkauan terhadap berbagai kebutuhan ekonomi maupun social akan dapat terpenuhi dengan baik. Kinerja jaringan jalan berdasarkan kondisi dapat dikategorikan dengan jalan kondisi baik, sedang, sedang rusak, rusak dan rusak berat. Proporsi kondisi jalan baik di Kota Pangkalpinang mengalami Kenaikan , di mana pada tahun 2012 proporsi jalan kondisi baik mencapai 215,45 km dan terus meningkat hingga tahun 2016 menjadi 262,61 km. Demikian halnya dengan proporsi jalan kondisi rusak berat mengalami penurunan yang sangat signifikan, yaitu dari 6,95 km pada tahun 2012 menjadi 2,95 km pada 2016. Berikut adalah gambaran jaringan jalan berdasarkan kondisi dan kecamatan di Kota Pangkalpinang.

Tabel 2.15 Panjang jaringan jalan berdasarkan kondisi Tahun 2012-2016

NO	KONDISI JALAN	PANJANG JALAN (KM)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Kondisi baik	215.45	228.71	230.76	249.27	262.61
2	Kondisi sedang rusak	97.3	95.0	97.28	86.89	77.08
3	Kondisi rusak	27.8	21.46	20.95	15.67	13.68
4	Kondisi rusak berat	6.95	6.69	6.04	4.27	2.95
5	Jalan secara keseluruhan	347.5	351.86	355.02	356.10	356.33

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2017

Tabel 2.16 Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Menurut Kecamatan tahun 2016 Kota Pangkalpinang

NO	Kecamatan	Kondisi Baik (Km)	Kondisi Sedang Rusak (Km)	Kondisi Rusak (Km)	Kondisi Rusak Berat (Km)	Jalan secara keseluruhan (Km)
1	Rangkui	15,30	10,94	2,43	0,72	29,39
2	Bukit Intan	77,97	16,95	1,58	0,42	96,92
3	Girimaya	15,65	8,65	1,12	0,30	25,72

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

4	Pangkalbalam	21,04	5,92	1,59	0,35	28,90
5	Gabek	45,36	7,39	3,60	0,50	56,85
6	Taman Sari	11,57	9,30	1,86	0,15	22,88
7	Gerunggang	75,72	17,94	1,50	0,51	95,67
	Jumlah	262,61	77,08	13,68	2,95	356,33

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2017

2) Rasio tempat ibadah

Rasio tempat ibadah dihitung untuk melihat seberapa banyak jumlah penduduk beragama yang dapat menggunakan fasilitas tempat ibadah yang ada. Berikut ini data jumlah tempat ibadah dan jumlah pemeluknya :

Tabel 2.17 Rasio tempat ibadah Kota Pangkalpinang tahun 2013 - 2015

No	Bangunan tempat ibadah	Tahun 2013			Tahun 2015		
		Jumlah	Jumlah pemeluk	Rasio	Jumlah	Jumlah pemeluk	Rasio
1	Mesjid	183	167.624	1.110	183	174.358	952,77
2	Gereja	16	15.469	966,8	16	20.032	1.252
3	Pura	1	80	80	1	87	87
4	Vihara	9	16.303	1.811	9	17.005	1.889
5	Kelenteng	4	8.403	2.100	4	9.496	2.374
6	Lain-lain	-	278	278	-	278	278
	Jumlah	213	208.157	977,29	213	221.256	1.309

Sumber : BPS, Pangkalpinang dalam angka Tahun 2016

3) Persentase rumah tinggal bersanitasi

Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi sebagai berikut : Fasilitas air bersih, pembuangan tinja, pembuangan air limbah (Air bekas), Pembuangan sampah, Persentase Rumah tinggal bersanitasi dari tahun 2012 85,94 mengalami kenaikan di tahun 2013 sebesar 91,97 dan mengalami penurunan pada tahun 2014-2016 menjadi 88,79 berikut disajikan data persentase rumah tinggal bersanitasi di Kota Pangkalpinang:

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Tabel 2.18 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kota Pangkalpinang Tahun 2012-2016

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi	39.539	40.987	43.916	44.708	44.299
2.	Jumlah rumah tinggal	46.009	50.634	52.503	50.349	50.349
3.	Persentase	85,94	91,97	83,64	88,79	87,98

Sumber : Dinas kesehatan Kota Pangkalpinang tahun 2017

Tabel 2.19 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Menurut kecamatan Tahun 2016

No	Kecamatan	Jumlah rumah tinggal	Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
1.	Rangkui	11.193	10.500	93,81
2.	Bukit Intan	8.076	7.681	95,11
3.	Girimaya	7.194	6.725	93,48
4.	Pangkalbalam	4.442	4.182	94,15
5	Gabek	4.335	3.764	86,83
6	Taman Sari	5.711	5.351	93,69
7	Gerunggang	6.746	6.096	90,36
	Jumlah	47.697	44.299	92,88

Sumber : Dinas Kesehatan Kota pangkalpinang tahun 2017

Dari data diatas dapat diketahui bahwa realisasi cakupan persentase rumah tangga bersanitasi pada tahun 2016 sebesar 84,47 %, persentase paling tinggi rumah tinggal bersanitasi terdapat di kecamatan Bukit Intan yaitu sebesar 95,11 % dan yang paling rendah di kecamatan Gabek sebesar 86, 83 sedangkan di 5 kecamatan lain persentase rumah tinggal bersanitasi sudah diatas 90 %.

4) Rasio Tempat pemakaman Umum Persatuan Penduduk

Rasio tempat pemakaman umum dihitung dengan membandingkan luas wilayah Tempat Pemakaman Umum (TPU) dengan jumlah penduduk Kota Pangkalpinang.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Tabel 2.30 Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk Tahun 2015 -2016 Kota Pangkalpinang

No	Uraian	Tahun 2015			Tahun 2016		
		Jumlah	Luas m2	Daya Tampung	Jumlah	Luas m2	Daya Tampung
1.	Tempat pemakaman umum (TPU)	23	311.727	4.824	23	311.727	4.567
2.	Tempat Pemakaman bukan umum (TPBU)	0	0	0	0	0	0
3.	Tempat pemakaman khusus (TPK)	1	2.118	0	1	2.118	0
4.	Lain-Lain	0	0	0	0	0	0
5.	Jumlah Tempat Pemakaman	24	313.845	4.824	24	313.845	4.567
6.	Jumlah penduduk (jiwa)	-	196.202	-	-	200.326	-
7.	Rasio TPU persatuan penduduk (1/6)	-	1.5996	-	-	1.5666	-

Sumber : Dinas Perumahan dan Pemukiman Tahun 2017

Dari data diatas Kota Pangkalpinang pada tahun 2016 memiliki 23 Tempat pemakaman Umum dengan luas area sebesar 311.727 M2 dan daya tampung 4.567 yang diasumsikan sudah hampir 85 % luas lahan TPU yang dimanfaatkan dan memungkinkan masih tersedia 15 % lahan dengan luas 41,341,05 m2. Sedangkan untuk rasio pemakaman umum per satuan penduduk menurut kecamatan Tahun 2012 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.21 Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2016

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Tempat pemakaman umum (TPU)		Tempat Pemakaman bukan umum (TPBU)		Tempat pemakaman khusus (TPK)		Lain-Lain		Jumlah Total		Rasio TPU persatuan penduduk
			Jmlh luass	Daya tam-pung	Jmlh luas	Daya tam-pung	Jmlh luas	Daya tam-pung	Jmlh luas	Daya tam-pung	Tmpt Pemakaman	Daya tam-pung	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12=4+6+8+10)	(13=5+7+9+11)	(14=4/3)
1.	Rangkui	38.519	16.451	117	0	0	2.118	0	0	0	18.568,88	117	0,4271

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Tempat pemakaman umum (TPU)		Tempat Pemakaman bukan umum (TPBU)		Tempat pemakaman khusus (TPK)		Lain-Lain		Jumlah Total		Rasio TPU persatuan penduduk
			Jmlh luass	Daya tampung	Jmlh luas	Daya tampung	Jmlh luas	Daya tampung	Jmlh luas	Daya tampung	Tmpt Pemakaman	Daya tampung	
2.	Bukit Intan	36.708	172.834	1.552	0	0	0	0	0	0	172.834	1.552	4,708
3.	Girimaya	20.301	22.496	628	0	0	0	0	0	0	22.496	628	1,108
4	Pangkalbalam	21.787	9.152	207	0	0	0	0	0	0	9.152	207	0,4201
5	Gabek	25.245	32.729	1.586	0	0	0	0	0	0	32.729	1.586	1,296
6	Taman Sari	22.632	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-
7	Gerunggang	35.134	58.065	477	0	0	0	0	0	0	58.065	477	1,652
	Jumlah	200.326	311.727	4.567	0	0	2.118	0	0	0	313.845	4.567	1,656

Sumber : Dinas Perumahan dan Pemukiman Tahun 2017

Untuk daya tampung relative bervariasi, tergantung sisa lahan yang belum termanfaatkan, di TPU rangkui masih tersisa 5 %, Bukit Intan 7,5 %, Girimaya 7,5 %. Pangkalbalam 7,5 %, dan Gerunggang 7,5 % lahan serta asumsi untuk 1 pemakaman muslim membutuhkan lahan 4 M2 sedangkan asumsi untuk 1 pemakaman non muslim membutuhkan lahan sekitar 16 m2.

5) Rasio Tempat pembuangan sampah

Rasio Tempat Pembuangan Akhir (TPA) persatuan penduduk adalah perbandingan luas wilayah TPA dengan jumlah penduduk. Berdasarkan data yang disampaikan Dinas Kebersihan dan Kebakaran Kota Pangkalpinang Tahun 2016, rasio TPA persatuan penduduk adalah 1,965. Ini berarti 1,9 hektar lahan TPA dapat menampung 100.000 ton produksi sampah penduduk. Berdasarkan rasio tersebut, untuk sekarang luas areal TPA Kota Pangkalpinang di Kelurahan Bacang (tepatnya di Parit Enam) seluas 2,5 hektar masih dapat menampung produksi sampah penduduk Kota Pangkalpinang sejumlah 200.326 jiwa serta produksi sampah penduduk di sekitar perbatasan dengan Bangka Tengah.

Tabel 2.22 Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2012 -2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah TPS	135	92	96	105	105
2.	Jumlah Daya Tampung TPS	506,25	345	360	393,75	393,75
3.	Jumlah Penduduk	209,998	191,454	191,994	196,202	200,326
4.	Rasio Daya Tampung TPS thd Jumlah penduduk	2,410 lt/orang	1,802	1,875	2,006	1,965

Sumber : Dinas kebersihan dan kebakaran Tahun 2017

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

D. Urusan Perumahan

1) Konsumsi Listrik Rumah Tangga di Kota Pangkalpinang

Jumlah pelanggan listrik di wilayah Kota Pangkalpinang adalah 122.287 pelanggan yang terdiri dari 108 pelanggan rumah tangga, 803 pelanggan industri, 1.763 pelanggan dinas/instansi, 23 pelanggan perusahaan dan 6.557 pelanggan lainnya dengan kapasitas pembangkit listrik yang tersambung sebesar 243.639 KVA.

2) Sanitasi Lingkungan Permukiman Masyarakat Kota Pangkalpinang



Gambar 2.18 Grafik Cakupan Rumah tangga bersanitasi Kota Pangkalpinang Tahun 2012-2017

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang Tahun 2017

Realisasi cakupan persentase rumah tangga bersanitasi pada tahun 2012 sebesar 74,77 %, terjadi peningkatan pada tahun 2013 dengan cakupan sebesar 77,46 % sedangkan pada tahun 2014 s/d 2016 terjadi kenaikan pencapaian diatas 80 %. Pada tahun 2016 terjadi peningkatan dengan capaian sebesar 90 % .

3) Lingkungan Pemukiman Kumuh (Slum Area)

Lingkungan kumuh (*slum area*) adalah daerah yang sifatnya kumuh dan tidak beraturan yang terdapat di perkotaan. Daerah kumuh umumnya dihuni oleh orang-orang yang memiliki penghasilan sangat rendah, terbelakang, pendidikan rendah, dan lain sebagainya. Pada tahun 2016, luas area kumuh di Kota Pangkalpinang mengalami peningkatan sebesar 196,2 ha berdasarkan data yang di peroleh Dokumen Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Perkotaan (RP2KP-KP) tahun 2017.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

E. Urusan penataan ruang

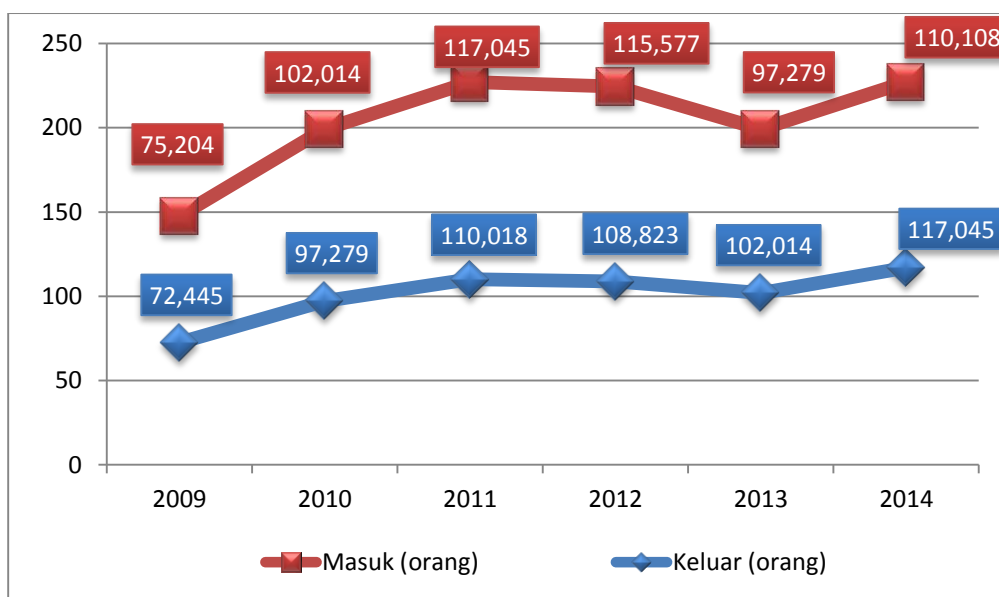
Apabila luas wilayah Kota Pangkalpinang 118,40 kilometer persegi, maka Pemerintah Kota Pangkalpinang diwajibkan menyediakan RTH seluas 35,52 kilometer persegi dengan rincian 23,68 kilometer persegi RTH publik dan 11,84 kilometer persegi RTH privat.

1) Rasio ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah

Luas Ruang terbuka hijau Kota Pangkalpinang Tahun 2016 baru mencapai 8,79 persen mengalami penurunan dari tahun 2012 yang mencapai 11,84 persen yang masih jauh dari target yaitu 30 persen dari wilayah daerah.

F. Perhubungan

1) Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum



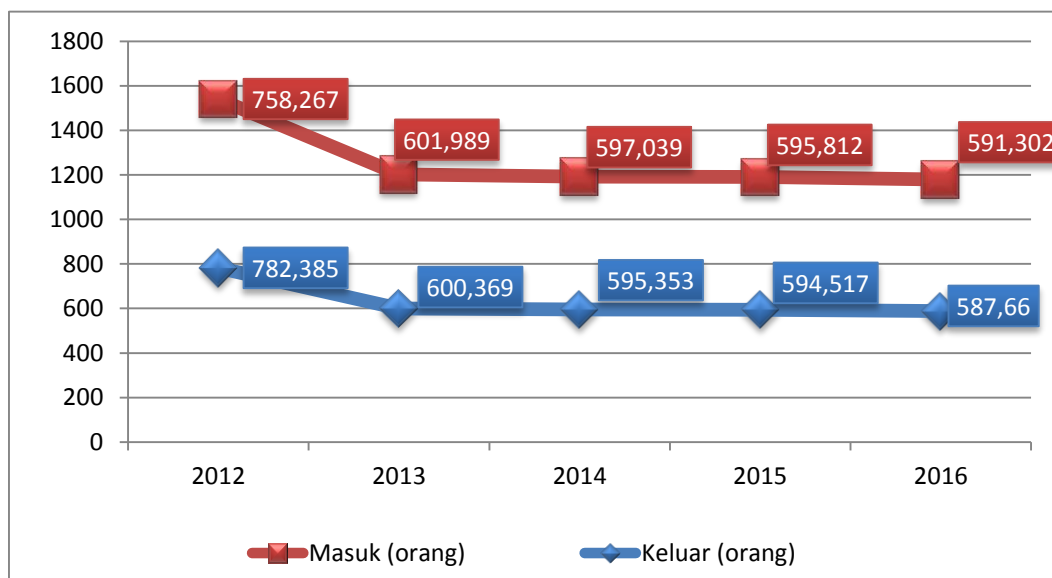
Gambar 2.19 Grafik Arus Penumpang Angkutan Umum Kapal Laut Di Kota Pangkalpinang Tahun 2009-2014

Sumber : Dinas Perhubungan, Telekomunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang
Tahun 2015

Arus keluar penumpang angkutan umum Kapal Laut di Kota Pangkalpinang hampir seimbang dengan arus masuk penumpang tahun 2016 yaitu sekitar 110.108 orang untuk arus masuk dan 117.045 orang untuk penumpang yang keluar Kota Pangkalpinang. Berikut ini data mengenai arus keluar masuk penumpang angkutan umum Kapal Laut dari dan ke luar Kota Pangkalpinang pada tahun 2009-2014.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Sedangkan untuk angkutan bis di Kota Pangkalpinang untuk tahun 2016 jumlah arus masuk penumpang ke Kota Pangkalpinang sebanyak 591.302 orang dan yang keluar Kota Pangkalpinang sebanyak 587.660 orang yang keluar.



Gambar 2.20 Grafik Arus Penumpang Angkutan Umum Bis di Kota Pangkalpinang Tahun 2012-2016

Sumber : Dinas Perhubungan, Telekomunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang Tahun 2017

2) Ijin trayek

Izin trayek adalah izin yang diberikan kepada angkutan penumpang yang melayani jalur-jalur yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai jalur angkutan kota. Izin trayek berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali. Retribusi izin trayek tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 5 Tahun 2007 adalah 400.000 rupiah.

Tabel 2.23 Realisasi Ijin Trayek Kota Pangkalpinang Tahun 2014 -2016

Keterangan	REALISASI			TARGET RPJMD	
	2014	2015	2016	2017	2018
Ijin trayek	368	410	324	450	500

Sumber : Dinas Perhubungan Tahun 2017

3) Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal Bis

Jumlah pelabuhan dan terminal di Kota Pangkalpinang dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2.24 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis tahun 2012 - 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah pelabuhan laut	1	1	1	1	1
2.	Jumlah pelabuhan udara	-	-	-	-	-
3.	Jumlah terminal bis	3	3	3	3	3
	Jumlah	4	4	4	4	4

Sumber : Dinas Perhubungan Tahun 2017

G. Urusan Lingkungan hidup

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruangan dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan secara sistematis dan terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Berikut ini analisa pelaksanaan urusan lingkungan hidup:

1) Persentase Penanganan sampah

Penanganan sampah di Kota Pangkalpinang dilaksanakan Dinas Kebersihan dan Kebakaran Kota Pangkalpinang melalui pengangkutan, pengumpulan, dan pemusnahan. Pada Tahun 2014, persentase pengelolaan sampah merupakan yang terendah selama 4 tahun terakhir. Jumlah sampah yang di kelola tahun 2014 (baik ditingkat pengumpulan, pengangkutan, dan Pengolahan) sebesar 81.724 meter kubik per hari atau 83 persen dari total produksi sampah sebesar 97.466 meter kubik perhari. Persentase pengelolaan sampah tertinggi berada di tahun 2013 sebesar 98 %.

Volume produksi sampah di Kota Pangkalpinang tidak sebanding dengan luas areal TPA yang hanya 2,5 Hektar. Untuk mengurangi beban dan memperpanjang usia operasional TPA, maka dilaksanakan upaya pengurangan sampah dari sumbernya dengan *reduce*, *reuse*, dan *recycle* diantaranya melalui kegiatan komposting skala rumah tangga sampai

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

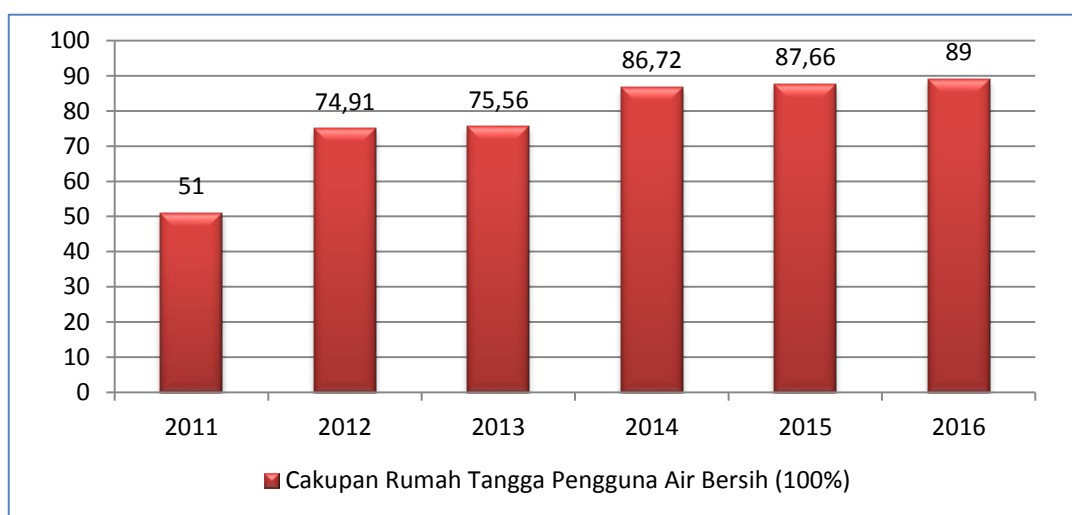
perkantoran. Berikut adalah kondisi persampahan di Kota Pangkalpinang secara lengkap dalam kurun waktu tahun 2013-2016.

Tabel 2.25 Jumlah volume sampah dan produksi sampah Kota Pangkalpinang Tahun 2013 - 2016

NO	URAIAN	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah sampah yang ditangani	72.839	81.724	107.681	125.882
2	Jumlah volume produksi sampah	74.295	97.466	118.449	138.470
3	persentase	98	83	90,01	87,2

Sumber : Pangkalpinang Dalam Angka Tahun 2017

2) Persentase penduduk berakses air minum



Gambar 2.21 Grafik Persentase penduduk berakses air minum

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang Tahun 2017

Dari data diatas dapat diketahui bahwa relisasi cakupan persentase rumah tangga pengguna air bersih terjadi peningkatan sejak tahun 2011 s/d 2016 dan rata-rata semuanya sudah diatas 70 %, hal ini disebabkan adanya kekosongan tenaga sanitarian di salah satu Puskesmas. Pada tahun 2016 terjadi peningkatan dengan capaian sebesar 89 % dan sudah melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 78 %.

Data rumah tangga pengguna air bersih di Kota Pangkalpinang yang berhasil terangkum adalah data pelanggan dari Perusahaan Daerah Air minum (PDAM) yang melayani penyaluran kebutuhan air bersih masyarakat di Kota Pangkalpinang. Sementara rumah tangga pengguna air bersih melalui sumur galian atau sumur bor masih belum terdata dengan baik. Sebesar 91,19 persen pelanggan PDAM di Kota

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pangkalpinang adalah rumah tinggal. Dari total air minum yang disalurkan untuk semua jenis pelanggan (1.358.987 m³), sebanyak 81,88 persen disalurkan untuk rumah tinggal. Pada tahun 2010, kapasitas air minum yang disalurkan khusus untuk rumah tinggal sebesar 491.296 m³, dengan total seluruh pelanggan untuk rumah tinggal sebanyak 2729 unit. Kondisi tersebut mengalami penurunan dibanding dengan tahun 2009 yang sebanyak 2.920 pelanggan untuk rumah tinggal dan ditahun 2012 meningkat menjadi 3.067.

H. Urusan Pertanahan

Pelaksanaan urusan pertanahan di Kota Pangkalpinang hanya pada tahapan pendaftaran, pemetaan, pengukuran, survey, pemberian izin lokasi, sosialisasi, dan penyelesaian konflik-konflik. Berikut ini analisa terhadap pencapaian urusan ini :

1) Penyelesaian Kasus Tanah Negara

Berdasarkan Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Bidang Pertanahan merupakan kewenangan penuh Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota. Namun demikian berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan hanya sebagian kecil yang menjadi kewenangan daerah.

Diantara kewenangan daerah kabupaten/kota di bidang pertanahan antara lain; pemberian ijin lokasi, penyelenggaraan pengadaan tanah untuk pembangunan, penyelesaian sengketa tanah garapan, penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong, pemberian ijin membuka tanah dan lain-lain.

Penyelesaian kasus tanah negara merupakan tugas utama Badan Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang. Kasus-kasus pertanahan mencuat pada saat lahan akan dibebaskan untuk keperluan pembangunan baik pemerintah maupun swasta atau pada saat lahan itu akan diperjualbelikan. Salah satu masalah yang paling sering adalah masalah kepemilikan lahan ganda. Permasalahan yang muncul berupa adanya satu lahan yang diakui/dimiliki oleh satu atau beberapa orang. Dengan pendekatan persuasif sosial kemasyarakatan semua masalah tersebut dapat diselesaikan dengan tuntas pada tingkat Pemerintah Kota Pangkalpinang.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Kasus tanah negara pada tahun 2016 sebanyak 1 (satu) kasus dan sudah diselesaikan dan dimediasi Badan Lingkungan Hidup bidang Penatagunaan Tanah ,yaitu tanah di perumahan Tampuk Pinang Pura I, Tampuk Pinang Pura II, Tampuk Pinang Pura III yang bealamat di Jl. Pahlawan 12 Kelurahan Kacang Pedang.

Kegiatan penyelesaian konflik – konflik pertanahan ini berdasarkan tinjauan terhadap realisasi hasil dapat dilakukan dengan baik hal ini dikarenakan pihak Badan Lingkungan hidup Bidang Penatagunaan Tanah disini hanya bertindak sebagai mediator dan hanya memfasilitasi antara pihak-pihak yang bersengketa.

2) Penyelesaian Izin Lokasi

Izin Lokasi dan Izin Peruntukan dan Penggunaan Lahan (IPPL) merupakan salah satu syarat untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Izin lokasi diperuntukkan bagi lahan diatas 2 hektar dan sejak tahun 2009 sudah tidak dikeluarkan lagi. Sedangkan IPPL diperuntukan bagi lahan dibawah 2 hektar. Sebelum dikeluarkan IPPL, harus ada rekomendasi (*advise planing*) yang dikeluarkan Bappeda Kota Pangkalpinang. Hal ini untuk menyesuaikan peruntukan lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

3) Persentase Luas Lahan Bersertifikat

Data mengenai persentase luas lahan bersertifikat tidak tersedia di Badan Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang. Hal ini dikarenakan Kendati urusan pertanahan merupakan urusan wajib dan kewenangan Pemerintah Daerah, namun pengeluaran Sertifikat Tanah masih menjadi kewenangan pusat sehingga di daerah ditangani oleh lembaga vertikal yaitu Badan Pertanahan Nasional. Penyerahan kewenangan urusan pertanahan yang setengah hati ini sering memicu persoalan baik antara BPN dengan pemerintah daerah sampai ke level kelurahan maupun dengan masyarakat, sehingga Pemerintah Kota Pangkalpinang terus berupaya untuk mencari jalan terbaik dalam penataan pertanahan di Kota Pangkalpinang.

I. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagai suatu sistem yang memiliki substansi inti yaitu pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi kependudukan. Administrasi kependudukan adalah pengakuan negara terhadap hak publik (domisili, pindah datang) dan hak sipil (pencatatan peristiwa penting). Sebagai hasil keluaran nyata dari pelaksanaan administrasi ini adalah dokumen kependudukan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

mulai dari Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Akta Catatan Sipil serta data penduduk perorangan dan atau agregat. Berikut ini analisa pelaksanaan urusan kependudukan di Kota Pangkalpinang :

1) Rasio Penduduk ber Kartu Tanda Penduduk (KTP) per Satuan Penduduk

Rasio penduduk berKartu Tanda Penduduk (KTP) dihitung dengan membandingkan jumlah total cetak KTP di Kota Pangkalpinang per jumlah penduduk Kota Pangkalpinang tahun 2016. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang Tahun 2016, total jumlah penduduk Kota Pangkalpinang adalah 206.799 Jiwa dan 166.344 jiwa yang telah memiliki KTP.

Berdasarkan data tersebut rasio penduduk ber Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah 80,34 persen. Artinya, dari 100 penduduk yang telah berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah, sebanyak 80 orang telah memiliki KTP.

2) Rasio Bayi Berakte Kelahiran

Rasio bayi berakte kelahiran dihitung dengan membandingkan jumlah bayi yang memiliki akte kelahiran dengan jumlah bayi yang ada di Kota Pangkalpinang dengan asumsi usia bayi adalah dari 0-12 bulan. Berdasarkan Data yang disampaikan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang tahun 2017, jumlah bayi yang memiliki akte kelahiran adalah 4.704 dan jumlah bayi yang berusia 0-12 bulan sebanyak 4.832 jiwa. Rasio bayi yang berakte kelahiran mengalami peningkatan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Tahun 2012 jumlah rasio bayi berakte kelahiran sebesar 36,34 %, Tahun 2013 sebesar 67,55 % , tahun 2014 sebesar 98,66 , tahun 2015 dan 2016 sebesar 97,35 %.

3) Rasio Pasangan Berakte Nikah

Rasio pasangan berakte nikah dihitung dengan membandingkan jumlah akta nikah dengan jumlah keseluruhan penduduk yang telah menikah. Berdasarkan Data yang disampaikan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang tahun 2017, jumlah penduduk yang berakte nikah adalah 1.665 pasangan sedangkan jumlah penduduk dengan status menikah sejumlah 95,540 jiwa. Dengan demikian Rasio pasangan berakte nikah tahun 2016 adalah 1,76 persen.

4) Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 Penduduk

Kutipan akta kelahiran di Kota Pangkalpinang dihitung dengan membandingkan total akta lahir di siak dengan total penduduk yang ada di Kota Pangkalpinang pada tahun 2016. Berdasarkan data yang disampaikan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Pangkalpinang, pada tahun 2016 jumlah total akta kelahiran yang di siak adalah 63.579 dan jumlah penduduk Kota Pangkalpinang pada tahun 2016 adalah 206.799 jiwa. Berdasarkan data tersebut, rasio kepemilikan akta kelahiran per 1.000 penduduk adalah 307per 1000 penduduk.

5) Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK

Pada tahun 2010 Pemerintah Kota Pangkalpinang menyelenggarakan program nasional pemutakhiran data kependudukan, penerbitan NIK dan persiapan penerapan e-KTP. Hal ini mempedomani Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010, tentang Penerapan KTP berbasis NIK Secara Nasional dan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/7295/SJ tanggal 13 Oktober 2010 tentang Pemuktahiran Data, Penerbitan NIK dan Persiapan e-KTP. Pada tahun 2011 mulai dilaksanakan program e-KTP secara serentak.

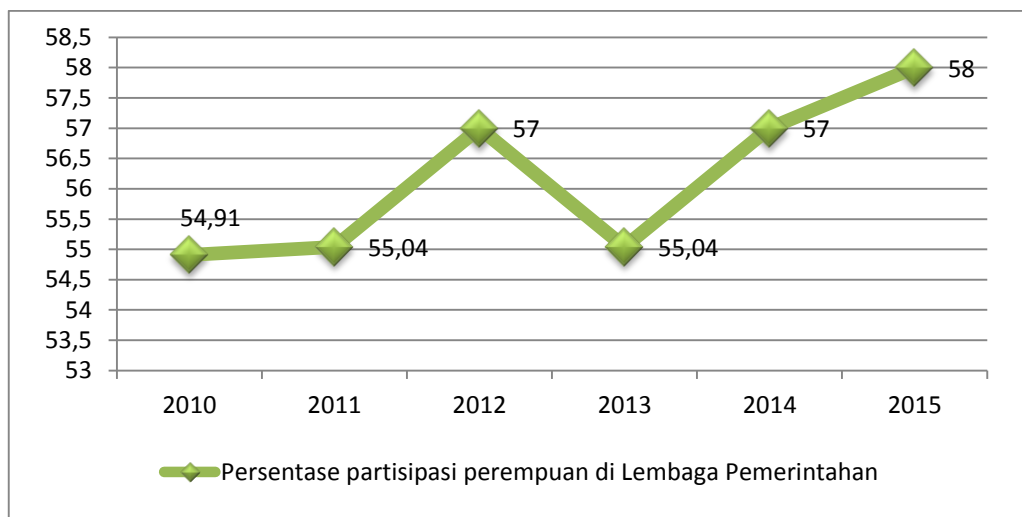
J. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan pemberdayaan merupakan urusan wajib yang dilaksanakan Pemerintah Kota Pangkalpinang melalui BPMPKB. Anasila terhadap pencapaian pelaksanaan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Pangkalpinang dicermati melalui pembahasan fokus-fokus berikut ini:

1) Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Di Kota Pangkalpinang, pada tahun 2015 penguatan peran perempuan di lembaga pemerintahan sudah cukup baik hal ini ditunjukkan dengan jumlah pegawai perempuan di Instansi-instansi Pemerintah di Kota Pangkalpinang sebesar 58 persen. Dibandingkan dengan 5 tahun terakhir persentase ini merupakan yang tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

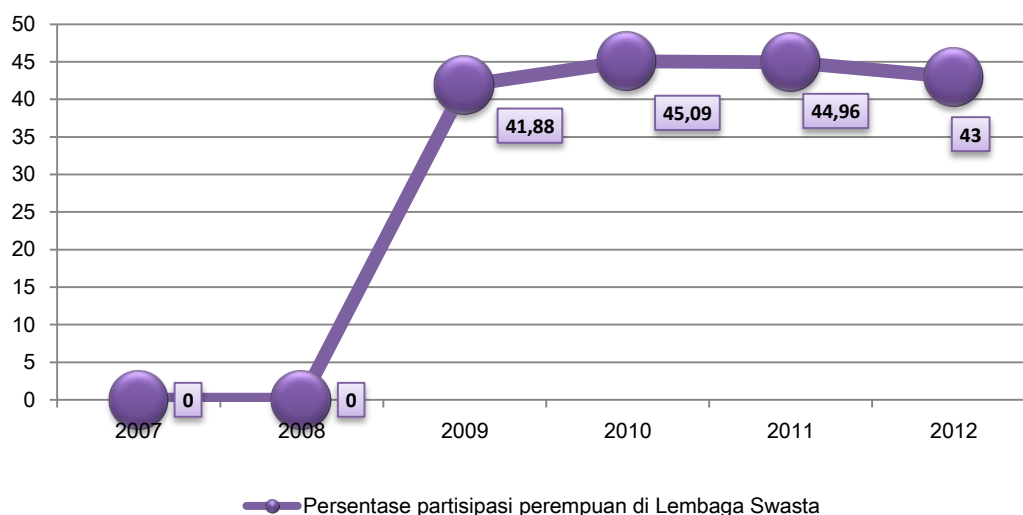


Gambar 2.22 Grafik Persentase partisipasi perempuan di Lembaga Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2010- 2015

Sumber : BPMPKB Kota Pangkalpinang tahun 2016

2) Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta

Partisipasi perempuan tentunya tidak terfokus pada ruang lingkup lembaga pemerintahan saja melainkan juga meliputi lembaga swasta. Sebanyak 45,09 persen dari total 7.052 pekerja perempuan atau sebanyak 3.180 pekerja yang ada di Kota Pangkalpinang terserap di lembaga swasta.



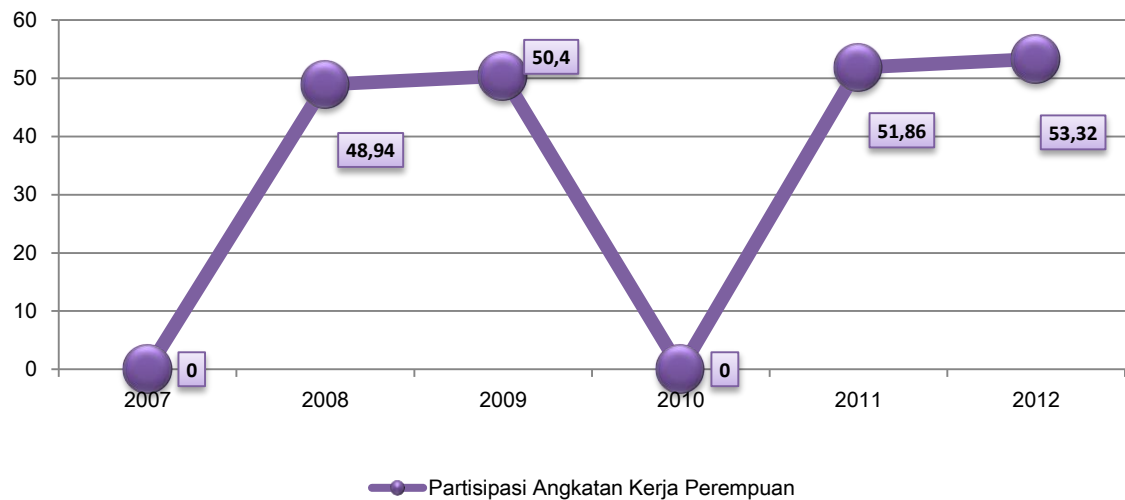
Gambar 2.23 Grafik Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Kota Pangkalpinang Tahun 2007 – 2012 (persen)

Sumber : BPMPKB Kota Pangkalpinang tahun 2012

*) Keterangan : Data tahun 2007,2008 belum tersedia

3) Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Partisipasi perempuan dalam dunia kerja merupakan wujud dari kesetaraan gender. Dulunya, perempuan identik dengan pekerjaan rumah tangga yang monoton. Namun saat ini, perempuan telah memiliki ruang dan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berpartisipasi dalam dunia kerja. Di Kota Pangkalpinang hingga tahun 2010, partisipasi jumlah angkatan kerja perempuan dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 2.24 Grafik Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2012 (persen)

Sumber : BPMPKB Kota Pangkalpinang tahun 2012

*) Keterangan : Data tahun 2007,2010 belum tersedia

Partisipasi angkatan kerja perempuan pada tahun 2009 sebesar 48,94.persen dan pada tahun 2010 mengalami kenaikan sebesar 50,40 persen. Dapat dikatakan bahwa peran serta perempuan sebagai angkatan kerja di Kota Pangkalpinang sama dengan angkatan kerja laki-laki.

4. Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Di Kota Pangkalpinang, pemahaman akan norma sosial yang melarang masyarakat melakukan tindak kekerasan masih cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan angka KDRT yang cukup rendah. Pada tahun 2015 yaitu sebanyak 20 kasus, tahun 2016 sebanyak 19 kasus di Kota Pangkalpinang berdasarkan data yang disampaikan Badan pemberdayaan perempuan dan KB.

5. Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan

Data dari BPMPKB Kota Pangkalpinang tahun 2015 terdapat 66 kasus pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan jumlah kasus yang terselesaikan sebanyak 58 kasus atau sebesar 88 %. Pada tahun 2016 terdapat 45 kasus dan yang terselesaikan sebanyak 40 kasus atau sebesar 89 %.

K. Urusan Keluarga Berencana

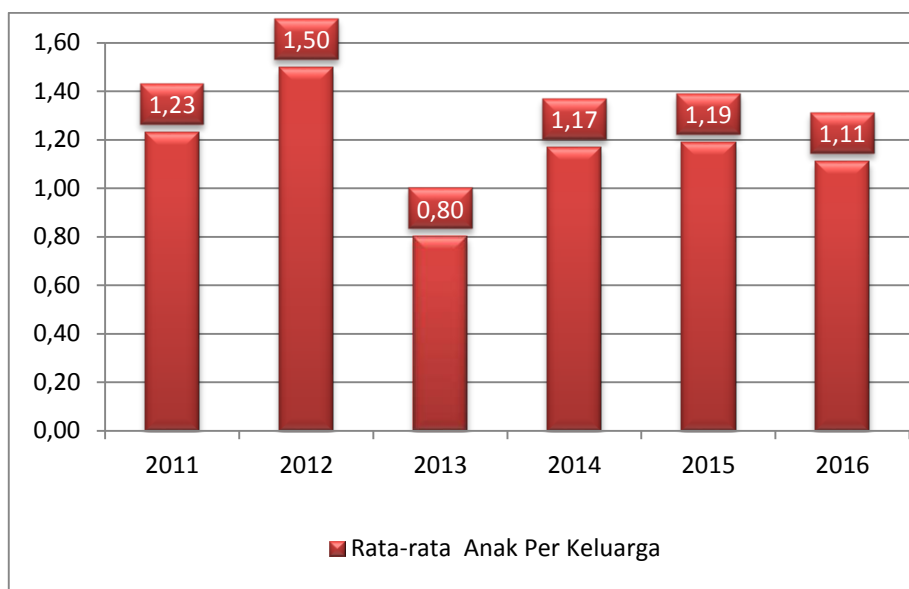
Menurut *World Health Organisation* (WHO), keluarga berencana adalah program yang membantu pasangan suami istri untuk menghindari kehamilan yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang memang sangat diinginkan, mengatur interval diantara kehamilan, mengontrol waktu saat kelahiran dalam hubungan dengan umur suami istri serta menentukan jumlah anak dalam keluarga.

Keluarga berencana menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan (PUP), pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Berikut ini analisa pencapaian urusan Keluarga Berencana di Kota Pangkalpinang

1) Rata-rata Jumlah Anak perKeluarga

Rata-rata jumlah anak per keluarga dihitung dengan membandingkan jumlah total anak dengan jumlah seluruh keluarga yang ada di suatu wilayah. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2017, persentase rata-rata jumlah anak di setiap keluarga di Kota Pangkalpinang sebesar 1,11. Dengan demikian dari total 50.349 keluarga yang ada di Kota Pangkalpinang, masing-masing keluarga rata-rata memiliki anak sebanyak 1 atau 2 orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kota Pangkalpinang mencapai target yang telah ditetapkan pada program keluarga berencana, dimana satu keluarga hanya memiliki 2 orang anak saja.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH



Gambar 2.25 Grafik Rata-rata Anak Per Keluarga Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2016

Sumber : BPMPKB Tahun 2017

Tabel 2.26 Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga Menurut Kecamatan Kota Pangkalpinang Tahun 2016

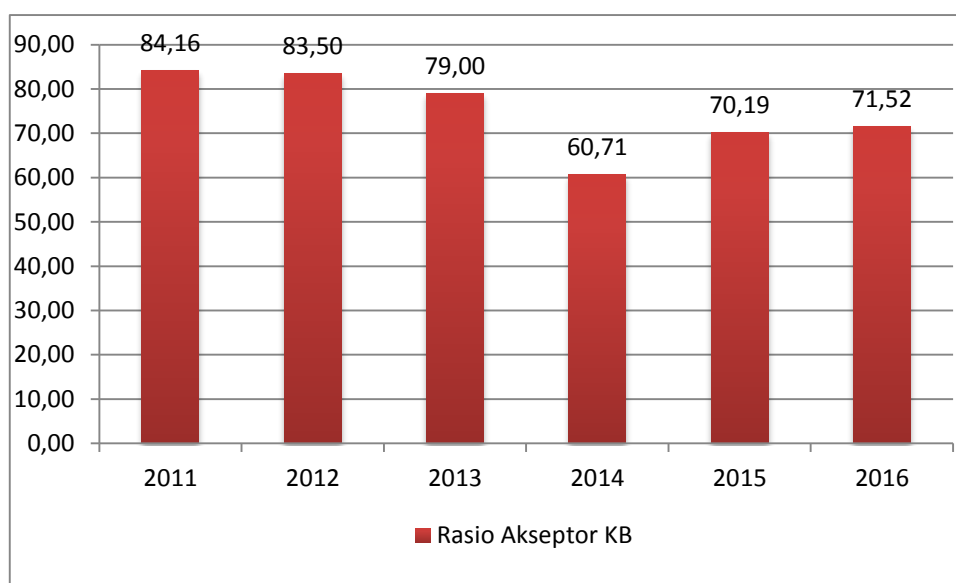
NO	Kabupaten/Kota	Jumlah Anak	Jumlah Keluarga	Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)
1	Rangkui	10.173	9.511	1,07
2	Bukit Intan	10.869	9.362	1,16
3	Girimaya	5.224	2.012	2,59
4	Pangkalbalam	6.235	4.596	1,36
5	Gabek	7.115	9.342	0,76
6	Taman Sari	5.805	4.533	1,28
7	Gerunggang	10.281	10.993	0,93
	Jumlah	55.702	50.349	1,11

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2017

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2) Rasio Akseptor KB

Rasio akseptor KB dihitung dengan membandingkan jumlah akseptor KB per Jumlah pasangan usia subur dikalikan 100 persen. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Tahun 2016, Rasio Akseptor KB kota Pangkalpinang ;



Gambar 2.26 Grafik Rasio Akseptor KB di Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2016

Sumber : BPMKB Kota Pangkalpinang Tahun 2017

Tabel 2.27 Rasio Akseptor KB Menurut Kecamatan Tahun 2015 Kota Pangkalpinang

NO	Kecamatan	Jumlah akseptor KB	Jumlah pasangan usia subur	Rasio akseptor KB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)
1	Rangkui	4.480	6.866	65,25
2	Bukit Intan	3.950	6.366	62,05
3	Girimaya	2.552	2.534	100,71
4	Pangkalbalam	1.698	3.627	46,81
5	Gabek	3.623	4.995	72,53
6	Taman Sari	3.456	4.793	72,10
7	Gerunggang	4.601	5.526	83,26
	Jumlah	24.360	34.707	70,19

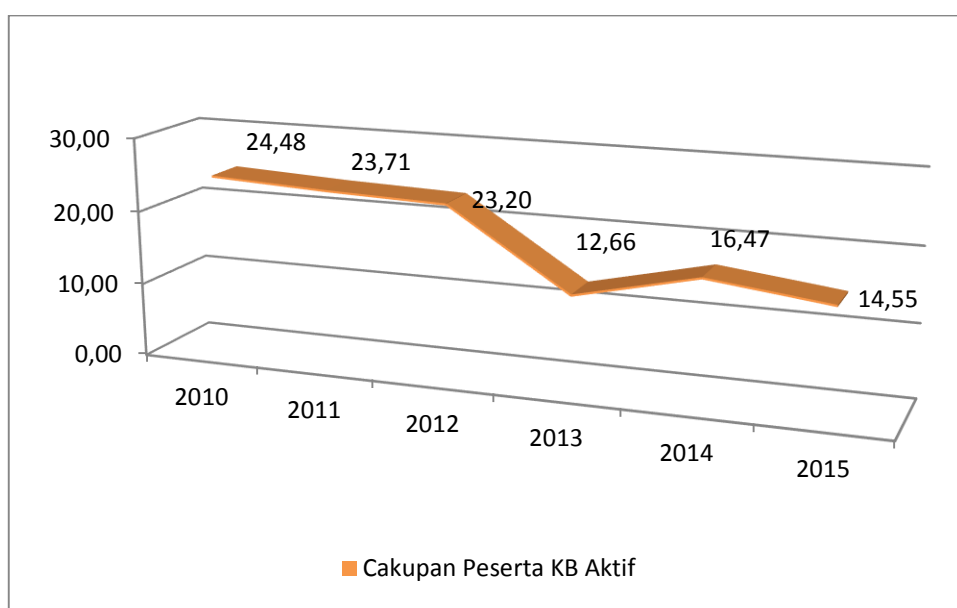
Sumber : BPMPKB Tahun 2016

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Berdasarkan data tersebut rasio akseptor KB di Kota Pangkalpinang adalah 70,19 persen. Artinya dari 100 PUS yang ada di Kota Pangkalpinang, sebanyak 70 orang telah menjadi akseptor KB atau telah menggunakan salah satu cara/alat kontrasepsi untuk menjarangkan kehamilan atau mengakhiri kesuburan. Jumlah akseptor KB yang telah melebihi separuh dari jumlah PUS ini menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengatur kelahiran anak serta membantu mensukseskan peran pemerintah dalam menekan lonjakan penduduk.

3) Cakupan Peserta KB Aktif

Cakupan peserta KB aktif dihitung dengan membandingkan jumlah peserta program KB aktif per jumlah pasangan usia subur dikalikan 100 persen. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Tahun 2016, jumlah peserta KB aktif dan Pasangan Usia Subur (PUS) sebagai berikut:



Gambar 2.27 Grafik Cakupan Peserta KB Aktif di Kota Pangkalpinang Tahun 2010-2015

Sumber :BPMKB Kota Pangkalpinang Tahun 2016

Tabel 2.28 Cakupan Peserta KB Aktif di Kota Pangkalpinang Tahun 2015 Per Kecamatan

No	Kecamatan	PUS	Peserta KB Aktif	cakupan
1	Rangkui	8.724	5.289	16,49
2	Bukit Intan	6.642	4.095	16,22

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

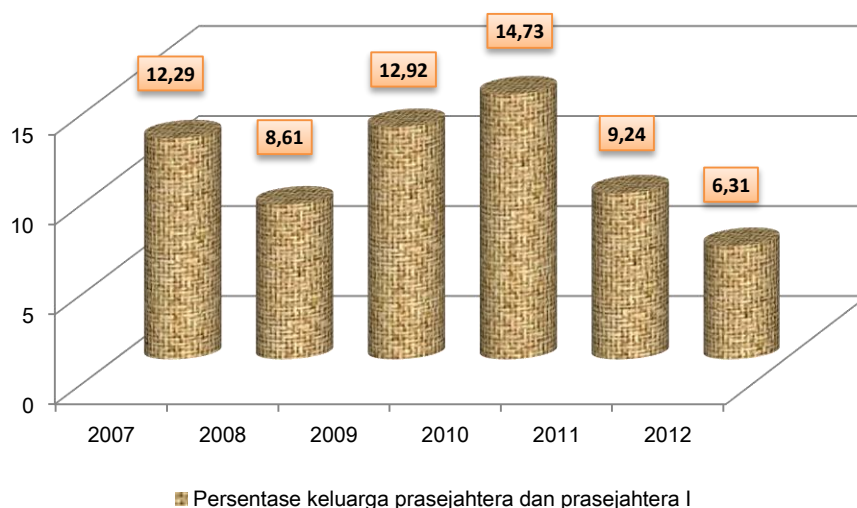
3	Girimaya	3.061	1.951	15,68
4	Pangkalbalam	3.925	2.775	14,14
5	Gabek	5.294	3.848	13,75
6	Taman Sari	4.151	3.814	10,88
7	Gerunggang	6.225	4.358	14,28
	Jumlah	38.022	26.130	14,55

Sumber : BPMPKB tahun 2016

Berdasarkan data tersebut, cakupan peserta KB aktif di Kota Pangkalpinang sebesar 14,55 persen pada Tahun. Artinya dari 100 PUS di Kota Pangkalpinang, sebanyak 15 orang menjadi peserta KB aktif.

4) Rasio Keluarga Prasejahtera dan Sejahtera - I

Pada tahun 2007 persentase keluarga prasejahtera dan prasejahtera I sebesar 12,29 %. Pada tahun 2008 persentase keluarga prasejahtera dan prasejahtera I sebesar 8,61 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Tahun 2009 persentase sebesar 12,92 % mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, Tahun 2010 persentase keluarga prasejahtera dan Prasejahtera I sebesar 14,73 %. Tahun 2012 persentase keluarga sejahtera I dan prasejahtera II sebesar 6,31 % artinya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.



Gambar 2.28 Grafik Persentase keluarga prasejahtera dan sejahtera I Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2012

Sumber : BPMKB Kota Pangkalpinang Tahun 2013

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Tabel 2.29 Keluarga Pra-sejahtera dan keluarga sejahtera I menurut Kecamatan Kota Pangkalpinang Tahun 2014

No	Pra Sejahtera	Sejahtera I	Sejahtera 2	Sejahtera 3	Sejahtera +3
1	139	4.493	19.979	23.201	513

Sumber : Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka Tahun 2015

L. Urusan Sosial

Dalam rangka menjamin terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat yang diupayakan melalui berbagai cara baik berupa pemberian pelayanan dan rehabilitasi sosial, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat serta peningkatan kapasitas kelembagaan sosial sebagai sumber dan potensi kesejahteraan sosial, maka urusan sosial merupakan salah satu urusan wajib yang harus diselenggarakan Pemerintah Kota Pangkalpinang.

1) Sarana Sosial di Kota Pangkalpinang

Sarana sosial yang ada di Kota Pangkalpinang diantaranya adalah panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi. Berdasarkan data tahun 2016, Sarana Sosial yang dimiliki Oleh Panti Sosial menjadi Fokus dalam Pelayanan Publik adalah sebanyak 53 sarana Sosial. Berikut disajikan data mengenai sarana sosial yang ada di Kota Pangkalpinang :

Tabel 2.30 Sarana Sosial di Kota Pangkalpinang Tahun 2016

No.	Sarana Sosial	Keterangan
1	PAA.Aisyah	Paud , TPA
2	PAA. Muhamadiyah	Menjahit
3	PAA.Baiturahmah	Panti Sosial Asuhan Anak
4	PAA. An-Nisa	Panti Sosial Asuhan Anak
5	PAA.Hidayatusalikin	Pondok Pesantren, TPQ
6	PAA. Bina Harapan	Panti Sosial Asuhan Anak
7	PAA. Adh-Dhuha	Panti Sosial Asuhan Anak
8	PAA.Al Ikhlas	Panti Sosial Asuhan Anak
9	Panti Bhakti Kasih Siti Anna	Panti Sosial Lansia

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

No.	Sarana Sosial	Keterangan
10	Yayasan Pembinaan Anak Cacat	SLB
11	SLB	Sekolah
12	Yayasan Al- Fitrah	-
13	Yayasan As- Syakur	-
14	Yayasan Baiturrohim	-
15	Yayasan Ash- Shalihah	Pembinaan Spritual Eks NAPI
16	Yayasan Waqaf "Mardhatillah"	Tempat Penitipan Anak (TPA)
17	Yayasan Al- Aziz	-
18	Yayasan Jannatu Ma'wa	-
19	Yayasan Tariqul Jannah	-
20	Yayasan Baitul Hikmah	Penyantunan Fakir Miskin
21	Yayasan Serumpun Sebalai	Penyantunan Fakir Miskin
22	Yayasan Baitur Rahman	-
23	Yayasan Kwanti Miau	-
24	Yayasan Anugerah Bangka	Penyantunan Fakir Miskin
25	Yayasan Kasih Sayang Lestari Prima	Panti Sosial Lansia
26	Yayasan Al- Huda	Penyantunan Fakir Miskin
27	Yayasan Jompo Bakti Wara	-
28	Yayasan Santo Yosef	-
29	Yayasan Santunan, FM dan Anak Yatim	-
30	Yayasan Muslimin	Penyantunan Fakir Miskin
31	Yayasan Untaian Kasih 6	Penyantunan Fakir Miskin
32	Yamusru	Penyantunan Fakir Miskin
33	Yayasan Muhajirin	-
34	Yayasan Uswatun Hasanah	-
35	Yayasan Al- Hikmah	-
36	Yayasan Dzikir SBY	-
37	Yayasan Elis Imandasari	Pelayanan Jasa Ambulance Gratis

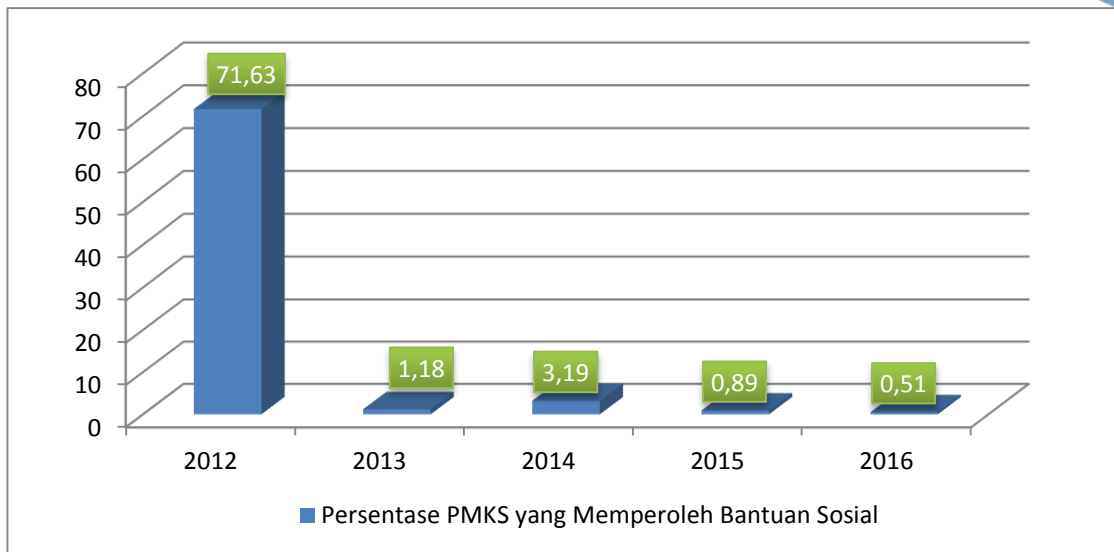
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

No.	Sarana Sosial	Keterangan
38	Yayasan Babel Peduli Dukungan Sebaya	-
39	Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPM) Prov. Babel	-
40	Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPM) Kota Pkp	-
41	Karang Taruna Kota Pangkalpinang	-
42	KNPI Kota Pangkalpinang	-
43	FKKADK Kota Pangkalpinang	-
44	KKTRM Prov. Babel	-
45	RBM. NAPZA Serumpun Sebalai Prov. Babel	-
46	PSAA. Muara Kasih Bunda	-
47	PSL. Al- Ikhlas	Panti Sosial Lansia
48	Panti Sosial Kasih Sayang Lestari Prima	-
49	PSAA. Nur- Rahmah	-
50	PSAA. Hidayatullah	-
51	PSAA. Ruth	-
52	PSAA. An- Nuha	-
53	LKS. FKKADK (Forum Komunikasi Keluarga Anak Cacat)	-

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 201

2) Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Memperoleh Bantuan Sosial.

Pada Tahun 2011, jumlah PMKS di Kota Pangkalpinang berjumlah 1193 orang. Dari jumlah tersebut baru 71,63 persen yang diberikan bantuan atau berjumlah 725 orang. Jumlah ini telah meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 18,44 persen. Pemberian bantuan ini mengalami penurunan sampai dengan tahun 2016 mencapai 51 persen

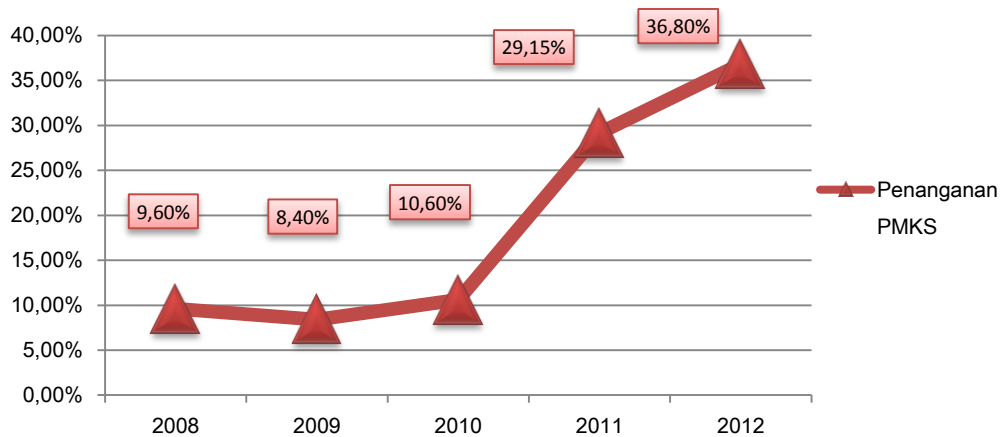


Gambar 2.29 Grafik Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Kota Pangkalpinang Tahun 2013–2016(persen)

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

3) Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Penanganan penyandang masalah sosial dilaksanakan dengan memberikan bantuan dan jaminan sosial bagi warga masyarakat. Berikut ini data Persentase penanganan PMKS Kota Pangkalpinang Tahun 2008-2012;



Gambar 2.30 Grafik Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Pangkalpinang Tahun 2008 – 2012

Sumber : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang Tahun 2012

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pada tahun 2011, ada 775 dari 2658 jumlah seluruh PMKS Kota Pangkalpinang atau sebesar 29,15 persen. Penanganan PMKS di Kota Pangkalpinang berupa ;

1. Pembuatan surat rekomendasi bagi PMKS untuk keperluan berobat
2. Pembuatan surat rekomendasi penguburan jenazah bagi PMKS
3. Fasilitasi berupa rekomendasi adopsi/pengangkatan anak
4. Pemberian bantuan pemakaman, pakaian dan peralatan dapur bagi korban kebakaran
5. Fasilitasi pengembalian orang terlantar ke daerah asalnya
6. Fasilitasi insentif bagi tenaga kerja sosial

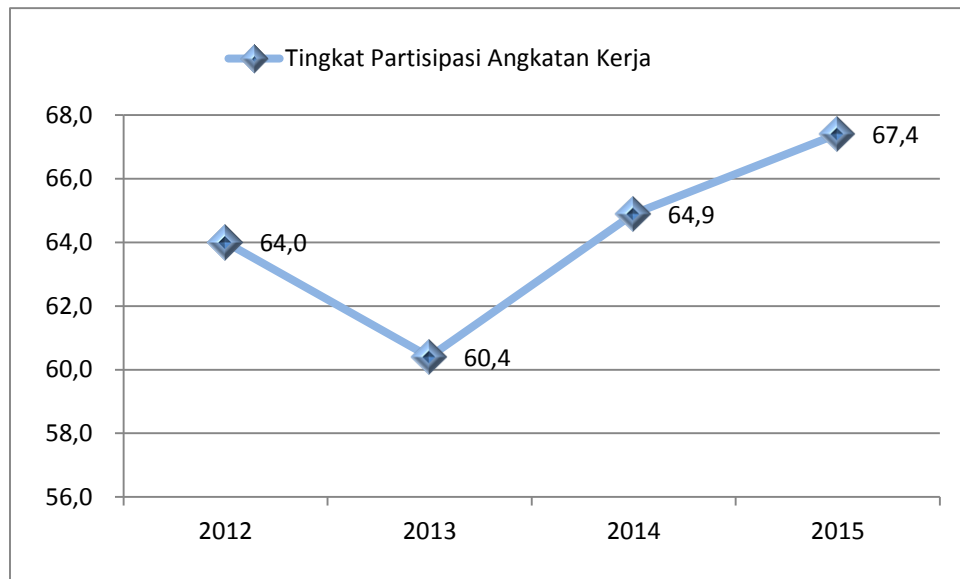
M. Urusan Ketenagakerjaan

Urusan ketenagakerjaan merupakan salah satu subsistem dari sebuah desain *holistic system* pembangunan nasional, sekaligus merupakan salah satu alat pencapaian tujuan pembangunan Kota Pangkalpinang, karena melalui pengurangan tingkat pengangguran dan meningkatnya jumlah sumberdaya manusia yang kreatif, produktif dan inovatif dalam semua bidang kerja, akan dapat mengeliminir berbagai masalah yang menghambat laju pembangunan. Berikut ini analisa pelaksanaan urusan ketenagakerjaan di Kota Pangkalpinang :

1) Angkatan Kerja

Angkatan kerja dapat didefinisikan sebagai bagian dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang produktif.

Angka partisipasi angkatan kerja dihitung dengan membandingkan angkatan kerja 15 tahun keatas per jumlah penduduk 15 tahun keatas dikalikan 100 persen. Berdasarkan data yang disampaikan Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang Tahun 2017, maka diketahui angka partisipasi angkatan kerja di kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut:



Gambar 2.31 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2015

Sumber : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang Tahun 2016

Pada tahun 2015, tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun keatas adalah sebesar 67,40 persen meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang artinya dari 191.994 penduduk berusia 15 keatas, 67,40 persen atau 129.403 orang merupakan angkatan kerja.

2) Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Per Tahun

Sengketa antara pengusaha dengan pekerja bisa saja terjadi karena adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) atau upah yang diberikan pengusaha kepada pekerja tidak sesuai dengan standar upah minimum yang telah ditetapkan pemerintah. Selama tahun 2010, terdapat 41 orang yang bekerja di 20 perusahaan di Kota Pangkalpinang melapor ke Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang terkait sengketa yang berkenaan dengan PHK seperti yang tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 2.31 Sengketa Pemutusan Hubungan Kerja Pada Perusahaan di Kota Pangkalpinang Tahun 2010

No.	Nama Perusahaan	Jumlah PHK (orang)
1	PT. Unza Vitalis	1
2	Toko Pecah Belah	1
3	PT. Enseval Putra Megatrading	1
4	PT. Praga Jaya	1

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

No.	Nama Perusahaan	Jumlah PHK (orang)
5	PT. Atri Distribusindo	1
6	PT. Sumber Cipta Multiniaga	1
7	RS. Bhakti Timah	3
8	PT. Bangka Jaya Line	1
9	Kop. Karyawan Timah Mitra Mandiri	1
10	PT. Ligita Jaya	1
11	Kop. PT. PLN LISBA	1
12	PT. Pelayaran Isna Agung Permata	1
13	PT. Maha Rupa Gatra	1
14	PT. Tanesia	2
15	PT,. Permata Sriwijaya	1
16	PT. Gugah Perkasa	8
17	PD. Jaya Abadai Prakarsa	1
18	PT. Mekar Jaya	5
19	PT. Ligita Jaya	1
20	Kop. PT. PLN Lisba Bangka	8
Jumlah		41 orang

Sumber : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang tahun 2011

Angka sengketa pengusaha pertahun dihitung dengan membandingkan angka sengketa pengusaha pekerja per jumlah perusahaan dikalikan 100 persen. Berikut ini data yang disampaikan Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang Tahun 2010 terkait masalah sengketa pengusaha pekerja :

Tabel 2.32Angka Sengketa Pengusaha pekerja, Jumlah Perusahaan, dan Angka SengketaPengusaha Per Pekerja Tahun 2010

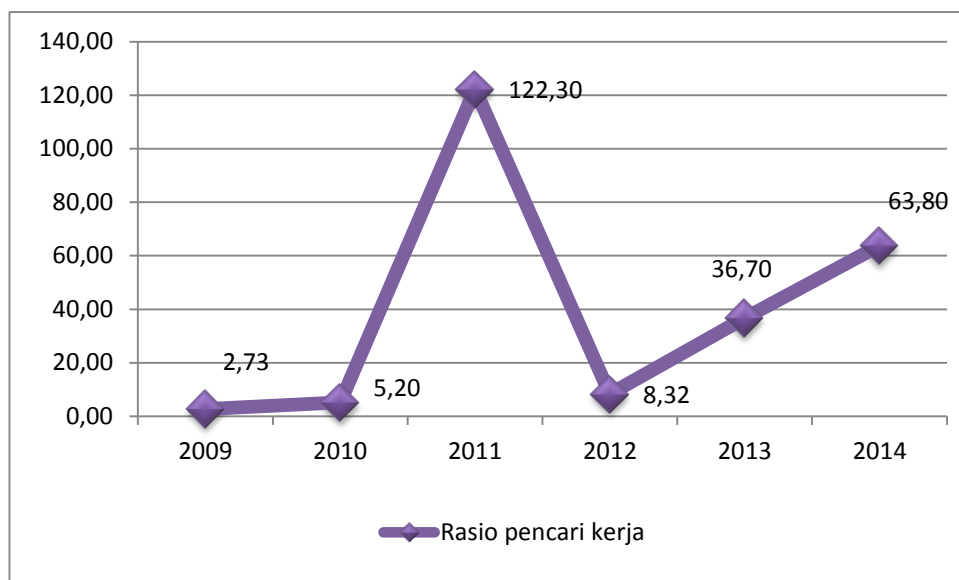
No.	Uraian	Jumlah (orang)
1	Angka Sengketa Pengusaha pekerja	41
2	Jumlah Perusahaan	350
3	Angka Sengketa Pengusaha Per Pekerja	11,71 persen

Sumber : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang Tahun 2011

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

3) Rasio Pencari Kerja yang di tempatkan

Rasio pencari kerja yang ditempatkan dihitung dengan membandingkan jumlah tenaga kerja yang mendaftar dengan jumlah tenaga kerja yang telah ditempatkan. Berikut ini data yang berkenaan dengan rasio jumlah pencari kerja yang ditempatkan di Kota Pangkalpinang :

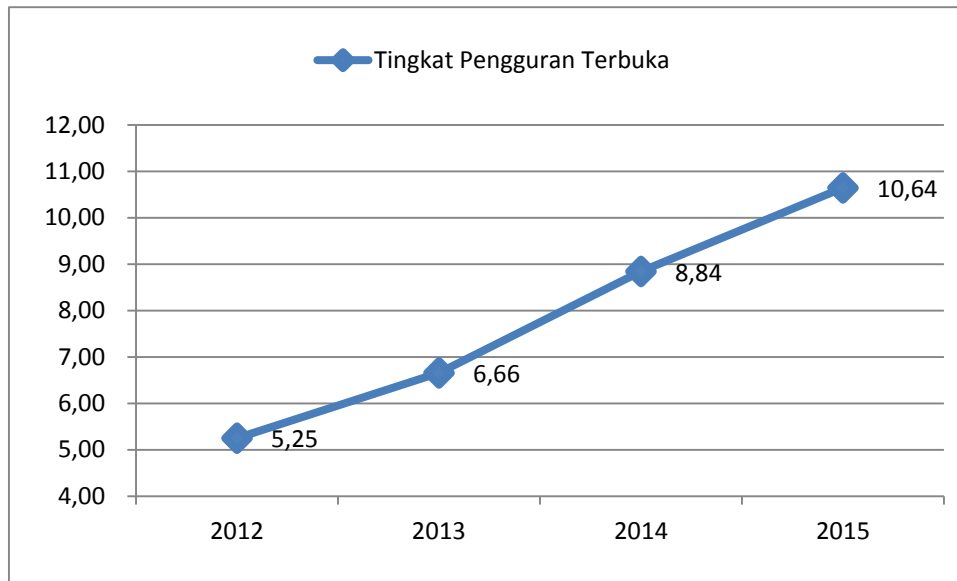


Gambar 2.32 Grafik Rasio pencari kerja di Kota Pangkalpinang Tahun 2009 – 2014

Sumber : Pangkalpinang dalam angka tahun 2015

Rasio pencari kerja yang ditempatkan di Kota Pangkalpinang sebesar 63,8 persen. Artinya dari 100 tenaga kerja yang mendaftar di Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang, sebanyak 64 orang telah ditempatkan di instansi-instansi pemerintah. Sedangkan pada tahun 2011 terjadi lonjakan angka penempatan yang mencapai 122,30 yang artinya yang ditempatkan melebihi dari yang mendaftar. Angka ini merupakan hasil kumulatif dari angka penempatan dari tahun sebelumnya yang baru bias terakomodir di lapangan kerja. Sedangkan pada tahun 2012 pencari kerja yang ditempatkan hanya 8,32 dari pendaftaran sebanyak 3764.

4) Tingkat Pengangguran Terbuka



Gambar 2.33 Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Pangkalpinang Tahun 2011 -2015

Sumber : BPS, Pangkalpinang Dalam Angka Tahun 2016

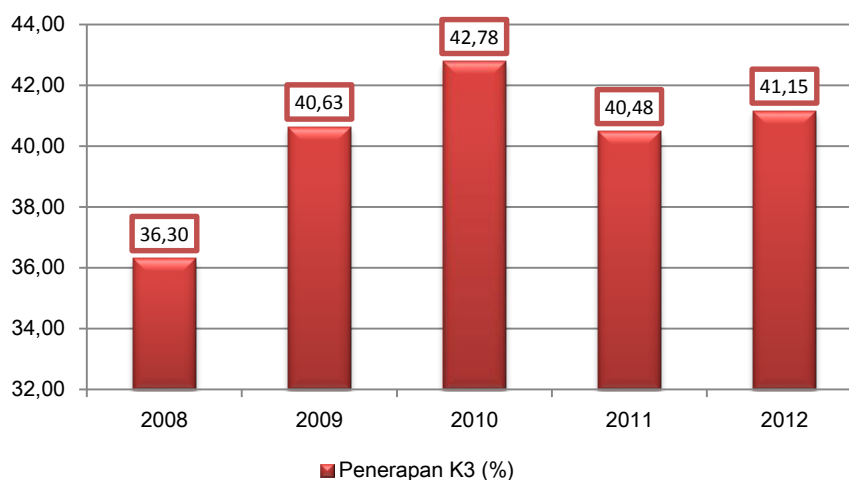
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah penduduk yang mencari pekerjaan terhadap jumlah angkatan kerja. TPT Kota Pangkalpinang dari tahun 2011 sampai dengan 2015 cenderung meningkat. Fenomena ini sangat dipengaruhi dengan kondisi perekonomian setempat dan juga tak jarang sebagai dampak kondisi perekonomian nasional bahkan global. Angka TPT tertinggi sepanjang tahun 2011- 2015 adalah pada tahun 2015 yaitu sebesar 10,64 persen.

5) Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Rasio keselamatan dan perlindungan tenaga kerja dihitung dengan membandingkan jumlah perusahaan di Kota Pangkalpinang yang menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada tahun berkenaan dikalikan 100 persen. Berdasarkan data yang disampaikan Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang, jumlah perusahaan yang menerapkan K3 dari tahun 2007 – 2011 selalu mengalami kenaikan. Persentase perusahaan yang menerapkan K3, terjadi penurunan pada tahun 2011, dikarenakan pertumbuhan perusahaan sangat tinggi yaitu sebesar 210 perusahaan, sedangkan yang telah menerapkan K3 40,48 persen meningkat menjadi 41,15 %. Kenaikan jumlah perusahaan pada tahun 2010 ini merupakan kenaikan tertinggi

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

selama kurun waktu dari tahun 2007 sampai dengan 2011, sehingga kemungkinan terjadi penyesuaian data tentang perusahaan yang menerapkan K3 pada tahun berikutnya.



Gambar 2.34 Grafik Persentase perusahaan di Kota Pangkalpinang yang menerapkan K3 Tahun 2008 -2012

Sumber : Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang tahun 2012

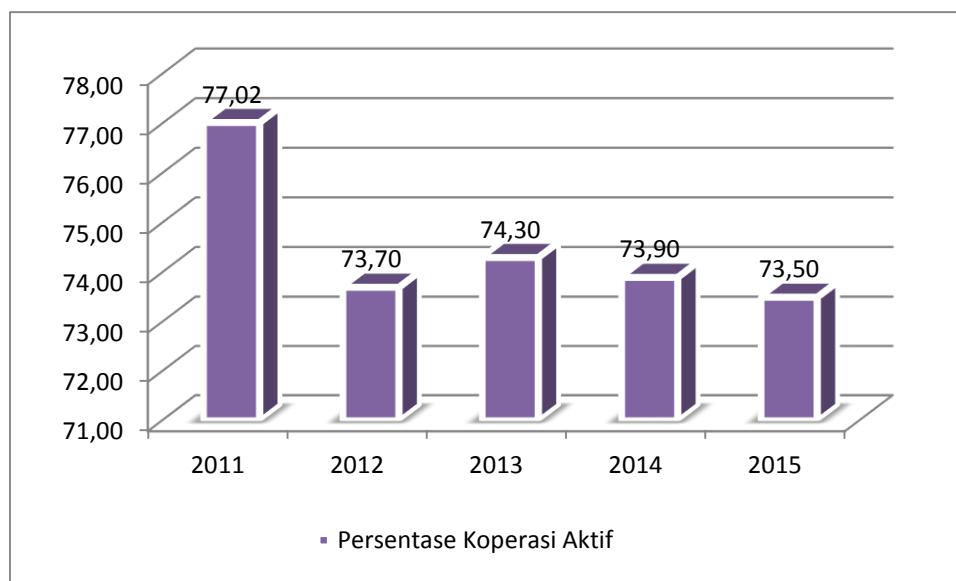
N. Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Analisa atas pencapaian kinerja urusan ini ditinjau melalui aspek-aspek berikut ini :

1) Persentase Koperasi Aktif di Kota Pangkalpinang

Data yang dihimpun melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Pangkalpinang dari tahun 2011 sampai dengan 2015 menunjukkan adanya fluktuasi jumlah unit. Berikut disajikan gambar persentase koperasi aktif di kota Pangkalpinang;

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH



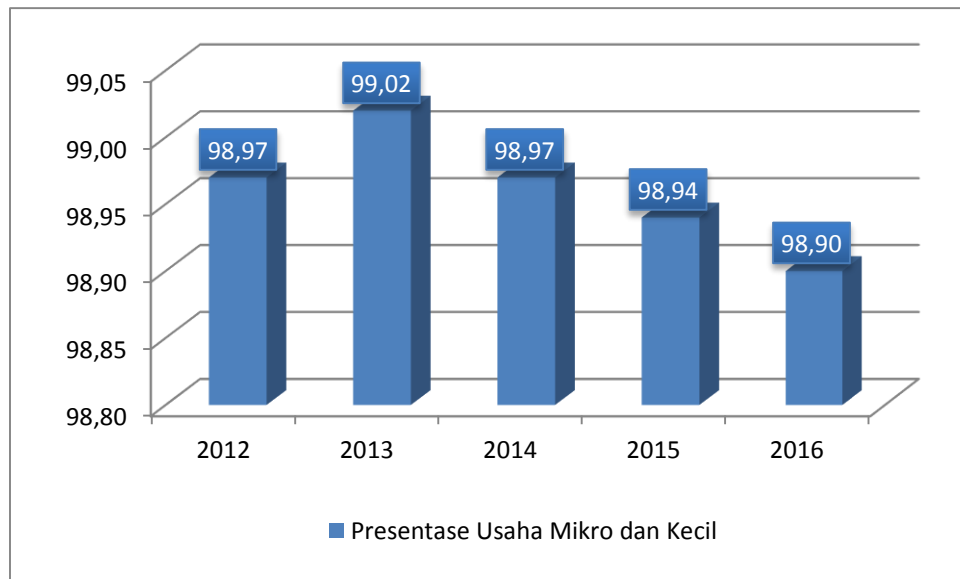
Gambar 2.35 Grafik Persentase Koperasi Aktif Di Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2015

Sumber : Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang Tahun 2016

Pada tahun 2015, jumlah koperasi aktif adalah sebesar 73,5, persen cenderung menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

2) Usaha Mikro dan Kecil

Perkembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kota Pangkalpinang dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 selalu mengalami kenaikan dan UKM lebih banyak didominasi oleh usaha mikro dan kecil.



Gambar 2.36 Grafik Persentase Usaha Mikro dan Kecil terhadap UMKM Kota Pangkalpinang Tahun 2012-2016

Sumber : Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang tahun 2017

Berdasarkan data dari Disperindag dan UMKM Kota Pangkalpinang, perkembangan jumlah, usaha mikro dan kecil dari 2010 sampai dengan tahun 2016 telah berada diatas 98 persen. Adapun kondisi pengelolaan industri kecil dan mikro di Kota Pangkalpinang sesuai dengan jenis industri yang dijalankan, maka pada umumnya dikelola dengan sistem administrasi dan keuangan yang sederhana dan bersifat manual.

O. Urusan Penanaman Modal

Analisa atas pencapaian kinerja urusan ini ditinjau melalui aspek-aspek berikut ini :

1) Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Rasio daya serap tenaga kerja menunjukkan angka 1:33,8. Angka tersebut diperoleh dengan membandingkan jumlah seluruh tenaga kerja yang bekerja di perusahaan investasi (1.521 orang) dengan jumlah perusahaan investasi yang terdata di Kota Pangkalpinang (45 perusahaan). Artinya, setiap 1 perusahaan mampu menampung tenaga kerja sebanyak 33 atau 34 orang.

2) Jumlah Investor Non PMA/PMDN di Kota Pangkalpinang

Peluang investasi di Kota Pangkalpinang hingga saat ini masih didominasi oleh investor lokal atau non PMA/PMDN. Total investor yang terdata DISPERINDAGKOP dan UMKM Kota Pangkalpinang dari tahun 2003 hingga tahun 2008 sebanyak 45 investor.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Kesemua investor tersebut bergerak di bidang usaha yang bermacam-macam diantaranya di bidang industri roti dan kue, industri smelter, jasa percetakan, industri furnitur dan lain-lain.

3) Nilai Investasi Kota Pangkalpinang.

Investasi merupakan salah satu penggerak perekonomian di suatu wilayah. Investasi ini terkait dengan kegiatan pembelian barang yang digunakan untuk produksi dengan harapan akan adanya peningkatan output sehingga keuntungan meningkat di masa yang akan datang.

Data investasi yang dimaksud, menggunakan pendekatan nilai PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto) yaitu nilai *fixed capital formation* (Pembentukan barang modal tetap) dengan mengabaikan nilai perubahan stok dikarenakan (dianggap) tidak berperan dalam penciptaan output (sumber : BPS, ICOR Kota Pangkalpinang Tahun 2012). Perkembangan Investasi Kota Pangkalpinang Tahun 2008-2011 dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2.33 Perkembangan Investasi (PMTB) di Kota Pangkalpinang Tahun 2008-2011
(Milyar rupiah)

Tahun	2008		2009		2010		2011		2012		Rata-rata Pertumbuhan	
	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK
Investasi	402,01	223,82	451,22	231,72	513,44	242,68	588,46	256,55	681,40	274		
Pertumbuhan (%)			12,24	3,52	13,78	4,72	14,61	5,71	15,7	6,8	14,10	5,1

Sumber ; BPS, ICOR Kota Pangkalpinang Tahun 2008-2011

4) Investasi PMA dan PMDN di Kota Pangkalpinang

Pendataan mengenai jumlah investor PMA dan PMDN berskala nasional berikut nilai investasi belum dilaksanakan secara maksimal sehingga data tersebut belum dapat diketahui secara akurat.

P. Urusan Kebudayaan

Urusan kebudayaan merupakan salah satu urusan wajib yang dilaksanakan Pemerintah Kota Pangkalpinang. Berikut ini anaisa pelaksanaan urusan kebudayaan :

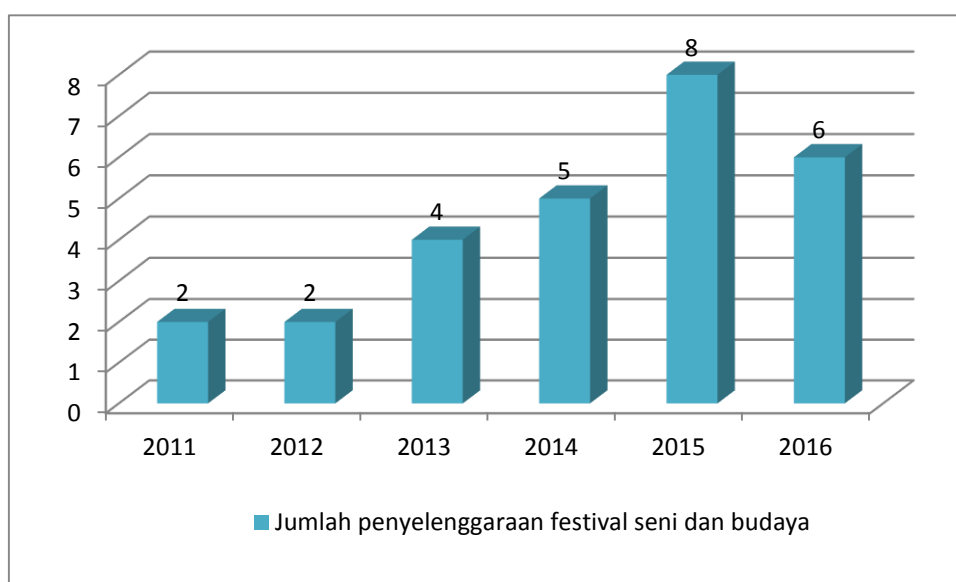
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

1) Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Dalam rangka melestarikan serta mengembangkan budaya asli daerah, pemerintah dengan giat melaksanakan program-program kegiatan budaya yang mendukung tujuan tersebut. Pargelaran seni dan budaya di Kota Pangkalpinang selama tahun 2016 berdasarkan data yang disampaikan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga ada 6 kegiatan, yang artinya terjadi penurunan disbanding tahun 2015 sebanyak 2 kegiatan yang meliputi :

1. Pemilihan Bujang Dayang Tingkat Kota Pangkalpinang,
2. Festival Kesenian Tingkat kota Pangkalpinang, dan

Berikut disajikan data Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kota Pangkalpinang;



Gambar 2.37 Grafik Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya Kota Pangkalpinang Tahun 2011 -2016

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang

2) Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya

Sarana penyelenggaraan seni dan budaya yang biasa digunakan untuk pertunjukkan budaya adalah Alun-alun Taman Merdeka dan Panggung Terbuka Taman Sari. Kedua sarana tersebut berada di posisi yang strategis dan mudah diakses yaitu tepatnya di tengah-tengah Kota Pangkalpinang, akan tetapi yang biasa digunakan secara resmi adalah Panggung terbuka Taman sari, ini berarti baru ada satu sarana tempat penyelenggaraan seni dan budaya.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

3) Rasio Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan

Berikut ini data benda, situs, dan cagar budaya yang ditetapkan di Kota Pangkalpinang :

Tabel 2.34Benda, Situs, dan Cagar Budaya yang Ditetapkan Di Kota
Pangkalpinang Tahun 2016

No.	Benda, Situs, dan Cagar Budaya yang Ditetapkan
1	Rumah Sakit Bhakti Tmah Pangkalpinang/RS. Pusat BTW
2	Wisma Timah I
3	Museum Timah
4	Rumah Residen
5	Menara Air Minum
6	Taman Kota Tamansari/Wilhelmina Park
7	Gereja GPIB Miranatatha Pangkalpinang
8	Masjid jamik
9	Gereja katedral Santo Yoseph
10	Kelenteng Kwan Tie Miaw
11	Kubur Belanda /Kerkof
12	Pemakaman Sentosa
13	Tugu Pergerakan Kemerdekaan
14	Masjid Al-Mukarrom Tuatunu
15	Post, en Telegraaf en Telepondiest/PTTT
16	HCS
17	Kuburan Akek Bandang
18	Perigi Pekasem
19	Makam Keluarga Boen Pet Liem
20	Makam Keluarga Boen Men Chiew
21	Makam Misionaris dan Bruder
22	Makam Tua Tahun 1931 (Makam Keluarga Lay)
23	ELS (Europeesce Lagere School) SMKN 1 Pangkalpinang
24	Societeit Concordia/ Gedung Panti Wangka
25	Gedung Sekolah Budi Mulia

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

No.	Benda, Situs, dan Cagar Budaya yang Ditetapkan
26	Tugu Pendiri Makam Sentosa
27	RUPBASAN (Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara/ Penjara)
28	Jerambah Gantung
29	Rumah Timah Type I
30	Rumah Timah Type II/ Rumah dr. Yudono
31	Gedung Ex Residen Cantoor
32	Kantor PDAM
33	Rumah Lay Nam Sen
34	Meriam
35	Rumah di Kampong Bintang (Rumah Yap Koen Koei)
36	Kantor Pegadaian
37	Pesanggrahan Gubernur (BI)
38	Gudang Garam
39	Loko Museum

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tahun 2017

Rasio benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dihitung dengan membandingkan jumlah benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan per total benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dimiliki daerah dikalikan 100 persen. Berdasarkan Data yang disampaikan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tahun 2017, rasio benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan sebesar 100 persen. Ini artinya dari 39 buah benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan seluruhnya masih dipelihara dengan baik.

Q. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Pelaksanaan urusan kepemudaan dan olahraga bertujuan untuk meningkatkan prestasi kepemudaan dan olahraga serta mengembangkan kerjasama dengan daerah lain dan lembaga yang bergerak dibidang kepemudaan dan dan olahraga. Berikut ini analisa pelaksanaan urusan pemuda dan olahraga di Kota Pangkalpinang :

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

1) Jumlah Organisasi Pemuda

Berikut ini data organisasi kepemudaan yang ada di Kota Pangkalpinang Tahun 2016;

Tabel 2.35 Jumlah Organisasi Pemuda di Kota Pangkalpinang Tahun 2016

No	Nama Organisasi Pemuda	No	Nama Organisasi Pemuda
1	DPD KNPI Kota Pangkalpinang	32	GMPI
2	Karang Taruna Kota Pangkalpinang	33	GM GAKARI
3	PPI Kota Pangkalpinang	34	GPK
4	PMI Kota Pangkalpinang	35	GPPI
5	Kwartir Cabang Gerakan Pramuka	36	GP ANSHOR
6	KONI Kota Pangkalpinang	37	IPPNU
7	Sekolah Sepak Bola (SSB) Tunas Depati Amir	38	IPNU
8	Generasi Muda FKKPI	39	IPM
9	Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan Putra-Putri TNI- POLRI	40	MAPANCAS
10	Forum Semabung Baru Bersatu	41	PEMUDA ISLAM
11	Yayasan Bhakti Pemuda	42	PEMUDA KATOLIK
12	Gerakan Nasional Peduli Anti Narkoba dan Tawuran/(Gepenta)	43	PEMUDA MUHAMMADIYAH
13	Aliansi Pemuda Peduli Rakyat Miskin	44	PEMUDA YUSTISIA
14	AMII (Angkatan Muda Islam Indonesia)	45	PPM
15	AMPI (Angkatan Muda pembaharuan Indonesia)	46	PP
16	BKPRMI	47	PP APRI
17	Pemuda Remaja Masjid Indonesia	48	SAPMA PP
18	BM PAN(Barisan Muda Partai Amanat Nasional)	49	PII
19	FATAYAT NU	50	PMII
20	BMK 57 (Barisan Muda Kristen)	51	WKI
21	GEMA BUDHIS	52	SOKSI
22	GEMA KOSGORO	53	MPI
23	GEMA MKGR	54	HMI (Himpunan Mahasiswa Indonesia)
24	GMKI (Gerakan Muda Kristen Indonesia)	55	NASIYATUL ASIYAH
25	GMNI (Gerakan Muda Nasional Indonesia)	56	IMM
26	PEMUDA DEMOKRAT	57	SAKA KENCANA
27	PMR (Palang Merah Remaja)	58	SAKA DIRGANTARA
28	TAGANA (Taruna Tanggap Bencana)	59	SAKA BAYANGKARA
29	FKPP	60	IBUDYPA
30	SAKA BAHARI	61	GERAKAN PEMUDA INDONESIA MANDIRI
31	SAKA WANABHAKTI		
	Lanjut ke Kolom Berikutnya...		Selesai.

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang Tahun 2017

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH**2) Jumlah Kegiatan Kepemudaan**

Pada tahun 2016, jumlah kegiatan kepemudaan berdasarkan data yang disampaikan dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang Tahun 2016 adalah :

1. Pelatihan dan pelaksanaan paskibraka,
2. Pengiriman Duta Belia Paskibraka
3. Fasilitasi Pekan Tamu Wicara Organisasi Pemuda
 - Jambore Pemuda Daerah
 - Kapal Pemuda Nusantara
 - Pertukaran Pemuda Antar Negara
 - Pemuda Pelopor

3) Jumlah Kegiatan Olahraga

Pada tahun 2016, jumlah kegiatan olahraga berdasarkan data yang disampaikan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang Tahun 2016 adalah :

1. Pembibitan dan Pembinaan Olahraga Berbakat (O2SN)
2. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga (POPDA VIII)
3. Pengembangan Olahraga Rekreasi (Car Free Day)
4. Penyediaan Jasa Penunjang Sarana dan Prasarana Olahraga
5. Pemassalan Olahraga bagi Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat
 - Senam Kesegaran Jasmani (SKJ)
 - Olahraga Tradisional

4) Gelanggang/Balai Remaja

Berdasarkan data yang disampaikan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang Tahun 2016, gelanggang atau balai remaja milik Pemerintah Kota Pangkalpinang berjumlah 2 buah Yaitu :

1. Stadion Dipati Amir
2. Gedung olahraga kecang pedang.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

5) Jumlah Lapangan Olahraga

Berikut ini lapangan olahraga yang ada di Kota Pangkalpinang berdasarkan data yang disampaikan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang Tahun 2016:

Tabel 2.36Jumlah Lapangan Olahraga Tahun 2016

No.	Nama Lapangan Olahraga
1	Bukit Intan Golf Course
2	Executif Putsal
3	Lapangan Sepakbola Bacang Smada
4	Kolam Pemancingan Andika
5	Stadion Depati Amir
6	Arena Panjat Tebing
7	Lapangan Sepak Bola Selindung
8	Amik Atmaluhur Futsal
9	Lapangan Sepakbola Lontong Pancur
10	Lapangan Sepakbola pasir garam
11	Kolam Pemancingan Air Salemba
12	Lapangan Tenis Bukit baru
13	Goor Indor Depati Bahrin
14	VIP Putsal
15	Lapangan Sepakbola Teratai
16	Lapangan Sepakbola Pasir Putih
17	Lapangan Sepakbola KODIM
18	Lapangan Volley Sub Denpom
19	Lapangan Sepakbola SD 16
20	Lapangan Bulu Tangkis Tunas Karya
21	Lapangan Basket ST Yosef
22	Lapangan Bulu Tangkis ST. Tresia
23	Lapangan Basket Pembinaan
24	Lapangan Tenis Bank Mandiri
25	Lapangan Sepak Bola Parit Lalang

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

No.	Nama Lapangan Olahraga
26	Lapangan Tenis Pangcab Pelti
27	Lapangan Voley Taman sari
28	Lapangan Futsal PT. Tmah
29	Lapangan Volly SMA Negeri 3
30	Gedung Centro Futsal
31	Kolam Renang Permata Sriwijaya
32	Lapangan Bulutangkis Gor Indoor Aming
33	Lapangan Bulutangkis Gor Indoor Eksekutive
34	Lapangan Bulutangkis Gor Indoor Pasir Putih
35	Lapangan Bola Volly Gor Indoor Sahabudin
36	Kolam Renang Serrata Hotel
37	Lapangan Basket Gor Indoor Sahabudin
38	Lapangan Bulutangkis Gor Indoor Sahabudin
39	Lapangan Mini Indoor Sepak Bola Gor Indoor Sahabudin
40	Do Jo Karate
41	Arena Tinju Eks Gedung Bulog
42	Lapangan Bulutangkis Gedung PT. Timah TBK
43	Lapangan Bulutangkis Gedung Nasional
44	Lapangan Bulutangkis Indoor Depati Bahrin
45	Lapangan Bola Volly Indoor Depati Bahrin
46	Lapangan Mini Indor Sepak Bola Depati Bahrin
47	Arena Olahraga Tradisional (Gasing)
48	Lapangan Basket Bukit Baru
49	Lapangan Bulutangkis Gedung SKB
50	Kolam Renang BBSC Bukit Baru
51	Lapangan Futsal Waka-waka
52	Hall Fitness BBSC Bukit Baru
53	Lapangan Track Atletik Stadion Depati Amir
54	Gedung SSB Futsal

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang Tahun 2017

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

R. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kota Pangkalpinang menjadi magnet bagi masyarakat pendatang dari daerah lain. Para pendatang dengan keterampilan, pengetahuan, status sosial ekonomi, serta budaya yang berbeda pada akhirnya akan menimbulkan permasalahan sosial ekonomi dan memberi warna dinamika masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri menjadi penting. Berikut ini analisa pelaksanaan urusan tersebut :

1) Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas, dan OKP

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Masa (ormas), dan Organisasi Kepemudaan (OKP) adalah wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dalam proses demokrasi. Untuk eksistensi keberadaan LSM, Ormas dan OKP agar tetap dalam rel reformasi yang tidak disalahartikan maka perlu pembinaan secara berkelanjutan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai tugas dan fungsinya secara rutin melaksanakan pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP yang ada di Kota Pangkalpinang. Dari tahun 2012 hingga Tahun 2016.

Tabel 2.37 Jumlah LSM aktif Kota Pangkalpinang Tahun 2012-2016

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah LSM terdaftar	1	7	8	12	3
2.	Jumlah LSM tidak aktif	-	-	-	-	-
3.	Jumlah LSM aktif (1-2)	1	7	8	12	3

Sumber : Badan Kesbangpol Kota Pangkalpinang tahun 2017

2) Kegiatan Pembinaan Politik Daerah

Pembinaan politik daerah yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang adalah melalui kegiatan forum diskusi Politik. Melalui kegiatan ini, pengurus organisasi kemasyarakatan dan warga masyarakat yang mempunyai kepedulian dan tertarik pada dunia politik dapat berdiskusi dalam satu forum yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang. Diskusi politik dipandu narasumber yang berkompeten. Melalui diskusi diharapkan dapat ditemukan kesamaan persepsi berpolitik yang bijak untuk bersama membangun Kota Pangkalpinang.

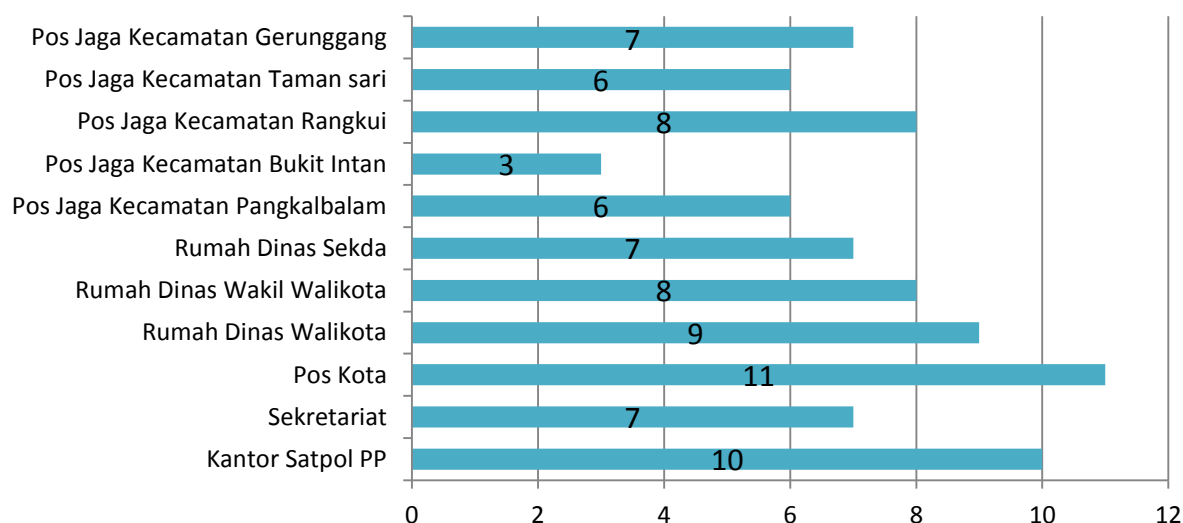
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

S. Urusan Otda, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian merupakan salah satu urusan wajib yang diselenggarakan Pemerintah Kota Pangkalpinang. Analisa terhadap pelaksanaan urusan tersebut dikaji melalui aspek-aspek pendukung berikut ini :

1) Rasio Pamong Praja Per 1.000 penduduk

Berikut ini sebaran personil pamong praja di Kota Pangkalpinang:



Gambar 2.38 Grafik Sebaran Pamong Praja di Kota Pangkalpinang Tahun 2012
(personil)

Sumber : Kantor Satpol PP Kota Pangkalpinang Tahun 2017

Rasio pamong praja per 1.000 penduduk dihitung dengan membandingkan jumlah pamong praja dengan jumlah penduduk Kota Pangkalpinang. Berdasarkan data Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2012, rasio pamong praja adalah 5 pamong praja per 10.000 penduduk. Ini berarti 93 petugas pamong praja melayani 185.830 penduduk Kota Pangkalpinang.

2) Jumlah Linmas Per 1000 Penduduk

Berdasarkan data yang disampaikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang Tahun 2012, jumlah linmas per 1.000 penduduk tidak memenuhi rasio dan hanya mencukupi 3 orang linmas per 10.000 penduduk. Angka ini diperoleh dengan membandingkan jumlah Linmas yang ada di Kota Pangkalpinang sejumlah 20 orang per

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

jumlah penduduk kota sejumlah penduduk 185.830. Angka ini masih jauh dalam memenuhi rasio 1 orang linmas per 1000 penduduk.

3) Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Kelurahan

Rasio pos siskamling dihitung dengan membandingkan jumlah pos siskamling per jumlah kelurahan yang ada di Kota Pangkalpinang. Berdasarkan data yang disampaikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang Tahun 2012, rasio pos siskamling per kelurahan adalah 47,61 persen. Ini berarti dari 42 kelurahan yang ada di Kota Pangkalpinang baru terdapat 20 pos siskamling.

4) Penegakkan Perda

Penegakan Peraturan Daerah (PERDA) diukur dengan membandingkan jumlah penyelesaian penegakan PERDA per jumlah pelanggaran PERDA. Berdasarkan Data Yang disampaikan Kontor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang Tahun 2016, penegakan perda di Kota Pangkalpinang mencapai 100 persen.

H. Cakupan Patroli Petugas Satpol PP

Cakupan Patroli Petugas Satpol PP dilihat dari jumlah patroli petugas Satpol PP pemantau dan penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) dan penyelesaian pelanggaran K3 dalam 24 jam. Berdasarkan data yang disampaikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang Tahun 2016 cakupan Patroli Petugas Satpol PP hampir 99,99 persen.

I. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kota Pangkalpinang

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kota Pangkalpinang Berdasarkan data yang disampaikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang Tahun 2016 mencapai 88 persen. Ini artinya dari 3 pelanggaran K3 yang terjadi di Kota Pangkalpinang seluruhnya dapat terselesaikan dengan baik.

J. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran

Cakupan pelayanan bencana kebakaran dihitung dengan membandingkan jumlah mobil kebakaran dengan banyaknya jumlah penduduk kemudian dikalikan 100 persen. Berdasarkan data yang disampaikan Dinas Kebersihan dan Kebakaran Kota Pangkalpinang Tahun 2015, cakupan pelayanan kebakaran adalah 0,00229 persen. Saat

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

ini jumlah mobil pemadam kebakaran yang dimiliki Pemerintah Kota Pangkalpinang adalah 4 unit yang terdiri dari 3 *fire truck* dan 1 *Jeep fire*.

K. Tingkat Waktu Tanggap (*Respon Time Rate*) Daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (MK)

Tingkat waktu tanggap (*Respose Time Rate*) Daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (MK) di Kota Pangkalpinang Berdasarkan data yang disampaikan Dinas Kebersihan dan Kebakaran Kota Pangkalpinang Tahun 2016 adalah 15 menit. Target tanggap ini mengacu Standar Nasional Indonesia (SNI) dengan radius 7,5 kilometer dari lokasi bencana ke POSKO, setelah pemberitahuan kebakaran. Pada tahun 2015 tercatat 60 kali terjadi bencana kebakaran yang ditangani.

L. Cakupan Prasarana Perkantoran Kelurahan Yang Baik

Prasarana perkantoran yang baik sangat diperlukan dalam rangka memberi pelayanan yang baik kepada masyarakat. Kantor lurah sejak tahun 2010 mengalami peningkatan dari 36 kelurahan menjadi 42 kelurahan. Pemekaran ini merupakan tuntutan masyarakat seiring peningkatan pelayanan dan dinamika masyarakat. Berdasarkan Data yang disampaikan Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, hingga tahun 2010 baru 5 kelurahan yang betul-betul dalam kondisi baik atau baru dibangun/rehab yaitu Kelurahan Batu Intan, Kelurahan Genas, Kelurahan Rawa Bangun, Kelurahan Taman Bunga, dan Kelurahan Selindung. Dengan demikian cakupan prasarana perkantoran kelurahan yang baik baru mencapai 11,90 persen. Cakupan ini terus ditingkatkan melalui Anggaran Tahun 2012 ini mencapai 62 %.

M. Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah

Sistem informasi yang baru dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang adalah e-planning untuk perencanaan daerah dan SIMDA untuk mengelola keuangan daerah.

N. Indeks Kepuasan Layanan Ketahanan Pangan

Indeks Kepuasan Layanan Ketahanan Pangan di Kota Pangkalpinang sampai dengan tahun 2016 belum dilakukan survey.

O. Urusan Ketahanan Pangan

Pangan merupakan kebutuhan yang sangat esensial, atau dengan kata lain sudah menjadi kebutuhan primer bagi manusia, untuk memberikan energi sehingga dapat melakukan aktifitas. Pangan juga merupakan kebutuhan manusia yang pemenuhannya menjadi hak azasi setiap rakyat Indonesia. Penyediaan pangan yang cukup, beragam, bergizi dan berimbang, baik secara kualitas maupun kuantitas merupakan pondasi yang sangat penting dalam pembangunan sumber daya manusia untuk melaksanakan pembangunan.

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Ketahanan pangan dihasilkan oleh suatu sistem pangan yang terdiri atas tiga subsistem, yaitu ketersediaan pangan dalam jumlah dan jenis yang cukup untuk seluruh penduduk, distribusi pangan yang lancar dan mengakses pada masyarakat, konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang, serta memenuhi kaidah kesehatan. Berikut ini analisa pelaksanaan urusan ketahanan pangan:

1) Regulasi Ketahanan Pangan

Paradigma baru pembangunan pangan setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diperbarui dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Perpres No 83 tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan pangan, Perpres Nomor 22 tahun 2009 tentang kebijakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya local adalah bagaimana penyediaan pangan bagi masyarakat yang semula sentralistik lebih dominan pada pertumbuhan ekonomi menjadi desentralistik dengan pertimbangan yang komprehensif, sehingga tujuan pemantapan Ketahanan Pangan Masyarakat dan perbaikan gizi masyarakat lebih terakomodasi. Sebagai tindak lanjut peraturan dan perundang-undangan tersebut Pada tahun 2012 pemerintah kota pangkalpinang telah membuat peraturan Walikota Nomor 44 tahun 2012 tentang program percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal dan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 29 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan minimal bidang ketahanan Pangan.

2) Ketersediaan Pangan Utama

Dipertahankannya ketersediaan energi penduduk sebesar 2.205 Kilokalori/kapita/hari dan ketersediaan energi protein sebesar 77,25 gram/kapita/hari. Dari hasil analisis pada tabel, ketersediaan energi bagi penduduk sebesar 2.205 Kkal/kapita telah terpenuhi pada capaian setiap tahun dengan rata-rata ketersediaan energi sebesar 2.490 Kkal/kapita dan ketersediaan energi protein (protein hewani dan nabati) bagi penduduk telah dipenuhi dengan rata-rata ketersediaan energi protein 130 gram/kapita. Dari target pelayanan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) bidang ketahanan pangan, penyediaan energi penduduk 90% atau sebesar 1980 Kkal/kapita telah dipenuhi pada tahun ke-1 yaitu 2330 Kkal/kapita. Untuk ketersediaan energi protein yang diamanatkan pada SPM Ketahanan Pangan sebesar 90% atau 52 gram/kapita juga telah terpenuhi pada tahun ke-1 dengan capaian 97 gram/kapita ;

Tersedianya cadangan pangan bagi masyarakat yang terdiri dari cadangan pangan pemerintah sebesar 100 ton ekuivalen beras dan cadangan pangan masyarakat sebesar 500 Kg ekuivalen beras di tingkat Rukun Tetangga (RT). Dari analisis kinerja pada tabel, menunjukkan penyediaan cadangan pangan pemerintah yang diamanatkan sebesar 100 ton belum terpenuhi dan untuk cadangan pangan masyarakat juga belum terpenuhi;

Tersedianya informasi pasokan, harga dan akses pangan yang berkesinambungan sepanjang tahun. Dari hasil analisis menunjukkan penyediaan informasi ini 100% atau 52 minggu dalam satu tahun baru dicapai sebesar 24 minggu atau baru tercapai 50% dari amanat SPM Ketahanan Pangan;

Meningkatnya pola konsumsi pangan penduduk sebagai implementasi dari gerakan panganekaragaman konsumsi pangan dengan capaian skor 90 pada tahun 2015. Dari hasil analisis kinerja SKPD pada tabel, capaian pola pangan harapan sampai dengan tahun ke-5 dengan skor 91,6 sedangkan amanat dalam SPM Ketahanan Pangan skor 90 akan dicapai pada tahun 2015;

Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar terhadap peredaran pangan segar hasil pertanian yang beredar belum terpenuhi dari amanat SPM Ketahanan pangan sebesar 80%. Pengawasan peredaran keamanan pangan dari hasil analisis pada tabel baru melayani 2 kecamatan sedangkan amanat SPM Ketahanan pangan minimal pengawasan keamanan pangan dilakukan di 7 kecamatan. Kemudian Intervensi

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

terhadap daerah rawan pangan dengan amanat SPM Ketahanan pangan 60% baru melayani 53% (7 kecamatan 14 kelurahan), sedangkan intervensi penanganan daerah rawan pangan ini seharusnya setiap tahun dapat melayani minimal 60% atau 7 kecamatan 26 kelurahan.

Tabel 2.39Ketersediaan Pangan Kota Pangkalpinang Tahun 2012-2016

No	Ketersediaan Pangan	2012	2013	2014	2015	2016
1	Ketersediaan Energi perkapita (Kkal)	2230		2581,4	2388,76	2205,82
2	Ketersediaan Protein perkapita (gram)	116		94,11	91,26	77,25
3	Cadangan pangan pemerintah (Ton)	1	-		-	17
4	Cadangan pangan masyarakat (Kg)	0	0	0	0	0
5	Ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan (informasi mingguan)	24	40	40	40	20
6	Pola Pangan Harapan (PPH)	89,2		93,9	93,9	91,6
7	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar (sampel)	2		10	9	18
8	Penanganan Daerah Rawan Pangan (kel)	14		6	7	7

Sumber : Kantor Ketahanan Pangan Kota Pangkalpinang Tahun 2017

P. Urusan Pemberdayaan Masyarakat

Urusan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dengan mengikutsertakan peran serta masyarakat dalam mengembangkan potensi kelurahan melalui pengembangan ekonomi daerah. Berikut ini analisa pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat di Kota Pangkalpinang:

1) Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dihitung dengan membandingkan jumlah kelompok binaan LPM dengan jumlah LPM. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Tahun 2016, jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah 60 kelompok binaan.

2) Rata-rata Kelompok Binaan PKK

Jumlah kelompok binaan PKK atau Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang dibina di Kota Pangkalpinang sebanyak 36 kelompok, dengan total jumlah PKK yang ada sebanyak 55 kelompok. Dengan demikian, kelompok PKK yang telah mendapat binaan dari Pemerintah Kota Pangkalpinang adalah 100 persen.

3) Jumlah LSM

Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang aktif di Kota Pangkalpinang sampai dengan Tahun 2016 sejumlah 15 LSM.

4) LPM Berprestasi

LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) berprestasi di Kota Pangkalpinang sebanyak 83,33 persen. Dari 42 LPM yang ada di Kota Pangkalpinang, sebanyak 5 LPM tergolong ke dalam LPM berprestasi.

5) PKK Aktif

Jumlah PKK di Kota Pangkalpinang sebanyak 87 kelompok. Namun dari total PKK yang ada, PKK yang aktif hanya sekitar 55 kelompok.

6) Posyandu Aktif

Posyandu aktif dihitung dengan membandingkan jumlah posyandu aktif per jumlah posyandu dikalikan 100 persen. Data posyandu aktif di Kota Pangkalpinang pada tahun 2016 sejumlah 77,39 persen. Dari 115 posyandu yang ada, sebanyak 75 posyandu masih berjalan dengan lancar baik program maupun kegiatan rutinnya.

7) Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat

Total program pemberdayaan masyarakat di Kota Pangkalpinang sebanyak 14 program. Dari seluruh program tersebut, sejumlah 57,14 persen merupakan swadaya masyarakat yang mendukung program pemberdayaan masyarakat.

8) Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat

Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat ditunjukkan dari banyaknya program pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan dan dipelihara oleh masyarakat, dibandingkan dengan total program pemberdayaan masyarakat yang ada dikalikan 100 persen. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Tahun 2011, pemeliharaan pasca program pemberdayaan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

masyarakat sebesar 100 persen. Ini artinya dari 13 program pemberdayaan masyarakat, seluruhnya masih dikembangkan dan dipelihara oleh masyarakat. Dengan kata lain, kesemua program yang ada masih berjalan dengan baik karena adanya dukungan dan konsistensi dari masyarakat.

Q. Urusan Statistik

Pelaksanaan urusan statistik menekankan pada penyediaan data dan informasi yang akurat dan terbaru dari tahun ke tahun untuk mendukung perencanaan yang berkelanjutan. Data dan informasi tersebut digunakan baik oleh pemerintah daerah maupun pihak swasta dan masyarakat sebagai suatu data dan informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2008-2013 ditetapkan bahwa kebijakan yang berkenaan dengan penyelenggaraan urusan statistik adalah “pengembangan pembaharu/validasi data/informasi yang berkesinambungan”. Pelaksanaan urusan statistik ini mempedomani Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik yang menyatakan bahwa penyelenggara statistik adalah Badan Pusat Statistik (BPS), dan dalam menyelenggarakan statistik dasar, BPS memperoleh dengan cara sensus, survey, kompilasi produk administrasi, dan cara lainnya. Berikut ini analisa pelaksanaan urusan statistik :

1) Penyediaan Buku Pangkalpinang Dalam Angka

Penyusunan Buku Pangkalpinang Dalam Angka (PDA) dilaksanakan tiap tahun. Buku PDA memuat kondisi geografis, pemerintahan, kependudukan, sosial, pertanian, industri, konstruksi, listrik, air minum, perhubungan, telekomunikasi, perdagangan, hotel, restoran, pariwisata, keuangan, perbankan, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Data yang dipublikasi pada PDA tahun 2016 adalah data tahun 2015. Penyusunan Buku PDA dilakukan oleh BPS Kota Pangkalpinang.

2) Buku Produk Domestik Bruto

Penyusunan Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dilaksanakan tiap tahun. Penyusunan buku PDRB di kota Pangkalpinang berdasarkan lapangan usaha dengan mengambil data selama 5 tahun terakhir. Buku PDRB tahun 2016 memuat data PDRB menurut lapangan usaha tahun 2010-2016.

R. Urusan Kearsipan

Urusan kearsipan dan perpustakaan di Kota Pangkalpinang dilaksanakan oleh Kantor Arsip Daerah. Penyelenggaraan urusan ini penting karena arsip merupakan koleksi penyimpanan catatan dan data-data, dan juga merujuk kepada tempat di mana catatan dan data-data ini disimpan. Berikut ini pelaksanaan urusan kearsipan dan perpustakaan di Kota Pangkalpinang:

1) Pengelolaan Arsip Secara Baku

Sistem pengelolaan kearsipan berguna sebagai rekaman sekaligus pertanggungjawaban atas berbagai kegiatan yang telah dilakukan. Sampai dengan tahun 2016, menurut data dari Kantor Perpustakaan dan Arsip seluruh SKPD di lingkungan pemerintah kota pangkalpinang yang berjumlah 31 SKPD telah menerapkan pengelolaan arsip secara baku. Namun secara kualitas sebagian kecil saja yang memenuhi standar terutama dalam hal sarana dan prasarana serta tingkat kepedulian unsur SDM SKPD yang mendukung.

2) Peningkatan SDM Pengelolaan Arsip

Mengingat pentingnya penerapan pengelolaan kearsipan, Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Pangkalpinang pada tahun 2015 dan 2016 telah melaksanakan bimbingan teknis kearsipan, sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta serta lomba pengelola kearsipan.

Kegiatan peningkatan SDM yang dilaksanakan oleh kantor Perpustakaan dan Arsip meliputi :

- Bimbingan teknis kearsipan, berupa pembekalan umum kearsipan dimana peserta terdiri dari pegawai yang bekerja di unit tata usaha/kearsipan di lingkungan SKPD masing-masing dengan peserta berjumlah 40 orang.
- Evaluasi/Penilaian secara langsung melihat secara fisik arsip yang ada di SKPD
- Sosialisasi kearsipan mengenai Tata Kearsipan dengan mendatangkan narasumber ahli dari Kantor Pusat Arsip Nasional Republik Indonesia dengan jumlah peserta sebanyak 35 orang

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

S. Urusan Komunikasi dan Informatika

Berikut ini analisa pelaksanaan urusan komunikasi dan informasi di Kota Pangkalpinang:

1) Jumlah Provider Telekomunikasi Yang Ada di Pangkalpinang

Pilihan layanan komunikasi telepon seluler di Kota Pangkalpinang telah beragam. Beberapa provider (operator seluler) yang eksisting saat ini diantaranya adalah Telkomsel, Axis, Smartfren, XL, PT. Telkom, Indosat, dan Three. Semakin banyaknya pilihan provider ini menjadikan kebutuhan masyarakat akan komunikasi dan informasi semakin mudah dipenuhi, sehingga arus keluar masuk informasi dapat berjalan dengan lancar. Terlebih lagi kesemua provider telekomunikasi tersebut menawarkan paket komunikasi dengan harga bersaing dan dengan *signal* yang cukup stabil.

2) Jumlah Jaringan Komunikasi Kota Pangkalpinang tahun 2013-2016 Ketersediaan layanan Telepon Seluler, layanan Telepon Kabel, Layanan Internet dan Layanan Media Elektronik.

Berdasarkan data dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang pada tahun 2016 terdapat 42 unit jumlah wilayah yang terlayani layanan telepon seluler, 63 BTS, 25 Provider yang tersebar dalam 7 kecamatan.

Tabel 2.39 Jumlah Layanan Telepon Seluler Kota Pangkalpinang Tahun 2016

No	Kecamatan	Layanan Telepon Seluler	Jumlah BTS	Jumlah Provider
1	Bukit Intan	7	17	3
2	Taman Sari	5	5	3
3	Pangkal Balam	5	6	4
4	Rangkui	8	9	5
5	Gerunggang	6	7	3
6	Gabek	6	7	2
7	Girimaya	5	12	5

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang Tahun 2017

Jumlah jaringan Telepon tersedia yang ada di kota Pangkalpinang sebanyak 42 Unit, yang terbagi dalam 7 Kecamatan: Bukit Intan 7 Unit, Taman Sari 5 Unit, Pangkal Balam 5 Unit, Rangkui 8 Unit, Gerunggang 6 Unit, Gabek 6 Unit, Girimaya 5 Unit, sedangkan jumlah jaringan terpasang pada tahun 2016 di kota Pangkalpinang sebanyak 91.950 Unit.

Tabel 2.40Jumlah Jaringan Telepon Terpasang Kota Pangkalpinang Tahun -2016

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah sambungan rumah tangga	91.565
2	Jumlah sambungan perkantoran	170
3	Jumlah sambungan swasta/dunia usaha	215
4	Jumlah telepon umum koin	0
5	Jumlah telepon umum kartu	0
6	Jumlah wartel	0

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang Tahun 2017

Minimnya ketersediaan wartel dilatarbelakangi oleh semakin banyaknya kepemilikan telepon genggam di kalangan masyarakat umum. Semakin terjangkaunya harga telepon genggam disertai dengan tersedianya banyak pilihan atas provider (operator seluler) yang menawarkan menu-menu komunikasi dengan harga miring dan bersaing, menjadikan masyarakat lebih beralih kepada alternatif sarana komunikasi yang lebih mudah dan murah ini. Kalangan pengguna sarana telekomunikasi ini telah menjangkau segala umur mulai dari anak-anak kecil, orang dewasa maupun orangtua. Bahkan penggunaan telepon genggam saat ini bukanlah hal yang mewah lagi, melainkan telah menjadi barang kebutuhan yang biasa. Hal inilah yang melatarbelakangi penurunan ketersediaan jumlah wartel dari tahun ke tahun. Pada tahun 2006 jumlah wartel yang ada sebanyak 66 unit, namun kemudian berkurang menjadi 41 unit pada tahun 2007 hingga akhirnya hanya tersedia 32 unit saja di tahun 2009 dan 2010 sedangkan pada tahun 2013-2016 tidak ada pemasangan jaringan telepon untuk wartel.

Di sisi lain, ketersediaan layanan internet di Pangkalpinang sudah terpasang di semua kecamatan yang ada di Kota Pangkalpinang sebanyak 42 Unit yang tersebar di Bukit intan 7 Unit, Taman Sari 5 Unit, Pangkal Balam 5 Unit, Rangkui 8 Unit, Gerunggang 6 Unit, Gabek 6 Unit, Girimaya 5 Unit. Sedangkan untuk Kantor Pos dikota Pangkalpinang sendiri hanya terdapat 1 Kantor Pos yang berada di Kecamatan Taman Sari, belum terdapat kantor pos pembantu maupun kantor pos keliling. .

3) Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal

Berkembangnya Kota Pangkalpinang sebagai ibukota provinsi yang dinamis didukung oleh tersedianya surat kabar nasional maupun lokal, sebagai sarana praktis penyebaran informasi akurat dan terkini yang berguna bagi dunia pendidikan, dunia usaha, maupun di lingkungan pemerintahan. Surat kabar nasional yang telah menjangkau Kota Pangkalpinang adalah; Koran Nasional: Kompas, Media Indonesia, Republika, Suara Pembaharuan, Seputar Indonesia. Dan Koran Lokal: Bangka Pos, Babel Pos, Rakyat Pos, Radar Bangka, Metro Babel

4) Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal

Saat ini, penyiaran TV lokal yang masuk ke Kota Pangkalpinang disiarkan oleh Bangka TV yang dikelola oleh Pemkab Bangka Induk. Selain siaran TV lokal, terdapat juga siaran radio dari beberapa stasiun radio lokal yang berada di Kota Pangkalpinang adalah untuk radio : Sonora, Palupi, Prima, sedangkan televisi adalah Cable Vision, PT. Pesona Visual Mandiri, PT. Bangka Belitung Televisi Media.

5) Web Site Milik Pemerintah Kota Pangkalpinang

Keberadaan website milik pemerintah daerah berperan dalam mensosialisasikan visi, misi, dan profil daerah serta rencana strategis yang sedang atau akan dijalankan. Website yang dimiliki dan dikelola secara resmi oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

1. www.pangkalpinangkota.go.id

Website ini dikelola oleh DISHUBKOMINFO Kota Pangkalpinang.

2. www.dinpendikpkp.go.id

Website ini dikelola oleh Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang, yang memuat tugas, pokok dan fungsi Dinas Pendidikan. Selain itu website ini juga memuat informasi penting mengenai profil pendidikan Kota Pangkalpinang, Kalender Pendidikan serta bank soal gratis mulai dari SD hingga SMU, yang dapat didownload dengan mudah.

3. www.tampukpinang.info.go.id

Website ini dikelola oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang. Tujuan utama website ini bertujuan sebagai ajang promosi wisata Kota Pangkalpinang kepada daerah-daerah lain. Website ini memuat berbagai informasi

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

penting mengenai pariwisata dan budaya khas Kota Pangkalpinang seperti informasi tentang transportasi, hotel, bank, restoran, agen perjalanan, toko souvenir hingga daftar rumah sakit. Selain itu dimuat pula beragam tempat wisata yang ada di Kota Pangkalpinang, lengkap dengan peta wisata.

4. www.bappeda.pangkalpinangkota.go.id

Website ini dikelola oleh Bappeda Kota Pangkalpinang.

5. www.lpse.pangkalpinangkota.go.id

website ini untuk melayani proses pengadaan secara online berdasarkan Perpres NO 54 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

T. Fokus Layanan Urusan Pilihan

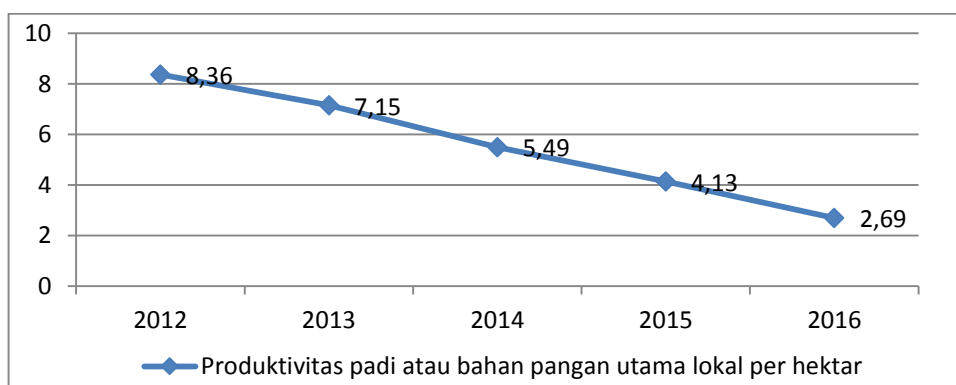
Berikut ini urusan pilihan berikut indikator pelaksanaan yang diselenggarakan Pemerintah Kota Pangkalpinang:

A. Urusan Pertanian

Berikut ini analisa pelaksanaan urusan pertanian di Kota Pangkalpinang :

1. Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Lokal Per Hektar

Komoditas padi di Kota Pangkalpinang produksinya tidak ada sama sekali. hal ini dikarenakan, Kota Pangkalpinang tidak berpotensi untuk penanaman padi. Untuk kebutuhan beras mendapat pasokan dari daerah lain disekitar wilayah Kota Pangkalpinang.



Gambar 2.39 Grafik Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal per hektar Kota Pangkalpinang Tahun 2012-2016

Sumber : BPS Kota Pangkalpinang Tahun 2017

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Tahun 2016, Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal per hektar Kota Pangkalpinang mencapai 2,695 ton per hektar. Angka ini menurun dari tahun sebelumnya 4,13 yaitu ton per hektar. Penurunan ini dipengaruhi oleh mulai berkurangnya luas areal tanam yaitu sebesar 11 ha yang tahun sebelumnya seluas 14 ha.

Bahan makanan di kota pangkalpinang yang menonjol ialah tanaman ubi kayu, sedangkan tanaman padi tidak dibudidayakan karena terbatasnya sumber daya lahan yang ada di Kota Pangkalpinang.

2. Kontribusi Sektor Pertanian/perkebunan Terhadap PDRB

Sektor pertanian pada PDRB meliputi sektor tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan dan hasil-hasilnya, serta perikanan. Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB dihitung dengan membandingkan jumlah kontribusi sektor pertanian/perkebunan per jumlah PDRB dikalikan 100 persen. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang tahun 2012-2016, Kontribusi sektor pertanian/perkebunan adalah :

Tabel 2.41 Kontribusi Sektor Pertanian/perkebunan Terhadap PDRB Tahun 2012-2016

SEKTOR	2012	2013	2014	2015	2016
Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	5,19	5,01	4,99	4,99	4,98

Sumber : BPS, Kota Pangkalpinang

3. Kontribusi Sektor Tanaman Pangan Terhadap PDRB

Sektor tanaman pangan di Kota Pangkalpinang dikelompokkan pada sektor tanaman bahan makanan. Subsektor ini meliputi kegiatan penyiapan dan pelaksanaan penanaman, pembibitan, pemeliharaan dan pemanen hasil-hasil pertanian tanaman pangan seperti: padi, jagung, ketela pohon, ketela rambat, kacang tanah, kacang hijau, kacang kedelai, buah dan sayur. Berikut ini data kontribusi sektor pertanian/bahan pangan di Kota Pangkalpinang :

Tabel 2.42 Kontribusi Sektor Tanaman Pangan Terhadap PDRB

SEKTOR	2012	2013	2014	2015	2016
Tanaman Pangan	0,17	0,18	0,18	0,18	0,18

Sumber : BPS, Kota Pangkalpinang

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

4. Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB

Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB Kota Pangkalpinang belum mencapai satu persen. Jumlah produksi perkebunan yang masih sangat kecil dikarenakan area perkebunan di kota Pangkalpinang merupakan perkebunan berskala kecil.

Tabel 2.43 Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB

SEKTOR	2012	2013	2014	2015	2016
Tanaman Perkebunan	1,48	1,44	1,55	1,49	1,48

Sumber : BPS, Kota Pangkalpinang

U. Energi dan Sumber Daya Mineral

Salah satu urusan pilihan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Pangkalpinang adalah energi dan sumber daya mineral. Dalam pelaksanaan urusan ini, kegiatan yang baru dilaksanakan sampai dengan tahun 2010 yaitu: (1) inventarisasi dan pengumpulan data bidang sumber daya mineral, (2) inventarisasi data badan usaha/instansi pemilik pembangkit, dan (3) pengumpul data terkait bidang kelistrikan. Untuk pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pertambangan belum dilaksanakan. Hal ini mengingat tidak ada kawasan khusus yang ada di Kota Pangkalpinang yang ditetapkan sebagai kawasan pertambangan.

Berikut ini analisa terhadap pencapaian terhadap pelaksanaan urusan sumber daya mineral dan energi di Kota Pangkalpinang:

1. Pertambangan Tanpa Ijin

Pertambangan tanpa ijin dihitung dengan membandingkan luas areal penambangan liar yang ditertibkan per luas areal penambangan liar dikali 100 persen. Berdasarkan data yang ada, tidak ditemukan luas areal pertambangan di Kota Pangkalpinang.

2. Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB

Sektor ini meliputi usaha penggalian, pengeboran, pencucian, pengambilan dan pemanfaatan segala macam barang tambang dan barang galian yang tersedia di dalam tanah baik yang berupa benda padat, benda cair, maupun gas.

Produksi timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan komoditas primadona yang menjadi andalan dalam hal kontribusi terhadap pendapatan regional disamping produksi koalin dan sektor penggalian lainnya. Namun, sektor pertambangan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

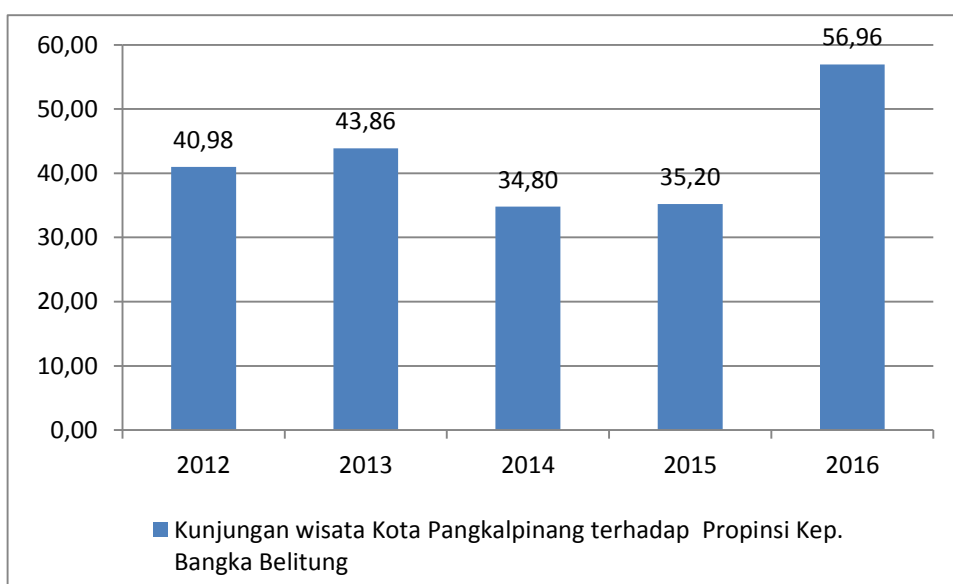
dan penggalian tidak dimasukan sebagai komponen penghitungan PDRB Kota Pangkalpinang. Hal ini dikarena lokasi pertambangan pada umumnya berada diluar wilayah Kota Pangkalpinang. Hal ini berdasarkan pada konsep *production originated* yang sudah merupakan kesepakatan dalam penyusunan PDRB.

V. Pariwisata

Berikut ini analisa pelaksanaan urusan pariwisata di Kota Pangkalpinang:

1. Kunjungan Wisata

Jumlah kunjungan wisata dihitung dengan membandingkan capaian kinerja kunjungan wisata se-Kota Pangkalpinang dengan Jumlah seluruh kunjungan Wisata se-Kota Pangkalpinang dikalikan 100 persen. Berdasarkan data yang disampaikan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga tahun 2016, kunjungan wisata Kota Pangkalpinang mencapai 56,96 persen. Ini berarti, capaian kinerja kunjungan wisata mencapai 198.008 wisatawan. Jika dibandingkan jumlah kunjungan wisatawan di Propinsi Bangka Belitung maka Kota Pangkalpinang mempunyai kontribusi sebesar 56,96 persen dari seluruh kunjungan sebanyak 347.619 kunjungan.



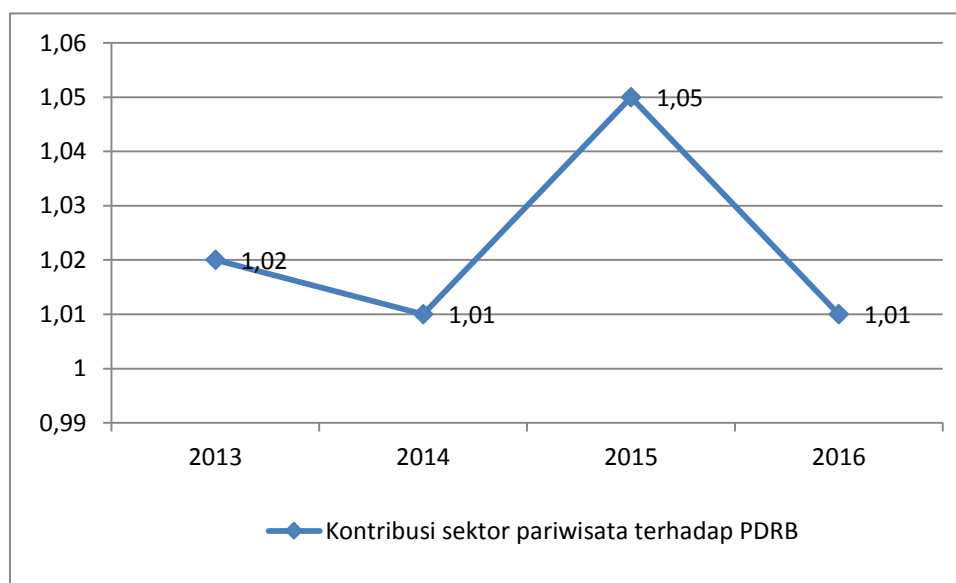
Gambar 2.40 Grafik Kunjungan wisata Kota Pangkalpinang terhadap Provinsi Kep. Bangka Belitung tahun 2012-2016

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang 2017

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2. Kontribusi Sektor Pariwisata

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kota Pangkalpinang dihitung dengan membandingkan jumlah kontribusi PDRB dari sektor pariwisata per jumlah PDRB Kota Pangkalpinang dikalikan 100 persen. Berdasarkan data yang disampaikan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Pangkalpinang tahun 2016, kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB di Kota Pangkalpinang sebesar 1,01 persen.



Gambar 2.41 Grafik Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB di Kota Pangkalpinang Tahun 2013-2016

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang 2017

W. Urusan Kelautan dan Perikanan

Urusan kelautan dan perikanan merupakan keunggulan komperatif untuk jangka pendek dan jangka panjang. Hal ini dikarenakan, sektor tersebut merupakan sektor yang erat hubungannya dengan mata pencarian penduduk Kota Pangkalpinang dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan dan nutrisi dalam jumlah mutu yang dibutuhkan serta tingkat harga yang terjangkau.

Berikut ini analisa pelaksanaan urusan kelautan dan perikanan di Kota Pangkalpinang :

1. Produksi Perikanan

Sektor kelautan dan perikanan Kota Pangkalpinang masih sangat potensial karena mempunyai wilayah penangkapan ikan/sumber daya ikan yang cukup baik dan masih

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

mempunyai prospek yang cukup cerah dalam pengembangannya, apabila pemanfaatan dan pengolahan sumber daya ikan tersebut di kelola secara optimal.

Perairan umum di Kota Pangkalpinang terdiri dari Sungai Muara Baturusa, Sungai Rangkui, Sungai Selindung, Sungai Air Mawar, dan kolong-kolong bekas penambangan dengan luas sekitar 285 hektar.

Secara geografis Kota Pangkalpinang terletak pada posisi yang sangat strategis yaitu berada di tengah-tengah Pulau Bangka dan dekat dengan pulau Sumatera, Jawa, serta Kalimantan.

Kegiatan penangkapan ikan di Kota Pangkalpinang sebagian besar didominasi oleh nelayan usaha kecil dengan menggunakan kapal motor dengan bobot 1 sampai 10 GT, dengan alat tangkap seperti: jaring, pancing, bubu dan alat tangkap lainnya. Jumlah alat tangkap perikanan di Kota Pangkalpinang hingga Tahun 2010 berjumlah 1.095 dengan rincian sebagai berikut :

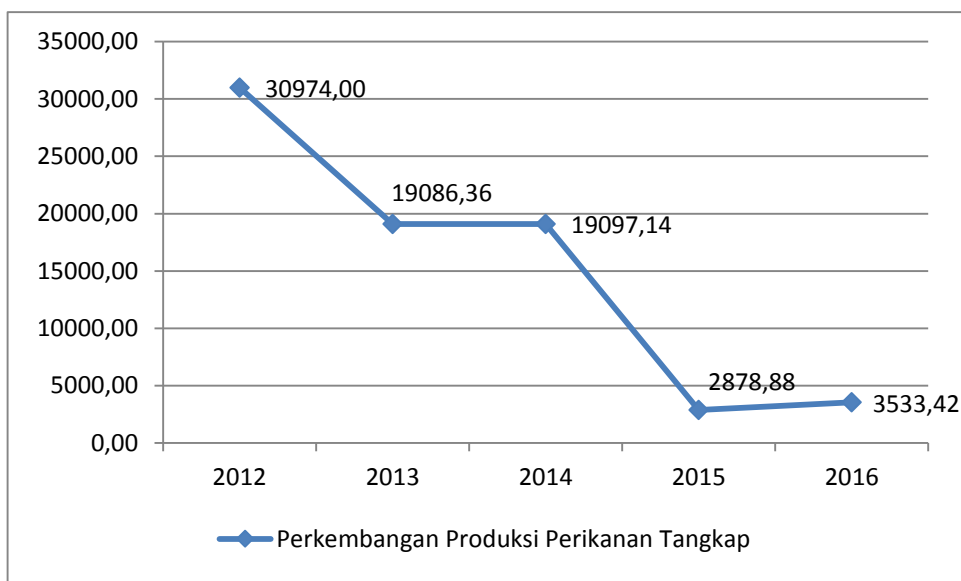
Tabel 2.44 Alat Tangkap Ikan Di Kota Pangkalpinang tahun 2016

No.	Jenis Alat Tangkap	Jumlah (unit)
1	Payang	842 Unit
2	Jaring Lingkar bertali kerut (Pukat Cincin)	10 Unit
3	Jaring insang tetap/jaring lion bun	47 Unit
4	Jaring insang hanyut	306 Unit
5	Jaring insang berlapis	37 Unit
6	Bubu	105 Unit
7	Bubu bersayap	323 Unit
8	Togo	173 Unit
9	Pancing Ulur	238 Unit
10	Pancing Cumi	18 Unit
Jumlah		2.099 Unit

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kota pangkalpinang Tahun 2017

Adapun nelayan yang terdata di Kota Pangkalpinang adalah sebanyak 3.533 jiwa. Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Pangkalpinang (200.326 jiwa), maka persentase penduduk sebagai nelayan adalah 1,76 persen. Berikut ini data perkembangan produksi perikanan tangkap di Kota Pangkalpinang :

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH



Gambar 2.42 Grafik Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap Di Kota Pangkalpinang Tahun 2012-2016

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang Tahun 2017

Selain dari hasil tangkapan, produksi perikanan juga dihasilkan dari budidaya. Berikut ini produksi ikan hasil budidaya masyarakat Kota Pangkalpinang Tahun 2013-2016 :

Tabel 2.45 Perkembangan Produksi Perikanan Budidayadi Kota Pangkalpinang Tahun 2013- 2016

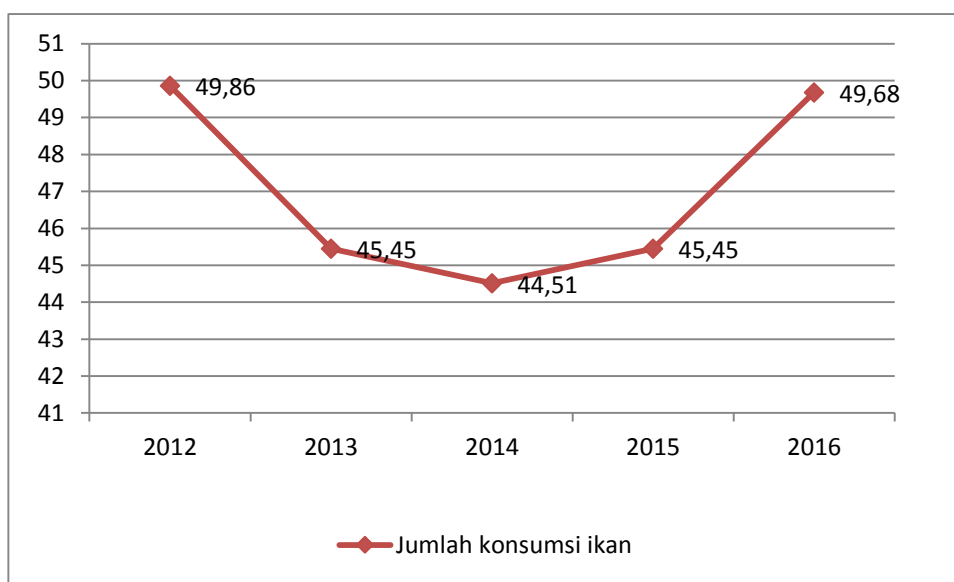
No.	Komoditas	Produksi Tahun 2013 (ton)	Produksi Tahun 2014 (ton)	Produksi Tahun 2015 (ton)	Produksi Tahun 2016 (ton)
1	Lele	14,63	20,09	0,18	64,15
2	Nila	3,18	1,83	1,38	2,39
3	Patin	8,71	11,19	5,20	27,99
4	Gurame	0,10	0,57	0,08	0,32
5	Mas	0,16	0,17	-	-
6	Bawal Tawar	0,60	-	-	-
7	Vannamei	67,91	60,82	91,09	1,74
8	Kepiting	3,84	3,17	1,61	1,13
9	Bandeng	-	-	-	-
Jumlah		99	98	100	98

Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2017

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2. Konsumsi Ikan

Produksi perikanan Kota Pangkalpinang pada tahun 2016 adalah sebesar 3.553,42ton dengan jumlah konsumsi sebanyak 49,68 Kg/tahun/kapita. Perkembangan jumlah konsumsi ikan di Kota Pangkalpinang Tahun 2012 sampai dengan 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :



Gambar 2.43 Grafik Jumlah konsumsi ikan di Kota Pangkalpinang Tahun 2012-2016 (kg/tahun/kapita)

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang tahun 2017

Wilayah kota Pangkalpinang yang dekat dengan daerah pantai mencipta Karakter penduduk Kota Pangkalpinang yang kebanyakan gemar mengkonsumsi ikan. Jumlah konsumsi ikan oleh penduduk Kota Pangkalpinang berdasarkan data yang disampaikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang dari tahun ke tahun selalu mengalami fluktuatif. Jumlah konsumsi ikan tahun 2012 sebesar 49,86, mengalami penurunan pada tahun 2013-2015 mengalami penurunan dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2016 sebesar 49,68.

X. Urusan Perdagangan

Peranan sektor industri dan perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Pangkalpinang cukup dominan. Besarnya peranan kedua sektor tersebut juga memberikan gambaran struktur ekonomi sebagai kota jasa dan perdagangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Salah satu indikator ekonomi makro daerah dan struktur

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

ekonomi Kota Pangkalpinang adalah PDRB yang menggambarkan kemampuan daerah dalam menghasilkan barang dan jasa untuk konsumsi domestik maupun ekspor.

Berikut ini analisa pelaksanaan urusan pilihan perdagangan dan perindustrian di Kota Pangkalpinang :

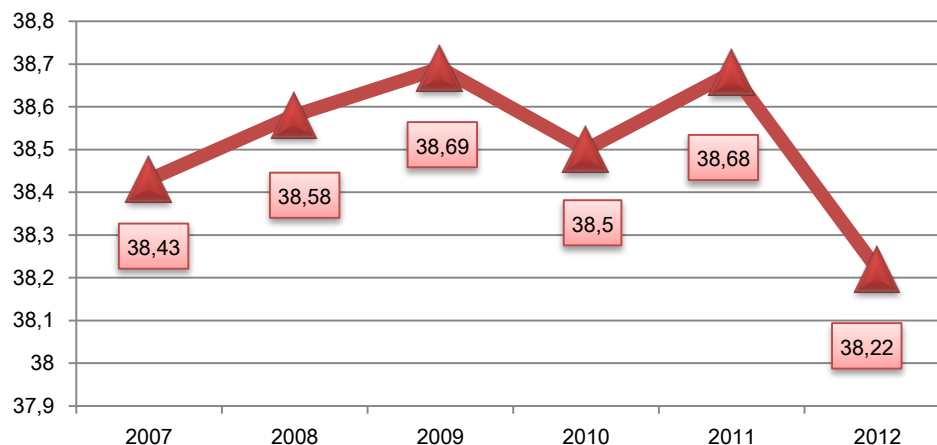
1. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan sektor ekonomi unggulan yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam aktivitas ekonomi, dikarenakan memang Kota Pangkalpinang merupakan kota dengan orientasi perdagangan dan jasa. Terlihat pada kontribusi sektor ini mencapai rata-rata 36 persen dalam pembentukan nilai tambah Kota Pangkalpinang setiap tahunnya. Berikut ini kontribusi sektor perdagangan dalam pembentukan PDRB Kota Pangkalpinang.

Tabel 2.46 Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

SEKTOR	2012	2013	2014	2015	2016
Perdagangan	27,07	25,65	25,64	26,39	27,03

Sumber : BPS, Kota Pangkalpinang



Gambar 2.44 Grafik Kontribusi Sektor Perdagangan (Berdasarkan Harga Berlaku)
Tahun 2007-2012

Sumber: BPS Kota Pangkalpinang, PDRB Tahun 2008-2012

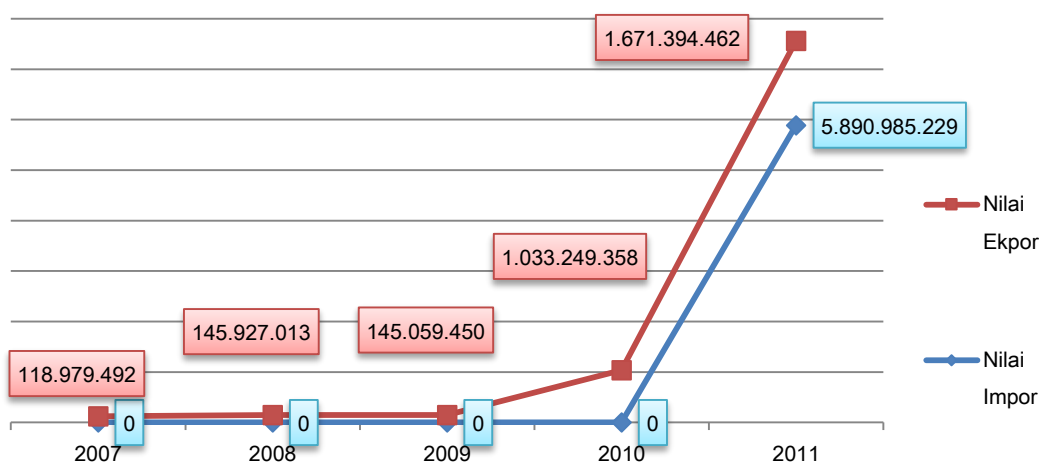
Pada tahun 2010, subsektor perdagangan besar dan eceran memberikan kontribusi terbesar pada PDRB Kota Pangkalpinang yaitu sebesar 38,50 persen. Pertumbuhan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

subsektor ini tahun 2010 sebesar 6,58 persen. Namun selama 5 tahun terakhir rata-rata pertumbuhannya sebesar 4,28 persen, di bawah pertumbuhan tahun 2010.

2. Ekspor Bersih Perdagangan

Nilai ekspor bersih adalah hasil ekspor suatu daerah setelah dikurangi dengan nilai impor suatu daerah. Ekspor merupakan injeksi pendapatan dalam negeri karena menaikkan nilai investasi, sedangkan impor merupakan bocoran pendapatan dikarenakan terjadi aliran modal ke luar negeri. Nilai impor Kota Pangkalpinang pada tahun 2011 lebih besar dari pada nilai ekspor dikarenakan banyak bahan baku terutama bahan pangan masih didatangkan dari luar daerah sehingga nilai ekspor bersih masih negatif. Data ekspor bersih kota Pangkalpinang belum dapat di hitung karena belum ada data yang tersedia.



Gambar 2.45 Grafik Nilai Ekspor dan Impor Kota Pangkalpinang Tahun 2007 – 2011

Sumber : Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang

*) Keterangan : Data Impor yang tersedia hanya tahun 2011

Nilai ekspor Kota Pangkalpinang dari tahun 2007 sampai dengan 2011 selalu mengalami kenaikan. Sedangkan data nilai impor baru dapat diketahui pada tahun 2011 yaitu sebesar Rp5.890.985.229, dimana nilai ekspor sebesar Rp1.671.394.462 sehingga nilai bersih ekspor bernilai negatif.

Y. Urusan Perindustrian

Berikut ini analisa pelaksanaan urusan perindustrian di Kota Pangkalpinang :

1. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB

Seringkali sektor industri pengolahan dikaitkan dengan kemajuan suatu wilayah, terutama dalam hal ketangguhan struktur sebagai titik tolak telaah bagi pertumbuhan berkelanjutan. Sektor industri pengolahan dibagi dalam dua sub sektor yaitu subsektor industri migas dan industri non migas. Subsektor industri migas terbagi dalam dua kelompok yaitu pengilangan minyak bumi dan gas alam cair. Kedua kelompok sub sektor ini tidak terdapat di Kota Pangkalpinang, oleh karena itu kontribusi dan laju pertumbuhan pada subsektor ini nol.

Subsektor industri pengolahan non migas terbagi atas sembilan kelompok yaitu makanan, minuman dan tembakau; tekstil, barang dari kulit dan alas kaki; barang kayu dan hasil hutan lainnya; kertas dan barang cetakan; pupuk, kimia dan barang dari karet; semen dan barang galian bukan logam; logam dasar besi dan baja; alat angkutan, mesin dan peralatannya; barang lainnya.

Berikut ini kontribusi sektor industri pengolahan terhadap struktur perekonomian Kota Pangkalpinang :

Tabel 2.47 Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB

SEKTOR	2012	2013	2014	2015	2016
Industri Pengolahan	22,16	21,82	20,89	19,05	17,83

Sumber : BPS, Kota Pangkalpinang

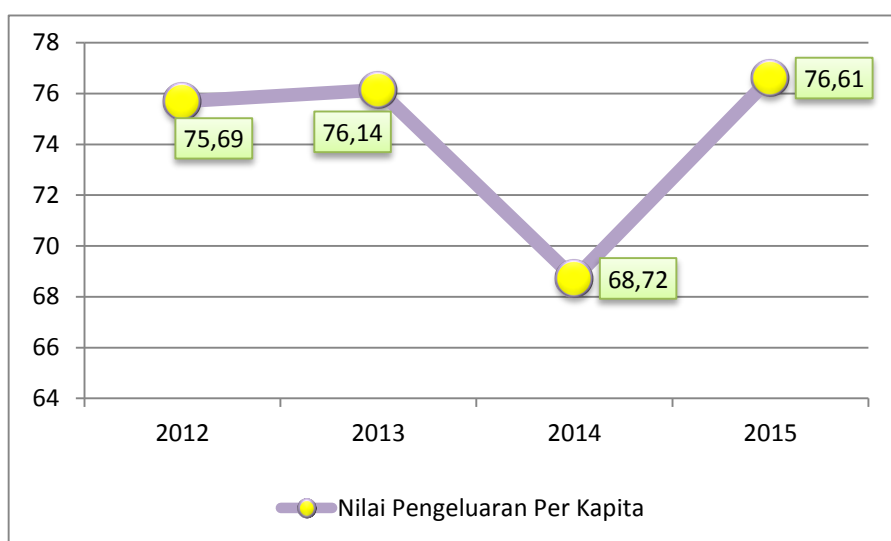
2. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

3. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita

Pengukuran standar hidup layak masyarakat di suatu wilayah diukur melalui kemampuan daya beli masyarakat. Tingkat daya beli masyarakat dihitung dari nilai pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan. Nilai pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan ini telah memperhitungkan aspek pemerataan pendapatan/distribusi penduduk Kota Pangkalpinang. Data mengenai pengeluaran per kapita masyarakat Kota Pangkalpinang dijabarkan pada tabel berikut ini :



Gambar 2.46 Grafik Nilai Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan Kota Pangkalpinang 2011-2015

Sumber: BPS Kota Pangkalpinang, Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2016

Meskipun tidak terlalu signifikan, kemampuan daya beli masyarakat Kota Pangkalpinang dalam kurun waktu Tahun 2012 – 2015 mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan dari peningkatan pengeluaran per kapita yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Nilai pengeluaran per Kapita tersebut dihitung berdasarkan standar harga Kota Pangkalpinang dan berdasarkan data pengeluaran atau konsumsi rumah tangga berdasarkan hasil survey ekonomi nasional tahun 2006 sampai dengan 2010. Pengeluaran per kapita pada Tahun 2016 tercatat sebesar 80,76 juta atau 6,73 juta rupiah per bulan. Nilai ini paling lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kenaikan pengeluaran per kapita masyarakat tersebut secara tidak langsung mengindikasikan kenaikan kesejahteraan masyarakat Kota Pangkalpinang.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH**2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD**

Evaluasi capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kota Pangkalpinang dilaksanakan dalam rangka mengidentifikasi isu-isu-isu strategis yang harus diatasi dalam rangka merumuskan permasalahan untuk dasar penyusunan prioritas pembangunan dan sasaran pembangunan.

Berikut ini disampaikan hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah dalam bentuk matrik Lampiran Tabel Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1 Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Tabel 2.48 Prioritas Pembangunan Pada Tahap 5 Tahun Ketiga
Kota Pangkalpinang

No.	Bidang	Prioritas
1	Kerjasama	Mencakup kerjasama antar dinas dan kerjasama antar pemerintah daerah
2	Ekonomi	<p>Daya dukung utilitas</p> <p>Kelayakan dan kesinambungan program dan alokasi anggaran</p> <p>Mengurangi dampak eksternalitas pembangunan</p> <p>Penanganan lingkungan hidup</p>
3	Peran dan Kontribusi	Tahap <i>empowerment</i> , dimana peranan pelaku pembangunan selain pemerintah yaitu : pengusaha, wanita dan partisipasi masyarakat secara umum di dalam proses pembangunan agar manfaat dan keuntungan dari keberhasilan pembangunan dapat terus terjaga dan tetap berkesinambungan
4	Pemerintah	<p>Peningkatan sistem penjenjangan karir yang baik dengan tupoksi yang jelas</p> <p>Memperhatikan kebutuhan pelayanan publik</p> <p>Alokasi anggaran untuk pemerintah dan DPRD harus tetap terjaga dengan baik</p>
5	Keamanan dan eksternalitas negatif	Diperlukan sebuah supremasi hukum yang tegas untuk menindak pelaku kejahatan tersebut
6	Sistem Informasi	Jaringan informasi yang berkualitas dan baik untuk mendukung kegiatan perekonomian Kota Pangkalpinang yang sebagian besar digerakkan oleh sektor jasa dan perdagangan

Sumber : RPJP-D Kota Pangkalpinang, Tahun 2007-2025

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Tabel 2.50 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

NO	URUSAN	PERMASALAHAN		ISU STRATEGIS
1	Pendidikan	1	Masih kurang memadainya tingkat kompetensi serta jaminan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan	Peningkatan mutu dan layanan pendidikan Sarana dan prasarana pendidikan Kualitas dan kuantitas tenaga pendidik
		2	Satuan pendidikan yang ada belum sepenuhnya mendukung/sejalan (<i>link and match</i>) dengan visi daerah	
		3	Manajemen berbasis sekolah yang masih kurang	
		4	Masih kurangnya sarana dan prasarana pendidikan	
		5	Masih kurangnya tenaga pendidik yang berkualifikasi S1 sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Sisdiknas	
2	Kesehatan	1	Pelayanan kesehatan yang belum maksimal	Derajat kesehatan masyarakat Jangkauan dan biaya pelayanan kesehatan Pangkalpinang sehat
		2	Puskesmas banyak yang belum memiliki standar mutu	
		3	Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana kesehatan.	
		4	Masih rendahnya perilaku dan kemandirian masyarakat pada upaya promotif dan preventif dibidang kesehatan	
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Perlunya pengendalian dan penanggulangan banjir dan rob terpadu dan sistemik di Kota Pangkalpinang.	Pengendalian banjir Pemanfaatan dan pengelolaan air bersih Penataan kota secara komprehensif
		2	Sistem drainase yang belum tertata dengan baik	
		3	Penataan kota yang belum optimal	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

NO	URUSAN	PERMASALAHAN		ISU STRATEGIS
		4	Pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat serta penjagaan kualitas dan kuantitas sumber daya air yang masih belum memadai	Alih fungsi lahan Bangunan liar Ketidaksesuaian tata ruang
		5	Masih banyaknya pelanggaran tataruang serta belum optimalnya penegakan perda yang berkaitan dengan tataruang	
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman		Masih terkendalanya upaya-upaya perbaikan permukiman kumuh, peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap konsep rumah sehat, meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan perumahan yang sehat, dan mendorong investasi swasta dalam pengadaan rumah sehat sederhana.	Usaha perbaikan lingkungan Kumuh Keterlibatan berbagai pihak dalam pengadaan rumah sehat
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1	Belum optimalnya penguatan lembaga sosial dan politik masyarakat	Penguatan kelembagaan sosial dan politik Penegakan perda Pemeliharaan kamtibmas
		2	Masih sering terjadinya pelanggaran Perda	
		3	Kualitas Sumber Daya Aparatur Linmas yang masih kurang	
6	Sosial	1	Belum meratanya kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi PMKS serta bantuan dan rehabilitasi sosial korban bencana.	Kemiskinan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) Mitigasi Bencana Peran serta berbagai pihak dalam penanggulangan kemiskinan
		2	Pemberdayaan warga miskin dan PMKS yang belum maksimal	
		3	Belum maksimalnya prakarsa dan peran aktif masyarakat termasuk masyarakat mampu, dunia usaha, perguruan tinggi, dan Orsos/ LSM dalam penyelenggaraan	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

NO	URUSAN	PERMASALAHAN		ISU STRATEGIS
			pembangunan kesejahteraan sosial secara terpadu dan berkelanjutan	
7	Tenaga Kerja	1	Masih rendahnya kualitas tenaga kerja.	Pengangguran Konflik perburuhan
		2	Belum maksimalnya peran lembaga pelatihan/ketrampilan dan penyalur tenaga kerja.	
		3	Masih rendahnya akses informasi bursa kerja baik dalam negeri maupun luar negeri.	
		4	Perselisihan antara perusahaan dan buruh serta masih rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja	
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang belum maksimal.	Pengutamaan gender Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
9	Pangan	1	Masyarakat masih mengutamakan nasi sebagai bahan pokok	Ketersediaan bahan pangan Keanekaragaman pangan
		2	Distribusi bahan pangan yang kurang lancar.	
		3	Ketersediaan dan kualitas bahan pangan belum mencukupi.	
10	Lingkungan Hidup	1	Pengelolaan pemanfaatan potensi sumberdaya alam/hutan kota yang belum optimal.	Pengelolaan hutan kota secara komprehensif
		2	Rehabilitasi sumberdaya alam/ hutan kota yang masih harus menjadi perhatian	
11	Pertanahan	1	Masih belum tertibnya administrasi pertanahan serta masih adanya masalah-	Konflik kepentingan pertanahan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

NO	URUSAN	PERMASALAHAN		ISU STRATEGIS
			masalah atau konflik pertanahan yang masih belum terselesaikan	
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Terkelolanya administrasi kependudukan berbasis Single Identification Number dan pencatatan sipil dalam kerangka keseimbangan persebaran penduduk.	Administrasi Kependudukan
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	Kelembagaan masyarakat yang masih lemah	Budaya gotong royong masyarakat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan
		2	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan wilayah yang masih kurang	
		3	Peran serta masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana prasana wilayah, proses kelurahan dan institusi kemasyarakatan lainnya agar mampu mengidentifikasi permasalahan dan potensi masyarakat yang ada dan mampu mempengaruhi proses pengambilan keputusan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan publik, serta mampu menjawab permasalahan yang berkembang dalam lingkungannya yang masih rendah	
14	Perhubungan		Arus barang dan jasa yang kurang lancar	Pelabuhan laut yang representatif
15	Komunikasi dan informatika	1	Belum terciptanya proses komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat secara intens.	Keterbukaan informasi publik Kualitas SDM bidang komunikasi dan informasi
		2	Kualitas SDM bidang komunikasi dan informasi yang belum memadai.	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

NO	URUSAN	PERMASALAHAN		ISU STRATEGIS
16	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1	Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) yang masih belum optimal.	Usaha Pemberdayaan Koperasi dan UMKM secara komprehensif
		2	Fasilitasi akses permodalan KUMKM kurang lancar.	
		3	Manajemen pengelolaan KUMKM yang belum sempurna	
17	Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Masih rendahnya iklim yang kondusif, peningkatan investasi/ penanaman modal, pemberdayaan BUMD dan optimalisasi manajemen aset daerah.	<p>Daya Saing Daerah</p> <p>Infrastruktur Kawasan Industri</p> <p>Insentif dan disinsentif investasi</p>
18	Kepemudaan dan Olahraga	1	Peran organisasi kepemudaan terutama di bidang pembangunan masih kurang	<p>Prestasi dan budaya olah raga</p> <p>Potensi dan partisipasi pemuda</p>
		2	Masih rendahnya aktivitas di bidang kebudayaan dan prestasi olah raga	
		3	Sarana prasarana olah raga berskala nasional dan internasional masih kurang.	
19	Statistik	1	Belum optimalnya pengembangan dan unifikasi data/ informasi statistik daerah.	<p>Akurasi data</p> <p>Unifikasi dan kodifikasi data</p>
		2	Kualitas data dan informasi statistik yang masih kurang memadai.	
		3	Sarana dan prasarana penyediaan data dan informasi statistik daerah yang masih kurang	
20	Kebudayaan		Belum optimalnya upaya pengembangan dan pelestarian sejarah, nilai budaya, permuseuman, kesenian dan perfilman	Lunturnya nilai-nilai budaya dan kesenian tradisional dikalangan masyarakat

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

NO	URUSAN	PERMASALAHAN		ISU STRATEGIS
				Cagar budaya dan bangunan bersejarah
21	Perpustakaan	1	Perpustakaan masih bersifat konvensional	Sarana dan prasarana perpustakaan Pengelolaan perpustakaan
		2	Manajemen perpustakaan yang belum optimal	
		3	Kualitas sarana dan prasana perpustakaan yang masih perlu menjadi perhatian.	
22	Kearsipan	1	Manajemen pelayanan arsip yang belum sempurna.	Manajemen pengelolaan arsip Kualitas SDM pengelola arsip
		2	Masih adanya arsip yang tidak terpelihara dan terawat dengan baik	
		3	SDM pengelolaan arsip yang kurang memadai.	
		4	Sarana dan prasarana pengelolaan arsip yang masih kurang.	
23	Fungsi Penunjang Perencanaan		Masih kurang efektif dan terpadunya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, peningkatan kerjasama pembangunan daerah, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah.	Pembangunan yang Partisipatif selaras dan efektif
24	Fungsi Penunjang Keuangan	1	Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel
		2	Masih rendahnya pendapatan asli daerah	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

NO	URUSAN	PERMASALAHAN		ISU STRATEGIS
25	Fungsi Penunjang Kepegawaian dan Diklat		Masih rendahnya kompetensi sumber daya manusia sesuai dengan bidang tugasnya	Peningkatan kompetensi
26	Fungsi Penunjang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Masih Kurangnya kapasitas pengendalian pelaporan dan pembangunan daerah.	
27	Pariwisata	1	Belum tergarapnya potensi-potensi wisata secara maksimal baik wisata dagang maupun wisata religius.	Pengembangan destinasi pariwisata Kualitas dan kuantitas sarana prasarana pariwisata
		2	Manajemen pengelolaan pariwisata serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang kepariwisataan yang masih kurang	
28	Pertanian	1	Kualitas SDM pertanian yang masih kurang	Manajemen pengelolaan sumberdaya pertanian
		2	Belum terkelolanya potensi lahan secara optimal	
		3	Sumber daya pertanian yang belum berkembang secara baik	
		4	Pelayanan kesehatan hewan, dan produksi peternakan yang perlu menjadi perhatian.	
29	Perdagangan	1	Belum berkembangnya sarana dan prasarana distribusi barang dan produk.	Sarana dan prasarana transportasi Pengelolaan produk unggulan Peningkatan ekspor
		2	Potensi produk unggulan daerah yang belum digarap secara komprehensif	
		3	Masih kurangnya kerjasama dalam hal peningkatan ekspor daerah	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

NO	URUSAN	PERMASALAHAN		ISU STRATEGIS
30	Perindustrian	1	Masih adanya industri kecil /home industri yang belum terbina	Pemberdayaan IKM secara komprehensif
		2	Masih adanya industri kecil yang belum mendapatkan akses fasilitas permodalan.	
		3	Sentra-sentra industri kecil/ home industriyang belum berkembang dengan baik	
		4	Masih kurangnya kemitraan usaha industri kecil/home industri.	

2.4 Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Pangkalpinang Tahun 2019 bersumber dari hasil penjangkaran aspirasi masyarakat melalui hasil reses maupun kunjungan konstituen, sebagai bentuk apresiasi dan aplikasi kepada public untuk mengakomodir rencana pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kepentingan umum.

Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Pangkalpinang Tahun 2019 sebagai upaya DPRD Kota Pangkalpinang dalam mengarahkan dan mengawasi strategi pelaksanaan program pembangunan dalam upaya mewujudkan visi Kota Pangkalpinang.

DPRD Kota Pangkalpinang memberikan 4 (empat) hal mendasar yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2019 adalah:

1. Fasilitasi wilayah atau infrastruktur ; hal ini dikarenakan akibat dari bencana banjir yang menimpa Kota Pangkalpinang Tahun 2016 yang lalu, sehingga banyak infrastruktur yang rusak. Jadi masih berfokus pada pembangunan fisik untuk pencegahan banjir dan air genangan.
2. Pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan bencana ; perlunya membentuk masyarakat yang tanggap bencana melalui mitigasi bencana berbasis masyarakat.
3. Program pengelolaan sampah masih menjadi keluhan masyarakat ; terkait dengan belum tersedianya TPA yang memadai untuk menampung sampah rumah tangga.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

4. Pada bidang kesehatan ; dukungan terhadap program BPJS masih sangat lemah, hal ini banyaknya masyarakat yang bergantung pada jaminan kesehatan, serta keluhan-keluhan terhadap layanan BPJS yang belum maksimal dirasakan oleh masyarakat.
5. Perlu untuk diperhatikan juga terhadap kesejahteraan Ketua RT/RW terkait kenaikan honor, mengingat tugas dan tanggung jawan mereka cukup besar yang berhadapan langsung dengan masyarakat.
6. Dibidang sosial kemasyarakatan, usulan masyarakat terhadap lahan pekuburan yang semakin sempit, sementara lahan pengganti yang belum terealisasi perlu pemikiran bersama.

2.5 Isu Strategis Daerah

Isu strategis daerah merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Isu-isu strategis daerah yang sangat terkait dengan visi, misi dan program Kepala Daerah Kota Pangkalpinang sebagaimana disampaikan dalam tabel diatas.

Untuk 2019, Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang memprioritaskan untuk menyelesaikan isu strategis daerah sebagai berikut :

1. Pengentasan Kemiskinan;
2. Penurunan angka pengangguran;
3. Fasilitasi wilayah dan infrastruktur;
4. Pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan bencana;
5. Program pengelolaan sampah.

2.6 Isu Strategis Nasional

Untuk tahun 2019 Pemerintah telah menetapkan 5 (lima) isu strategis sebagai berikut:

1. pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar,
2. pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman,
3. peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, Industri, dan jasa produktif.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

4. pemanfaatan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air (SDA), dan
5. stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilihan umum.

2.6.1 Sembilan Agenda Pembangunan

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

2.6.2 Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)

Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan sebagai wilayah yang menempati Koridor 1 (Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Batam, Jambi, Padang, Palembang, Bengkulu, Lampung, Pangkalpinang) dalam program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Program ini memiliki potensi dan prospek yang luar biasa bagi Kepulauan Bangka Belitung yang harus dicapai di masa mendatang sesuai dengan target MP3EI hingga 2025.

Kota Pangkalpinang merupakan Ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sesuai dengan MP3EI maka Pangkalpinang merupakan salah satu Pusat Kegiatan Ekonomi Utama (PKEU) untuk wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari 11 PKEU yang ada dalam Koridor Ekonomi Sumatera. Untuk itu, Kota Pangkalpinang bukan merupakan kawasan pengembangan investasi.

2.7 Penetapan Kawasan Strategis

Kawasan strategis kota merupakan bagian wilayah kota yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota baik di bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Kawasan strategis kota berfungsi :

- a. mengembangkan, melestarikan, melindungi dan/atau mengoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan yang bersangkutan dalam mendukung penataan ruang wilayah kota;
- b. sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dalam wilayah kota yang dinilai mempunyai pengaruh sangat penting terhadap wilayah kota;
- c. sebagai pertimbangan dalam penyusunan indikasi program utama rencana tata ruang wilayah kota; dan
- d. sebagai dasar penyusunan rencana rinci tata ruang wilayah kota.

Kawasan strategis kota ditetapkan berdasarkan :

- a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota;
- b. nilai strategis dari aspek-aspek eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi penanganan kawasan;
- c. kesepakatan antar para pemangku kepentingan (stakeholder) dan kebijakan yang ditetapkan tingkat kestrategisan nilai ekonomi, sosial budaya dan lingkungan pada kawasan yang ditetapkan;
- d. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kota; dan
- e. ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Kawasan strategis kota ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut :

- a. memperhatikan kawasan strategis nasional dan kawasan strategis provinsi yang ada di wilayah kota;
- b. kawasan strategis kota dapat berhimpit dengan kawasan strategis nasional dan atau kawasan strategis provinsi, namun harus memiliki kepentingan/kekhususan yang berbeda serta harus ada pembagian kewenangan yang jelas;
- c. dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi yaitu merupakan aglomerasi berbagai kegiatan ekonomi yang memiliki :

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

- 1) potensi ekonomi cepat tumbuh;
 - 2) sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi;
 - 3) potensi ekspor;
 - 4) dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
 - 5) kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi; dan
 - 6) fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi.
- d. dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya seperti :
- 1) tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya;
 - 2) prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya;
 - 3) aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;
 - 4) tempat perlindungan peningkatan budaya;
 - 5) tempat yang memberi perlindungan terhadap keanekaragaman budaya;
 - 6) tempat yang memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial;
 - 7) hasil karya cipta budaya masyarakat kota yang dapat menunjukkan jati diri maupun penanda (focal point, landmark) budaya kota; dan atau
 - 8) kriteria lainnya yang dikembangkan sesuai dengan kepentingan pembangunan kota.
- e. merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi di wilayah kota, antara lain:
- 1) kawasan yang diperuntukan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan lokasi sumber daya alam strategis, pengembangan antariksa, serta tenaga atom dan nuklir;
 - 2) memiliki sumber daya alam strategis;
 - 3) memiliki fungsi sebagai pusat pengendali dan pengembangan antariksa;
 - 4) memiliki fungsi sebagai pusat pengendali tenaga atom dan nuklir; atau
 - 5) memiliki fungsi sebagai lokasi penggunaan teknologi tinggi strategis.
- f. dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup seperti :
- 1) tempat perlindungan sumberdaya alam hayati;

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

- 2) kawasan lindung yang ditetapkan bagi kepentingan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
 - 3) kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian;
 - 4) kawasan yang memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim mikro;
 - 5) kawasan yang menuntut prioritas tinggi untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup
 - 6) kawasan rawan bencana alam; dan/atau
 - 7) kawasan yang sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.
- g. dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis lainnya yang sesuai dengan kepentingan pembangunan wilayah kota.
- h. mengikuti ketentuan pemetaan kawasan strategis kota sebagai berikut:
- 1) delineasi kawasan strategis harus dipetakan pada satu lembar kertas yang menggambarkan wilayah kota secara keseluruhan;
 - 2) pada bagian legenda peta harus dijelaskan bidang apa yang menjadi pusat perhatian setiap delineasi kawasan strategis kota; dan
 - 3) penggambaran peta kawasan strategis kota harus mengikuti peraturan perundang-undangan terkait pemetaan rencata tata ruang.

Kawasan strategis kota perlu digambarkan dalam peta penetapan kawasan strategis. Penentuan batasan fisik kawasan strategis kota pada RTRW kota lebih bersifat indikatif. Penetapan kawasan strategis harus didukung oleh tujuan tertentu daerah sesuai pertimbangan aspek strategis masing-masing kota. Kawasan strategis yang ada di kota memiliki peluang sebagai kawasan strategis nasional dan provinsi. Penetapan kawasan strategis kota didasarkan pada kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan.

2.7.1 Kawasan Strategis Ekonomi

- a) Kawasan Peruntukan Industri Ketapang di Kecamatan Bukit Intan.

Kawasan Peruntukan Industri Ketapang merupakan kawasan strategis ekonomi bagi pengembangan industri di Kota Pangkalpinang. Perencanaan kawasan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

industri ini dalam rangka menunjang kebutuhan lahan industri yang semakin mendesak. Kawasan ini sangat potensial karena:

1. merupakan lahan yang kurang produktif dan cukup luas untuk menunjang kegiatan industri;
2. dilalui rencana jaringan jalan lingkar timur Kota Pangkalpinang;
3. dekat dengan Pelabuhan Pangkalbalam dan rencana pengembangan Pasir Padi Water Front City yang akan dilengkapi dengan terminal pelabuhan bertaraf internasional di muara Sungai Baturusa; dan
4. berkembangnya kegiatan industri terutama industri pengolahan timah.

Permasalahan dari Kawasan Peruntukan Industri Ketapang adalah sebagai berikut:

1. penyediaan air untuk kebutuhan industri relatif terbatas, sehingga perlu diupayakan pemenuhan kebutuhan air dengan merencanakan penyediaan air dan jaringan PDAM; dan
2. jaringan jalan eksisting kurang memadai dan kurang menarik bagi investor, sehingga perlu diupayakan peningkatan jaringan jalan untuk menunjang aksesibilitas kawasan industri ini.

Strategi pengembangan yang perlu dilakukan di kawasan industri Ketapang adalah:

1. penataan kawasan melalui upaya penyusunan Rencana Detail Kawasan Peruntukan Industri Ketapang;
2. peningkatan jaringan jalan utama dan jaringan jalan kawasan di lingkungan kawasan industri;
3. pengembangan kawasan industri perlu tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup; dan
4. pengembangan sabuk hijau (green belt) sebagai pembatas antara kawasan industri dengan kawasan lain di sekitarnya.

b) Kawasan Pergudangan Selindung di Kecamatan Gabek.

Kawasan Pergudangan Selindung merupakan kawasan strategis ekonomi dalam rangka menunjang kegiatan ekonomi perdagangan dan jasa serta industri di wilayah Kota Pangkalpinang. Lokasi ini sangat potensial untuk dikembangkan sebagai kawasan pergudangan karena :

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

1. merupakan lahan yang kurang produktif dan masih sangat luas untuk pengembangan;
2. dekat dengan Pelabuhan Pangkalbalam; dan
3. dilalui oleh rencana jaringan jalan lingkar Pangkalpinang yaitu ruas Selindung.

Permasalahan dari kawasan pergudangan ini adalah sebagai berikut:

1. jaringan jalan saat ini masih sangat terbatas dan masih merupakan jalan tanah; dan
2. merupakan kawasan rawa dan mangrove yang pengembangannya sebaiknya terbatas.

2.7.2 Kawasan Strategis Sosial Budaya

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya di Kota Pangkalpinang ditetapkan pada kawasan pariwisata Pantai Pasir Padi dan Pantai Tanjung Bunga di Kecamatan Bukit Intan. Kawasan ini merupakan penunjang salah satu visi Kota Pangkalpinang, yaitu sebagai salah satu kota tujuan wisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saat ini kawasan ini telah tumbuh sebagai kawasan wisata di Kota Pangkalpinang yang telah dilengkapi dengan sarana hotel, rumah makan, arena permainan dan memiliki pantai yang relatif landai. Namun secara keseluruhan pengembangan kawasan ini belum optimal sehingga masih sangat memungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai kawasan wisata yang lebih baik.

Kawasan ini memiliki potensi diantaranya adalah :

1. kondisi pantai yang landai dengan dengan jarak kelandaian yang relatif jauh sehingga sangat potensial dikembangkan wisata permainan di wilayah perairannya;
2. memiliki potensi alam lain di sekitar pantai yaitu dalam bentuk batuan yang unik yang dapat dikembangkan lebih lanjut;
3. memiliki ketersediaan lahan yang cukup luas untuk pengembangannya; dan
4. tersedia sarana hotel dan rumah makan yang representatif sarana pendukung pengembangan objek wisata lainnya.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Permasalahan yang terdapat pada kawasan ini di antaranya adalah:

1. dukungan prasarana jaringan jalan untuk menuju kawasan relatif belum cukup baik dengan kondisi jalan di beberapa bagian mengalami kerusakan dan lebar jalan yang relatif kecil, sehingga pada saat tingkat kunjungan wisatawan cukup banyak pada ruas jalan ini terjadi kemacetan;
2. dukungan prasarana air bersih relatif terbatas;
3. penataan kawasan yang belum tertata baik, karena pada beberapa bagian kawasan ini terlihat kotor dan kumuh;
4. terjadi abrasi pantai yang cukup parah, sehingga merusak badan jalan pada beberapa bagian pantai; dan
5. tidak terdapat tanaman pelindung di sekitar garis pantai yang berfungsi sebagai pelindung dari abrasi air laut.

Strategi pengembangan yang perlu dilakukan antara lain adalah:

1. penyusunan rencana detail kawasan sehingga dalam pengembangannya lebih terarah dan tertata lebih baik;
2. peningkatan jalan akses sehingga akan lebih memberi kenyamanan dan keamanan dalam menuju kawasan ini;
3. penyediaan sarana dan prasarana air bersih yang memadai sehingga dapat lebih memberi kenyamanan bagi wisatawan dan menarik bagi investor untuk pengembangan lebih lanjut;
4. pembuatan bangunan pemecah ombak untuk mengurangi dampak abrasi pada kawasan pantai; dan
5. penanaman pohon pelindung pada kawasan pantai yang berfungsi sebagai pembatas kawasan sempadan pantai dan sekaligus pengaman dari pengaruh abrasi pada kawasan pantai.

2.7.3 Kawasan Strategis Lingkungan Hidup

Kawasan yang ditetapkan menjadi kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terdiri dari :

- a) Hutan kota di Kelurahan Tua Tunu Indah (Kecamatan Gerunggang).

Fungsi kawasan ini adalah memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air dan memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim mikro. Saat ini

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

kawasan ini merupakan kawasan hutan dengan kondisi tutupan lahan yang sudah mengalami degradasi dengan luasan kurang lebih 163 ha, sehingga dengan kondisi ini harus diupayakan perbaikan pada kawasan tersebut. Keberadaan kawasan ini perlu tetap dipertahankan dan dilindungi dari upaya perambahan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Strategi yang perlu diupayakan dalam rangka mempertahankan keberadaan kawasan ini antara lain adalah :

- penetapan kawasan hutan kota sebagai kawasan lindung dengan penatabatasan secara jelas di lapangan, sehingga tidak terjadi perambahan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab;
- pengembangan kawasan di sekitarnya sebagai buffer dengan dikembangkan sebagai kawasan hutan produksi;
- pengembangan kawasan pertanian perkotaan di sekitar kawasan ini sebagai kawasan RTH dengan mengembangkan pertanian perkebunan yang memiliki tegakan tanaman keras atau tanaman buah. Dengan upaya ini diharapkan penetapan kawasan ini sebagai kawasan RTH di Kota Pangkalpinang dapat tetap dipertahankan; dan
- pengembangan prasarana jaringan jalan pada kawasan ini perlu dibatasi sebagai suatu upaya disinsentif, agar upaya pengembangan pada kawasan ini dapat terkendali.

b) Kolam Retensi Kacang Pedang di Kelurahan Keramat dan Kelurahan Pintu Air (Kecamatan Rangkui), Kelurahan Kacang Pedang (Kecamatan Gerunggang), Kelurahan Kejaksaan (Kecamatan Tamansari).

Kolam Retensi Kacang Pedang dinilai bersifat strategis karena memiliki fungsi yang beragam yaitu sebagai sumber air baku Kota Pangkalpinang, pengendali banjir dan wisata air. Aktivitas penambangan timah di hulu sungai berpotensi mengganggu fungsi-fungsi tersebut, menyebabkan pendangkalan dan merusak kualitas air, sehingga perlu diupayakan tindakan pencegahan dan penanggulangan. Kolam Retensi Kacang Pedang termasuk jaringan sumber daya air lintas kota/kabupaten sehingga penanganannya perlu bekerjasama dengan pemerintah daerah yang berbatasan.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH**c) Kolong-kolong.**

Kolong-kolong di Kota Pangkalpinang bernilai strategis bagi pelestarian sumber daya air dan lingkungan hidup. Jumlahnya cukup banyak dan tersebar di beberapa lokasi. Kondisi yang berbeda di antara setiap kolong membutuhkan penanganan yang berbeda pula. Kolong-kolong tersebut berpotensi sebagai sumber air baku, pengendali banjir dan wisata. Keberadaan kolong harus dipertahankan dan dilindungi dari upaya kerusakan terhadap kondisi air dan lingkungannya.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 sebagai penutup kabinet kerja sehingga tema dan prioritas nasional RKP Tahun 2019 lebih terfokus. Prioritas nasional di bidang ekonomi masuk dalam Prioritas Nasional 3, yaitu Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif, dengan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan ekspor dan nilai tambah pertanian melalui peningkatan produktivitas, kualitas, serta dukungan kelembagaan dan sarana prasarana.
2. Mendorong percepatan peningkatan nilai tambah industri pengolahan melalui perbaikan iklim usaha, peningkatan investasi, penguatan rantai pasok/ nilai, dan pemanfaatan inovasi.
3. Meningkatkan nilai tambah jasa produktif antara lain melalui pengembangan destinasi wisata, ekonomi kreatif dan digital, peningkatan ekspor terutama produk hilirisasi, dan penguatan kemitraan.
4. Mendorong percepatan peningkatan keahlian tenaga kerja melalui penguatan vokasi dan kompetensi, pengembangan kerja sama dunia usaha dan kewirausahaan.
5. Mengembangkan iptek dan inovasi untuk peningkatan produktivitas antara lain melalui peningkatan SDM iptek, pengembangan litbang keilmuan strategis, dan pengembangan teknologi frontier.

Kebijakan ekonomi daerah merupakan pondasi dalam membangun kemandirian dan mengurangi ketergantungan daerah dengan pemerintah pusat. Kebijakan ekonomi daerah dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek ekonomi dan aspek keuangan.

Aspek ekonomi salah satunya dapat dilihat dari kondisi ekonomi makro suatu daerah. Kebijakan ekonomi makro ini akan mempengaruhi arah pembangunan sehingga perlu adanya sinergisitas antara kebijakan ekonomi makro pemerintah daerah dengan kebijakan ekonomi makro pemerintah pusat.

Arah Kebijakan ekonomi yang termaktub dalam RPJMN Tahun 2015-2019 adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan pemerataan pendapatan, menjaga tingkat inflasi, meningkatkan investasi, meningkatkan pembangunan manusia, menurunkan pengangguran dan angka kemiskinan dengan sasaran antara lain dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1 Sasaran Ekonomi Nasional RPJMN Tahun 2015-2019

INDIKATOR MAKRO	2014 (Baseline)	2015	2016	2017	2018*	Sasaran Akhir RPJMN 2019*
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,0	4,8	5,3	5,3	5,6	8
Pengangguran (%)	5,94	6,18	5,61	5,6	5,4	4,0-5,0
Angka Kemiskinan (%)	10,96	11,13	10,7	10,5	9,5	7,0-8,0
Gini Ratio (indeks)	0,41	0,41	0,39	0,39	0,38	36
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73.8	74.8	70,19	70,38	71,38	76.3
Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMAS)	55	n.a	n.a	n.a	n.a	meningkat

Sumber : RPJMN Tahun 2015-2019

Pengelolaan keuangan pemerintah Kota Pangkalpinang dilakukan dengan mengacu pada batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam:

- (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 *juncto* Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- (5) Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan perundangan yang mendasari pengelolaan keuangan daerah tersebut memberikan tekanan perlunya efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Kerangka pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang secara garis besar terdiri dari penyusunan anggaran daerah, penatausahaan dan pertanggungjawaban, yang kesemuanya mengacu pada prinsip-prinsip efisiensi dan efektifitas seperti yang dimaksud dalam peraturan di atas. Sedangkan, Arah kebijakan pembangunan ekonomi Kota Pangkalpinang yang menjadi prioritas pembangunan Tahun 2019 (merupakan masa transisi) akan difokuskan pada beberapa tujuan sesuai dengan fokus yang termasuk dalam RPJPD Kota Pangkalpinang, yaitu:

1. Daya dukung utilitas
2. Kelayakan dan kesinambungan program dan alokasi anggaran
3. Mengurangi dampak eksternalitas pembangunan
4. Penanganan lingkungan hidup

3.1.1. Analisa Ekonomi Daerah

Analisa ekonomi daerah bertujuan untuk menilai sejauh mana realisasi pembangunan dapat mempengaruhi kinerja ekonomi dan sejauh mana indikator makro ekonomi sesuai dengan yang diasumsikan dalam RPJMD.

Dalam rangka memperoleh gambaran kondisi ekonomi riil suatu daerah pada tahun lalu, tahun berjalan dan tahun rencana, yang merupakan langkah penting dalam merumuskan kebijakan ekonomi daerah maka dilakukan analisis asumsi umum/makro ekonomi daerah tahun lalu, tahun berjalan dan tahun rencana. Hal ini dimaksudkan

untuk mengumpulkan fakta dan permasalahan yang dihadapi daerah sebagai pertimbangan dalam analisa keuangan dan perumusan kerangka ekonomi.

3.1.1.1. Kondisi Makro Ekonomi Kota Pangkalpinang Pada Tahun 2016 dan Perkiraan Pada Tahun 2018

Gambaran kondisi makro ekonomi Kota Pangkalpinang pada Tahun 2015-2016 dan perkiraan Tahun 2017-2018 dapat dilihat antara lain dari laju pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, jumlah penduduk miskin, tingkat pengangguran dan pendapatan perkapita penduduk. Berikut ini beberapa indikator ekonomi makro Tahun 2014-2015 dan proyeksi tahun 2016-2017:

Tabel 3.2 Indikator Ekonomi Makro Kota Pangkalpinang Realisasi Tahun 2015-2016 dan Proyeksi Tahun 2017-2018

No	Indikator Makro	Satuan	Realisasi		Bertambah / Berkurang	Proyeksi	
			2015	2016		2017	2018
1.	PDRB (Harga Berlaku)	Rp.juta	10.214.674,00	11.673.989,55	856.069,00	12.325.369,75	13.281.061,88
2.	PDRB (Harga Konstan)	Rp.juta	7.551.391,00	7.949.211,87	303.894,00	8.300.712,35	8.652.212,84
3.	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB Harga Berlaku tahun tertentu	persen	9,15	14,29	(2,07)	5,58	7,75
4.	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB Harga Konstan tahun tertentu	persen	3,40	5,27	(0,87)	4,42	4,23
5.	Tingkat Inflasi	persen	4,66	5,26	(2,15)	4,80	4,35
6.	PDRB ADHB	Rp.juta	10.214.674,00	11.673.989,55	856.069,00	12.325.369,75	13.281.061,88
	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Rp.juta	509.466,00	569.779,18	42.997,00	600.787,82	643.695,09
	Pertambangan dan Penggalian	Rp.juta	-	-	-	-	-
	Industri Pengolahan	Rp.juta	1.927.461,00	2.156.671,30	(15.115,00)	2.249.478,46	2.365.847,02
	Pengadaan Listrik dan Gas	Rp.juta	6.203,00	6.569,06	927,00	7.133,46	7.840,25
	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Rp.juta	3.412,00	3.646,83	484,00	3.858,47	4.132,31
	Konstruksi	Rp.juta	1.097.449,00	1.318.321,13	94.963,00	1.392.591,07	1.519.546,20
	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil	Rp.juta	2.700.093,00	2.993.245,61	291.260,00	3.159.135,78	3.389.999,24
	Transportasi dan Pergudangan	Rp.juta	633.748,00	728.666,56	81.533,00	771.993,32	839.709,70
	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Rp.juta	348.920,00	402.226,38	34.386,00	425.197,79	460.386,43
	Informasi dan Komunikasi	Rp.juta	287.429,00	317.946,81	18.373,00	334.385,32	355.966,05
	Jasa Keuangan dan Asuransi	Rp.juta	462.969,00	585.526,81	31.063,00	615.004,32	673.968,23
	Real Estate	Rp.juta	548.373,00	664.721,61	47.509,00	700.497,63	764.630,52
	Jasa Perusahaan	Rp.juta	52.960,00	63.141,32	3.986,00	66.645,18	72.462,54
	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Rp.juta	728.049,00	858.141,91	91.732,00	907.292,95	991.507,01
	Jasa Pendidikan	Rp.juta	532.163,00	622.509,39	88.776,00	659.594,51	724.369,62
	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Rp.juta	197.349,00	230.448,06	21.464,00	243.809,32	265.234,68
	Jasa lainnya	Rp.juta	178.631,00	207.239,05	20.659,00	219.619,74	239.333,50
7.	PDRB ADHK	Rp.juta	7.551.391,00	7.949.211,87	303.894,00	8.300.712,35	8.652.212,84

No	Indikator Makro	Satuan	Realisasi		Bertambah / Berkurang	Proyeksi	
			2015	2016		2017	2018
	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Rp.juta	372.760,00	384.947,60	12.571,00	396.876,34	408.805,09
	Pertambangan dan Penggalian	Rp.juta	-	-	-	-	-
	Industri Pengolahan	Rp.juta	1.548.903,00	1.592.651,13	9.443,00	1.619.146,50	1.645.641,88
	Pengadaan Listrik dan Gas	Rp.juta	4.666,00	5.010,80	222,00	5.394,74	5.778,69
	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Rp.juta	2.244,00	2.230,53	107,00	2.269,30	2.308,08
	Konstruksi	Rp.juta	766.416,00	829.052,73	25.438,00	876.481,56	923.910,39
	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil	Rp.juta	2.020.103,00	2.123.017,47	80.159,00	2.213.670,70	2.304.323,92
	Transportasi dan Pergudangan	Rp.juta	444.032,00	469.193,47	24.964,00	493.502,84	517.812,21
	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Rp.juta	250.327,00	259.196,73	17.651,00	271.292,28	283.387,82
	Informasi dan Komunikasi	Rp.juta	265.440,00	280.704,33	16.383,00	296.718,76	312.733,19
	Jasa Keuangan dan Asuransi	Rp.juta	342.470,00	382.880,93	10.047,00	410.366,39	437.851,85
	Real Estate	Rp.juta	390.064,00	422.255,00	15.391,00	448.346,14	474.437,29
	Jasa Perusahaan	Rp.juta	37.566,00	40.256,40	1.202,00	42.420,23	44.584,06
	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Rp.juta	488.711,00	508.751,07	41.303,00	536.583,90	564.416,72
	Jasa Pendidikan	Rp.juta	340.861,00	356.555,87	28.591,00	377.637,50	398.719,12
	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Rp.juta	148.653,00	157.073,53	11.963,00	166.666,30	176.259,08
	Jasa lainnya	Rp.juta	128.175,00	135.435,53	8.457,00	143.340,30	151.245,08
7.	Jumlah Penduduk	jiwa	196.339,10	200.725,43	4.345,10	204.767,27	208.965,36
8.	Jumlah Penduduk Miskin	ribu jiwa	7,06	7,02	(0,75)	6,76	6,51
9.	Tingkat Pengangguran	persen	10,64	9,47	1,80	9,2	9
10.	Pendapatan Perkapita (Harga Berlaku)	Rp.ribu	53.873,45	59.248,41	5.099,45	62.984,02	67.456,75
11.	Pendapatan Perkapita (Harga Konstan)	Rp.ribu	39.106,91	40.325,78	1.358,35	41.410,15	42.556,24

a. Perkembangan PDRB, Pertumbuhan Ekonomi, dan Struktur Ekonomi

Perkembangan PDRB baik PDRB Harga Berlaku dan PDRB Harga Konstan selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. PDRB Harga Berlaku Tahun 2015 adalah Rp10,2 triliun dan meningkat ditahun berikutnya 2016 menjadi Rp11,6 triliun atau naik sebesar 14,29persen. Prediksi PDRB Harga Berlaku untuk tahun 2017 dan tahun 2018 adalah masing-masing sebesar Rp12,3 triliun dan RP13,2 rupiah. Demikian juga, untuk PDRB Harga Konstan di Tahun 2015 sebesar Rp7,5triliun dan naik menjadi Rp7,9 triliun di Tahun 2016 atau naik sebesar 5,27 persen. Perkembangan PDRB Harga Konstan adalah pertumbuhan riil dari PDRB yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi. Prediksi PDRB Harga Konstan untuk tahun 2017 dan tahun 2018 masing-masing adalah Rp8,3triliun dan Rp8,6 triliun. Estimasi pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2017 dan 2018 masing-masing sebesar 4,42 persen dan 4,23 persen.

Struktur ekonomi Kota Pangkalpinang masih didominasi oleh sektor perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan sektor Industri Pengolahan sebagai penyumbang terbesar PDRB Kota Pangkalpinang.

b. Laju Inflasi

Indikator pembangunan ekonomi yang baik tidak hanya diukur dengan besaran PDRB, laju pertumbuhan ekonomi, dan transformasi struktural perekonomian, namun juga dapat disinergikan dengan besaran perkembangan harga di tingkat konsumen yang diindikasikan dengan laju inflasi. Kajian terhadap perkembangan laju inflasi cukup penting mengingat tingkat inflasi mempengaruhi daya beli (*purchasing power*) masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan membawa dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kalau tingkat kenaikan harga tinggi. Bila daya beli masyarakat meningkat berarti terdapat peningkatan kesejahteraan masyarakat yang mencerminkan berkembangnya sektor produksi dan distribusi barang dan jasa. Selanjutnya kondisi tersebut akan mendorong (*feedback linkage*) pertumbuhan ekonomi.

Sebagai salah satu indikator makro ekonomi yang berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi, inflasi sesungguhnya merupakan gabungan dari sumbangan beberapa jenis barang dan jasa yang mengalami fluktuasi harga.

Tingkat inflasi untuk Kota Pangkalpinang sangat perfluktuasi. Nilai inflasi Kota Pangkalpinang untuk tahun 2015 mencapai 4,66 persen dan mengalami kenaikan di tahun 2016 menjadi sebesar 5,26 persen. Angka inflasi diestimasikan turun pada tahun 2017 adalah sebesar 4,80 persen dan diharapkan kembali menurun pada tahun 2018 sebesar 4,35 persen.

c. Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Kota Pangkalpinang pada tahun 2015 menjadi 7060 jiwa. Jumlah ini mengalami penurunan pada tahun 2016 sebesar 7020 jiwa, sehingga diharapkan untuk tahun 2017 menjadi 6760 jiwa dan 6510 jiwa di tahun 2018 dengan asumsi adanya stabilitas ekonomi yang lebih baik pada tahun-tahun berikutnya.

d. Tingkat Pengangguran

Tingkat pengangguran di Kota Pangkalpinang Tahun 2016 sebesar 9,47persen. Harapan untuk tahun 2018 tingkat pengangguran dapat ditekan hingga 9 persen. Proyeksi sebesar ini mempertimbangkan pertambahan jumlah penduduk di Kota Pangkalpinang yang begitu pesat dengan dengan migrasi masuk sangat tinggi juga mempertimbangkan gejolak harga timah dunia. Kedua faktor ini saling keterkaitan dan merupakan bagian dari beberapa faktor lain yang meningkatkan jumlah pengangguran di Kota Pangkalpinang.

e. Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita penduduk harga berlaku Kota Pangkalpinang Tahun 2016 mencapai Rp59,24 juta meningkat dari tahun sebelumnya Rp53,8 juta sedangkan pendapatan perkapita penduduk harga konstan adalah sebesar Rp39,10 juta di tahun 2015 dan mengalami kenaikan di tahun 2016 menjadi Rp40,3 juta. Proyeksi kedepan, pendapatan perkapita penduduk harga berlaku Kota Pangkalpinang untuk tahun 2017 adalah sebesar Rp62,98 juta dan Tahun 2018 sebesar Rp67,45 juta. Untuk pendapatan perkapita harga konstan di proyeksikan pada tahun 2017 mencapai Rp41,41 juta dan Rp42,55 juta pada tahun 2018.

3.1.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Kota Pangkalpinang Tahun 2018 dan Tahun 2019

Kajian spesifik terhadap perkembangan PDRB menjadi indikator perkembangan perekonomian daerah. Demikian juga analisis terhadap pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran mengenai dampak kebijakan ekonomi terhadap pembangunan yang dilaksanakan.

Secara empiris pertumbuhan ekonomi merupakan indikator turunan yang diperoleh dari perkembangan PDRB ADHK. Dari sisi pengeluaran (*expenditure*), PDRB (Y) merupakan hasil penjumlahan dari konsumsi rumah tangga (C), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), perubahan inventori, belanja pemerintah (G) dan netto ekspor-impor (X-M). Dengan demikian, terdapat hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dengan besaran belanja pemerintah. Makin besar belanja pemerintah memberikan kontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, demikian pula

sebaliknya. Proyeksi (prospek) pertumbuhan ekonomi Kota Pangkalpinang Tahun 2018 diperkirakan tumbuh pada kisaran 4,00 – 4,50 persen.

Secara global, perekonomian dunia perlahan-lahan membaik dan kebanyakan negara-negara berkembang menjaga stabilitas pertumbuhan dengan berhati-hati terhadap gejolak perekonomian baik bidang moneter maupun fiskal yang mungkin akan terjadi. Hal yang perlu diantisipasi dalam perencanaan pembangunan Tahun 2018 adalah peningkatan inflasi ini diperkirakan sebagai dampak dari rencana pemerintah pusat untuk melakukan pembatasan subsidi Bahan Bakar Minyak, dampak melemahnya harga minyak dunia, menurunnya harga timah, perubahan iklim dan melemahnya kurs rupiah yang berimbas kepada ekspektasi masyarakat dan dunia usaha terhadap keinginan berinvestasi menurun. Faktor lain seperti bertambah jumlah penduduk terutama migrasi masuk yang mungkin akan menjadi faktor menambah tingkat pengangguran terbuka dikarenakan meningkatnya jumlah angkatan kerja tidak terdidik dan terlatih.

Peran Pemerintah dalam membuat kebijakan moneter dan fiskal dan fokus pemerintah pusat untuk meningkatkan daya saing daerah terutama bagi sumber daya manusia, menggalakkan investasi melalui perbaikan iklim investasi merupakan hal positif terhadap perekonomian kedepan. Pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk yang diharapkan mengalami peningkatan juga tingkat inflasi dan pengangguran yang lebih terkendali diharapkan akan menggerakkan peningkatan investasi di Kota Pangkalpinang pada Tahun 2017-2018.

3.1.1.3. Arah kebijakan Perekonomian Kota Pangkalpinang Tahun 2018 dan Tahun 2019

Berdasarkan gambaran perkembangan, tantangan dan prospek perekonomian makro Kota Pangkalpinang adalah beberapa poin yang menjadi arah kebijakan perekonomian pada tahun 2018-2019 yaitu;

1. Meningkatkan peran UMKM dan Koperasi untuk menggeliatkan ekonomi kerakyatan, ekonomi kreatif dan berorientasi pariwisata.
2. Meningkatkan daya saing daerah terutama peningkatan sumber daya manusia melalui pengembangan, pelatihan dan pendidikan terhadap angkatan kerja, meningkatkan program pendidikan dan kesehatan.
3. Memperluas lapangan pekerjaan, menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat serta menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui regulasi di bidang investasi, peningkatan pelayanan perizinan, meningkatkan peran lembaga yang berhubungan dengan investasi.
4. Meningkatkan kemitraan antara pemerintah dan swasta melalui program CSR.
5. Meningkatkan belanja pemerintah di bidang infrastruktur dan fasilitas publik.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, dengan komponen pokoknya adalah pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Meningkatnya tuntutan kebutuhan dana sebagai konsekuensi penyerahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, melalui otonomi daerah, menuntut berbagai upaya penyesuaian manajemen keuangan daerah termasuk arah pengelolaan pendapatan dan belanja daerah.

Penyusunan APBD sesuai dengan peraturan perundangan diawali dengan proses musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang hasilnya dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), selanjutnya dipergunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan

Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Daerah adalah salah satu wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab serta sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penyusunan APBD harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah yang dinamis diseimbangkan dengan prioritas pembangunan yang relevan berdasarkan kemampuan keuangan daerah, sinkronisasi dan integrasi kebijakan pemerintah pusat, provinsi sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Kebijakan dalam pengelolaan APBD memegang peranan yang sangat strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah karena APBD merupakan salah satu instrument penting kebijakan fiskal daerah. Kebijakan Desentralisasi Fiskal Daerah mengandung tiga misi utama yaitu :

- 1) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya;
- 2) meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat;
- 3) serta memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Sedangkan tiga fungsi utama kebijakan fiskal yaitu sebagai alat stabilisasi ekonomi, alat distribusi pendapatan, dan alat alokasi anggaran. Sebagai alat stabilisasi ekonomi, kebijakan fiskal memainkan perannya dalam menjaga stabilitas nilai tukar dan laju inflasi yang pada gilirannya berpengaruh positif dalam pencapaian ekspansi ekonomi tinggi. Sebagai alat distribusi pendapatan, fungsi kebijakan fiskal tercermin sebagai media dalam penarikan pajak dari masyarakat dimana orang kaya akan membayar pajak lebih tinggi dibandingkan orang miskin. Sedangkan, fungsi kebijakan fiskal sebagai alat alokasi anggaran tercermin dari kualitas anggaran dalam APBD.

Selain terus memprioritaskan pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal, pemerintah hendaknya juga mendukung dan melaksanakan kebijakan reformasi dalam administrasi keuangan daerah, dimana antara lain tercermin dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja, sebagai salah satu langkah perubahan dalam upaya membangun sebuah pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu

pengelolaan APBD harus melalui tiga tahapan penting yaitu mulai dari penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan/pengendalian.

Dalam paradigma baru dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah, perencanaan harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- 1) Berorientasi pada kepentingan publik / masyarakat luas;
- 2) Disusun berdasarkan pendekatan kinerja;
- 3) Mempunyai keterkaitan yang erat antara pengambil kebijakan (decisionmaker) di DPRD dengan perencanaan operasional oleh Pemerintah Daerah dan penganggaran pada unit kerja (PD);
- 4) Terdapat upaya-upaya untuk mensinergikan hubungan antara APBD, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, lembaga pengelola keuangan daerah dan unit-unit pengelola layanan publik dalam pengambilan keputusan.

Pengelolaan keuangan di daerah meliputi mobilisasi pendapatan, penetapan alokasi belanja daerah, dan mobilisasi pembiayaan. Untuk memenuhi sufficient condition bagi pengelolaan keuangan daerah yang baik, maka daerah perlu memahami dan menggali potensi/keunggulan daerah serta mengidentifikasi pokok-pokok permasalahan yang ada. Daerah juga perlu menentukan arah pembangunannya dalam rencana tahunan, jangka menengah hingga jangka panjang yang masing-masing dituangkan ke dalam RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang), RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) daerah, RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah). Selain ketersediaan sumber-sumber pembiayaan yang ideal, alokasi belanja daerah sangat ditentukan oleh prioritas-prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam ketiga dokumen perencanaan tersebut.

Dalam upaya untuk mencapai seluruh rencana tindak yang ada pada dokumen perencanaan lima tahunan dan satu tahunan, perlu ditetapkan arah pengelolaan keuangan daerah. Arah pengelolaan ini dimaksudkan agar seluruh sumber daya keuangan daerah dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan efisien. Arah pengelolaan tersebut meliputi arah pengelolaan pendapatan daerah, arah pengelolaan belanja daerah dan arah pengelolaan pembiayaan daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta dalam rangka mendukung upaya percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemantapan stabilitas ekonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta pelayanan umum kepada masyarakat, maka kebijakan keuangan (anggaran) Kota Pangkalpinang pada tahun 2019 diarahkan untuk :

- 1) Memberikan dorongan terhadap pertumbuhan perekonomian daerah dengan melanjutkan dan memantapkan langkah-langkah konsolidasi fiskal daerah, guna mewujudkan APBD yang sehat dan berkelanjutan (fiscalsustainability) dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan karakteristik, kondisi obyektif dan isu-isu strategis di daerah, di samping memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- 2) Langkah konsolidasi fiskal daerah tersebut, antara lain ditempuh melalui optimalisasi pengumpulan sumber-sumber pendapatan daerah, peningkatan efisiensi dan efektifitas belanja daerah serta peningkatan dan perbaikan manajemen keuangan daerah;
- 3) Memantapkan kondisi ketahanan fiskal daerah yang berkelanjutan dengan cara :
 - ✓ melanjutkan langkah-langkah konsolidasi fiskal dengan menjaga tingkat defisit yang terkendali dari aspek pembiayaan daerah,
 - ✓ peningkatan manajemen keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien;
- 4) Menyelesaikan masalah-masalah mendasar yang menjadi prioritas pembangunan tahun 2017-2022.

3.3. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Pendapatan daerah menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 1 ayat 13 merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan di atas, dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas :

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi

- Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- 2) Dana Perimbangan yang meliputi : Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus;
 - 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, meliputi : Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus, Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi/Kabupaten/Kota Lainnya, Lain-lain Penerimaan, Dana Transfer Pusat dan Dana Insentif Daerah. Sedangkan penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pendapatan Daerah menurut Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan dikelompokkan atas : a) PAD, yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD pada umumnya terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang Sah; b) Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Hibah, Dana Darurat, DBH Pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, Dana Penyesuaian dan Otsus, serta Bantuan Keuangan dari provinsi atau dari pemda lainnya.

Dari berbagai komponen Pendapatan Daerah, sumber utama penerimaan Daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok. Hal ini sebagai pertanda bahwa perlu segera dilakukan upaya-upaya terobosan untuk mencari sumber-sumber alternatif pendapatan lainnya yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi sumber penerimaan daerah, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan dari pajak daerah yang bersifat “limitative”. Hal yang sama juga terjadi pada penerimaan dana perimbangan yang menunjukkan kecenderungan menurun.

Hal ini, antara lain disebabkan oleh hilangnya potensi komponen Dana Bagi Hasil Pajak bersumber dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan yang diserahkan kepada Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan serta prospek perekonomian di Kota Pangkalpinang sebagaimana telah diuraikan pada sub bab sebelumnya, maka dapat disajikan analisa dan proyeksi sumber sumber pendapatan daerah sebagaimana tertuang di dalam Tabel Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah pada Tabel T-C.20, Tabel Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah pada Tabel T-C.21 dan Tabel Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah pada Tabel T-C.22 berikut ini :

Tabel 3.3
TABEL T.C.20 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan
KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2015 s.d 2019

NO	URAIAN	Jumlah				
		Realisasi tahun (n-3)	Realisasi tahun (n-2)	Realisasi tahun (n-1)	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana (n)	Proyeksi/Target pada Tahun (n+1)
1	2	3	4	5	6	7
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	135,305,782,559.87	136,257,398,973.11	147,701,073,151.00	163,003,375,710.00	
1.1.1	Pajak Daerah	57,078,721,282.23	65,953,671,740.50	84,180,560,848.58	73,471,200,000.00	
1.1.2	Restribusi daerah	16,933,544,425.66	14,368,849,102.52	12,611,409,222.78	14,853,975,710.00	
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	4,314,667,852.53	6,079,642,892.25	6,175,994,513.15	6,000,000,000.00	
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	56,978,849,029.45	49,855,235,237.84	44,733,108,566.49	68,678,200,000.00	
1.2	DANA PERIMBANGAN	538,208,270,454.00	741,810,521,719.00	530,406,970,952.00	669,634,285,000.00	
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	55,506,991,454.00	49,745,083,917.00		60,329,163,000.00	
1.2.2	Dana alokasi umum	419,863,119,000.00	451,406,721,000.00	443,476,956,000.00	443,476,956,000.00	
1.2.3	Dana alokasi khusus	62,838,160,000.00	240,658,816,802.00	86,930,014,952.00	165,828,166,000.00	
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	124,305,685,774.41	100,302,763,552.96		57,622,765,000.00	
1.3.1	Hibah	-	23,955,982,961.00			
1.3.2	Dana darurat	-				

1.3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah yang lainnya	63,365,681,774.41	36.044.446.191.,96		50,000,000,000.00	
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	43,423,684,000.00				
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya	17,516,320,000.00	40,302,307,400.00		7,622,765,000.00	
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1+1.2+1.3)		797,819,738,788.28	978,370,657,245.07	678,108,044,103.00	890,260,425,710.00	

Tabel 3.4

**TABEL T.C.21 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah
KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2015 s.d 2019**

NO	URAIAN	Jumlah				
		Realisasi tahun (n-3)	Realisasi tahun (n-2)	Realisasi tahun (n-1)	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana (n)	Proyeksi/Target pada Tahun (n+1)
1	2	3	4	5	6	7
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG					
2.1.1	Belanja Pegawai	350,939,207,975.00	362,907,498,330.00	308,963,409,277.00	330,601,773,683.00	
2.1.2	Belanja bunga					
2.1.3	Belanja subsidi					
2.1.4	Belanja hibah	9,917,564,500.00	13,484,777,132.00	15,662,685,000.00	30,472,008,000.00	
2.1.5	Belanja bantuan sosial	760,952,900.00	424,301,000.00	119,450,000.00	200,000,000.00	
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa					
2.1.7	Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa	514.231.573.,00	763,656,167.00	787,147,000.00	1,384,319,683.00	
2.1.8	Belanja tidak terduga	4,233,614.00	962,347,500.00	548,547,705.00	4,000,000,000.00	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	362,136,190,562.00	378,542,580,129.00	326,081,238,982.00	366,658,101,366.00	
2.2	BELANJA LANGSUNG					
2.2.1	Belanja pegawai	57,974,681,427.00	90,188,184,250.00	86,983,506,011.00	106.743.971.322,00	
2.2.2	Belanja barang dan jasa	191,810,707,763.64	184,563,224,181.63	128,657,215,128.65	257.663.753.133,00	
2.2.3	Belanja modal	196,105,837,101.00	336,343,181,795.55	128,657,215,128.65	194.194.599.889,00	
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	445,891,226,291.64	611,094,590,227.23	460,983,061,573.81	558.602.324.344,00	
	TOTAL JUMLAH BELANJA	808,027,416,853.64	989,637,170,356.23	787,064,300,555.81	925,260,425,710.00	

Tabel 3.5

**TABEL T.C.22 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah
KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2015 s.d 2019**

No.	URIAN	Jumlah				
		Realisasi tahun (n-3)	Realisasi tahun (n-2)	Realisasi tahun (n-1)	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana (n)	Proyeksi/Target pada Tahun (n+1)
1	2	3	4	5	6	7
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	147,823,263,031.81	130,101,195,419.45	99,115,143,180.29	35,000,000,000.00	
	Pencairan dana cadangan					
	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan					
	Penerima pinjaman daerah					
	Penerimaan kembali pemberian pinjaman					
	Penerimaan piutang daerah					

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	147,823,263,031.81	130,101,195,419.45	99,115,143,180.29	35,000,000,000.00	
	Pengeluaran pembiayaan					
	Pembentukan dana cadangan					
	Penyertaan modal (investasi) daerah	7,000,000,000.00	18,955,982,961.00			
	Pembayaran pokok utang					
	Pemberian pinjaman daerah					
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7,000,000,000.00	18,955,982,961.00			
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	140,823,263,031.81	111,145,212,458.45	99,115,143,180.29		
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAN	156,879,907,399.89	99,115,143,180.29	140,582,045,283.35	35,000,000,000.00	

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran dan prioritas pembangunan daerah yaitu tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi benang merah/tonggak capaian antara (*milestones*) menuju sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD melalui rencana program pembangunan daerah tahunan.

Suatu prioritas pembangunan daerah pada dasarnya (berisi) program-program unggulan yang paling tinggi relasinya (*leading indicators*) bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah tahun rencana. Dengan demikian, suatu program pembangunan daerah merupakan program atau sekumpulan program unggulan kepala daerah yang berhubungan dengan janji politik kepala daerah pada saat pilkada dan hasil perumusan teknokratis terkait.

Sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kota Pangkalpinang yang dituangkan dalam RKPD tahun 2019 disusun melalui pendekatan politis, tehnokratis-partisipatif, dan top down-bottom up. Dalam tahapan -tahapan tersebut pada intinya mempertimbangkan : (1) Prioritas pembangunan nasional (2) Prioritas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 dan (3) Evaluasi capaian kinerja RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2016 sebagaimana tertuang dalam bab sebelumnya.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Pangkalpinang

RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2019 merujuk pada arah kebijakan pembangunan 5 tahun ketiga dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pangkalpinang 2007 – 2025 sebagai bahan utama untuk diterjemahkan dalam rencana kerja tahun 2019.

Adapun target sasaran pembangunan Kota Pangkalpinang serta Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang akan dicapai pada Tahun 2018 dan 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1 Target Sasaran Pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun 2018

Indikator	2018		2019	
	Kota	Provinsi	Kota	Provinsi
Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,7	5,50	5,1	6,25
Inflasi (%)	4,0	5,0-6,0	3,8	3,8
Pengangguran Terbuka (%)	2,25	5,1	5	4,5
Penduduk Miskin (%)	4,5	66,54		54,88
Angka Kelahiran Bayi	7 per 1000 kelahiran	29 per 1000 kelahiran	7 per 1000 kelahiran	29 per 1000 kelahiran
Rata-rata Lama Sekolah	12	8,11	12	
Angka Harapan Hidup	71,09	69,40	71,2	
PDRB Perkapita	31 JUTA	50.762.940	32 Juta	55.382.367

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2019

Selain berpedoman pada tema pembangunan Tahun 2019 yang merupakan tema pentahapan pencapaian Visi dan Misi Walikota Pangkalpinang, prioritas pembangunan daerah ditetapkan berdasarkan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi, maka penentuan prioritas pembangunan daerah juga mempertimbangkan beberapa hal seperti kebijakan pembangunan nasional dan provinsi.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2019 “**Memacu Investasi dan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas**”, melalui:

1. **Holistik-Tematik** Untuk mencapai sasaran prioritas nasional Kedaulatan Pangan, perlu koordinasi multi kementerian, yaitu antara lain Kementan, KemenPUPR, Kemen ATR, dan Kemen KLH, Kemen Perdagangan serta pemerintah Daerah.
2. **Integratif** pencapaian Kedaulatan Pangan perlu dilakukan secara terintegrasi melalui peningkatan produktifitas lahan existing, meyetop konversi lahan produktif, reforma agrarian, pencetakan sawah baru, pengembangan pertanian organik, pengendalian harga dan impor pangan, dan seterusnya (kombinasi berbagai program/kegiatan).

3. **Spasial** Pembangunan sawah baru misalnya, harus mempertimbangkan lokasi, berdekatan dengan irigasi, terintegrasi dengan jalan, gudang, pasar dan lain-lain.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2019, maka sasaran yang harus dicapai pada akhir tahun 2019, sesuai dengan (RPJMN 2015-2019), antara lain:

1. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 7,1 persen (*); dengan sasaran per wilayah; Sumatera sebesar 6,5 persen; Jawa-bali sebesar 7,1 persen; Nusa Tenggara sebesar 7,6 persen; Kalimantan sebesar 6,1 persen; Sulawesi sebesar 8,2 persen; Maluku sebesar 7,8 persen dan Papua sebesar 16,0 persen;
2. Pencapaian target tingkat kemiskinan sebesar 7,5-8,5 persen (*); dengan sasaran Tingkat Kemiskinan Per Wilayah: Sumatera sebesar 8,8 persen; Jawa-bali sebesar 8,6 persen; Nusa Tenggara sebesar 15,1 persen; Kalimantan sebesar 5,4 persen; Sulawesi sebesar 9,1 persen; Maluku sebesar 12,0 persen dan Papua sebesar 25,1 persen;
3. Pencapaian target tingkat pengangguran sebesar 5,2-5,5 persen (*); dengan sasaran Tingkat Pengangguran Per Wilayah: Sumatera sebesar 5,0 persen; Jawa-bali sebesar 5,9 persen; Nusa Tenggara sebesar 3,4 persen; Kalimantan sebesar 4,2 persen; Sulawesi sebesar 4,5 persen; Maluku sebesar 5,4 persen dan Papua sebesar 3,4 persen; dan
4. Laju inflasi 3,5.

Selanjutnya berdasarkan paparan berjudul “Prioritas Nasional dan Program Prioritas RKP 2019” oleh Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pada Temu Konsultasi Triwulan I Bappenas-Bappeda di Jakarta tanggal 24 Januari 2018, telah disampaikan Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas Nasional. Terdapat 5 (lima) Prioritas Nasional Tahun 2019, yaitu:

1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar;
2. Pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman;

3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif;
4. Pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumberdaya air, dan
5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan Pemilu.

Kebijakan pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun 2019 tertuang dalam Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 dengan tema **“Perluasan Pembangunan Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”**, maka disusun prioritas pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun 2019, Penyusunan prioritas dilakukan dengan memperhatikan beberapa kriteria, terutama yang berkorelasi dengan upaya untuk :

1. pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti terhadap SDG's, Standar Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan pekerjaan;
2. pencapaian visi dan misi Pembangunan Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007-2025;
3. pengembangan sektor/bidang yang terkait dengan prioritas dan keunggulan kompetitif daerah; dan
4. penyelesaian isu-isu strategis daerah.

Prioritas pembangunan daerah berisi program-program unggulan yang paling tinggi korelasinya (*leading indicators*) bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah pada tahun 2019. Dalam penentuan prioritas pembangunan, telah diidentifikasi beberapa permasalahan pembangunan daerah yang bersifat internal dan eksternal. Dengan demikian suatu program pembangunan daerah merupakan program atau kumpulan program unggulan sebagaimana nanti akan tertuang dalam RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2019 dan RPJPD Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2025 setelah Kepala Daerah terpilih yang didasarkan pada hasil perumusan secara teknokratis.

Adapun prioritas pembangunan Kota Pangkalpinang sesuai dengan RPJPD Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2007-2025, yaitu:

1. Kerjasama
Mencakup kerjasama antar dinas dan kerjasama antar pemerintah daerah
2. Ekonomi
✓ Daya dukung utilitas

- ✓ Kelayakan dan kesinambungan program dan alokasi anggaran
 - ✓ Mengurangi dampak eksternalitas pembangunan
 - ✓ Penanganan lingkungan hidup
3. Peran dan Kontribusi
- Tahap *empowerment*, dimana peranan pelaku pembangunan selain pemerintah yaitu : pengusaha, wanita dan partisipasi masyarakat secara umum di dalam proses pembangunan agar manfaat dan keuntungan dari keberhasilan pembangunan dapat terus terjaga dan tetap berkesinambungan
4. Pemerintah
- ✓ Peningkatan sistem penjenjangan karir yang baik dengan tupoksi yang jelas
 - ✓ Memperhatikan kebutuhan pelayanan publik
 - ✓ Alokasi anggaran untuk pemerintah dan DPRD harus tetap terjaga dengan baik
5. Keamanan dan eksternalitas negatif
- Diperlukan sebuah supremasi hukum yang tegas untuk menindak pelaku kejahatan tersebut
6. Sistem Informasi
- Jaringan informasi yang berkualitas dan baik untuk mendukung kegiatan perekonomian Kota Pangkalpinang yang sebagian besar digerakkan oleh sektor jasa dan perdagangan

Prioritas daerah tersebut diselesaikan melalui program dan kegiatan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2019 dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

1. Memenuhi kriteria holistik-tematik, integratif dan spasial;
2. Program/kegiatan harus merupakan kewenangan Provinsi dan Pemerintah Pusat, serta sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah bersangkutan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;
3. Memiliki korelasi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPJPD 2007-2025;
4. Merupakan respon relevan terhadap isu strategis dan masalah yang mendesak dan faktual yang dihadapi pada tahun 2019;
5. Program dan kegiatan terpilih merupakan program/kegiatan yang menyentuh secara langsung bagi usaha pemecahan masalah mendasar yang dihadapi oleh masyarakat;

6. Selaras dan konsisten dengan kebijakan pemerintah pusat untuk mengantisipasi dan penyelesaian target-target pembangunan nasional; dan
7. Sesuai dengan pagu anggaran indikatif sementara.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun 2019 serta mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional dan prioritas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka dengan berpedoman pada tema pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun 2019, dan memperhatikan berbagai isu strategis dan permasalahan di Kota Pangkalpinang, maka ditetapkan prioritas pembangunan Kota Pangkalpinang tahun 2019 sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat
2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan Sektor Strategis
3. Peningkatan Pemberdayaan Sosial Masyarakat
4. Pengembangan Infrastruktur Daerah
5. Penguatan Sinergitas dan Pemantapan Reformasi Birokrasi
6. Pemantapan Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Sedangkan sasaran daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Meningkatnya Layanan Pendidikan;
2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat;
3. Meningkatnya Iklim Investasi Daerah;
4. Meningkatnya Produktivitas Dan Daya Saing Masyarakat Yang Kreatif Dan Inovatif;
5. Meningkatnya Pembangunan Yang Berbasis Kewilayahan;
6. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan;
7. Terwujudnya Masyarakat Yang Religius;
8. Meningkatnya Internalisasi Nilai-Nilai Budaya Dalam Kehidupan Masyarakat;
9. Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan Dan Berbasis Smart City;
10. Meningkatnya Fungsi Koordinasi Serta Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan;

11. Meningkatnya Kinerja Pemerintah Melalui Reformasi Birokrasi; dan
12. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Berstandar, Mudah Dan Terjangkau.

Keselarasn Prioritas Pembangunan Daerah dengan Prioritas Nasional dapat dilihat dari kesamaan indikator makro yang digunakan untuk menjadi target pembangunan secara makro baik di tingkat nasional, regional dan daerah yang tertuang dalam tabel 4.2 dibawah.

Tabel 4.2 Keselarasan Target Indikator Pembangunan Makro Antara Target Nasional, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dan Kota Pangkalpinang Tahun 2019

Indikator	Tahun 2019		
	Nasional	Provinsi	Pangkalpinang
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertumbuhan Ekonomi (%)	8,0	5,3	5,10
Tingkat Kemiskinan %	7,0-8,0%	4,15	3
Tingkat Pengangguran %	4,0-5,0%	5,6	5,00
Laju Inflasi (%)	3,5	6,1	5,50

Sumber : RPJMN 2015-2019, Rancangan RKP 2019

Untuk mencapai 5 (lima) Prioritas Nasional, diperlukan dukungan dari prioritas pembangunan daerah. Untuk mendukung pencapaian Prioritas Nasional tersebut terdapat 5 (lima) Prioritas Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan 6 (enam) Prioritas Pembangunan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2019. Pemilihan prioritas daerah dan penyelarasn terhadap Prioritas Nasional dan Prioritas Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimaksudkan agar didalam implementasinya dapat lebih fokus dan lebih terarah dan dapat dilaksanakan oleh perangkat daerah maupun *stakeholder* lainnya.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

Tabel 4.3 Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah Dengan Nasional Dan Provinsi

PRIORITAS NASIONAL 2019		PRIORITAS PROVINSI 2019		PRIORITAS KOTA		SASARAN DAERAH	
1	Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar	1	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	1	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	1	Meningkatnya layanan pendidikan
2	Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman	2	Pengembangan Energi dan Infrastruktur Kewilayahan			2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
3	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif	3	Pengembangan Pariwisata	2	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan Sektor Strategis	3	Meningkatnya Iklim Investasi Daerah
4	Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air	4	Pengembangan Pembangunan Agropolitan			4	Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing Masyarakat yang Kreatif dan Inovatif

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

5	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	5	Pembangunan Demokrasi			5	Meningkatnya Pembangunan yang Berbasis Kewilayahan
				3	Peningkatan Pemberdayaan Sosial Masyarakat	6	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
						7	Terwujudnya Masyarakat yang Religius
						8	Meningkatnya Internalisasi Nilai-Nilai Budaya Dalam Kehidupan Masyarakat
				4	Pengembangan Infrastruktur Daerah	9	Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dan Berbasis Smart City
				5	Penguatan Sinergitas dan Pemanapan Reformasi Birokrasi	10	Meningkatnya Fungsi Koordinasi serta Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

						11	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Reformasi Birokrasi melalui
				6	Pemantapan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	12	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang berstandar, mudah dan terjangkau

4.3 Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan SDGs

Setelah pelaksanaan Millenium Development Goals (MDGs) periode 2010-2015 yang berfokus pada aspek pembangunan manusia dan dalam penyusunannya bersifat top down, saat ini perumusan target berkelanjutan yaitu Sustainability Development Goals (SDGs) sedang digagas untuk melengkapi kekurangan yang belum dapat dicapai oleh MDGs. SDGs memiliki ruang lingkup lebih luas dan lebih kompleks. Prinsip penjabaran konkrit pelaksanaan SDGs untuk agenda paska 2015, yaitu: (1) SDGs tidak melemahkan komitmen internasional terhadap pencapaian MDGs pada tahun 2015, namun bahkan akan memperbarui komitmen dan melanjutkan komitmen MDGs yang masih belum selesai, dengan penyesuaian selaras dengan dinamika yang terjadi; (2) SDGs akan dilaksanakan berdasarkan Agenda 21, Johannesburg Plan of Implementation dan Rio Principles, serta mempertimbangkan perbedaan kondisi, kapasitas dan prioritas nasional; (3) SDGs akan difokuskan pada pencapaian tiga dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu dimensi pembangunan manusia (human development), dimensi ekonomi (economic development) dan dimensi lingkungan (environment development). Sampai dengan saat ini, konsep SDGs akan meliputi 17 goal, 169 target, dan lebih dari 300 indikator yang saat ini masih dalam proses perumusan akhir. Berikut ini tabel yang menyajikan keterkaitan antara prioritas pembangunan Kota Pangkalpinang dalam upaya untuk mendukung pencapaian tujuan SDGs.

Tabel 4.4 Korelasi Prioritas Kota Pangkalpinang dalam Merespon Program SDGs

No	Tujuan Pembangunan SDGs	Prioritas Kota Pangkalpinang 2019
(1)	(2)	(3)
1	Mengentaskan Segala Bentuk Kemiskinan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan Sektor Strategis

2	Mengentaskan Kelaparan Ketahanan Pangan Dan Meningkatkan Gizi Serta Mempromosikan <i>Agriculture</i> Berkelanjutan	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kesehatan Masyarakat
3	Menjamin Hidup Sehat Dan Mempromosikan Kesejahteraan Untuk Semua Dan Segala Usia	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kesehatan Masyarakat
4	Menjamin Kualitas Pendidikan Yang Inklusif Dan Adil Serta Mempromosikan Kesempatan Belajar Seumur Hidup Bagi Semua	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kesehatan Masyarakat
5	Mencapai Kesenjangan Gender Dan Memberdayakan Semua Perempuan Dan Anak Perempuan	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat, Harmonisasi Sosial, Demokratisasi Serta Nilai-Nilai Budaya
6	Menjamin Ketersediaan Dan Manajemen Air Serta Sanitasi Yang Berkelanjutan Untuk Semua	Peningkatan Kualitas Pembangunan Daerah Yang Berwawasan Lingkungan, Daya Dukung Infrastruktur, Connectivity Serta Utilitas Publik Berbasis Smart City
7	Menjamin Akses Energi Yang Terjangkau, Handal, Berkelanjutan Dan Modern Untuk Semua	Peningkatan Kualitas Pembangunan Daerah Yang Berwawasan Lingkungan, Daya Dukung Infrastruktur, Connectivity Serta Utilitas Publik Berbasis Smart City
8	Mempromosikan Keberlanjutan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja Yang Menyeluruh Produktif Dan Pekerjaan Yang Layak Untuk Semua	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan Sektor Strategis
9	Membangun Infrastruktur Yang Tangguh, Mempromosikan Industri Yang Inklusif Dan Berkelanjutan Serta Mendorong Inovasi	Peningkatan Kualitas Pembangunan Daerah Yang Berwawasan Lingkungan, Daya Dukung Infrastruktur, Connectivity Serta Utilitas Publik Berbasis Smart City

10	Mengurangi Kesenjangan Di Dalam Dan Luar Negeri	
11	Membuat Kota Dan Pemukiman Yang Inklusif, Aman, Tangguh Dan Berkelanjutan	Peningkatan Kualitas Pembangunan Daerah Yang Berwawasan Lingkungan, Daya Dukung Infrastruktur, Connectivity Serta Utilitas Publik Berbasis Smart City
12	Menjamin Pola Konsumsi Dan Produksi Yang Berkelanjutan	
13	Membuat Langkah Aksi Untuk Menghadapi Perubahan Iklim Dan Dampaknya	Peningkatan Kualitas Pembangunan Daerah Yang Berwawasan Lingkungan, Daya Dukung Infrastruktur, Connectivity Serta Utilitas Publik Berbasis Smart City
14	Melakukan Konservasi Dan Pemanfaatan Laut, Samudra Dan Sumberdaya Maritim Yang Berkelanjutan Untuk Pembangunan Berkelanjutan	Peningkatan Kualitas Pembangunan Daerah Yang Berwawasan Lingkungan, Daya Dukung Infrastruktur, Connectivity Serta Utilitas Publik Berbasis Smart City
15	Melindungi, Mengembalikan, Dan Mempromosikan Pemanfaatan Ekosistem Darat Yang Berkelanjutan, Manajemen Hutan Yang Lestari, Memerangi Kekeringan, Menghentikan Dan Mengembalikan Degradasi Lahan Serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	Peningkatan Kualitas Pembangunan Daerah Yang Berwawasan Lingkungan, Daya Dukung Infrastruktur, Connectivity Serta Utilitas Publik Berbasis Smart City
16	Melindungi Kedamaian Dan Masyarakat Yang Inklusif Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua Dan Membangun Institusi Yang	Penguatan Sinergitas Dalam Tata Kelola Pemerintahan Serta Pemantapan Reformasi Birokrasi

	Efektif, Akuntabel, Dan Inklusif Untuk Semua Tingkatan	
17	Penguatan Moi Dan Revitalisasi Kerjasama Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan	<p>✓ Penguatan Sinergitas Dalam Tata Kelola Pemerintahan Serta Pemantapan Reformasi Birokrasi</p> <p>✓ Pemantapan Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Rencana kerja dan pendanaan daerah tahun 2019 disusun berdasarkan program prioritas dengan mempertimbangkan evaluasi dan rancangan teknokratis (sinkronisasi pusat-provinsi-kota), serta aspirasi dan kepentingan masyarakat, melalui proses pemrioritasan dari yang paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat.

Program prioritas, adalah program yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah dan merupakan program prioritas yang baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal.

Program dan kegiatan prioritas Tahun 2019 merupakan operasionalisasi dari prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2018, yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, fungsi penunjang urusan pemerintahan maupun urusan pilihan. Program dan kegiatan prioritas tersebut nantinya akan menjadi acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2019. Selain itu juga sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2019.

Pelaksanaan perencanaan Tahun 2019 merupakan pentahapan RPJPD tahap ketiga 2007-2025 yang mana arah kebijakan yang akan dituju oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut :

No.	Faktor Internal
1	Hubungan profesionalisme kerja antara DPRD dan Pemerintah Kota Pangkalpinang
2	Daya dukung utilitas dasar seperti jaringan listrik dan air bersih
3	Kegiatan yang bertentangan dengan ketertiban dan keamanan seperti narkoba, tingkat kejahatan
4	Kejelasan dan ketersediaan TUPOKSI di setiap dinas Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang
5	Peran pengusaha di dalam pembangunan Kota Pangkalpinang
6	Ketersediaan jaringan teknologi informasi seperti internet dan telepon
7	Alokasi anggaran untuk program yang dijalankan oleh dinas
8	Kesesuaian jabatan struktural dengan ketersediaan SDM
9	Tingkat kepastian hukum bagi para investor
10	Partisipasi masyarakat di dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di Kota Pangkalpinang
11	Pembinaan sentra pelayanan jasa oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang
12	Penanganan kasus-kasus sengketa lahan seperti penyelesaian lahan sengketa dan ganti rugi oleh Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang
13	Jumlah PNS dan alokasi dana yang mendukung aktifitas PNS di Kota Pangkalpinang
14	Eksternalitas pembangunan di Kota Pangkalpinang (Kemiskinan, Pedagang Kaki Lima, Rumah Liar dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan)
15	Ketersediaan dana operasional untuk mendukung aktivitas DPRD Kota Pangkalpinang (Proposal dari LSM, Penyambutan Tamu, Pansus , dan lain-lain)

16	Emansipasi perempuan di dalam pembangunan Kota Pangkalpinang
17	Dampak permasalahan sampah di Kota Pangkalpinang
18	Pengendalian Banjir di Kota Pangkalpinang

Untuk prioritas pembangunan 5 tahun ketiga adalah terdapat pada tabel 5.2 berikut ini :

Tabel 5.2 Prioritas Pembangunan 5 Tahun Ketiga

No.	Bidang	Prioritas
1	Kerjasama	Mencakup kerjasama antar dinas dan kerjasama antar pemerintah daerah
2	Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daya dukung utilitas 2. Kelayakan dan kesinambungan program dan alokasi anggaran 3. Mengurangi dampak eksternalitas pembangunan 4. Penanganan lingkungan hidup
3	Peran dan Kontribusi	Tahap <i>empowerment</i> , dimana peranan pelaku pembangunan selain pemerintah yaitu : pengusaha, wanita dan partisipasi masyarakat secara umum di dalam proses pembangunan agar manfaat dan keuntungan dari keberhasilan pembangunan dapat terus terjaga dan tetap berkesinambungan
4	Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan sistem penjenjangan karir yang baik dengan tupoksi yang jelas 2. Memperhatikan kebutuhan pelayanan publik 3. Alokasi anggaran untuk pemerintah dan DPRD harus tetap terjaga dengan baik
5	Keamanan dan eksternalitas negatif	Diperlukan sebuah supremasi hukum yang tegas untuk menindak pelaku kejahatan tersebut
6	Sistem Informasi	Jaringan informasi yang berkualitas dan baik untuk mendukung kegiatan perekonomian Kota Pangkalpinang yang sebagian besar digerakkan oleh sektor jasa dan perdagangan

Sedangkan Prioritas Pembangunan Tahun 2019 adalah :

1. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat
2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan Sektor Strategis
3. Peningkatan Pemberdayaan Sosial Masyarakat
4. Pengembangan Infrastruktur Daerah
5. Penguatan Sinergitas dan Pemantapan Reformasi Birokrasi
6. Pemantapan Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Serta tema dasar RKPD 2019 adalah **“Perluasan Pembangunan Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”** dengan prioritas pembangunan seperti yang telah diuraikan pada Bab 4, dilaksanakan dengan program prioritas sebagai berikut :

A. Program yang dilaksanakan setiap OPD :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;
5. Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

B. Urusan Wajib Program Prioritas Pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.3 Urusan Wajib Program Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2019

JENIS	URUSAN	PROGRAM	OPD PELAKSANA
Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program penyediaan akses dan peningkatan mutu layanan PAUD, PNF dan Dikdas	
		Program pengembangan fungsi pelayanan KBM pendidikan non formal	
		Program pengelolaan bantuan operasional pendidikan (BOP) PAUD	
		Program pengelolaan bantuan operasional sekolah (BOS)	
	Kesehatan	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	
		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	
		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	
		Program Pengembangan Lingkungan Sehat	
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	
		Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	
		Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	

JENIS	URUSAN	PROGRAM	OPD PELAKSANA
		Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	
		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	
		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	
		Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan dan minuman	
		Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	
		Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah	
		Program Kebijakan dan Pembangunan Kesehatan	
		Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular, Nafza dan Jiwa	
		Program surveilans dan imunisasi dan kesehatan Matra	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	
		Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	
		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	
		Program Perencanaan Tata Ruang	
		Program Pemanfaatan Ruang	
		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	

JENIS	URUSAN	PROGRAM	OPD PELAKSANA
		Program pengadaan sarana dan prasarana SDA dan penunjang infrastruktur operasional SDA	
		Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	
		Program Peningkatan Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban Kota	
			Bukit Intan
			Gabek
			Gerunggang
			Girimaya
			Pangkalbalam
			Rangkui
			Tamansari
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Program Lingkungan Sehat Perumahan	
		Program Pemberdayaan komunitas Perumahan	
		Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	
		Program pengelolaan areal pemakaman	
		Program Pembangunan Taman Kota	
		Program Pengembangan FASUM	

JENIS	URUSAN	PROGRAM	OPD PELAKSANA
	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program bina ideologi dan wawasan kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program pembinaan politik dalam negeri	
		Program Rehabilitasi/rekonstruksi sarana dan prasarana pasca bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Program penyediaan logistik/peralatan dan tanggap darurat penanggulangan bencana	
		Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	
		Program pengembangan wawasan kebangsaan	Satuan Polisi Pamong Praja
		Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	
		Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	
		Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	
		Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	
	Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program penguatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial	
		Program penanganan fakir miskin	
		Program pemberdayaan sosial	
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	
Wajib Non Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
		Program Peningkatan Kesempatan Kerja	
		Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Jamsostek	

JENIS	URUSAN	PROGRAM	OPD PELAKSANA
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	
		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak	
	Pangan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Dinas Pangan dan Pertanian
	Pertanahan	Program pembangunan sistem pendaftaran tanah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	
		Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	
	Lingkungan Hidup	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	
		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	
		Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam	
	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Kesehatan Reproduksi Remaja	
		Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	
		Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	

JENIS	URUSAN	PROGRAM	OPD PELAKSANA
	Perhubungan	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Dinas Perhubungan
		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	
		Program peningkatan pelayanan angkutan	
		Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas	
		Program Pembangunan Penerangan Jalan Umum	
	Komunikasi dan Informatika	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	
		Program kerjasama informasi dengan massa media	
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	
		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	
	Penanaman Modal	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
		Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah	
		Program peningkatan pelayanan perijinan	
		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	

JENIS	URUSAN	PROGRAM	OPD PELAKSANA
	Kepemudaan dan Olahraga	Program upaya kesehatan kerja dan olahraga	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program peningkatan peran serta kepemudaan	Dinas Pariwisata
		Pembinaan dan pemasyarakatan Olahraga	
	Statistik	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Persandian	Program Peningkatan Persandian Daerah	
	Kebudayaan	Program pengembangan, pelestarian dan perlindungan cagar budaya, permuseuman, seni budaya, sejarah dan tradisi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Perpustakaan	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Kearsipan	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	
Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Program Pengembangan Perikanan Budidaya	Dinas Pangan dan Pertanian
		Program Pengembangan Perikanan Tangkap	
		Program Pengembangan Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	
		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (UPTD) Kabupaten/Kota	
	Pariwisata	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata

JENIS	URUSAN	PROGRAM	OPD PELAKSANA
		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	
		Program Pengembangan Kemitraan	
	Pertanian	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Dinas Pangan dan Pertanian
		Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	
		Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	
		Program peningkatan produksi hasil peternakan	
		Pembangunan/Perbaikan Balai/Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak, Pusat Kesehatan Hewan, Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Penyediaan Sarana Pendukungnya	
	Perdagangan	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan *)	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
		Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	
		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	
Penunjang Urusan	Perencanaan	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
		Program Pembangunan Data Industri Kecil dan Menengah	
		Program Pengembangan data/informasi	
		Program Kerjasama Pembangunan	
		Program perencanaan pembangunan daerah	Daerah
		Program perencanaan sosial dan budaya	

JENIS	URUSAN	PROGRAM	OPD PELAKSANA
		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	
		Program kajian dan penelitian pengembangan pembangunan	
		Program Peningkatan Pemantauan dan Pelaksanaan Pembangunan	Bukit Intan
	Keuangan		Gabek
			Gerunggang
			Girimaya
			Pangkalbalam
			Rangkui
			Tamansari
		Peningkatan Manajemen Aset dan Investasi Daerah	Badan Keuangan Daerah
		Program Peningkatan PAD dan Pendapatan lainnya	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
			Dinas Lingkungan Hidup
			Dinas Pangan dan Pertanian
			Dinas Perhubungan

JENIS	URUSAN	PROGRAM	OPD PELAKSANA
	Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Program Peningkatan Pelayanan Korpri	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (teknis)	Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH *)	Inspektorat Daerah
	Penunjang urusan lainnya	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan *)	Inspektorat Daerah
		Program Pendidikan Kedinasan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Keuangan Daerah
			Sekretariat Daerah
		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Sekretariat Daerah

JENIS	URUSAN	PROGRAM	OPD PELAKSANA
		Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	
		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	
		Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	
		Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	
		Program Peningkatan Kerjasama Daerah	
		Program peningkatan kualitas pemahaman,pengamalan dan pembinaan kerukunan agama	
		Program Peningkatan Komunikasi dan Informasi serta Media Massa dan Protokol	
		Program Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	
		Program Pengembangan dan Pembinaan Lembaga Ekonomi dan Keuangan	
		Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	
		Program Peningkatan Pengembangan BUMD, Perencanaan, Pengkajian, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi	
		Program Kebijakan Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan	
		Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	
	Program Pembinaan Keagamaan Masyarakat	Bukit Intan	
	Gabek		
	Gerunggang		

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

JENIS	URUSAN	PROGRAM	OPD PELAKSANA
			Girimaya
			Pangkalbalam
			Rangkui
			Tamansari
		Program Pembinaan Organisasi Kelurahan	Bukit Intan
			Gabek
			Gerunggang
			Girimaya
			Pangkalbalam
			Rangkui
			Tamansari
		Program Peningkatan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Girimaya
			Rangkui
		Program Peningkatan Kinerja Aparat Kelurahan	Bukit Intan
			Gabek
			Gerunggang
			Girimaya
			Pangkalbalam
			Rangkui
			Tamansari

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

JENIS	URUSAN	PROGRAM	OPD PELAKSANA
		Program Peningkatan Pelayanan Kemasyarakatan	Bukit Intan
			Gabek
			Gerunggang
			Pangkalbalam
			Tamansari
			Girimaya
			Rangkui
		Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
			Bukit Intan
			Gabek
			Gerunggang
			Girimaya
			Pangkalbalam
			Rangkui
			Tamansari

Tabel 5.4 Pagu Indikatif OPD
Belanja Langsung TA 2019
RAPBD Kota Pangkalpinang

NO	O P D	PAGU APBD MURNI	PAGU DAK PENUGASAN	PAGU DAK REGULER	BLUD	KAPITASI	DABA	JUMLAH
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	89,079,590,000	0	175,939,231,000	0	0	341,500,000,000	606,518,821,000
2	Sekretariat Daerah	35,840,629,350	0	0	0	0		35,840,629,350
3	Sekretariat DPRD	31,619,414,400	0	0	0	0		31,619,414,400
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	29,520,962,400	0	5,323,500,000	0	0	4,480,000,000	39,324,462,400
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	23,446,828,194	0	20,014,868,000	0	0	3,341,400,000	46,803,096,194
6	Dinas Lingkungan Hidup	16,551,604,837	5,720,000,000	0	0	0	5,300,000,000	27,571,604,837
7	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	21,971,074,808	0	346,767,535,497	36,000,000,000	4,913,686,000		409,652,296,305
8	Dinas Perhubungan	13,528,726,000	0	0	0	0		13,528,726,000
9	Badan Keuangan Daerah	12,725,077,300	0	0	0	0		12,725,077,300
10	Satuan Polisi Pamong Praja	8,451,725,000	0	0	0	0		8,451,725,000
11	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	6,952,899,000	0	0	0	0		6,952,899,000
12	Kecamatan Rangkui	6,305,495,000	0	0	0	0		6,305,495,000
13	Kecamatan Bukit Intan	5,452,317,900	0	0	0	0		5,452,317,900
14	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5,055,143,000	0	0	0	0		5,055,143,000
15	Kecamatan Gabek	5,032,382,200	0	0	0	0		5,032,382,200

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

16	Kecamatan Gerunggang	4,798,778,000	0	0	0	0		4,798,778,000
17	Kecamatan Tamansari	4,218,796,000	0	0	0	0		4,218,796,000
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4,159,781,000	0	0	0	0		4,159,781,000
19	Kecamatan Girimaya	4,082,607,000	0	0	0	0		4,082,607,000
20	Kecamatan Pangkalbalam	4,053,404,100	0	0	0	0		4,053,404,100
21	Dinas Pariwisata	3,859,154,000	0	32,339,970,640	0	0		36,199,124,640
22	Dinas Komunikasi dan Informatika	3,218,354,420	0	0	0	0		3,218,354,420
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	3,034,701,683	0	0	0	0		3,034,701,683
24	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan	2,928,150,135	0	0	0	0		2,928,150,135
25	Dinas Pangan dan Pertanian	2,780,094,200	0	3,425,000,000	0	0		6,205,094,200
26	Inspektorat Daerah	2,736,555,500	0	0	0	0		2,736,555,500
27	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2,270,054,000	0	1,252,684,000	0	0		3,522,738,000
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2,264,418,000	0	0	0	0		2,264,418,000
29	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1,964,920,600	0	3,090,500,800	0	0		5,055,421,400
30	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	1,870,203,000	0	0	0	0		1,870,203,000
		359,773,841,027	5,720,000,000	588,153,289,937	36,000,000,000	4,913,686,000	354,621,400,000	1,349,182,216,964

Tabel 5.5 Pagu Program Prioritas RKPD
Belanja Langsung Ta. 2019
RAPBD Kota Pangkalpinang

No	Prioritas RKPD	Program	Kegiatan	Rp	%
1	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	33	238	451.673.699.012	33%
2	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan Sektor Strategis	30	112	41.229.931.540	3%
3	Peningkatan Pemberdayaan Sosial Masyarakat	11	197	32.268.243.250	2%
4	Pengembangan Infrastruktur Daerah	37	231	668.601.967.787	50%
5	Penguatan Sinergitas dan Pemantapan Reformasi Birokrasi	23	153	50.193.350.583	4%
6	Pemantapan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	27	934	105.215.024.792	8%
-	TOTAL	161	1.865	1.349.182.216.964	

Tabel 5.6 Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Tahun 2019
Kota Pangkalpinang

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			-								
	Pemantapan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Berstandar, Mudah Dan Terjangkau	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								Sekretariat Daerah
			Penyediaan jasa surat menyurat	Kota			Terkelolanya surat masuk dan keluar 3.500 surat	3.500 surat	127,550,000	140,305,000	
			Penyediaan alat tulis kantor	Kota			Tersedianya Alat Tulis Kantor 1 paket	1 paket	220,000,000	242,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota			Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan 1 tahun	1 tahun	289,740,000	318,714,000	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota			Tersedianya komponen instalasi listrik 1 paket	1 paket	40,000,000	44,000,000	
		Penyediaan peralatan rumah tangga	Kota			Tersedianya peralatan rumah tangga 1 tahun	1 tahun	57,680,000	8,448,000	
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota			Tersedianya bahan bacaan untuk lingkup Sekretariat Daerah 12 bulan	12 bulan	250,000,000	275,000,000	
		Penyediaan makanan dan minuman	Kota			Tersedianya makanan dan minuman 1 tahun	1 tahun	652,700,000	717,970,000	
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota			Tersedianya sarana kelancaran perjalanan dinas 1	1 tahun	1,500,000,000	1,650,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

						tahun				
		Penyediaan Jasa Perkantoran	Kota			Tersedianya jasa perkantoran 1 tahun	1 tahun	40,100,000	44,110,000	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota			Tersedianya jasa komunikasi, listrik dan air 4 jenis	4 jenis	1,210,000,000	1,331,000,000	
		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kota			Jumlah cendaramata 60 cinderamata	60 cinderamata	161,750,000	177,925,000	
		Penyediaan Jasa Asuransi Gedung Kantor	Kota			Teransuransinya gedung tudung saji 1 tahun	1 tahun	200,000,000	220,000,000	
		Penyediaan jasa perbaikan perlengkapan kantor	Kota			Terpeliharanya perlengkapan dan peralatan kantor 1 tahun	1 tahun	275,000,000	302,500,000	
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kota			Jumlah dokumen yang diterbitkan 1.000 berkas	1.000 berkas	470,080,000	517,088,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kota			Tersedianya jasa kebersihan kantor dan alat pembersih 1 tahun	1 tahun	252,240,000	277,464,000	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								Sekretariat Daerah
		Pengadaan mebeleur	Kota			Tersedianya meubeler 1 paket	1 paket	50,000,000	55,000,000	
		Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Kota			Terpeliharanya rumah jabatan 1 tahun	1 tahun	584,060,000	642,466,000	
		Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Kota			Tersedianya sarana dan prasarana 1 tahun	1 tahun	104,360,000	114,796,000	
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kota			Terpeliharanya secara rutin/ berkala gedung kantor 1 tahun	1 tahun	600,000,000	660,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Kota			Terpeliharanya secara rutin/ berkala mobil jabatan 1 tahun	1 tahun	450,000,000	495,000,000	
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kota			Terpeliharanya secara rutin berkala kendaraan dinas/operasional 1 tahun	1 tahun	1,500,000,000	1,760,000,000	
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Kota			Terpeliharanya peralatan rumah jabatan/dinas 1 tahun	1 tahun	500,000,000	550,000,000	
		Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Kota			terlaksananya rehab gedung tudung saji 1 tahun	1 tahun	200,000,000	220,000,000	
		pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Kota			Tersedianya Kendaraan dinas/operasional 2 unit	2 unit	1,500,000,000	1,650,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Kota			Terlaksananya perlengkapan rumah jabatan/dinas 1 tahun	1 tahun	500,000,000	440,000,000	
		Pengadaan makan dan minum rumah dinas/jabatan	Kota			Tersedianya makanan dan minuman 1 tahun	1 tahun	200,000,000	220,000,000	
		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kota			Tersedianya perlengkapan gedung kantor 1 paket	1 paket	452,000,000	497,200,000	
		Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Kota			Terpenuhinya peralatan rumah jabatan/dinas 1 tahun	1 tahun	700,000,000	660,000,000	
		Pengadaan peralatan gedung kantor	Kota			Tersedianya peralatan gedung kantor 1 paket	1 paket	125,000,000	137,500,000	
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur								Sekretariat Daerah

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kota			Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya 3 paket	3 paket	300,000,000	330,000,000	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								Sekretariat Daerah
			Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Kota			Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparatur dalam penerapan manajemen Pemerintahan yang berbasis kinerja 200 orang	200 orang	70,000,000	77,000,000	
			Pendayagunaan Aparatur dalam peningkatan kinerja organisasi	Kota			Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparatur dalam penerapan manajemen Pemerintahan yang berbasis kinerja 80	80 orang	85,000,000	93,500,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

						orang				
			Pendidikan dan Pelatihan kehumasan dan protokol	Kota		Jumlah aparatur yang mengikuti diklat 5 orang	5 orang	90,000,000	99,000,000	
			Monitoring dan evaluasi administrasi kecamatan dan kelurahan	Kota		terlaksananya monitoring 80 %	80%	75,000,000	82,500,000	
			Rapat Koordinasi Kerjasama Daerah	Kota		terlaksananya rapat koordinasi kerjasama daerah 1 kali	1 kali	45,000,000	49,500,000	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							Sekretariat Daerah

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kota			Terlaksananya pelaporan kinerja 2 Dokumen	2 Dokumen	20,000,000	22,000,000	
			Penyusunan laporan umum tahunan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal	Kota			terpenuhinya ketersediaan laporan penerapan dan pencapaian SPM Kota Pangkalpinang 1 Laporan	1 Laporan	50,000,000	55,000,000	
			Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Kota			Terlaksananya pelaporan keuangan semesteran 5 Dokumen	5 Dokumen	6,000,000	6,600,000	
			Penyusunan Pelaporan Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan OPD	Kota			Terlaksananya kegiatan SATGAS SPIP Sekretariat Daerah 1 Tahun	1 Tahun	90,000,000	99,000,000	
			Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat	Kota			tersusunnya LAKIP Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang 1 Laporan	1 Laporan	25,000,000	27,500,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Daerah Kota Pangkalpinang								
		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Kota			Terlaksananya pelaporan keuangan akhir tahun 10 Dokumen	10 Dokumen	6,000,000	6,600,000	
		Penyusunan RENJA (RKT, RKA, dan DPA)	Kota			Terlaksananya penyusunan RENJA (RKT, RKA, dan DPA) 4 Dokumen	4 Dokumen	6,000,000	6,600,000	
		Penyusunan RENSTRA	Kota			Terlaksananya penyusunan RENSTRA Sekretariat Darah 15 Dokumen	15 Dokumen	90,000,000	99,000,000	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								Sekretariat DPRD
		Penyediaan alat tulis kantor	SKPD			jumlah jenis ATK yang dibeli/yang diadakan 42 Jenis	42 Jenis	71,273,000	78,400,300	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD			jumlah jenis barang cetakan yang diadakan 20 jenis jumlah lembar fotocopy 70.000 lembar	20 jenis 70.000 lembar	100,725,000	110,797,500	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD			jumlah jenis alat listrik dan elektronik yang dibeli 16 jenis	16 jenis	17,380,000	19,118,000	
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD			jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 6 unit	6 unit	100,000,000	110,000,000	
		Penyediaan peralatan rumah tangga	SKPD			jumlah peralatan rumah tangga yang dibeli 6 jenis	6 jenis	50,000,000	55,000,000	
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD			jumlah jenis bahan bacaan yang tersedia 2 jenis	2 jenis	60,000,000	66,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Penyediaan makanan dan minuman	SKPD			jumlah waktu penyediaan makanan dan minuman 12 Bulan	12 Bulan	187,824,000	206,606,400	
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SKPD			jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang di ikuti 16 kali	16 kali	130,340,000	143,374,000	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD			Jumlah Waktu Penyediaan jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik yang tersedia 12 Bulan	12 Bulan	285,600,000	314,160,000	
		Penyediaan Jasa Dokumentasi	SKPD			jumlah bahan dokumentasi kegiatan dprd 1 paket	1 paket	5,000,000	5,500,000	
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD			jumlah waktu penyediaan jasa administrasi keuangan 12 Bulan	12 Bulan	202,270,000	222,497,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD			jumlah waktu penyediaan peralatan dan bahan pembersih 12 Bulan	12 Bulan	232,454,000	255,699,400	
		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD			jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang mendapat perbaikan 28 Unit	28 Unit	94,870,000	104,357,000	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								Sekretariat DPRD
		Pengadaan mebeleur	SKPD			jumlah mubeleur kantor 7 unit	7 unit	155,065,000	170,571,500	
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD			jumlah gedung kantor yang mendapat pemeliharaan rutin atau berkala 4 unit	4 unit	65,000,000	71,500,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD			jumlah kendaraan operasional yang mendapat pemeliharaan 11 unit	11 unit	480,000,000	528,000,000	
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	SKPD			jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara 4 unit	4 unit	50,000,000	55,000,000	
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur								Sekretariat DPRD
		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	SKPD			jumlah pakaian dinas aparatur dan anggota dewan 160 orang	160 orang	1,095,200,000	1,204,720,000	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								Sekretariat DPRD
		Pendidikan dan pelatihan formal	SKPD			jumlah asdeski 6 kali jumlah bimtek 16 kali	6 kali 16 kali	100,000,000	110,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

Sekretariat
DPRD

			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	SKPD			jumlah jenis laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun 3 jenis	3 jenis	3,500,000	3,850,000	
			Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	SKPD			jumlah jenis laporan keuangan semesteran 1 jenis	1 jenis	3,500,000	3,850,000	
			penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD	SKPD			jumlah jenis laporan keuangan akhir tahun 1 jenis	1 jenis	3,500,000	3,850,000	
			Penyusunan Renja (RKT, RKA dan DPA)	SKPD			jumlah jenis dokumen perencanaan kinerja 3 jenis	3 jenis	4,400,000	4,840,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Jumlah Kegiatan Terpenuhinya Pelayananan Administrasi Perkantoran	11 Kegiatan					Inspektorat Daerah
		Penyediaan alat tulis kantor	SKPD			Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang dibeli 1 Jenis	1 Jenis	33,975,000	44,167,500	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD			Jumlah jenis barang cetakan yang dibeli 1 Jenis	1 Jenis	29,871,000	38,832,300	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD			Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 Jenis	1 Jenis	6,250,000	8,125,000	
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD			Jumlah Jenis Bahan bacaan dan peraturan perUUan 1 Jenis	1 Jenis	21,000,000	27,300,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Penyediaan makanan dan minuman	SKPD			Jumlah Waktu Penyediaan makanan dan minuman 12 Bulan	12 Bulan	24,453,000	31,788,900	
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SKPD			Jumlah Rapat-rapat koordinasi keluar daerah yang diikuti 4 Kali	4 Kali	150,000,000	195,000,000	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD			Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik 12 Bulan	12 Bulan	72,304,000	93,995,200	
		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD			Jumlah jenis Jasa peralatan perlengkapan kantor 1 Jenis	1 Jenis	36,240,000	47,112,000	
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD			Jumlah jasa Administrasi Keuangan yang tersedia 1 Jasa	1 Jasa	21,180,000	27,534,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD			Jumlah Jasa Kebersihan Kantor 1 Jasa	1 Jasa	21,483,000	27,927,900	
		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD			Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kantor 1 Jasa	1 Jasa	30,300,000	39,390,000	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Jumlah Kegiatan Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	7 Kegiatan					Inspektorat Daerah
		Pengadaan mebeleur	SKPD			Jumlah jenis mebeleur yang dibeli 1 Jenis	1 Jenis	14,350,000	18,655,000	
		Pengadaan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS)	SKPD			Jumlah Jenis Sistem Informasi Manajemen Pengawasan 1 Jenis	1 Jenis	200,000,000	260,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS)	SKPD		Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pengawasan yang mendapat pemeliharaan 1 Unit	1 Unit	-	-	
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD		Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12 Kali	12 Kali	68,800,000	89,440,000	
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan 10 Unit	10 Unit	234,807,500	305,249,750	
			Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	SKPD		Jumlah gedung kantor yang mendapat Rehabilitas sedang/berat 1 Unit	1 Unit	-	-	
			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	SKPD		Jumlah Perlengkapan Gedung kantor yang	1 Unit	30,087,000	39,113,100	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

						dibeli 1 Unit				
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Jumlah Kegiatan Peningkatan Disiplin Aparatur	1 Kegiatan				Inspektorat Daerah
			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	SKPD			Jumlah Pakaian dinas beserta kelengkapannya yang diadakan 40 Stel	40 Stel	27,000,000	35,100,000
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1 Kegiatan				Inspektorat Daerah
			Pendidikan dan pelatihan formal	SKPD			Jumlah Orang yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal 2 Orang	2 Orang	15,000,000	19,500,000

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Jumlah Kegiatan Peningkatan Pengembang an Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	6 Kegiatan					Inspektorat Daerah
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	SKPD			Jumlah jenis laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1 Jenis	1 Jenis	3,000,000	3,900,000	
		Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	SKPD			Jumlah jenis Laporan Keuangan Semesteran 1 Jenis	1 Jenis	3,000,000	3,900,000	
		Penyusunan Pelaporan Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan OPD	SKPD			Jumlah Jenis Dokumen Laporan Kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 1 Jenis	1 Jenis	10,000,000	12,000,000	
		penyusunan pelaporan	SKPD			Jumlah Jenis Laporan Keuangan	1 Jenis	3,000,000	3,900,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		keuangan akhir tahun				Akhir Tahun 1 Jenis				
		Penyusunan RENJA (RKT, RKA, dan DPA)	SKPD			Jumlah jenis Dokumen Perencanaan Kinerja 1 Jenis	1 Jenis	3,000,000	3,900,000	
		Penyusunan RENSTRA	SKPD			Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan Kinerja Jangka Menengah 1 Jenis	1 Jenis	20,000,000	26,000,000	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								Badan Perencanaan dan Pembangunan dan Litbang Daerah
		Penyediaan alat tulis kantor	SKPD			jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia 42 jenis	42 jenis	24,500,000	30,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD			jumlah jenis barang cetakan yang tersedia 8 jenis	8 jenis	35,500,000	35,500,000	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD			jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia 1 jenis	1 jenis	10,000,000	10,000,000	
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD			jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia 2 jenis	2 jenis	160,000,000	35,000,000	
		Penyediaan peralatan rumah tangga	SKPD			jumlah jenis peralatan rumah tangga yang tersedia 2 jenis	2 jenis	10,000,000	5,000,000	
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD			jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia 2 jenis	2 jenis	8,000,000	5,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Penyediaan makanan dan minuman	SKPD			jumlah jenis waktu penyediaan makanan dan minuman yang tersedia 11 bulan	11 bulan	65,000,000	65,000,000	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Daerah			jumlah waktu yang disediakan untuk rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 12 bulan	12 bulan	340,000,000	400,000,000	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD			jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan telepon 12 bulan	12 bulan	193,659,000	220,000,000	
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD			jumlah waktu penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan	12 bulan	105,500,000	100,000,000	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD			jumlah waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	32,000,000	36,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

						12 bulan				
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD		jumlah waktu yang disediakan untuk pemeliharaan peralatan kerja 12 bulan	12 bulan	45,000,000	45,000,000	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD		jumlah jenis pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 unit	1 unit	50,000,000	40,000,000	
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD		jumlah unit kendaraan yang mendapatkan perawatan rutin/berkala 5 unit	5 unit	145,740,000	150,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Pemeliharaan Taman Kantor	SKPD			jumlah waktu pemeliharaan taman kantor 12 bulan	12 bulan	18,500,000	20,000,000	
		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	SKPD			jumlah jenis perlengkapan gedung yang tersedia 3 jenis	3 jenis	30,000,000	-	
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur								Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah
		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	SKPD			jumlah pakaian dinas yang tersedia 56 stel	56 stel	40,000,000	33,000,000	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Pendidikan dan pelatihan formal	SKPD			jumlah PNS yang mengikuti diklat/bintek/sosialisasi/diklat dalam satu tahun 11 orang	11 orang	50,000,000	50,000,000	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	SKPD			jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersedia 3 dokumen	3 dokumen	15,000,000	15,000,000	
		Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	SKPD			jumlah dokumen laporan keuangan semesteran yang tersedia 1 dokumen	1 dokumen	10,000,000	10,000,000	
		Penyusunan Pelaporan Penyelenggaraan	Kota			jumlah laporan SPIP yang tersedia 2	2 laporan	10,000,000	-	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			SPIP di Lingkungan OPD			laporan				
			penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD	SKPD		jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersedia 4 dokumen	4 dokumen	12,000,000	12,500,000	
			Penyusunan Renja (RKT, RKA dan DPA)	SKPD		jumlah jumlah dokumen laporan RENJA (RKT, RKA, dan DPA) 3 dokumen	3 dokumen	12,500,000	12,500,000	
			Penyusunan RENSTRA	SKPD		jumlah dokumen OPD yang tersedia 1 dokumen	1 dokumen	40,000,000	-	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							Badan Kepegawai an dan Pengemba ngan Sumber Daya Manusia Daerah

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Penyediaan alat tulis kantor	SKPD			Jumlah jenis alat tulis kantor yang dibeli 37 Jenis	37 Jenis	40,000,000	45,000,000	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD			Jumlah jenis barang cetakan yang dibeli 12 Jenis	12 Jenis	25,000,000	45,000,000	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD			Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang dibeli 11 Jenis	11 Jenis	6,000,000	8,000,000	
		Penyediaan peralatan rumah tangga	SKPD			Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang dibeli 2 Jenis	2 Jenis	4,000,000	6,000,000	
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD			Jumlah jenis bahan bacaan yang tersedia 1 Jenis	1 Jenis	6,000,000	8,000,000	
		Penyediaan makanan dan minuman	SKPD			Jumlah waktu peyediaan makanan dan minuman 12	12 Bulan	7,500,000	30,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

						Bulan				
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SKPD			Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri 50 Kali	50 Kali	250,000,000	250,000,000	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD			Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 Bulan	12 Bulan	110,000,000	120,000,000	
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD			, KotaJumlah jasa administrasi keuangan yang tersedia 7 Jasa	7 Jasa	80,000,000	85,000,000	
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD			Jumlah waktu peyediaan jasa kebersihan kantor 12 Bulan	12 Bulan	40,000,000	45,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD			Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki 32 Unit/Tahun	32 Unit/Tahun	30,000,000	45,000,000	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD			Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Kali	1 Kali	40,000,000	40,000,000	
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD			Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara 4 Unit	4 Unit	140,000,000	140,000,000	
			Program Peningkatan Kapasitas								Badan Kepegawaian dan Pengembangan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Sumber Daya Aparatur							ngan Sumber Daya Manusia Daerah
			Pendidikan dan pelatihan formal	Luar Daerah		Jumlah PNS yang mengikuti diklat formal 20 Orang	20 Orang	45,000,000	150,000,000	
			Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah	Kota		Jumlah pelaksanaan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah 1 Kali	1 Kali	80,000,000	100,000,000	
			Peninjauan masa kerja dan Peningkatan Pendidikan PNS	Kota		Jumlah ASN yang mendapat tambahan masa kerja dan peningkatan pendidikan 50 Orang	50 Orang	30,000,000	30,000,000	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							Badan Kepegawai an dan Pengemba ngan Sumber Daya

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

Manusia
Daerah

			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	SKPD		Jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang dibuat 3 Jenis	3 Jenis	2,000,000	2,000,000	
			Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	SKPD		Jumlah jenis laporan semesteran/ prognosis keuangan yang dibuat 1 Jenis	1 Jenis	2,000,000	2,000,000	
			Forum Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	SKPD		Jumlah dokumen hasil pengendalian intern OPD 1 Jenis	1 Jenis	10,000,000	10,000,000	
			penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	SKPD		Jumlah jenis laporan keuangan akhir tahun yang dibuat 1 Jenis	1 Jenis	2,000,000	2,000,000	
			Penyusunan RENJA (RKT, RKA, dan DPA)	SKPD		Jumlah dokumen Renja, RKA dan DPA	3 Jenis	2,000,000	2,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

						yang dibuat 3 Jenis				
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Penyediaan alat tulis kantor	SKPD			jumlah waktu penyediaan atk 12 Bulan	12 Bulan	21,165,500	22,223,000
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD			Jumlah waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan	12 Bulan	15,797,000	16,586,000
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD			Jumlah waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12 Bulan	12 Bulan	4,972,500	5,221,000

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD			Jumlah waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 12 Bulan	12 Bulan	6,930,000	2,726,000	
		Penyediaan makanan dan minuman	SKPD			Jumlah waktu penyediaan makanan dan minuman 1 Paket	1 Paket	40,000,000	42,000,000	
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SKPD			Jumlah rapat koordinasi keluar daerah yang diikuti 28 Kali	28 Kali	200,000,000	210,000,000	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD			Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan	12 bulan	45,000,000	47,250,000	
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD			Jumlah waktu penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan	12 bulan	58,605,000	61,535,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD			Jumlah waktu penyediaan jasa kebersihan kantor 12 Bulan	12 Bulan	42,655,000	43,778,000	
		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD			Jumlah peralatan kerja yang mendapat perbaikan 23 unit	23 unit	38,867,000	40,810,000	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD			Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Paket	1 Paket	23,100,000	24,255,000	
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala 12 Bulan	12 Bulan	176,295,000	185,110,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Program Peningkatan Disiplin Aparatur							Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	SKPD		Jumlah pakaian dinas yang di buat 35 Stel	35 Stel	17,150,000	18,000,000	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Pendidikan dan pelatihan formal	SKPD		Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal 7 orang	7 orang	70,000,000	73,500,000	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	SKPD			Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd yang disusun 3 laporan	3 laporan	4,000,000	4,200,000	
			Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	SKPD			Jumah laporan keuangan semesteran yang disusun 1 laporan	1 laporan	4,000,000	4,200,000	
			Penyusunan Pelaporan Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan OPD	SKPD			Jumlah laporan SPIP yang disusun 1 Lap	1 Lap	10,000,000	10,500,000	
			penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	SKPD			Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun 1 laporan	1 laporan	5,000,000	5,250,000	
			Penyusunan RENJA (RKT,RKA,DPA)	SKPD			Jumlah dokumen RENJA(RKA,RKT dan DPA) yang disusun 3 laporan	3 laporan	10,000,000	10,500,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Penyusunan RENSTRA	SKPD			Jumlah dokumen renstra yang disusun 3 laporan	3 laporan	6,000,000	6,300,000	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								Dinas Lingkungan Hidup
		Penyediaan alat tulis kantor	SKPD			jumlah jenis alat tulis yang tersedia 46 jenis	46 jenis	29,998,000	32,997,800	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD			jumlah jenis barang 2 jenis	2 jenis	15,000,000	16,500,000	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD			jumlah jenis komponen instansi listrik/penerangan bangunan kantor 9 jenis	9 jenis	5,000,000	5,500,000	
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD			jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli 4 unit	4 unit	40,000,000	44,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Penyediaan makanan dan minuman	SKPD			jumlah waktu tersedianya makan dan minum 12 bualn	12 bualn	13,500,000	14,850,000	
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Daerah			jumlah pegawai yang mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah 50 orang	50 orang	350,000,000	385,000,000	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD			jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi dan listrik 12 bulan	12 bulan	253,200,000	278,520,000	
		Penyediaan jasa penunjang administrasi perkantoran	SKPD			jumlah jasa penunjang administrasi perkantoran yang tersedia 8 orang	8 orang	162,400,000	178,640,000	
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD			Jumlah jasa administrasi keuangan yang tersedia 12 bulan	12 bulan	124,650,000	137,115,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD			jumlah jasa kebersihan kantor 1 jasa	1 jasa	25,274,000	27,801,400	
		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD			jumlah peralatan kerja yang mendapat perbaikan 25 unit	25 unit	40,000,000	44,000,000	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								Dinas Lingkungan Hidup
		pemeliharaan rumah penjaga kantor	SKPD			jumlah pemeliharaan rumah penjaga kantor 1 kali	1 kali	75,000,000	82,500,000	
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD			jumlah pemeliharaan gedung kantor 1 kali	1 kali	294,989,550	324,488,505	
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD			jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapatkan pemeliharaan 8 unit	8 unit	237,052,400	260,757,640	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Program Peningkatan Disiplin Aparatur							Dinas Lingkungan Hidup
			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	SKPD			jumlah pakaian dinas yang di buat 100 stel	100 stel	50,000,000	55,000,000
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							Dinas Lingkungan Hidup
			Pendidikan dan pelatihan formal	SKPD			jumlah pegawai/ASN yang mendapat pendidikan dan pelatihan formal 100 orang	100 orang	50,000,000	55,000,000
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							Dinas Lingkungan Hidup

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	SKPD			jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd 1 laporan	1 laporan	3,150,000	3,465,000	
		Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	SKPD			jumlah laporan keuangan semesteran 1 laporan	1 laporan	3,150,000	3,465,000	
		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	SKPD			jumlah laporan keuangan akhir tahun 1 laporan	1 laporan	3,150,000	3,465,000	
		Penyusunan Renja (RKT, RKA, dan DPA)	SKPD			jumlah dokumen kerja (RKT,RKA,DPA) 1 laporan	1 laporan	3,150,000	3,465,000	
		Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal	SKPD			jumlah laporan SPM 1 laporan	1 laporan	3,150,000	3,465,000	
		Penyusunan RENSTRA	SKPD			jumlah dokumen renstra skpd 1 dokumen	1 dokumen	3,150,000	3,465,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Program Peningkatan PAD dan Pendapatan lainnya							Dinas Lingkungan Hidup
			Peningkatan Penerimaan PAD	SKPD			jumlah jenis tanda bukti retribusi yang dicetak 5 jenis	5 jenis	28,200,000	31,020,000
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Penyediaan alat tulis kantor	SKPD			Tersedianya alat tulis kantor 12 Bulan	12 Bulan	38,488,500	42,337,350
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD			Tersedianya barang cetak dan penggandaan 12 Bulan	12 Bulan	32,230,000	35,453,000
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD			Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan 25 Jenis	25 Jenis	20,000,000	22,000,000

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD			Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor 3 Jenis	3 Jenis	57,550,000	82,500,000	
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD			Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 12 Bulan	12 Bulan	5,000,000	5,500,000	
		Penyediaan makanan dan minuman	SKPD			Tersedianya makan dan minum 12 Bulan	12 Bulan	20,000,000	22,000,000	
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Daerah			Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah 12 Bulan	12 Bulan	250,000,000	275,000,000	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD			Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 Bulan	12 Bulan	379,256,457	421,197,102	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD			Tersedianya jasa administrasi keuangan 12 Bulan	12 Bulan	487,090,000	535,799,000	
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD			Tersedianya jasa kebersihan kantor 12 Bulan	12 Bulan	60,950,000	67,045,000	
		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD			Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja 4 Jasa	4 Jasa	25,000,000	27,500,000	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Peningkatan Pelayanan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TIK(Teknologi Informasi dan Komunikasi)	SKPD			Jumlah jenis peningkatan pelayanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana TIK 4 Jenis	4 Jenis	100,000,000	110,000,000	
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD			Terpeliharanya gedung kantor 12	12 Bulan	67,450,000	110,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

						Bulan				
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD			Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 12 Bulan	12 Bulan	105,019,000	115,520,900
			Pengadaan peralatan gedung kantor	SKPD			Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan 2 Jenis	2 Jenis	25,000,000	27,500,000
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pendidikan dan pelatihan formal	Luar Daerah, Kota			Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal 15 Orang	15 Orang	50,000,000	100,000,000
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Capaian Kinerja dan Keuangan							
			Penyusunan Dokumen Evaluasi Perencanaan Pembangunan	Kota, SKPD		Jumlah dokumen evaluasi perencanaan pembangunan yang disusun 5 Dokumen	5 Dokumen	319,000,000	350,900,000	
			Bimtek Penatausahaan Keuangan sekolah	Kota		Jumlah peserta yang mengikuti bimtek penatausahaan keuangan sekolah 76 Sekolah	76 Sekolah	138,198,237	152,018,000	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Kota, SKPD		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang disusun 2 Dokumen	2 Dokumen	115,000,000	126,500,000	
			Pelaksanaan Pendataan Pendidikan dan Kebudayaan	Kota, SKPD		Jumlah Buku pendataan pendidikan yang disusun 4 Buku	4 Buku	315,000,000	346,500,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	SKPD			Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun 2 Laporan	2 Laporan	5,000,000	5,500,000	
		Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	SKPD			Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun 1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	5,500,000	
		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	SKPD			Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun 1 Laporan	1 Laporan	6,000,000	6,600,000	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Penyediaan alat tulis kantor	SKPD			Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan	12 bulan	58,000,000	58,580,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD			Formulir formulir dan hasil fotocopy 12 bulan	12 bulan	25,000,000	27,500,000	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD			Tersedianya alat - alat listrik/ penerangan untuk bangunan kantor 12 bulan	12 bulan	9,000,000	9,900,000	
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD			Tersedianya bahan bacaan 12 bulan	12 bulan	6,000,000	6,600,000	
		Penyediaan makanan dan minuman	SKPD			Tersedianya makan dan minum kantor 12 bulan	12 bulan	10,000,000	11,000,000	
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SKPD			Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 bulan	12 bulan	250,000,000	275,000,000	
		Penyediaan Jasa Perkantoran	SKPD			Tersedianya jasa administrasi perkantoran 12	12 bulan	1,126,500,000	1,239,150,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

					bulan					
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD		Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan internet 12 bulan	12 bulan	227,871,620	3,721,275,682		
		Pemasangan baru/ Penambahan daya Listrik	SKPD		Terlaksananya pemasangan baru/ penambahan daya listrik 12 bulan	12 bulan	-	-		
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD		Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan 12 bulan	12 bulan	392,868,000	432,154,800		
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD		Tersedianya peralatan dan jasa kebersihan kantor 12 bulan	12 bulan	66,000,000	72,600,000		
		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD		Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur 12 bulan	12 bulan	35,000,000	38,500,000		

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							Dinas Kesehatan, Pengendali an Penduduk dan Keluarga Berencana
			Pengadaan mebeleur	SKPD			Tersedianya mebeler 12 bulan	12 bulan	75,000,000	82,500,000
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD			Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 12 bulan	12 bulan	75,000,000	82,500,000
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasiona l	SKPD			Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 12 bulan	12 bulan	130,000,000	143,000,000
			Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	SKPD			Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor 12 bulan	12 bulan	1,000,000	1,100,000

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	SKPD			Tersedianya perlengkapan gedung kantor 12 bulan	12 bulan	100,000,000	110,000,000	
		Pengadaan peralatan gedung kantor	SKPD			Tersedianya peralatan gedung kantor 12 bulan	12 bulan	100,000,000	110,000,000	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	SKPD			Terlaksananya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 12 bulan	12 bulan	26,700,000	29,370,000	
		Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	SKPD			Tersedianya laporan keuangan semesteran 12 bulan	12 bulan	10,000,000	11,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Penyusunan Pelaporan Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan OPD	SKPD			Terlaksananya laporan SPIP 12 bulan	12 bulan	10,000,000	11,000,000	
		Penyusunan RENSTRA	SKPD			Tersedianya dokumen Renstra 1 dokumen	1 dokumen	25,340,000	27,874,000	
		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	SKPD			Tersedianya laporan keuangan akhir tahun 12 bulan	12 bulan	11,305,000	12,435,500	
		Penyusunan RENJA (RKT, RKA, dan DPA)	SKPD			Terlaksananya Laporan RENJA Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 12 bulan	12 bulan	32,700,000	35,970,000	
		Program Peningkatan PAD dan Pendapatan lainnya								Dinas Kesehatan, Pengendali an Penduduk dan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

											Keluarga Berencana
			Peningkatan Penerimaan PAD	SKPD			Tersedianya blangko - blangko retribusi 12 bulan	12 bulan	7,000,000	7,700,000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Penyediaan alat tulis kantor	SKPD			Jumlah waktu penyediaan biaya pembelian ATK 12 Bulan	12 Bulan	30,000,000	33,000,000	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD			Jumlah waktu penyediaan biaya barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan	12 Bulan	19,000,000	20,900,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD			Jumlah waktu penyediaan biaya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12 Bulan	12 Bulan	10,000,000	11,000,000	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD			Jumlah waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 12 Bulan	12 Bulan	6,600,000	6,600,000	
			Penyediaan makanan dan minuman	SKPD			Jumlah waktu penyediaan makanan dan minuman 12 Bulan	12 Bulan	48,114,000	52,925,400	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Daerah			Jumlah waktu penyediaan biaya perjalanan dinas rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 Bulan	12 Bulan	300,000,000	400,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD			Jumlah waktu penyediaan biaya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik 12 Bulan	12 Bulan	70,075,750	77,151,500	
		Pembinaan dan Peningkatan koordinasi pelaksanaan tugas dinas	SKPD			Jumlah waktu terlaksananya penataan dan pengelolaan arsip dan aset kantor 2 Bulan	2 Bulan	20,000,000	-	
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD			Jumlah waktu penyediaan jasa administrasi keuangan 12 Bulan	12 Bulan	131,770,000	131,770,000	
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD			Jumlah waktu penyediaan jasa kebersihan kantor 12 Bulan	12 Bulan	61,624,000	61,624,000	
		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD			Jumlah waktu penyediaan biaya jasa perbaikan peralatan kerja 12	12 Bulan	39,370,000	43,307,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

						Bulan				
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Pengadaan mebeleur	SKPD			Jumlah mebeleur yang diadakan 9 Unit	9 Unit	28,600,000	50,000,000
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD			Jumlah gedung/bangunan/pasarana kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala 1 Unit	1 Unit	102,686,250	108,500,000
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala 10 Unit	10 Unit	424,164,000	440,000,000

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Pembangunan gedung kantor	SKPD			Jumlah gedung/bangunan/pasarana kantor yang dibangun 1 Unit	1 Unit	183,120,000	179,800,000	
		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	SKPD			Jumlah peralatan penunjang perkantoran yang diadakan 8 Unit	8 Unit	43,500,000	75,000,000	
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur								Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	SKPD			Jumlah pakaian dinas yang diadakan 75 Stel	75 Stel	35,190,000	38,709,000	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

										Perlindungan Anak
		Pendidikan dan pelatihan formal	Kota, Luar Daerah			Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal 3 Orang	3 Orang	15,000,000	25,000,000	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	SKPD			Jumlah laporan yang disusun 1 Laporan	1 Laporan	3,600,000	3,960,000	
		Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	SKPD			Jumlah laporan yang disusun 1 Laporan	1 Laporan	3,300,000	3,630,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD	SKPD			Jumlah laporan yang disusun 1 Laporan	1 Laporan	3,300,000	3,630,000	
		Penyusunan RENja (RKT, RKA, DPA)	SKPD			Jumlah laporan yang disusun 3 Laporan	3 Laporan	3,600,000	3,960,000	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								Dinas Perhubungan
		Penyediaan alat tulis kantor	SKPD			Jumlah Jenis alat tulis kantor yang dapat tersedia 15 Jenis	15 Jenis	25,000,000	30,000,000	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD			Jumlah Jenis barang cetakan dan penggandaan 3 Jenis	3 Jenis	20,000,000	30,000,000	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD			Jumlah Jenis Komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor yang dapat tersedia 5 Jenis	5 Jenis	5,000,000	6,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD			Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dapat tersedia 7 Jenis	7 Jenis	150,000,000	170,000,000	
		Penyediaan peralatan rumah tangga	SKPD			Jumlah Jenis peralatan rumah tangga 5 Jenis	5 Jenis	15,000,000	20,000,000	
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD			Jumlah explar bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4 Explar	4 Explar	7,500,000	8,500,000	
		Penyediaan makanan dan minuman	SKPD			Jumlah waktu penyediaan makanan dan minuman 12 Bulan	12 Bulan	5,000,000	10,000,000	
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Daerah, Kota, SKPD			Jumlah pegawai yang mengikuti rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 20 Orang	20 Orang	150,000,000	220,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD			Jumlah Rekening Penyedia Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia 4 Rekening	4 Rekening	6,500,000,000	7,000,000,000	
		Penataan Arsip Perkantoran	SKPD			Jumlah Pelaksanaan Penataan arsip 1 Kegiatan	1 Kegiatan	40,000,000	50,000,000	
		Penyediaan jasa perbaikan perlengkapan kantor	SKPD			Jumlah Jenis peralatan kantor yang dapat diperbaiki 5 Jenis	5 Jenis	15,000,000	23,000,000	
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD			Jumlah Jasa Tenaga kerja Administrasi keuangan yang tersedia 3 Orang	3 Orang	115,000,000	120,000,000	
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD			Jumlah Jasa Tenaga kerja Kebersihan Kantor 2 Orang	2 Orang	45,000,000	60,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD			Jumlah Jenis peralatan kerja yang dapat di perbaiki 5 Jenis	5 Jenis	15,000,000	35,000,000	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								Dinas Perhubungan
		Pengadaan mebeleur	SKPD			Jumlah jenis Mebeleur yang dapat tersedia 3 Jenis	3 Jenis	20,000,000	20,000,000	
		Pengadaan Handy Talky	SKPD			Jumlah Alat Komunikasi (HT) yang dapat tersedia 10 Buah	10 Buah	25,000,000	-	
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD			Jumlah gedung kantor yang dapat diperbaiki 1 Buah Gedung	1 Buah Gedung	125,000,000	100,000,000	
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	Kota, SKPD			Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang dapat	13 Unit	335,000,000	375,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		dinas/operasional			diperbaiki 13 Unit					
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	SKPD		Jumlah Jenis peralatan gedung kantor yang dapat diperbaiki 4 Jenis	4 Jenis	10,000,000	10,000,000		
		Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	SKPD		jumlah jenis mebeleur yang dapat di perbaiki 3 Jenis	3 Jenis	-	20,000,000		
		Pembangunan gedung kantor	Kota, SKPD		Jumlah Fasilitas Gedung kantor yang dibangun 1 Gedung	1 Gedung	200,000,000	-		
		Pemeliharaan dan Pemindahan Alat Komunikasi HT	SKPD		Jumlah Alat Komunikasi (HT) yang diperbaiki 15 Buah	15 Buah	20,000,000	-		
		Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	SKPD		Jumlah gedung kantor yang dapat direhab 1 Buah Gedung	1 Buah Gedung	45,000,000	-		

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	SKPD			Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang dapat diperbaiki 3 Unit	3 Unit	45,000,000	-	
		pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Kota, SKPD			Jumlah Kendaraan dinas/operasional 1 Unit	1 Unit	-	-	
		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	SKPD			Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang dapat tersedia 5 Jenis	5 Jenis	30,000,000	-	
		Pengadaan peralatan gedung kantor	SKPD			Jumlah Jenis peralatan gedung kantor yang dapat tersedia 6 Jenis	6 Jenis	-	200,000,000	
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur								Dinas Perhubungan
		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	SKPD			Jumlah Pakaian dinas beserta perlengkapannya yang dapat tersedia	87 steel	80,000,000	90,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

						87 steel				
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							Dinas Perhubungan
			Pendidikan dan pelatihan formal	Luar Daerah, Kota		Jumlah SDM yang dapat mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal 8 Orang	8 Orang	80,000,000	120,000,000	
			Monitoring dan Evaluasi di Bidang Perhubungan	Kota, SKPD		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi 3 Dokumen	3 Dokumen	50,000,000	60,000,000	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							Dinas Perhubungan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	SKPD			Jumlah dokumen Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD 3 Dokumen	3 Dokumen	2,500,000	2,500,000	
		Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	SKPD			Jumlah dokumen Laporan Keuangan semesteran yang tersedia 3 Dokumen	3 Dokumen	2,500,000	2,500,000	
		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	SKPD			Jumlah dokumen Laporan Keuangan akhir tahun yang tersedia 3 Dokumen	3 Dokumen	2,500,000	2,500,000	
		Penyusunan RENJA (RKT, RKA, dan DPA)	SKPD			Jumlah Dokumen Perencanaan Jangka Pendek yang tersedia 3 Dokumen	3 Dokumen	2,500,000	2,500,000	
		Penyusunan RENSTRA	SKPD			Jumlah Dokumen Perencanaan Jangka Menengah yang tersedia 3 Dokumen	3 Dokumen	2,500,000	2,500,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Program Peningkatan PAD dan Pendapatan lainnya							Dinas Perhubung an
			Penyelenggaraan Perparkiran	Kota, SKPD			Jumlah Jasa Pendukung Penyelenggaraan Perparkiran 14 Orang	14 Orang	335,000,000	320,000,000
			Penyelenggaraan Terminal	Kota, SKPD			Jumlah Terminal yang Terselenggara 4 Terminal	4 Terminal	70,000,000	85,000,000
			Peningkatan Penerimaan PAD Dinas Perhubungan	Kota, SKPD			Jumlah Jasa Pendukung Peningkatan Penerimaan PAD 4 Orang	4 Orang	98,600,000	97,500,000
			Penyelenggaraan UPTD.PPTD	Kota, SKPD			Jumlah Kendaraan Angkutan Umum dan Barang yang Laik Jalan 7.500 Unit	7.500 Unit	230,000,000	275,120,000
			Program Pelayanan							Dinas Kependudu kan dan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

Pencatatan
Sipil

		Administrasi Perkantoran								
		Penyediaan alat tulis kantor	SKPD			Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia 40 jenis	40 jenis	45,240,000	50,245,000	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD			Jumlah waktu barang cetakan adan penggandaan yang tersedia 12 bulan	12 bulan	19,710,000	23,881,000	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranga n bangunan kantor	SKPD			Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 18 jenis	18 jenis	11,682,000	12,905,000	
		Penyediaan makanan dan minuman	SKPD			Jumlah jenis penyediaan makanan dan minuman 2 jenis	2 jenis	8,580,000	22,500,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Daerah		Jumlah pegawai yang mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 35 orang	35 orang	150,000,000	300,000,000	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD		jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya ir dan listrik 12 bulan	12 bulan	216,800,000	238,480,000	
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD		Jumlah waktu penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan	12 bulan	31,863,000	39,942,000	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD		Jumlah waktu penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan	12 bulan	28,836,500	31,720,000	
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD		jumlah waktu penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 12 bulan	12 bulan	48,490,000	53,339,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD		Jumlah gedung kantor yang mendapat pemeliharaan 1 unit	1 unit	20,950,000	23,045,000	
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD		Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara 3 unit/tahun	3 unit/tahun	98,705,000	108,576,000	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	SKPD		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 1 laporan	1 laporan	8,000,000	8,800,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	SKPD			Jumlah laporan keuangan semesteran 1 laporan	1 laporan	3,500,000	4,500,000	
		Penyusunan Pelaporan Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan OPD	SKPD			Jumlah laporan hasil implementasi SPIP 1 laporan	1 laporan	10,000,000	12,000,000	
		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	SKPD			Jumlah laporan keuangan akhir tahun 1 laporan	1 laporan	4,000,000	5,000,000	
		Penyusunan RENJA (RKT, RKA, dan DPA)	SKPD			Jumlah dokumen perencanaan jangka pendek yang disusun 1 dokumen	1 dokumen	5,000,000	5,000,000	
		Penyusunan RENSTRA	SKPD			Jumlah dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun 1 dokumen	1 dokumen	20,000,000	-	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								Dinas Koperasi, UMKM dan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

									Perdagangan
		Penyusunan dokumen ketatalaksanaan perizinan	SKPD		Jumlah penyediaan peralatan kantor 70 unit	70 unit	80,800,000	94,380,000	
		Penyediaan alat tulis kantor	SKPD		Jumlah penyediaan alat tulis kantor 49 jenis	49 jenis	55,400,000	63,140,000	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD		Jumlah penyediaan barang cetakan dan pengadaan 19 jenis	19 jenis	44,000,000	51,700,000	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD		Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 10 jenis	10 jenis	15,000,000	16,500,000	
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD		Jumlah peralatan kantor yang di beli 4 unit	4 unit	27,000,000	29,700,000	
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan	SKPD		Jumlah penyediaan media massa 2 media masa	2 media masa	4,800,000	6,350,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		perundang-undangan								
		Penyediaan makanan dan minuman	SKPD			Jumlah waktu penyediaan makan dan minum 11 bulan	11 bulan	29,000,000	86,218,000	
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SKPD			Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 25 kali	25 kali	150,000,000	330,000,000	
		Penyediaan Jasa Perkantoran	SKPD			Jumlah penyediaan jasa perkantoran 2 orang	2 orang	33,292,000	36,621,200	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD			Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan	12 bulan	90,000,000	110,000,000	
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD			Jumlah jasa penyediaan administrasi keuangan 14 jasa	14 jasa	129,000,000	145,400,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD			Jumlah jasa kebersihan kerja 1 jasa	1 jasa	36,000,000	42,680,000	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Jumlah upaya peningkatan disiplin aparatur	3 kegiatan					Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
		Pengadaan Meubelair Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SKPD			Jumlah meubelair yang diadakan 30 unit	30 unit	-	49,500,000	
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD			Jumlah unit pemeliharaan gedung kantor 2 unit	2 unit	-	44,000,000	
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD			Jumlah unit pemeliharaan kendaraan dinas operasional 4 unit	4 unit	146,716,500	161,388,150	
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur								Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	SKPD			Jumlah pakaian dinas yang diadakan 97 pakaian	97 pakaian	44,550,000	52,140,000	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Jumlah upaya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1 kegiatan					Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
			Pendidikan dan pelatihan formal	SKPD			Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan 38 orang	38 orang	70,000,000	165,000,000	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	SKPD			Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 1 dokumen	1 dokumen	10,000,000	11,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	SKPD		Jumlah dokumen laporan keuangan semester 1 dokumen	1 dokumen	10,000,000	11,000,000	
		Penyusunan Pelaporan Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan OPD	SKPD		Jumlah dokumen SPIP 1 dokumen	1 dokumen	10,000,000	11,000,000	
		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	SKPD		Jumlah laporan keuangan tahunan 1 dokumen	1 dokumen	10,000,000	11,000,000	
		Penyusunan RENJA (RKT, RKA, dan DPA)	SKPD		Jumlah dokumen laporan Renja 1 dokumen	1 dokumen	10,000,000	11,000,000	
		Penyusunan RENSTRA	SKPD		Jumlah dokumen Renstra 1 dokumen	1 dokumen	10,000,000	11,000,000	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							Badan Keuangan Daerah
		Penyediaan alat tulis kantor	SKPD		jumlah jenis alat tulis kantor yang dibeli 50 jenis	50 jenis	70,000,000	80,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD			jumlah jenis barang cetakan dan pengadaan yang dibeli 14 jenis	14 jenis	100,000,000	110,000,000	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD			jumlah jenis alat listrik yang dibeli 11 jenis	11 jenis	7,000,000	10,000,000	
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD			jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli 4 jenis	4 jenis	100,000,000	200,000,000	
		Penyediaan peralatan rumah tangga	SKPD			jumlah peralatan rumah tangga yang dibeli 3 jenis	3 jenis	3,000,000	5,000,000	
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD			jumlah media cetak yang di beli 2 media cetak	2 media cetak	10,000,000	20,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Penyediaan makanan dan minuman	SKPD			jumlah waktu penyediaan makanan dan minuman 12 bulan	12 bulan	150,000,000	200,000,000	
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SKPD			jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 60 kali	60 kali	435,000,000	600,000,000	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD			jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan	12 bulan	620,000,000	700,000,000	
		Penataan Arsip Perkantoran	SKPD			jumlah jasa penataan arsip perkantoran 3 orang	3 orang	70,000,000	75,000,000	
		Penataan inventarisasi Aset SKPD	SKPD			jumlah jasa penataan inventarisasi aset skpd 3 orang	3 orang	70,000,000	75,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD			jumlah waktu jasa administrasi keuangan 12 bulan 0	12 bulan 0	90,000,000	100,000,000	
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD			jumlah waktu penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan	12 bulan	80,000,000	90,000,000	
		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD			jumlah jenis peralatan kerja yang diperbaiki 9 jenis	9 jenis	100,000,000	110,000,000	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								Badan Keuangan Daerah
		Pengadaan mebeleur	SKPD			jumlah jenis mebeleur yang dibeli 2 jenis	2 jenis	75,000,000	100,000,000	
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD			jumlah gedung kantor yang mendapat pemeliharaan rutin 1	1 unit	70,000,000	80,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

						unit				
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD			jumlah kendaraan operasional yang mendapat pemeliharaan rutin 8 unit	8 unit	350,000,000	400,000,000	
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	SKPD			jumlah jenis peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan rutin 3 jenis	3 jenis	50,000,000	100,000,000	
		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	SKPD			jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang di beli 4 jenis	4 jenis	75,000,000	200,000,000	
		Pengadaan peralatan gedung kantor	SKPD			jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dibeli 1 jenis	1 jenis	194,580,120	200,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Program Peningkatan Disiplin Aparatur								Badan Keuangan Daerah
			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	SKPD			jumlah pakaian yang dibuat 150 steal	150 steal	100,000,000	120,000,000	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								Badan Keuangan Daerah
			Pendidikan dan pelatihan formal				jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal 10 pegawai	10 pegawai	75,000,000	100,000,000	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								Badan Keuangan Daerah

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	SKPD			jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja skpd yang disusun 1 laporan	1 laporan	7,000,000	10,000,000	
		Penatausahaan Buku Kas Umum Daerah	SKPD			jumlah buku kas daerah yang disusun 16 buku	16 buku	335,000,000	368,500,000	
		Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	SKPD			jumlah dokumen sopyang disusun 1 dokumen	1 dokumen	25,000,000	30,000,000	
		Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	SKPD			jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun 1 laporan	1 laporan	5,000,000	7,500,000	
		Penyusunan Pelaporan Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan OPD	SKPD			jumlah spip yang disusun 1 laporan	1 laporan	10,000,000	12,000,000	
		Penyusunan pelaporan prognosis	SKPD			jumlah laporan prognosisrealisasi anggaran yang	1 laporan	156,007,500	195,009,375	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		realisasi anggaran				disusun 1 laporan				
		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD	SKPD			jumlah laporan keuangan akhir tahunan yang disusun 1 laporan	1 laporan	5,000,000	7,500,000	
		Penyusunan Renja (RKT, RKA, dan DPA)	SKPD			jumlah dokumen renja yang disusun 1 dokumen	1 dokumen	25,000,000	27,000,000	
		Penyusunan RENSTRA	SKPD			jumlah dokumen renstra yang disusun 1 dokumen	1 dokumen	30,000,000	-	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Penyediaan alat tulis kantor	SKPD			Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan 20 jenis	20 jenis	25,210,000	27,731,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD			Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 5 jenis	5 jenis	21,930,000	24,123,000	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD			Jumlah jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan 7 jenis	7 jenis	2,320,000	2,552,000	
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD			Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 4 jenis	4 jenis	139,000,000	152,900,000	
		Penyediaan makanan dan minuman	SKPD			Jumlah waktu penyediaan makanan dan minuman 11 bulan	11 bulan	4,800,000	5,280,000	
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Daerah			jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang	72 kali	250,000,000	275,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

						dilaksanakan 72 kali				
		Penyediaan Jasa Perkantoran	SKPD			Jumlah waktu penyediaan jasa perkantoran 12 bulan	12 bulan	78,400,000	86,240,000	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD			Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan	12 bulan	191,688,000	210,856,800	
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD			Jumlah waktu penyediaan jasa administrasi 12 bulan	12 bulan	195,800,000	215,380,000	
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD			Jumlah jenis alat kebersihan yang dibeli 17 jenis	17 jenis	5,800,000	6,380,000	
		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD			Jumlah jenis peralatan kerja yang	4 Jenis	33,500,000	36,850,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

					diperbaiki 4 Jenis					
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Pengadaan mebeleur	SKPD		Jumlah jenis meubelair yang disediakan 5 jenis	5 jenis	204,850,000	225,335,000	
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD		Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara 5 jenis	5 jenis	261,250,000	287,375,000	
			Pembangunan gedung kantor	SKPD		Jumlah unit gedung kantor yang dibangun 5 unit	5 unit	6,165,000,000	6,781,500,000	
			Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	SKPD, Tamansari, Pangkalbalam		Jumlah unit gedung kantor yang direhabilitasi 4 unit	4 unit	1,660,000,000	1,826,000,000	
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur							Dinas Pekerjaan Umum dan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

										Penataan Ruang
		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	SKPD			Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya 136 stel	136 stel	59,000,000	64,900,000	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	SKPD			Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd 6 dokumen	6 dokumen	4,208,000	4,628,800	
		Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	SKPD			Jumlah dokumen laporan keuangan smesteran 6 dokumen	6 dokumen	3,094,500	3,403,950	
		Forum Sistem Pengendalian Intern	SKPD			jumlah dokumen yang disusun untuk SPIP 0 dokumen	0 dokumen	15,000,000	16,500,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Pemerintah (SPIP)								
		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	SKPD			Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun 6 dokumen	6 dokumen	3,094,500	3,403,950	
		Penyusunan RENJA (RKT, RKA, dan DPA)	SKPD			Jumlah dokumen renja (rkt, rka, dan dpa) 6 dokumen	6 dokumen	3,203,000	3,523,300	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								Dinas Pangan dan Pertanian
		Penyediaan alat tulis kantor	SKPD			jumlah jenis alat tulis kantor yang di beli 44 jenis	44 jenis	30,000,000	31,500,000	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD			jumlah lembar dokumen yang di cetak dan di fotokopi 20.000 lembar	20.000 lembar	25,000,000	27,500,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD			jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia 6 jenis	6 jenis	3,170,000	3,328,500	
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD			jumlah jenis bahan bacaan yang dibeli 5 jenis	5 jenis	9,920,000	10,416,000	
		Penyediaan makanan dan minuman	SKPD			jumlah waktu penyediaan makanan / minuman 11 bulan	11 bulan	18,830,000	19,771,500	
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Daerah			jumlah ASN yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 57 orang	57 orang	150,000,000	157,500,000	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD			Jumlah waktu penyediaan komunikasi suber daya air dan listrik yang tersedia 12	12 bulan	116,010,500	121,811,025	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

						bulan				
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD			JUMLAH jasa administrasi keuangan yang tersedia 19 jasa	19 jasa	422,340,000	443,457,000	
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD			jumlah jasa kebersihan kantor yang tersedia 9 jasa	9 jasa	174,105,000	182,810,250	
		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD			jumlah jenis peralatan kerja yang mendapat perbaikan 5 jenis	5 jenis	17,200,000	19,780,000	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								Dinas Pangan dan Pertanian

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD			jumlah jasa pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2 orang	2 orang	50,000,000	55,000,000	
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD			jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapatkan pemeliharaan 7 unit	7 unit	183,732,500	192,919,125	
		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	SKPD			jumlah perlengkapan gedung kantor yang dibeli 1 unit	1 unit	25,000,000	27,500,000	
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur								Dinas Pangan dan Pertanian
		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	SKPD			jumlah pakaian dinas yang di buat 60 stel	60 stel	30,000,000	31,500,000	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								Dinas Pangan dan Pertanian

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Pendidikan dan pelatihan formal	SKPD			jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal 7 orang	7 orang	12,500,000	15,000,000	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								Dinas Pangan dan Pertanian
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	SKPD			jumlah jenis dokumen laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun 1 dokumen	1 dokumen	2,500,000	3,000,000	
		Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	SKPD			jumlah laporan keuangan semesteran yang tersusun 1 laporan	1 laporan	2,000,000	2,500,000	
		Penyusunan Pelaporan Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan OPD	SKPD			jumlah jenis laporan SPIP yang tersusun 1 laporan	1 laporan	10,000,000	10,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD	SKPD			jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun 1 laporan	1 laporan	2,000,000	2,500,000	
		Penyusunan RENJA (RKT, RKA, dan DPA)	SKPD			jumlah jenis dokumen perencanaan jangka pendek yang tersusun 1 dokumen	1 dokumen	10,000,000	12,500,000	
		Penyusunan RENSTRA	SKPD			jumlah laporan RENSTRA yang tersusun 1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	5,500,000	
		Program Peningkatan PAD dan Pendapatan lainnya								Dinas Pangan dan Pertanian
		Peningkatan Penerimaan PAD	SKPD			jumlah Pos penerimaan PAD yang dioptimalkan 4 pos	4 pos	34,000,000	36,000,000	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								Dinas Pariwisata

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Penyediaan alat tulis kantor	SKPD			Jumlah jenis alat tulis kantor yang dibeli 65 jenis	65 jenis	15,000,000	17,000,000	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD			Jumlah jenis barang cetakan/ jumlah lembar penggandaan 16 jenis	16 jenis	20,000,000	22,000,000	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD			Jumlah jenis alat listrik/penerangan bangunan kantor yang dibeli 19 jenis	19 jenis	2,500,000	6,550,000	
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang di beli 2 unit	2 unit	35,000,000	95,000,000	
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD			Jumlah jenis bahan bacaan yang dibeli 3 jenis	3 jenis	10,000,000	12,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Penyediaan makanan dan minuman	SKPD			Jumlah waktu penyediaan makanan dan minuman 11 bulan	11 bulan	5,500,000	45,100,000	
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SKPD			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang diikuti 67 kali	67 kali	100,000,000	160,000,000	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD			Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia 12 bulan	12 bulan	157,240,800	186,000,000	
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD			Jumlah jenis jasa administrasi keuangan yang tersedia 6 jenis	6 jenis	55,396,000	56,000,000	
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD			Jumlah jasa kebersihan kantor yang tersedia 1 jasa	1 jasa	22,000,000	22,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD			Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki 47 unit	47 unit	37,690,000	40,000,000	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								Dinas Pariwisata
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD			Jumlah gedung kantor yang mendapat pemeliharaan rutin 1 unit	1 unit	30,450,000	100,000,000	
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD			Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang mendapat pemeliharaan rutin 2 unit	2 unit	74,881,500	80,000,000	
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur								Dinas Pariwisata
		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	SKPD			Jumlah pakaian dinas harian ASN yang dibuat 55 stel	55 stel	33,400,000	25,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							Dinas Pariwisata
			Pendidikan dan pelatihan formal	SKPD		Jumlah pendidikan dan pelatihan yang diikuti 5 kali	5 kali	30,000,000	30,000,000	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							Dinas Pariwisata
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	SKPD		Jumlah jenis laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 1 jenis	1 jenis	3,000,000	3,500,000	
			Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	SKPD		Jumlah jenis laporan keuangan semesteran 1 jenis	1 jenis	3,000,000	3,500,000	
			Penyusunan Pelaporan Penyelenggaraan	SKPD		Jumlah jenis laporan implementasi penyelenggaraan	1 jenis	10,000,000	10,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			SPIP di Lingkungan OPD				SPIP 1 jenis				
			penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD	SKPD			Jumlah jenis laporan keuangan akhir tahun 1 jenis	1 jenis	3,000,000	3,500,000	
			Penyusunan RENJA (RKT, RKA, dan DPA)	SKPD			Jumlah jenis laporan perencanaan jangka pendek yang tersusun 1 jenis	1 jenis	15,000,000	10,000,000	
			Penyusunan RENSTRA	SKPD			Jumlah jenis laporan perencanaan jangka menengah yang tersusun 1 jenis	1 jenis	5,000,000	-	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Penyediaan alat tulis kantor	SKPD			jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia 28 jenis	28 jenis	24,090,000	26,499,000	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD			jumlah jenis barang yang disediakan 2 jenis	2 jenis	18,300,000	20,130,000	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD			jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia 7 jenis	7 jenis	5,830,000	6,413,000	
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD			jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia 4 jenis	4 jenis	38,258,000	175,000,000	
		Penyediaan peralatan rumah tangga	SKPD			jumlah waktu penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan	12 bulan	2,160,000	2,376,000	
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan	SKPD			jumlah waktu penyediaan bahan bacaan 12 bulan	12 bulan	5,940,000	6,534,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		perundang-undangan								
		Penyediaan makanan dan minuman	SKPD			jumlah jenis rapat yang dilaksanakan 2 jenis	2 jenis	4,356,000	4,791,600	
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Daerah, Kota			jumlah waktu penyediaan rakor dan konsultasi 12 bulan	12 bulan	182,000,000	200,200,000	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD			jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan	12 bulan	58,000,000	63,800,000	
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD			jumlah jenis jasa administrasi keuangan yang tersedia 3 jenis	3 jenis	29,990,000	32,989,000	
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD			jumlah jenis jasa kebersihan kantor yang tersedia 2 jenis	2 jenis	43,796,500	48,176,150	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD			jumlah jenis peralatan kerja yang diperbaiki 4 jenis	4 jenis	22,000,000	24,200,000	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD			jumlah gedung kantor yang dipelihara 2 unit	2 unit	44,600,000	49,060,000	
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD			jumlah waktu pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional 12 bulan	12 bulan	79,641,500	87,605,650	
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur								Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

										dan Tenaga Kerja
		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	SKPD			jumlah jenis pakaian dinas yang tersedia 2 jenis	2 jenis	68,540,000	115,394,000	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	SKPD			jumlah jenis laporan yang disusun 3 jenis	3 jenis	4,900,000	5,390,000	
		Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	SKPD			jumlah jenis laporan yang disusun 1 jenis	1 jenis	4,950,000	5,445,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Penyusunan Pelaporan Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan OPD	SKPD			jumlah jenis laporan yang disusun 1 jenis	1 jenis	10,000,000	11,000,000	
		Forum Perangkat Daerah	SKPD			jumlah forum yang dilaksanakan 1 forum	1 forum	10,000,000	11,000,000	
		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD	SKPD			jumlah jenis laporan yang disusun 1 jenis	1 jenis	4,950,000	5,445,000	
		Penyusunan RENJA (RKT, RKA, dan DPA)	SKPD			jumlah jenis laporan yang disusun 3 jenis	3 jenis	4,900,000	5,390,000	
		Penyusunan RENSTRA	SKPD			jumlah jenis laporan yang disusun 1 jenis	1 jenis	10,000,000	-	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Penyediaan alat tulis kantor	SKPD			Jenis alat tulis kantor yang dibeli 50 jenis	50 jenis	27,501,400	35,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD			Jenis barang cetakan dan penggandaan 15 Jenis	15 Jenis	28,790,000	20,000,000	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD			Jenis komponen instalasi listrik 13 jenis	13 jenis	7,163,000	10,000,000	
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD			Jenis peralatan dan perlengkapan kantor 6 jenis	6 jenis	58,070,000	125,000,000	
		Penyediaan peralatan rumah tangga	SKPD			Jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia 3 jenis	3 jenis	5,000,000	5,000,000	
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD			Jangka waktu ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 12 bulan	12 bulan	15,156,000	20,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Penyediaan makanan dan minuman	SKPD			Jangka waktu ketersediaan makanan dan minuman 11 bulan	11 bulan	6,460,000	50,000,000	
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Daerah			Jumlah orang yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah untuk rapat koordinasi dan konsultasi 30 orang	30 orang	220,000,000	275,000,000	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD			Jangka waktu ketersediaan jasa listrik dan telekomunikasi 12 bulan	12 bulan	110,200,000	140,000,000	
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD			Jenis jasa administrasi keuangan 5 jenis	5 jenis	129,070,000	200,000,000	
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD			Jumlah jasa kebersihan kantor 3 orang	3 orang	61,343,000	85,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD		Jenis peralatan kerja yang diperbaiki 4 jenis	4 jenis	26,500,000	20,000,000	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Pengadaan mebeleur	SKPD		Jenis mebeleur kantor yang diadakan 1 jenis	1 jenis	15,000,000	100,000,000	
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD		Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 kali	1 kali	95,000,000	110,000,000	
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD		Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara 6 unit	6 unit	112,068,000	150,000,000	
		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	SKPD		Jenis perlengkapan kantor yang diadakan 4 jenis	4 jenis	68,290,000	100,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Program Peningkatan Disiplin Aparatur							Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	SKPD		Jumlah pakaian dinas yang tersedia 52 stel	52 stel	24,840,000	40,000,000	
			Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	SKPD		Jumlah pakaian khusus yang tersedia 52 stel/lbr	52 stel/lbr	32,640,000	42,500,000	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Pendidikan dan pelatihan formal	Luar Daerah, Kota, SKPD		Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis/ fungsional 4 orang	4 orang	36,584,200	50,000,000	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	SKPD			Jenis laporan capaian kinerja yang disusun 3 jenis	3 jenis	11,205,500	13,500,000	
		Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	SKPD			Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun 1 laporan	1 laporan	4,437,500	5,000,000	
		Penyusunan Pelaporan Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan OPD	SKPD			Jenis dokumen pelaporan implementasi SPIP di lingkungan OPD yang disusun 1 jenis	1 jenis	10,000,000	10,000,000	
		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD	SKPD			Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun 1 laporan	1 laporan	4,455,000	5,000,000	
		Penyusunan RENJA (RKT, RKA, dan DPA)	SKPD			Jenis dokumen perencanaan jangka pendek yang disusun 3 jenis	3 jenis	10,000,000	12,500,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Penyusunan RENSTRA	SKPD			Jumlah dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun 1 dokumen	1 dokumen	13,896,000	-	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								Satuan Polisi Pamong Praja
		Penyediaan alat tulis kantor	SKPD			Jumlah jenis ATK yang dibeli 21 jenis	21 jenis	20,000,000	40,000,000	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD			Jumlah lembar dokumen yang difoto copy 15.000 lembar	15.000 lembar	23,270,000	30,000,000	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD			Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dibeli 5 jenis	5 jenis	5,000,000	-	
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD			Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli 8 jenis	8 jenis	83,840,500	100,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Penyediaan makanan dan minuman	SKPD			Jumlah waktu penyediaan minuman harian kantor 12 bulan	12 bulan	25,500,000	30,000,000	
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SKPD			Jumlah ASN yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 10 orang	10 orang	150,000,000	200,000,000	
		Penyediaan Jasa Perkantoran	SKPD			Jumlah jasa perkantoran yang tersedia 2 jasa	2 jasa	37,400,000	-	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD			Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan	12 bulan	41,760,000	45,000,000	
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD			Jumlah jasa administrasi keuangan yang tersedia 9 jasa	9 jasa	40,000,000	45,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD			Jumlah jasa kebersihan yang tersedia 2 jasa	2 jasa	40,000,000	-	
		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD			Jumlah jenis peralatan kerja yang mendapat perbaikan 4 jenis	4 jenis	20,000,000	-	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								Satuan Polisi Pamong Praja
		Pengadaan mebeleur	SKPD			Jumlah Meubelair yang dibeli 2 unit	2 unit	-	-	
		Pengadaan kendaraan Angkut	SKPD			Jumlah kendaraan angkut yang tersedia 1 unit	1 unit	-	-	
		Pengadaan Alat Kelengkapan dan Pengamanan Petugas Satpol PP	SKPD			Jumlah Pengadaan alat pengamanan petugas polisi pamong praja yang tersedia 1 unit	1 unit	-	-	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Pembangunan Pos Jaga/Ronda	SKPD		Jumlah pos jaga/ronda yang dibangun 3 unit	3 unit	-	-	
		Konstruksi Pos Pantau Tibumtranmas	SKPD		Jumlah pos pantau yang dibangun 7 unit	7 unit	-	-	
		Pengadaan Motor Patroli	SKPD		Jumlah motor patroli yang dibeli 3 unit	3 unit	-	-	
		Pengadaan Mobil Patroli	SKPD		Jumlah mobil patroli yang dibeli 1 unit	1 unit	-	-	
		Pengadaan Mobil Dalmas	SKPD		Jumlah mobil dalmas yang dibeli 1 unit	1 unit	-	320,000,000	
		Pengadaan Mobil PPNS	SKPD		Jumlah mobil PPNS yang dibeli 1 unit	1 unit	-	310,000,000	
		Pengadaan Kanopi	SKPD		Jumlah kanopi yang dibangun 1 unit	1 unit	-	110,000,000	
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kota, SKPD		Jumlah gedung kantor yang mendapat pemeliharaan rutin	1 unit	-	-	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

						berkala 1 unit				
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD		Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala 7 unit	7 unit	140,930,000	175,000,000	
			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	SKPD		jumlah perlengkapan gedung kantor 3 buah	3 buah	-	-	
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur							Satuan Polisi Pamong Praja
			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	SKPD		Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang dibuat 310 stel	310 stel	-	-	
			Manajemen Pengaturan	SKPD		Jumlah ASN yang diatur 115 orang	115 orang	-	-	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Anggota Sat Pol PP							
			Peningkatan Kinerja Polisi Pamong Praja	SKPD		Jumlah ASN yang mendapat Peningkatan kinerja polisi pamong praja 115 orang	115 orang	-	-	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							Satuan Polisi Pamong Praja
			Pendidikan dan pelatihan formal	SKPD		Jumlah ASN yang mendapat pendidikan pelatihan formal 2 orang	2 orang	-	-	
			Pelatihan dan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	SKPD		Jumlah ASN yang mendapat pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 31 orang	31 orang	67,125,000	100,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Pelatihan dan Peralatan alat korsik	SKPD		Jumlah waktu pelatihan korsik 12 bulan	12 bulan	58,330,000	80,000,000	
		Pelatihan Petugas Tindak Internak (PTI)	SKPD		Jumlah ASN yang mendapat pelatihan tindak internal 8 orang	8 orang	-	-	
		Pelatihan Beladiri	SKPD		Jumlah PHL yang mendapat pelatihan beladiri 100 orang	100 orang	-	-	
		Pembekalan dan Penyegaran Kapasitas dan Kompetensi Polisi Pamong Praja	SKPD		Jumlah PHL yang mendapat Pembekalan dan penyegaran kapasitas dan kompetensi 115 orang	115 orang	-	-	
		Pelatihan dan Peralatan Pataka	SKPD		Jumlah waktu pelatihan pataka 12 bulan	12 bulan	-	-	
		Pelaksanaan Jambore Sat Pol PP	SKPD		Jumlah ASN yang mengikuti jambore 5	5 orang	-	-	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

						orang				
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							Satuan Polisi Pamong Praja
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	SKPD		Jumlah jenis laporan capaian kinerja& ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun 1 jenis	1 jenis	8,000,000	10,000,000	
			Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	SKPD		Jumlah jenis laporan keuangan semesteran SKPD yang disusun 2 jenis	2 jenis	6,500,000	10,000,000	
			Penyusunan Pelaporan Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan OPD	SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan SPIP dilingkungan OPD 1 laporan	1 laporan	10,000,000	15,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD	SKPD			Jumlah jenis laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun 1 jenis	1 jenis	6,000,000	10,000,000	
		Penyusunan Renja (RKT, RKA, dan DPA)	SKPD			Jumlah dokumen perencanaan jangka pendek yang tersusun 1 dokumen	1 dokumen	10,000,000	15,000,000	
		Penyusunan Laporan SPM	SKPD			Jumlah jenis laporan SPM (standar pelayanan minimal) yang disusun 1 jenis	1 jenis	-	-	
		Penyusunan RENSTRA	SKPD			Jumlah dokumen renstra yang tersusun 1 dokumen	1 dokumen	10,000,000	15,000,000	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Penyediaan alat tulis kantor	SKPD			Jumlah jenis alat kantor yang dibeli 25 Jenis	25 Jenis	6,000,000	13,493,700	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD			Jumlah lembar penggandaan Dokumen 25.000 Lembar	25.000 Lembar	5,500,000	9,625,000	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD			Jumlah jenis komponen instalasi/penerangan bangunan kantor 4 Jenis	4 Jenis	2,450,000	5,795,592	
		Penyediaan makanan dan minuman	SKPD			Jumlah waktu penyediaan makanan dan minuman 12 Bulan	12 Bulan	2,000,000	3,300,000	
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Daerah			Jumlah pegawai yang mengikuti rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 20 Orang	20 Orang	110,000,000	165,000,000	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD			Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 Bulan	12 Bulan	62,400,000	71,500,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD			Jumlah jasa administrasi yang tersedia 3 Jasa	3 Jasa	110,000,000	137,500,000	
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD			Jumlah jasa kebersihan kantor yang tersedia 12 Bulan	12 Bulan	25,800,000	28,380,000	
		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD			Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki 25 Unit	25 Unit	8,000,000	18,700,000	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD			Jumlah unit gedung kantor yang terpelihara 1 Unit	1 Unit	10,000,000	38,500,000	
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD			Jumlah unit kendaraan dinas / operasional yang terpelihara 5 Unit	5 Unit	88,785,000	97,663,500	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Pendidikan dan pelatihan formal	Luar Daerah		Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal 10 Orang	10 Orang	55,000,000	60,500,000	
			Rapat Koodinasi Penanggulangan Bencana Alam	Kota		Jumlah rapat koordinasi penganggulangan bencana alam 2 Rapat	2 Rapat	75,000,000	165,000,000	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	SKPD		Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 5	5 Dokumen	3,000,000	3,850,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

						Dokumen				
		Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	SKPD			Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran 5 Dokumen	5 Dokumen	3,000,000	3,850,000	
		Penyusunan Pelaporan Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan OPD	SKPD			Jumlah Dokumen SPIP yang dilaporkan 5 Dokumen	5 Dokumen	10,000,000	11,000,000	
		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD	SKPD			Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun 5 Dokumen	5 Dokumen	3,000,000	3,850,000	
		Penyusunan Renja (RKT, RKA, dan DPA)	SKPD			Jumlah dokumen laporan renja (RKT, RKA dan DPA) 5 Dokumen	5 Dokumen	3,000,000	3,850,000	
		Penyusunan Laporan SPM	SKPD			Jumlah dokumen laporan SPM yang	5 Dokumen	5,000,000	5,500,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

					tersedia 5 Dokumen					
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Penyediaan alat tulis kantor	SKPD		Jenis Alat Tulis Kantor yang dibeli 40 Jenis	40 Jenis	35,000,000	35,000,000	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD		Jumlah Barang cetakan yang tersedia dan fotokoppy 15 Jenis	15 Jenis	25,000,000	27,500,000	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10 Jenis	10 Jenis	80,000,000	100,000,000	
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di beli	20 Unit	175,000,000	185,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

						20 Unit				
		Penyediaan peralatan rumah tangga	SKPD			Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang di beli 5 Jenis	5 Jenis	3,500,000	4,000,000	
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD			Jumlah Bahan Bacaan dan Buku Peraturan Perundang-Undangan yang Tersedia 4 Jenis	4 Jenis	7,500,000	7,500,000	
		Penyediaan makanan dan minuman	SKPD			Jumlah Makanan dan Minuman yang tersedia 2.700 Kotak	2.700 Kotak	40,000,000	40,000,000	
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Daerah			Jumlah Orang yang mengikut rapat-rapat koordinasi/konsultasi, Seminar, Sosialisasi, dll 33 Orang	33 Orang	250,000,000	250,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD			Jumlah Waktu Pembayaran Tagihan Rekening listrik, air, telp/wifi 12 Bulan	12 Bulan	250,000,000	275,000,000	
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD			Jumlah Waktu Pelayanan Administrasi Keuangan 12 Bulan	12 Bulan	250,000,000	265,000,000	
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD			Jumlah Waktu Layanan Jasa Kebersihan Kantor 12 Bulan	12 Bulan	50,000,000	55,000,000	
		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD			Jumlah Peralatan yang diperbaiki 30 Unit	30 Unit	40,000,000	50,000,000	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Pengadaan mebeleur	SKPD			Jumlah Mebeleur yang dibeli 210 Unit	210 Unit	198,000,000	198,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Pengadaan Peralatan Jaringan	SKPD		Jumlah Peralatan Jaringan yang dibeli 3 Jenis	3 Jenis	195,000,000	300,000,000	
		Pengadaan Aplikasi E-Monitoring dan Pelayanan	SKPD		Jumlah Aplikasi yang dibuat 1 Jenis	1 Jenis	50,000,000	50,000,000	
		Pembuatan Taman	SKPD		Jumlah Taman yang di Bangun 1 Taman	1 Taman	185,000,000	185,000,000	
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD		Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor 1 Unit	1 Unit	175,000,000	175,000,000	
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD		Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara 15 Unit	15 Unit	450,000,000	450,000,000	
		Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	SKPD		Jumlah Rehab Gedung Kantor yang dilaksanakan 1 Unit	1 Unit	450,000,000	450,000,000	
		pengadaan Kendaraan dinas/operasional	SKPD		Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional /(Mobil Crane) yang	4 Unit	45,000,000	900,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

						dibeli 4 Unit				
		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	SKPD			Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dibeli 25 Unit	25 Unit	195,000,000	200,000,000	
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur								Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	SKPD			Jumlah Seragam Dinas yang tersedia 100 Stel	100 Stel	50,000,000	55,000,000	
		Pengadaan pakaian kerja lapangan	SKPD			Jumlah Pakaian Kerja Lapangan dan Perlengkapannya yang tersedia 40 Set	40 Set	65,000,000	65,000,000	
		Program Peningkatan Kapasitas								Dinas Perumahan dan Kawasan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Sumber Daya Aparatur							Permukiman
			Pendidikan dan pelatihan formal	Luar Daerah		Jumlah Orang yang mengikuti Diklat Teknis 12 Orang	12 Orang	84,000,000	84,000,000	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	SKPD		Jumlah Dokumen yang Tersusun 5 Dokumen	5 Dokumen	3,000,000	3,000,000	
			Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	SKPD		Jumlah Dokumen yang disusun 3 Dokumen	3 Dokumen	45,000,000	55,000,000	
			Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	SKPD		Jumlah Dokumen yang tersusun 8 Dokumen	8 Dokumen	3,000,000	3,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Penyusunan Pelaporan Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan OPD	SKPD			Jumlah Dokumen yang tersusun 1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	10,000,000	
		Pelaksanaan Evaluasi Renstra	SKPD			Jumlah Dukumen yang tersusun 1 Dokumen	1 Dokumen	3,000,000	3,000,000	
		Pelaksanaan Evaluasi Renja	SKPD			Jumlah Dukumen yang tersusun 1 Dokumen	1 Dokumen	3,000,000	3,000,000	
		Penyusunan Data dan Pengelolaan WebSite	SKPD			Jumlah Waktu Layanan Redaksi atau Data yang diterbitkan 12 Bulan	12 Bulan	125,000,000	125,000,000	
		Penyusunan Data dan Inventarisasi Aset Disperkim	SKPD			Jumlah Dokumen yang tersusun 5 Dokumen	5 Dokumen	85,000,000	85,000,000	
		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD	SKPD			Jumlah Dokumen yang tersusun 8 Dokumen	8 Dokumen	3,000,000	3,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Penyusunan Renja (RKT, RKA dan DPA)	SKPD			Jumlah Dokumen yang tersusun 5 Dokumen	5 Dokumen	3,000,000	3,000,000	
		Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal	SKPD			Jumlah Dokumen yang tersusun 1 Dokumen	1 Dokumen	55,000,000	65,000,000	
		Penyusunan RENSTRA	SKPD			Jumlah Dokumen yang tersusun 1 Dokumen	1 Dokumen	3,000,000	3,000,000	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								Dinas Komunikasi dan Informatika
		Penyediaan alat tulis kantor	SKPD			Alat tulis kantor 1 jenis	1 jenis	20,092,920	25,000,000	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD			Barang cetakan dan penggandaan 3 jenis	3 jenis	15,000,000	15,000,000	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranga	SKPD			Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 jenis	1 jenis	5,000,000	5,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			n bangunan kantor							
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	SKPD		Bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan 2 jenis	2 jenis	15,000,000	15,000,000	
			Penyediaan makanan dan minuman	SKPD		Makanan dan minuman 1 jenis	1 jenis	20,000,000	20,000,000	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SKPD		Perjalanan Dinas 1 jenis	1 jenis	125,000,000	150,000,000	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD		Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 jenis	3 jenis	65,000,000	70,000,000	
			Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD		Peralatan dan perlengkapan kantor 2 jenis	2 jenis	70,000,000	80,000,000	
			Penataan Arsip Perkantoran	SKPD		Arsip Perkantoran 1 Jenis	1 Jenis	5,000,000	5,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD		Jasa administrasi keuangan 3 jenis	3 jenis	50,000,000	60,000,000	
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD		Jasa kebersihan kantor 3 jenis	3 jenis	40,000,000	40,000,000	
		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD		Jasa perbaikan peralatan kerja 2 jenis	2 jenis	20,000,000	25,000,000	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							Dinas Komunikasi dan Informatika
		Pengadaan mebeleur	SKPD		Meubiler 1 jenis	1 jenis	30,000,000	30,000,000	
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD		Pemeliharaan dan perbaikan bagian unit gedung kantor 1 jenis	1 jenis	30,000,000	30,000,000	
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD		Pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dinas/operasional 4 jenis	4 jenis	108,261,500	110,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	SKPD			Pemeliharaan dan perbaikan bagian pelengkap gedung kantor 1 jenis	1 jenis	20,000,000	20,000,000	
		Pembangunan gedung kantor	SKPD			Bagian unit gedung kantor 1 jenis	1 jenis	20,000,000	20,000,000	
		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	SKPD			Bagian pelengkap gedung kantor 1 jenis	1 jenis	40,000,000	40,000,000	
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur								Dinas Komunikasi dan Informatika
		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	SKPD			Pakaian Dinas 40 stel	40 stel	25,000,000	25,000,000	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								Dinas Komunikasi dan Informatika
		Pendidikan dan pelatihan formal	SKPD			SDM yang mengikuti diklat 9 orang	9 orang	75,000,000	75,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

Dinas
Komunikasi
dan
Informatika

			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	SKPD			Lakip OPD 1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	5,000,000	
			Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	SKPD			Laporan keuangan semesteran 1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	5,000,000	
			Pelaksanaan Evaluasi Renstra	SKPD			Laporan Evaluasi Renstra 1 laporan	1 laporan	5,000,000	5,000,000	
			Pelaksanaan Evaluasi Renja	SKPD			Laporan Evaluasi Renja 1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	5,000,000	
			Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	SKPD			Instrumen dan Laporan Monev 1 Laporan	1 Laporan	15,000,000	15,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Forum Perangkat Daerah	SKPD			Laporan Rekomendasi Tindak Lanjut Program dan Kegiatan 1 Laporan	1 Laporan	20,000,000	20,000,000	
		Forum Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	SKPD			Laporan Rekomendasi Tindak Lanjut SPIP 1 Laporan	1 Laporan	15,000,000	15,000,000	
		Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	SKPD			Laporan prognosis realisasi anggaran 1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	5,000,000	
		Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	SKPD			Laporan Pemerintahan Berbasis Elektronik 1 Laporan	1 Laporan	15,000,000	15,000,000	
		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD	SKPD			Laporan keuangan akhir tahun 1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	5,000,000	
		Penyusunan RENJA (RKT, RKA, dan DPA)	SKPD			Dokumen RENJA, RKA dan DPA 3 Dokumen	3 Dokumen	5,000,000	5,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Penyusunan RENSTRA	SKPD			Dokumen Renstra 1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	5,000,000	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								Rangkui
		Penyediaan alat tulis kantor	Rangkui			Jumlah Waktu Penyediaan ATK 12 Bulan	12 Bulan	27,500,000	60,000,000	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rangkui			Jumlah Waktu Penyediaan barang cetak dan penggandaan 12 Bulan	12 Bulan	30,000,000	60,000,000	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranga n bangunan kantor	Rangkui			Jumlah waktu Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12 Bulan	12 Bulan	20,000,000	60,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rangkui			JUMLAH JENIS PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 4 Jenis	4 Jenis	200,000,000	400,000,000	
		Penyediaan peralatan rumah tangga	Rangkui			jumlah waktu penyediaan peralatan RT 12 bulan	12 bulan	5,000,000	7,500,000	
		Penyediaan peralatan rumah tangga	Rangkui			jumlah waktu penyediaan peralatan RT 12 Bulan	12 Bulan	1,495,000	-	
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rangkui			Jumlah waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 12 bulan	12 bulan	7,500,000	25,000,000	
		Penyediaan makanan dan minuman	Rangkui			Jumlah Waktu Penyediaan makan dan minum 12 Bulan	12 Bulan	24,000,000	40,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rangkui			Jumlah yang mengikuti rapat-rapat koordinasi kelurahan daerah yg dilaksanakan 30 orang	30 orang	200,000,000	400,000,000	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rangkui			Jumlah waktu penyedia jasa komunikasi, SDA dan listrik 12 Bulan	12 Bulan	80,000,000	150,000,000	
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Rangkui			Jumlah waktu penyedia jasa keuangan 12 Bulan	12 Bulan	175,000,000	350,000,000	
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rangkui			Jumlah waktu jasa kebersihan kantor 12 Bulan	12 Bulan	50,000,000	90,000,000	
		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Rangkui			Jumlah waktu penyediaan jasaperbaikan Peralatan kerja 12 Bulan	12 Bulan	25,000,000	75,000,000	
		Program Peningkatan								Rangkui

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Sarana dan Prasarana Aparatur							
			Pengadaan mebeleur	Rangkui		Jumlah meubelair 4 jenis	4 jenis	120,000,000	250,000,000	
			Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Rangkui		Jumlah Jenis pemeliharaan rutin berkala rumah jabatan 1 Jenis	1 Jenis	50,000,000	150,000,000	
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Rangkui		Jumlah waktu pemeliharaan rutin berkala gedung kantor 12 Bulan	12 Bulan	100,000,000	175,000,000	
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Rangkui		Jumlah waktu pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 12 bulan	12 bulan	85,000,000	175,000,000	
			Pembangunan gedung kantor	Rangkui		Jumlah Jenis Pembangunan Kantor 2 Jenis	2 Jenis	100,000,000	200,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Pemeliharaan rutin/berkala jaringan	Rangkui			Jumlah Jenis pemeliharaan jaringan Listrik 1 Jenis	1 Jenis	65,000,000	75,000,000	
		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Rangkui			Jumlah Jenis Perlengkapan Gedung kantor 5 Jenis	5 Jenis	100,000,000	300,000,000	
		Pengadaan peralatan gedung kantor	Rangkui			Jumlah peralatan gedung kantor 5 Jenis	5 Jenis	50,000,000	180,000,000	
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur								Rangkui
		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Rangkui			Jumlah Pakaian dinas 50 Jenis	50 Jenis	25,000,000	75,000,000	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								Rangkui

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Pendidikan dan pelatihan formal	Rangkui			Jumlah ASN mengikuti Pelatihan 10 Orang	10 Orang	50,000,000	90,000,000	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								Rangkui
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Rangkui			Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	10,000,000	
		Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Rangkui			Jumlah laporan keuangan semesteran 1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	10,000,000	
		Penyusunan Pelaporan Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan OPD	Rangkui			Jumlah Laporan SPIP 1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	15,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD	Rangkui			Jumlah laporan keuangan akhir tahun 1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	10,000,000	
		Penyusunan RENJA (RKT, RKA, dan DPA)	Rangkui			Jumlah Laporan Renja (RKT,RKA dan DPA) 3 Laporan	3 Laporan	5,000,000	10,000,000	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								Gerunggan g
		Penyusunan dokumen ketatalaksanaaa n perizinan	Gerunggang			Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi keluar Daerah yang dilaksanakan 20 kali	20 kali	180,000,000	350,000,000	
		Penyediaan alat tulis kantor	Gerunggang			Jumlah waktu penyediaan ATK 12 bulan	12 bulan	35,009,000	80,000,000	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Gerunggang			Jumlah Waktu Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan 12 bulan	12 bulan	22,300,000	45,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Gerunggang			Jumlah Waktu Penyediaan Komponen Instansi & Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12 bulan	12 bulan	30,156,000	60,000,000	
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Gerunggang			Jumlah jenis penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7 jenis	7 jenis	134,800,000	180,000,000	
			Penyediaan peralatan rumah tangga	Gerunggang			Jumlah Waktu Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12 bulan	12 bulan	20,000,000	25,000,000	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Gerunggang			Jumlah waktu penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 12 bulan	12 bulan	3,000,000	5,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Penyediaan makanan dan minuman				Jumlah Waktu Peneyediaan makanan dan Minuman 12 bulan	12 bulan	24,800,000	40,000,000	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Gerunggang			jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan	12 bulan	44,400,000	70,000,000	
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Gerunggang			jumlah Waktu Penyedian jasa keuangan 12 bulan	12 bulan	149,750,000	200,000,000	
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Gerunggang			jumlah Waktu Jasa Kebersihan kebersihan kantor 12 bulan	12 bulan	42,988,000	70,000,000	
		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Gerunggang			Jumlah Waktu peralatan kerja yang mendapat perbaikan 12 bulan	12 bulan	31,000,000	45,000,000	
		Program Peningkatan Sarana dan								Gerunggan g

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Prasarana Aparatur							
			Pengadaan mebeleur	Gerunggang			Jumlah Jenis Pengadaan meubeler 8 jenis	8 jenis	77,600,000	120,000,000
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gerunggang			Jumah waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 12 bulan	12 bulan	134,900,000	165,000,000
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasiona l	Gerunggang			Jumlah Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 12 bulan	12 bulan	64,162,000	85,000,000
			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Gerunggang			Jumlah jenis pengadaan perlengkapan gedung kantor 3 jenis	3 jenis	165,000,000	210,000,000

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Pengadaan peralatan gedung kantor				Jumlah jenis pengadaan Peralatan Gedung Kantor 3 jenis	3 jenis	68,000,000	90,000,000	
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur								Gerunggan g
		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				Jumlah Jenis Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya 3 jenis	3 jenis	29,850,000	60,000,000	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								Gerunggan g
		Pendidikan dan pelatihan formal	Gerunggang			Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal 10 orang	10 orang	75,000,000	90,000,000	
		Program Peningkatan Pengembangan								Gerunggan g

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Gerunggang			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 laporan	1 laporan	3,150,000	5,000,000	
		Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Gerunggang			Jumlah laporan Keuangan Semesteran 1 laporan	1 laporan	3,150,000	5,000,000	
		Penyusunan Pelaporan Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan OPD	Gerunggang			Jumlah Laporan SPIP 1 laporan	1 laporan	10,000,000	20,000,000	
		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD	Gerunggang			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 laporan	1 laporan	3,150,000	5,000,000	
		Penyusunan RENJA (RKT, RKA, dan DPA)	Gerunggang			Jumlah Laporan RENJA (RKT, RKA, DPA) 3 laporan	3 laporan	3,150,000	6,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

Tamansari

			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							
			Penyediaan alat tulis kantor	Tamansari			jumlah waktu ATK yang dibeli 12 Bulan	12 Bulan	36,254,000	39,879,400
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tamansari			jumlah jenis cetakan dan penggandaan 2 Jenis	2 Jenis	30,349,000	33,383,900
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tamansari			jumlah jenis komponen instalasi dan listrik/penerangan kantor 18 Jenis	18 Jenis	10,000,000	11,000,000
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tamansari			jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli 3 Jenis	3 Jenis	64,765,000	71,241,500
			Penyediaan peralatan rumah tangga	Tamansari			jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia 3 Jenis	3 Jenis	20,000,000	27,000,000

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tamansari			jumlah jenis media cetak yang tersedia 3 Jenis	3 Jenis	7,000,000	7,700,000	
		Penyediaan makanan dan minuman	Tamansari			jumlah waktu penyediaan makanan dan minuman harian kantor 12 bulan	12 bulan	50,600,000	55,660,000	
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tamansari			jumlah rapat-rapat koordinasi keluar daerah yang diikuti 12 Bulan	12 Bulan	250,000,000	275,000,000	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tamansari			jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 12 Bulan	12 Bulan	90,000,000	100,000,000	
		Pemasangan baru/ Penambahan daya Listrik	Tamansari			jumlah daya listrik yang ditambah 15.000 Watt	15.000 Watt	30,000,000	33,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tamansari			jumlah jasa administrasi keuangan yang tersedia 14 Jasa	14 Jasa	264,000,000	290,400,000	
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tamansari			jumlah jasa kantor 1 Jasa	1 Jasa	36,796,000	40,475,600	
		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tamansari			jumlah peralatan kerja yang mendapat perbaikan 5 Jenis	5 Jenis	38,720,000	42,592,000	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								Tamansari
		Pengadaan mebeleur	Tamansari			jumlah jenis mebeuler yang dibeli 2 Jenis	2 Jenis	130,000,000	143,000,000	
		Dekorasi Ruangan/Pelayan	Tamansari			jumlah ruangan pelayanan yang mendapat peningkatan 2 Jenis	2 Jenis	-	-	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Pembangunan Nama Pagar Kantor	Tamansari		Nama pagar kantor yang dibangun 1 Unit	1 Unit	-	-	
		Pembangunan Posko Terpadu	Tamansari		Jumlah posko yang dibangun 1 Unit	1 Unit	100,000,000	110,000,000	
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tamansari		jumlah pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 kali	1 kali	117,450,000	129,195,000	
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tamansari		jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala 3 Unit	3 Unit	70,022,500	77,024,750	
		Pengadaan Website	Tamansari		jumlah media elektronik perangkat daerah yang dibuat 6 Unit	6 Unit	60,000,000	66,000,000	
		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tamansari		jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang dibeli 2 Jenis	2 Jenis	51,450,000	56,595,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Program Peningkatan Disiplin Aparatur							Tamansari
			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tamansari			jumlah jenis pakaian dinas yang dibuat 4 Jenis	4 Jenis	-	-
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							Tamansari
			Pendidikan dan pelatihan formal	Tamansari			jumlah ASN Kec.Taman Sari yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal 10 Orang	10 Orang	50,000,000	55,000,000
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							Tamansari

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tamansari			Jumlah jenis laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1 Jenis	1 Jenis	2,500,000	2,750,000	
		Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Tamansari			Jumlah jenis laporan keuangan akhir tahun 1 Jenis	1 Jenis	2,500,000	2,750,000	
		Penyusunan Pelaporan Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan OPD	Tamansari			Jumlah Laporan SPIP 1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	11,000,000	
		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tamansari			Jumlah jenis laporan keuangan akhir tahun 1 Jenis	1 Jenis	2,500,000	2,750,000	
		Penyusunan RENJA (RKT,RKA,DPA)	Tamansari			Jumlah jenis penyusunan renja (RKT,RKA,DPA) 1 Jenis	1 Jenis	2,500,000	2,750,000	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								Pangkalbalam

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Penyediaan alat tulis kantor	Pangkalbalam			Jumlah Jenis ATK yang dibeli 15 jenis	15 jenis	30,000,000	35,000,000	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Pangkalbalam			Jumlah Jenis Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan 6 jenis	6 jenis	30,500,000	35,000,000	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Pangkalbalam			Jumlah Jenis Penyediaan Komponen Instansi & Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10 jenis	10 jenis	7,705,000	8,860,750	
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Pangkalbalam			tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3 jenis	3 jenis	200,000,000	230,000,000	
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Pangkalbalam			Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1 jenis	1 jenis	14,900,000	17,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Penyediaan makanan dan minuman	Pangkalbalam			Jumlah Waktu Penyediaan makanan dan Minuman 11 bulan	11 bulan	15,180,000	17,457,000	
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Pangkalbalam			Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi keluar Daerah yang dilaksanakan 12 bulan	12 bulan	150,000,000	165,000,000	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pangkalbalam			jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi 12 bulan	12 bulan	89,723,600	92,201,279	
		Pemasangan baru/ Penambahan daya Listrik	Pangkalbalam			jumlah penambahan daya listrik 1 kali	1 kali	35,000,000	40,250,000	
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Pangkalbalam			jumlah jenis jasa keuangan yang tersedia 4 jenis	4 jenis	261,567,500	300,802,625	
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Pangkalbalam			jumlah jenis Jasa Kebersihan kebersihan kantor 2 jenis	2 jenis	75,000,000	80,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Pangkalbalam			Jumlah Jenis peralatan kerja yang mendapat perbaikan 4 jenis	4 jenis	25,475,000	30,000,000	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								Pangkalbalam
		Pengadaan mebeleur	Pangkalbalam			Jumlah Jenis Pengadaan meubeler 2 jenis	2 jenis	100,000,000	115,000,000	
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pangkalbalam			Jumah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1 kali	1 kali	85,000,000	97,750,000	
		Pemeliharaan rutin/berkala jaringan	Pangkalbalam			jumlah waktu pemeliharaan jaringan listrik 1 kali	1 kali	45,000,000	50,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Pangkalbal am			Jumlah Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 12 bulan	12 bulan	70,000,000	80,500,000	
			Pengadaan Website	Pangkalbal am			jumlah pengadaan website 1 kali	1 kali	40,000,000	46,000,000	
			Pemeliharaan Website	Pangkalbal am			jumlah pemeliharaan website 12 bulan	12 bulan	10,000,000	11,500,000	
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur								Pangkalbal am
			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pangkalbal am			Jumlah Jenis Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya 1 jenis	1 jenis	25,000,000	28,750,000	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								Pangkalbal am

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Pendidikan dan pelatihan formal	Pangkalbalam			Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal 5 orang	5 orang	45,000,000	50,000,000	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								Pangkalbalam
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Pangkalbalam			Jumlah Jenis Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 laporan	1 laporan	2,875,000	3,305,250	
		Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Pangkalbalam			Jumlah Jenis Pelaporan Keuangan Semesteran 1 laporan	1 laporan	2,875,000	3,306,250	
		Penyusunan Pelaporan Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan OPD	Pangkalbalam			Jumlah Jenis Laporan SPIP 1 laporan	1 laporan	10,000,000	11,500,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Pangkalbalam			Jumlah Jenis Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 laporan	1 laporan	2,875,000	3,306,250	
		Penyusunan Renja (RKT, RKA dan DPA)	Pangkalbalam			Jumlah Jenis Laporan RENJA (RKT, RKA, DPA) 1 laporan	1 laporan	2,875,000	3,306,250	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								Girimaya
		Penyediaan alat tulis kantor	Girimaya					20,635,000	20,504,000	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Girimaya					22,348,000	15,510,000	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Girimaya					6,910,000	16,940,000	
		Penyediaan peralatan dan	Girimaya					87,170,000	35,147,530	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		perlengkapan kantor							
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Girimaya				3,480,000	5,742,000	
		Penyediaan makanan dan minuman	Girimaya				16,390,000	16,500,000	
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Girimaya				150,000,000	214,500,000	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Girimaya				60,360,000	80,916,000	
		Pemasangan baru/ Penambahan daya Listrik	Girimaya				12,000,000	-	
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Girimaya				214,000,000	328,486,400	
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Girimaya				42,040,000	48,331,800	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Girimaya					40,750,000	26,400,000	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								Girimaya
		Pembangunan Tempat Parkir Kendaraan	Girimaya					83,817,300	-	
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Girimaya					62,450,000	-	
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Girimaya					60,219,000	66,240,900	
		Pengadaan Website						55,000,000	-	
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur								Girimaya
		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Girimaya					34,000,000	40,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

Girimaya

			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							
			Pendidikan dan Pelatihan kehumasan dan protokol					25,000,000	-	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							Girimaya
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Girimaya				2,875,000	-	
			Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Girimaya				2,875,000	-	
			Forum Sistem Pengendalian Intern	Girimaya				10,000,000	-	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Pemerintah (SPIP)								
		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD						2,875,000	-	
		Penyusunan Renja (RKT, RKA, dan DPA)	Girimaya					2,875,000	-	
		Penyusunan RENSTRA	Girimaya					2,875,000	-	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								Gabek
		Penyediaan alat tulis kantor	Gabek			Jumlah waktu penyediaan alat tulis kantor yang dibeli 12 bulan	12 bulan	27,500,000	30,250,000	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Gabek			Jumlah waktu dokumen yang difotocopy dan dicetak 12 bulan	12 bulan	25,950,000	28,575,360	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Gabek			Jumlah waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12 bulan	12 bulan	8,500,000	11,000,000	
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Gabek			Jumlah unit pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 15 unit	15 unit	100,000,000	192,500,000	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Gabek			Jumlah waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 12 bulan	12 bulan	6,300,000	17,047,800	
			Penyediaan makanan dan minuman	Gabek			Jumlah waktu penyediaan makanan dan minuman 12 bulan	12 bulan	8,800,000	10,285,000	
			Rapat-rapat koordinasi dan	Gabek			Jumlah waktu rapat-rapat koordinasi 12	12 bulan	150,000,000	192,500,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			konsultasi ke luar daerah			bulan				
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Gabek		Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan	12 bulan	103,212,200	133,947,000	
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Gabek		Jumlah waktu penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan	12 bulan	315,500,000	347,050,000	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Gabek		Jumlah waktu penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan	12 bulan	44,866,000	49,352,600	
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Gabek		Jumlah unit peralatan kerja yang mendapatkan perbaikan 40 unit	40 unit	30,500,000	35,750,000	
			Program Peningkatan Sarana dan							Gabek

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Prasarana Aparatur							
			Pengadaan mebeleur	Gabek		Jumlah Meubeler yang dibeli 50 buah	50 buah	100,000,000	192,500,000	
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gabek		Jumlah gedung kantor yang mendapatkan pemeliharaan rutin/berkala 1 unit	1 unit	70,000,000	91,850,000	
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasiona l	Gabek		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapatkan pemeliharaan rutin/berkala 4 unit	4 unit	63,521,000	69,873,100	
			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Gabek		Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dibeli 15 buah	15 buah	100,000,000	192,500,000	
			Pengadaan peralatan gedung kantor	Gabek		Jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli 15 unit	15 unit	100,000,000	192,500,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

Gabek

			Program Peningkatan Disiplin Aparatur								
			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Gabek			Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya yang dibeli 35 stel	35 stel	16,500,000	20,000,000	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								Gabek
			Pendidikan dan pelatihan formal	Gabek			Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan 12 orang	12 orang	75,000,000	93,500,000	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								Gabek

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Gabek			Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun 1 dokumen	1 dokumen	4,000,000	5,000,000	
		Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Gabek			Jumlah dokumen pelaporan keuangan semester yang disusun 1 dokumen	1 dokumen	4,000,000	5,000,000	
		Penyusunan Pelaporan Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan OPD	Gabek			Jumlah dokumen SPIP 1 dokumen	1 dokumen	10,000,000	12,000,000	
		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD	Gabek			Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun yang disusun 1 dokumen	1 dokumen	4,000,000	5,000,000	
		Penyusunan RENJA (RKT, RKA, dan DPA)	Gabek			Jumlah dokumen RENJA (RKT, RKA, dan DPA) yang disusun 4 dokumen	4 dokumen	4,000,000	5,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

Bukit Intan

			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							
			Penyediaan alat tulis kantor	Bukit Intan			Jumlah Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 Bulan	12 Bulan	38,882,400	41,250,000
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bukit Intan			Jumlah waktu Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan 12 bulan	12 bulan	38,500,000	41,250,000
			Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranga n bangunan kantor	Bukit Intan			Jumlah waktu Penyediaan Komponen Instansi & Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12 bulan	12 bulan	15,000,000	17,000,000
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Bukit Intan			Jumlah jenis penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4 Jenis	4 Jenis	190,000,000	210,000,000

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bukit Intan			Jumlah waktu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 12 bulan	12 bulan	4,200,000	4,800,000	
			Penyediaan makanan dan minuman	Bukit Intan			Jumlah Waktu Penyediaan makanan dan Minuman 12 bulan	12 bulan	35,400,000	39,000,000	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Bukit Intan			Jumlah waktu penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi keluar Daerah yang dilaksanakan 12 bulan	12 bulan	170,000,000	180,000,000	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bukit Intan			Jumlah Waktu Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 Bulan	12 Bulan	82,500,000	92,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Pemasangan baru/ Penambahan daya Listrik	Bukit Intan			Jumlah Jenis tersedianya Penambahan/pemasangan baru daya listrik 2 jenis	2 jenis	25,000,000	27,000,000	
		Penyediaan Sarana Pelayanan administrasi Perkantoran	Bukit Intan			Jumlah waktu Tersedianya Gedung kantor tempat kerja 12 bulan	12 bulan	60,000,000	-	
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Bukit Intan			jumlah waktu penyediaan jasa keuangan 12 bulan	12 bulan	282,000,000	295,000,000	
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Bukit Intan			jumlah waktu Penyediaan Jasa Kebersihan kebersihan kantor 12 bulan	12 bulan	35,000,000	39,500,000	
		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Bukit Intan			Jumlah waktu peralatan kerja yang mendapat perbaikan 12 Bulan	12 Bulan	52,000,000	58,500,000	
		Program Peningkatan								Bukit Intan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Sarana dan Prasarana Aparatur							
			Pengadaan Peralatan Jaringan	Bukit Intan			jumlah Pengadaan peralatan Jaringan 1 Jenis	1 Jenis	65,000,000	-
			Pengadaan Aplikasi E-Monitoring dan Pelayanan	Bukit Intan			Jumlah Pengadaan Aplikasi E-Monitoring dan Pelayanan 7 Jenis	7 Jenis	35,000,000	42,000,000
			Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Bukit Intan			jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 1 kali	1 kali	30,000,000	35,000,000
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Bukit Intan			Jumah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1 kali	1 kali	120,140,000	130,000,000
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Bukit Intan			Jumlah Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan	87,780,000	94,500,000

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

						12 Bulan				
		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Bukit Intan			Jumlah Jenis Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2 Jenis	2 Jenis	75,000,000	100,000,000	
		Pemeliharaan Website	Bukit Intan			Jumlah Pengerjaan Pemeliharaan Website 1 tahun	1 tahun	9,500,000	10,250,000	
		Pengadaan peralatan gedung kantor	Bukit Intan			Jumlah Jenis Pengadaan peralatan gedung kantor 2 jenis	2 jenis	95,000,000	140,000,000	
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur								Bukit Intan
		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Bukit Intan			Jumlah jenis Pakaian Dinas beserta perlengkapannya 1	1 Jenis	56,000,000	65,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

						Jenis				
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							Bukit Intan
			Pendidikan dan pelatihan formal	Bukit Intan		Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal 8 Orang	8 Orang	40,000,000	50,000,000	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							Bukit Intan
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Bukit Intan		Jumlah Jenis Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan	1 Laporan	2,000,000	2,500,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Bukit Intan			Jumlah Jenis Pelaporan Keuangan Semesteran 1 Laporan	1 Laporan	2,000,000	2,500,000	
			Penyusunan Pelaporan Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan OPD	Bukit Intan			Jumlah Jenis Laporan SPIP 1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	15,000,000	
			penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD	Bukit Intan			Jumlah Jenis Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Laporan	1 Laporan	2,000,000	2,500,000	
			Penyusunan RENJA (RKT, RKA, dan DPA)	Bukit Intan			Jumlah Jenis Laporan RENJA (RKT, RKA, DPA) 3 Laporan	3 Laporan	2,000,000	2,500,000	

			Pendidikan								
	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya Layanan Pendidikan	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan								Dinas Pendidikan dan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

	dan Kesehatan Masyarakat		Tenaga Kependidikan								Kebudayaan
			Pengelolaan GTK PAUD	SKPD			Waktu Pengelolaan GTK PAUD 12 Bulan	12 Bulan	568,850,000	625,735,000	
			Pengembangan Mutu PTK PAUD, PNF dan Tenaga Kebudayaan	Kota			Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan mutu PTK PAUD, PNF dan Tenaga Kebudayaan 351 orang	351 orang	570,000,000	627,000,000	
			Pengelolaan GTK Dikdas	Kota			Waktu Pengelolaan GTK Dikdas 12 Bulan	12 Bulan	10,495,650,000	11,545,215,000	
			Pengembangan Mutu PTK DIKDAS	Kota			Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan mutu PTK DIKDAS 368 orang	368 orang	385,040,000	467,500,000	
			Pengembangan Mutu PTK dalam Pemanfaatan TIK	Kota, SKPD			Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan mutu PTK dalam pemanfaatan TIK 48 orang	48 orang	69,600,000	76,560,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi DIKDAS	Kota		Jumlah guru yang melanjutkan pendidikan 4 Orang	4 Orang	9,600,000	24,000,000	
			Peningkatan Kualitas Tenaga Pengajar PAUD	Kota		Jumlah GTK penerima peningkatan kualitas tenaga pengajar PAUD 521 Orang	521 Orang	3,126,000,000	3,438,600,000	
			Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi (PAUD)	Kota		Jumlah guru yang mengikuti pendidikan lanjutan 21 Orang	21 Orang	40,800,000	360,000,000	
			Program penyediaan akses dan peningkatan mutu layanan PAUD, PNF dan Dikdas							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Penyediaan Akses Pendidikan Anak Usia Dini	Kota		Jumlah jenis penyediaan akses Pendidikan Anak Usia Dini 1 jenis	1 jenis	400,000,000	440,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Pengembangan Mutu Layanan Kelembagaan dan Sarana PAUD	Kota		Jumlah lembaga PAUD yang mendapatkan pengembangan mutu layanan kelembagaan 98 Lembaga	98 Lembaga	120,000,000	132,000,000	
			Penyediaan Akses Pendidikan Dasar	Kota		Jumlah jenis penyediaan akses Pendidikan Dasar 2 Jenis	2 Jenis	1,420,600,000	1,562,660,000	
			Pengembangan Mutu Layanan Pendidikan Non Formal	Kota		Jumlah lembaga yang mendapatkan pengembangan mutu layanan pendidikan non formal 64 Lembaga	64 Lembaga	205,000,000	225,500,000	
			Pengembangan Mutu Layanan Peserta Didik dan Pendidikan Karakter Pendidikan Dasar	Kota		Jumlah sekolah yang mendapatkan pengembangan mutu layanan kurikulum dan penilaian pendidikan dasar 107 Sekolah	107 Sekolah	1,994,226,000	2,193,692,600	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Pengembangan Mutu Layanan Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Dasar	Kota		Jumlah sekolah yang mendapatkan pengembangan mutu layanan kurikulum dan penilaian pendidikan dasar 107 Sekolah	107 Sekolah	1,045,000,000	1,149,500,000	
			Pengembangan Mutu Layanan Pendidikan Anak Usia Dini	Kota		Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan mutu layanan pendidikan anak usia dini 98 Lembaga	98 Lembaga	425,000,000	467,500,000	
			Pengadaan Sarana Belajar SD (DAK FISIK)	Kota		Jumlah jenis pengadaan sarana belajar SD 2 Jenis	2 Jenis	1,400,000,000	1,540,000,000	
			Pembangunan Prasarana Belajar SD (DAK FISIK)	Kota		Jumlah jenis pembangunan prasarana belajar SD 3 Jenis	3 Jenis	4,701,170,000	5,171,287,000	
			Rehabilitasi Prasarana Belajar SD (DAK FISIK)	Kota		Jumlah jenis ruang yang direhabilitasi 4 Jenis	4 Jenis	4,439,278,000	4,883,205,800	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Rehabilitasi Prasarana Belajar SKB (DAK FISIK)	Kota			Jumlah prasarana Belajar SKB yang direhabilitasi 2 Jenis	2 Jenis	1,325,520,000	1,458,072,000	
		Pengadaan Sarana Belajar SKB (DAK FISIK)	Kota			Jumlah jenis pengadaan sarana belajar SKB 1 Jenis	1 Jenis	592,000,000	651,200,000	
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (DAK FISIK)	Kota			Jumlah jenis pengadaan sarana dan prasarana PAUD 2 Jenis	2 Jenis	210,000,000	231,000,000	
		Pengadaan Sarana Belajar SMP (DAK FISIK)	Kota			Jumlah jenis pengadaan sarana belajar SMP 9 Jenis	9 Jenis	1,893,000,000	2,082,300,000	
		Pembangunan Prasarana Belajar SMP (DAK FISIK)	Kota			Jumlah jenis pembangunan prasarana belajar SMP 2 Jenis	2 Jenis	870,900,000	957,990,000	
		Rehabilitasi Prasarana Belajar SMP (DAK FISIK)	Kota			Jumlah jenis rehabilitasi prasarana belajar SMP 6 Jenis	6 Jenis	4,583,000,000	5,041,300,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Pendiidkan Inklusi SD	Kota			Jumlah Siswa SD Penerima Pendidikan Inklusi 95 Siswa	95 Siswa	142,500,000	156,750,000	
		Pendidikan Inklusi SMP	Kota			Jumlah siswa SMP penerima pendidikan inklusi 15 Siswa	15 Siswa	22,500,000	24,750,000	
		Program pengembangan fungsi pelayanan KBM pendidikan non formal								Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Peningkatan fungsi pelayanan KBM di SKB Pangkalpinang	Kota			Jumlah layanan KBM di SKB 3 Layanan	3 Layanan	436,230,000	479,853,000	
		Program pengelolaan bantuan operasional pendidikan (BOP) PAUD								Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pengelolaan Dana BOP di TKN Pembina 1 Pangkalpinang	Kota			Jumlah waktu pengelolaan Dana BOP di TKN Pembina 1 12 Bulan	12 Bulan	5,150,000	5,665,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Pengelolaan Dana BOP di TKN Pembina 3 Pangkalpinang	Kota			Jumlah waktu pengelolaan Dana BOP di TKN Pembina 3 12 Bulan	12 Bulan	5,500,000	6,050,000	
		Pengelolaan Dana BOP di TKN Pembina 2 Pangkalpinang	Kota			Jumlah waktu pengelolaan Dana BOP di TKN Pembina 2 12 Bulan	12 Bulan	5,050,000	5,555,000	
		Pengelolaan Dana BOP di TKN Kecamatan Tamansari Pangkalpinang	Kota			Jumlah waktu pengelolaan Dana BOP di TKN kec. Taman Sari 12 Bulan	12 Bulan	5,000,000	5,500,000	
		Pengelolaan Dana BOP di TKN Model Pangkalpinang	Kota			Jumlah waktu pengelolaan Dana BOP di TKN Model 12 Bulan	12 Bulan	4,950,000	5,445,000	
		Pengelolaan Dana BOP di TKN Kecamatan Pangkalbalam Pangkalpinang	Kota			Jumlah waktu pengelolaan Dana BOP di TKN Pangkal Balam 12 Bulan	12 Bulan	1,850,000	2,035,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Pengelolaan Dana BOP di TKN Kecamatan Rangkui Pangkalpinang	Kota			Jumlah waktu pengelolaan Dana BOP di TKN Kec. Rangkui 12 Bulan	12 Bulan	5,300,000	5,830,000	
		Manajemen BOP PAUD	Kota			Jumlah lembaga yang termonitoring dalam penggunaan BOP PAUD 98 lembaga	98 lembaga	50,000,000	55,000,000	
		Program pengelolaan bantuan operasional sekolah (BOS)								Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pengelolaan Dana BOS di SDN 1 Pangkalpinang	Kota			Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 1 12 Bulan	12 Bulan	23,050,000	25,355,000	
		Pengelolaan Dana BOS di SDN 2 Pangkalpinang	Kota			Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 2 12 Bulan	12 Bulan	12,150,000	13,365,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Pengelolaan Dana BOS di SDN 3 Pangkalpinang	Kota			Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 3 12 Bulan	12 Bulan	42,050,000	46,255,000	
		Pengelolaan Dana BOS di SDN 4 Pangkalpinang	Kota			Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 4 12 Bulan	12 Bulan	9,250,000	10,175,000	
		Pengelolaan Dana BOS di SDN 6 Pangkalpinang	Kota			Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 6 12 Bulan	12 Bulan	25,300,000	27,830,000	
		Pengelolaan Dana BOS di SDN 7 Pangkalpinang	Kota			Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 7 12 Bulan	12 Bulan	11,150,000	12,265,000	
		Pengelolaan Dana BOS di SDN 5 Pangkalpinang	Kota			Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 5 12 Bulan	12 Bulan	11,800,000	12,980,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Pengelolaan Dana BOS di SDN 8 Pangkalpinang	Kota			Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 8 12 Bulan	12 Bulan	11,350,000	12,485,000	
		Pengelolaan Dana BOS di SDN 10 Pangkalpinang	Kota			Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 10 12 Bulan	12 Bulan	36,350,000	39,985,000	
		Pengelolaan Dana BOS di SDN 11 Pangkalpinang	Kota			Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 11 12 Bulan	12 Bulan	13,900,000	15,290,000	
		Pengelolaan Dana BOS di SDN 9 Pangkalpinang	Kota			Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 9 12 Bulan	12 Bulan	8,100,000	8,910,000	
		Pengelolaan Dana BOS di SDN 12 Pangkalpinang	Kota			Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 12 12 Bulan	12 Bulan	10,300,000	11,330,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Pengelolaan Dana BOS di SDN 13 Pangkalpinang	Kota			Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 13 12 Bulan	12 Bulan	8,750,000	9,625,000	
		Pengelolaan Dana BOS di SDN 14 Pangkalpinang	Kota			Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 14 12 Bulan	12 Bulan	16,450,000	18,095,000	
		Pengelolaan Dana BOS di SDN 15 Pangkalpinang	Kota			Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 15 12 Bulan	12 Bulan	37,250,000	40,975,000	
		Pengelolaan Dana BOS di SDN 17 Pangkalpinang	Kota			Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 17 12 Bulan	12 Bulan	10,750,000	11,825,000	
		Pengelolaan Dana BOS di SDN 19 Pangkalpinang	Kota			Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 19 12 Bulan	12 Bulan	26,000,000	28,600,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Pengelolaan Dana BOS di SDN 16 Pangkalpinang	Kota			Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 16 12 Bulan	12 Bulan	21,250,000	23,375,000	
		Pengelolaan Dana BOS di SDN 21 Pangkalpinang	Kota			Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 21 12 Bulan	12 Bulan	12,800,000	14,080,000	
		Pengelolaan Dana BOS di SDN 20 Pangkalpinang	Kota			Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 20 12 Bulan	12 Bulan	29,350,000	32,285,000	
		Pengelolaan Dana BOS di SDN 18 Pangkalpinang	Kota			Pengelolaan Dana BOS di SDN 18 Pangkalpinang 12 Bulan	12 Bulan	10,600,000	11,660,000	
		Pengelolaan Dana BOS di SDN 22 Pangkalpinang	Kota			Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 22 12 Bulan	12 Bulan	14,500,000	15,950,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Pengelolaan Dana BOS di SDN 24 Pangkalpinang	Kota			Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 24 12 Bulan	12 Bulan	20,250,000	22,275,000	
		Pengelolaan Dana BOS di SDN 25 Pangkalpinang	Kota			Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 25 12 Bulan	12 Bulan	10,600,000	11,660,000	
		Pengelolaan Dana BOS di SDN 23 Pangkalpinang	Kota			Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 23 12 Bulan	12 Bulan	22,750,000	25,025,000	
		Pengelolaan Dana BOS di SDN 26 Pangkalpinang	Kota			Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 26 12 Bulan	12 Bulan	13,700,000	15,070,000	
		Pengelolaan Dana BOS di SDN 27 Pangkalpinang	Kota			Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 27 12 Bulan	12 Bulan	9,500,000	10,450,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Pengelolaan Dana BOS di SDN 30 Pangkalpinang	Kota			Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 30 12 Bulan	12 Bulan	18,800,000	20,680,000	
		Pengelolaan Dana BOS di SDN 28 Pangkalpinang	Kota			Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 28 12 Bulan	12 Bulan	31,200,000	34,320,000	
		Pengelolaan Dana BOS di SDN 29 Pangkalpinang	Kota			Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 29 12 Bulan	12 Bulan	10,950,000	12,045,000	
		Pengelolaan Dana BOS di SDN 32 Pangkalpinang	Kota			Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 32 12 Bulan	12 Bulan	10,750,000	11,825,000	
		Pengelolaan Dana BOS di SDN 37 Pangkalpinang	Kota			Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 37 12 Bulan	12 Bulan	10,500,000	11,550,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Pengelolaan Dana BOS di SDN 36 Pangkalpinang	Kota			Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 36 12 Bulan	12 Bulan	11,050,000	12,155,000	
		Pengelolaan Dana BOS di SDN 35 Pangkalpinang	Kota			Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 35 12 Bulan	12 Bulan	11,000,000	1,210,000	
		Pengelolaan Dana BOS di SDN 38 Pangkalpinang	Kota			Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 38 12 Bulan	12 Bulan	10,500,000	11,550,000	
		Pengelolaan Dana BOS di SDN 41 Pangkalpinang	Kota			Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 41 12 Bulan	12 Bulan	9,600,000	10,560,000	
		Pengelolaan Dana BOS di SDN 42 Pangkalpinang	Kota			Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 42 12 Bulan	12 Bulan	15,850,000	17,435,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Pengelolaan Dana BOS di SDN 33 Pangkalpinang	Kota			Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 33 12 Bulan	12 Bulan	18,800,000	20,680,000	
		Pengelolaan Dana BOS di SDN 40 Pangkalpinang	Kota			Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 40 12 Bulan	12 Bulan	10,900,000	11,990,000	
		Pengelolaan Dana BOS di SDN 39 Pangkalpinang	Kota			Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 39 12 Bulan	12 Bulan	10,300,000	11,330,000	
		Pengelolaan Dana BOS di SDN 43 Pangkalpinang	Kota			Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 43 12 Bulan	12 Bulan	11,300,000	12,430,000	
		Pengelolaan Dana BOS di SDN 47 Pangkalpinang	Kota			Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 47 12 Bulan	12 Bulan	11,200,000	12,320,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Pengelolaan Dana BOS di SDN 49 Pangkalpinang	Kota			Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 49 12 Bulan	12 Bulan	8,650,000	9,515,000	
		Pengelolaan Dana BOS di SDN 48 Pangkalpinang	Kota			Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 48 12 Bulan	12 Bulan	17,000,000	18,700,000	
		Pengelolaan Dana BOS di SDN 45 Pangkalpinang	Kota			Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 45 12 Bulan	12 Bulan	9,550,000	10,505,000	
		Pengelolaan Dana BOS di SDN 51 Pangkalpinang	Kota			Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 51 12 Bulan	12 Bulan	10,250,000	11,275,000	
		Pengelolaan Dana BOS di SDN 44 Pangkalpinang	Kota			Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 44 12 Bulan	12 Bulan	11,800,000	12,980,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Pengelolaan Dana BOS di SDN 46 Pangkalpinang	Kota			Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 46 12 Bulan	12 Bulan	11,600,000	12,760,000	
		Pengelolaan Dana BOS di SDN 54 Pangkalpinang	Kota			Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 54 12 Bulan	12 Bulan	9,450,000	10,395,000	
		Pengelolaan Dana BOS di SDN 50 Pangkalpinang	Kota			Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 50 12 Bulan	12 Bulan	8,650,000	9,515,000	
		Pengelolaan Dana BOS di SDN 56 Pangkalpinang	Kota			Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 56 12 Bulan	12 Bulan	11,100,000	12,210,000	
		Pengelolaan Dana BOS di SDN 53 Pangkalpinang	Kota			Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 53 12 Bulan	12 Bulan	15,400,000	16,940,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Pengelolaan Dana BOS di SDN 52 Pangkalpinang	Kota			Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 52 12 Bulan	12 Bulan	12,650,000	13,915,000	
		Pengelolaan Dana BOS di SDN 58 Pangkalpinang	Kota			Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 58 12 Bulan	12 Bulan	11,550,000	12,705,000	
		Pengelolaan Dana BOS di SDN 57 Pangkalpinang	Kota			Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 57 12 Bulan	12 Bulan	9,500,000	10,450,000	
		Pengelolaan Dana BOS di SDN 55 Pangkalpinang	Kota			Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 55 12 Bulan	12 Bulan	8,850,000	9,735,000	
		Pengelolaan Dana BOS di SDN 60 Pangkalpinang	Kota			Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 60 12 Bulan	12 Bulan	10,500,000	11,550,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Pengelolaan Dana BOS di SDN 61 Pangkalpinang	Kota			Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 61 12 Bulan	12 Bulan	12,100,000	13,310,000	
		Pengelolaan Dana BOS di SDN 65 Pangkalpinang	Kota			Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 65 12 Bulan	12 Bulan	9,900,000	10,890,000	
		Pengelolaan Dana BOS di SMPN 2 Pangkalpinang	Kota			Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SMPN 2 12 Bulan	12 Bulan	73,800,000	81,180,000	
		Pengelolaan Dana BOS di SMPN 3 Pangkalpinang	Kota			Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SMPN 3 12 Bulan	12 Bulan	81,800,000	89,980,000	
		Pengelolaan Dana BOS di SDN 67 Pangkalpinang	Kota			Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 67 12 Bulan	12 Bulan	10,100,000	11,110,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Pengelolaan Dana BOS di SMPN 6 Pangkalpinang	Kota			Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SMPN 6 12 Bulan	12 Bulan	60,700,000	66,770,000	
		Pengelolaan Dana BOS di SDN 68 Pangkalpinang	Kota			Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 68 12 Bulan	12 Bulan	11,600,000	12,750,000	
		Pengelolaan Dana BOS di SDN 66 Pangkalpinang	Kota			Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 66 12 Bulan	12 Bulan	12,150,000	13,365,000	
		Pengelolaan Dana BOS di SMPN 4 Pangkalpinang	Kota			Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SMPN 4 12 Bulan	12 Bulan	83,600,000	91,960,000	
		Pengelolaan Dana BOS di SDN 62 Pangkalpinang	Kota			Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 62 12 Bulan	12 Bulan	11,650,000	12,815,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Pengelolaan Dana BOS di SMPN 1 Pangkalpinang	Kota			Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SMPN 1 12 Bulan	12 Bulan	70,700,000	77,770,000	
		Pengelolaan Dana BOS di SMPN 8 Pangkalpinang	Kota			Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SMPN 8 12 Bulan	12 Bulan	58,800,000	64,680,000	
		Pengelolaan Dana BOS di SMPN 7 Pangkalpinang	Kota			Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SMPN 7 12 Bulan	12 Bulan	79,000,000	86,900,000	
		Pengelolaan Dana BOS di SDN 63 Pangkalpinang	Kota			Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 63 12 Bulan	12 Bulan	8,550,000	9,405,000	
		Pengelolaan Dana BOS di SMPN 9 Pangkalpinang	Kota			Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SMPN 9 12 Bulan	12 Bulan	67,000,000	73,700,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Pengelolaan Dana BOS di SDN 69 Pangkalpinang	Kota			Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 69 12 Bulan	12 Bulan	9,800,000	10,780,000	
		Pengelolaan Dana BOS di SDN 64 Pangkalpinang	Kota			Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 64 12 Bulan	12 Bulan	11,300,000	12,430,000	
		Pengelolaan Dana BOS di SMPN 10 Pangkalpinang	Kota			Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SMPN 10 12 Bulan	12 Bulan	69,400,000	76,340,000	
		Manajemen BOS Dikdas	Kota			Jumlah sekolah yang termonitoring dalam pengelolaan Dana BOS jenjang Dikdas 107 Sekolah	107 Sekolah	50,000,000	55,000,000	
		Pengelolaan Dana BOS di SMPN 5 Pangkalpinang	Kota			Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SMPN 5 12 Bulan	12 Bulan	85,200,000	93,720,000	
		Kesehatan								

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan							Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Manajemen Pelaksanaan Dana BOK Kefarmasian			Terlaksananya manajemen pelaksanaan dana BOK kefarmasian 12 bulan	12 bulan	100,281,500	110,309,650	
			Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	SKPD		Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan puskesmas dan labkesda 10 lokasi	10 lokasi	3,801,165,765	4,181,282,342	
			Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan	Tamansari, Bukit Intan, Gabek, Gerunggang, Girimay		Meningkatnya pemerataan obat dan perbekalan kesehatan 3 kegiatan	3 kegiatan	18,000,000	19,800,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			a, Pangkal balam, Rangkui							
		Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	SKPD			Terjaganya mutu peralatan laboratorium 1 kali	1 kali	170,000,000	187,000,000	
		Kegiatan Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan	SKPD			Terpantaunya sarana pelayanan obat dan perbekalan kesehatan dikota pangkalpinang 12 bulan	12 bulan	260,845,170	286,929,687	
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat								Dinas Kesehatan, Pengendali an Penduduk dan Keluarga Berencana
		Pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan				Terlaksananya pelayanan kesehatan di masyarakat 12	12 bulan	90,825,000	99,907,500	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

						bulan				
		Penyelenggaraan Kesehatan Dasar Rumah Sakit Umum	SKPD			biaya operasional pelayanan kesehatan RSUD yang tersedia 1 RSUD 3.155.106.273	3.155.106.273	3,155,106,273	3,470,616,900	
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	SKPD			Terbina dan terpantaunya pelayanan kesehatan di sarpras 12 bulan	12 bulan	45,615,000	50,176,500	
		Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan	SKPD			Meningkatnya cakupan Kota yang menyelenggarakan program bina pelayanan kesehatan tradisional alternatif komplementer 12 bulan	12 bulan	84,789,000	93,267,900	
		Bantuan Operasional Kesehatan	SKPD			tersedianya bantuan operasional kesehatan 12 bulan	12 bulan	569,559,000	626,514,900	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			PENYELENGGARAAN Pemeriksaan LABKESDA (LABKESDA)			Tersedianya penunjang penyelenggaraan pemeriksaan laboratorium kesehatan 12 bulan	12 bulan	340,000,000	374,000,000	
			Penyelenggaraan Kesehatan Dasar Puskesmas Gerunggang	Gerung gang		biaya operasional pelayanan kesehatan puskesmas yang tersedia (puskesmas) 1 puskesmas	1 puskesm as	320,049,000	320,049,000	
			Penyelenggaraan Kesehatan Dasar Puskesmas Selindung	Gabek		biaya operasional pelayanan kesehatan puskesmas yang tersedia (puskesmas) 1 puskesmas	1 puskesm as	223,689,000	223,689,000	
			Penyelenggaraan Kesehatan Dasar Puskesmas Pasir Putih	Bukit Intan		biaya operasional pelayanan kesehatan puskesmas yang tersedia 1 puskesmas	1 puskesm as	280,164,000	280,164,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Penyelenggaraan Kesehatan Dasar Puskesmas Air Hitam	Bukit Intan			biaya operasional pelayanan kesehatan puskesmas air hitam yang tersedia (puskesmas) 1 puskesmas	1 puskesmas	468,774,000	468,774,000	
		Penyelenggaraan Kesehatan Dasar Puskesmas Girimaya	Girimaya			biaya operasional pelayanan kesehatan puskesmas yang tersedia 1 puskesmas	1 puskesmas	274,938,000	274,938,000	
		Penyelenggaraan Kesehatan Dasar Puskesmas Taman Sari	Tamansari			biaya operasional pelayanan kesehatan puskesmas yang tersedia 1 puskesmas	1 puskesmas	248,616,000	273,477,600	
		Penyelenggaraan Kesehatan Dasar Puskesmas Pangkal Balam	Pangkalbalam			biaya operasional pelayanan kesehatan puskesmas yang tersedia 1 puskesmas	1 puskesmas	302,418,000	332,659,800	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Penyelenggaraan Kesehatan Dasar Puskesmas Kacang Pedang	Tamansari			biaya operasional pelayanan kesehatan puskesmas yang tersedia 1 puskesmas	1 puskesmas	270,355,000	297,390,500	
		Penyelenggaraan Kesehatan Dasar Puskesmas Melintang	Rangkui			biaya operasional pelayanan kesehatan puskesmas yang tersedia (puskesmas) 12 puskesmas	12 puskesmas	272,097,000	299,306,700	
		Upaya Kesehatan Promotif dan Preventif (DAK Non Fisik) Puskesmas Gerunggang	Gerunggang			Upaya kesehatan promotif dan preventif yang dilaksanakan di puskesmas 1 puskesmas	1 puskesmas	628,820,000	691,702,000	
		Upaya Kesehatan Promotif dan Preventif (DAK Non Fisik) Puskesmas Selindung	Gabek			Upaya kesehatan promotif dan preventif yang dilaksanakan di puskesmas 1 puskesmas	1 puskesmas	503,350,000	553,685,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Upaya Kesehatan Promotif dan Preventif (DAK Non Fisik) Puskesmas Pasir Putih	Bukit Intan			Upaya kesehatan promotif dan preventif di Puskesmas (puskesmas) 1 puskesmas	1 puskesmas	417,038,000	458,741,800	
			Upaya Kesehatan Promotif dan Preventif (DAK Non Fisik) Puskesmas Air Itam	Bukit Intan			Upaya kesehatan promotif dan preventif yang dilaksanakan di puskesmas air itam 1 puskesmas	1 puskesmas	564,896,000	564,896,000	
			Upaya Kesehatan Promotif dan Preventif (DAK Non Fisik) Puskesmas Girimaya	Girimaya			Upaya kesehatan promotif dan preventif di Puskesmas 1 puskesmas	1 puskesmas	614,845,000	614,845,000	
			Upaya Kesehatan Promotif dan Preventif (DAK Non Fisik) Puskesmas Taman Sari	Tamansari			Upaya kesehatan promotif dan preventif yang dilaksanakan di puskesmas 1 puskesmas	1 puskesmas	434,900,000	478,390,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Upaya Kesehatan Promotif dan Preventif (DAK Non Fisik) Puskesmas Pangkal Balam	Pangkal balam			Upaya kesehatan promotif dan preventif di Puskesmas 1 puskesmas	1 puskesmas	525,924,000	578,516,400	
			Upaya Kesehatan Promotif dan Preventif (DAK Non Fisik) Puskesmas Kacang Pedang	Tamansari			Upaya kesehatan promotif dan preventif di Puskesmas 1 puskesmas	1 puskesmas	406,526,000	447,178,600	
			Upaya Kesehatan Promotif dan Preventif (DAK Non Fisik) Puskesmas Melintang	Rangkui			Upaya kesehatan promotif dan preventif yang dilaksanakan di puskesmas (puskesmas) 1 puskesmas	1 puskesmas	675,625,000	743,193,500	
			Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Gerunggang	Gerunggang			Tersedianya pembiayaan jaminan kesehatan nasional puskesmas Gerunggang (puskesmas) 1 puskesmas	1 puskesmas	620,000,000	682,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Selindung	Gabek			Tersedianya pembiayaan jaminan kesehatan nasional puskesmas Selindung 1 puskesmas	1 puskesmas	560,000,000	616,000,000	
			Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Pasir Putih	Bukit Intan			Tersedianya pembiayaan jaminan kesehatan nasional puskesmas Pasir Putih 1 puskesmas	1 puskesmas	441,250,000	441,250,000	
			Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Air Itam	Bukit Intan			Tersedianya pembiayaan jaminan kesehatan nasional puskesmas Air itam (puskesmas) 1 puskesmas	1 puskesmas	510,000,000	561,000,000	
			Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Girimaya	Girimaya			Tersedianya pembiayaan jaminan kesehatan nasional puskesmas girimaya 1 puskesmas	1 puskesmas	600,000,000	660,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Taman Sari	Tamansari			Tersedianya pembiayaan jaminan kesehatan nasional puskesmas Taman Sari 1 puskesmas	1 puskesmas	300,000,000	330,000,000	
			Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Pangkal Balam	Pangkalbalam			Upaya kesehatan promotif dan preventif di Puskesmas 1 puskesmas	1 puskesmas	762,436,000	838,679,600	
			Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Kacang Pedang	Tamansari			Tersedianya pembiayaan jaminan kesehatan nasional puskesmas kacang pedang 1 puskesmas	1 puskesmas	360,000,000	396,000,000	
			Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Melintang	Rangkui			Tersedianya pembiayaan jaminan kesehatan nasional puskesmas melintang (puskesmas) 1 puskesmas	1 puskesmas	760,000,000	836,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan	SKPD			Terlaksananya kegiatan dalam satu tahun 12 bulan	12 bulan	-	-	
		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat								Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	SKPD			Terlaksananya kegiatan pengembangan media promosi dan tersebarnya informasi sadar hidup sehat 3 bulan	3 bulan	54,245,000	59,669,500	
		Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	SKPD			Meningkatnya pengetahuan peserta pertemuan sosialisasi dan advokasi SBH 1 kali	1 kali	15,763,735	17,340,108	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Kegiatan lomba kesehatan institusi dan UKBM Tk. Kota	SKPD			Terlaksananya lomba kegiatan institusi dan UKBM Tingkat Kota Pangkalpinang 1 kali	1 kali	74,740,000	82,214,000	
			Program Perbaikan Gizi Masyarakat								Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Pemberian tambahan makanan dan vitamin	SKPD			Terlaksananya kegiatan pemberian tambahan makanan dan vitamin 12 kali	12 kali	84,640,000	93,104,000	
			Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	SKPD			Jumlah peserta LBSI 80 orang	80 orang	47,168,500	51,885,350	
			Monitoring, evaluasi dan pelaporan	SKPD			Terlaksananya data program gizi yang update dan valid 1 hari	1 hari	19,733,500	21,706,850	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Program Pengembangan Lingkungan Sehat								Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Monitoring, evaluasi dan pelaporan	SKPD			Terlaksananya pertemuan dan evaluasi secara berkala program kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga dan IKL RS 8 hari	8 hari	32,370,400	35,607,440	
			Kegiatan pembinaan dan pengawasan tempat-tempat umum	SKPD			Terlaksananya pembinaan dan pengawasan tempat - tempat umum 13 hari	13 hari	17,396,000	19,135,600	
			Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular								Dinas Kesehatan, Pengendalian

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

										Penduduk dan Keluarga Berencana
		Penyemprotan/fogging sarang nyamuk				Terlaksananya penyemprotan/fogging sarang nyamuk demam berdarah dengue/chikungunya 60 kasus	60 kasus	131,051,000	144,156,100	
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan								Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		akreditasi labkesda	SKPD			Labkesda terakreditasi 1 Labkesda	1 Labkesda	285,934,000	259,527,400	
		Pelaksanaan akreditasi puskesmas	SKPD			Terakreditasinya Puskesmas 9 Puskesmas	9 Puskesmas	663,450,000	729,795,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Kegiatan akreditasi rumah sakit	SKPD		rumah sakit terakreditasi versi 2017 0	0	500,000,000	-	
			Kegiatan penyediaan tenaga pemenuhan standarisasi mutu pelayanan rumah sakit	SKPD		Tersedianya tenaga pemenuhan standarasi mutu pelayanan rumah sakit 12 bulan	12 bulan	3,278,800,000	3,606,680,000	
			Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin							Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Monitoring, evaluasi dan pelaporan	SKPD		Terpantaunya sarana pembiayaan dan jaminan kesehatan pemerintah, swasta serta FKTP 14 sarana kesehatan	14 sarana kesehatan	25,425,000	27,967,500	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Pelayanan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	SKPD			Terlaksananya pembiayaan dan jaminan kesehatan 12 bulan	12 bulan	6,929,815,000	7,622,796,500	
		Sosialisasi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin	SKPD			Meningkatnya pelayanan masyarakat miskin 1 kegiatan	1 kegiatan	107,760,000	118,536,000	
		Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya								Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Renovasi/Rehab Puskesmas	Tamansari, Gerunggang			Terlaksananya renovasi/ rehab puskesmas 2 puskesmas	2 puskesmas	6,678,560,000	7,346,416,000	
		Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	SKPD			Tersedianya Instalasi Pengolahan Air Limbah Puskesmas 5 Puskesmas	5 Puskesmas	6,820,000,000	7,502,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Pembangunan baru Puskesmas	SKPD			Terlaksananya pembangunan baru puskesmas 3 Puskesmas	3 Puskesmas	14,173,105,030	15,590,415,533	
		pengadaan kendaraan pemeliharaan dinas, puskesmas dan kendaraan labkesda	SKPD			Terlaksananya pengadaan kendaraan pemeliharaan Dinas/ Puskesmas dan Kendaraan Labkesda 3 unit	3 unit	1,051,250,000	1,156,375,000	
		penyediaan alat kesehatan bagi puskesmas dan jaringan lainnya	SKPD			Tersedianya alat kesehatan bagi puskesmas dan jaringan lainnya 9 puskesmas	9 puskesmas	2,200,666,452	2,420,733,097	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		pengadaan prasarana penyediaan alat, mesin, dan bahan untuk pengendalian penyakit kesehatan lingkungan, kesehatan masyarakat di puskesmas non afirmasi dan Labkesda	SKPD			terlaksananya pengadaan alat, mesin dan bahan untuk pengendalian penyakit kesehatan lingkungan, kesehatan masyarakat dipuskesmas non afirmasi dan labkesda 4 paket	4 paket	4,715,000,000	5,186,500,000	
		Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru- paru/ rumah sakit mata								Dinas Kesehatan, Pengendali an Penduduk dan Keluarga Berencana
		Pembangunan rumah sakit	SKPD			Tersedianya bangunan baru rumah sakit 1 Paket	1 Paket	274,259,106,332	274,286,532,24 3	
		Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	SKPD			Jumlah alat - alat kesehatan RS yang dibeli 1 paket	1 paket	22,254,838,418	24,480,322,260	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita							Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
			Monitoring, evaluasi dan pelaporan	SKPD			Pengadaan cetak formulir MTBS, Formulir MTBM, Formulir SDIDTK, Bagan MTBS 1 paket	1 paket	25,228,000	27,750,800	
			Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia							Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
			Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Kota			Pembelajaran manajemen puskesmas santun usila 30 orang	30 orang	60,241,000	66,265,100	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan dan minuman							Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga	Kota		tersedianya keamanan pangan industri rumah tangga yang memenuhi standar bagi masyarakat 30 orang	30 orang	29,078,800	31,986,680	
			Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan Makanan dan minuman	SKPD		Terlaksananya pembinaan dan pengawasan kesehatan makanan dan minuman 12 hari	12 hari	87,649,700	96,414,670	
			Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak							Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

										Keluarga Berencana
		evaluasi Program kesehatan ibu dan anak	SKPD			Terlaksananya kegiatan manajemen penurunan angka kematian Ibu dan angka kematian bayi serta kematian maternal dan perinatal 9 puskesmas	9 puskesmas	77,959,000	85,754,900	
		Peningkatan Pelayanan Jaminan Persalinan	SKPD			Meningkatnya jaminan kesehatan pada ibu melahirkan 12 bulan	12 bulan	1,141,725,000	1,255,897,500	
		Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah								Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Pelayanan dan pendukung pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah	SKPD			Tersedianya pelayanan kesehatan yang mudah di akses dan terjangkau 100 Persen	100 Persen	36,000,000,000	39,600,000,000	
			Program Kebijakan dan Pembangunan Kesehatan								Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Penyusunan Perencanaan bidang kesehatan	SKPD			tersusunnya perencanaan bidang kesehatan 12 bulan	12 bulan	39,000,000	42,900,000	
			Pengumpulan Updating dan Analisa data dan informasi Kesehatan	SKPD			Terlaksananya pengumpulan updating dan analisa data serta informasi kesehatan 12 bulan	12 bulan	38,000,000	41,800,000	
			Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan								Dinas Kesehatan, Pengendalian an

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

										Penduduk dan Keluarga Berencana
		Kegiatan Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan	SKPD			Terlaksananya uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan 8 kali	8 kali	44,470,000	48,917,000	
		Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal	SKPD			Terlaksananya kursus-kursus singkat 6 kursi	6 kursi	48,250,000	53,075,000	
		kegiatan lomba-lomba bidang kesehatan	SKPD			Terlaksananya lomba petugas kesehatan teladan tingkat kota pangkalpinang 1 kali	1 kali	57,770,500	63,547,550	
		Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan	SKPD			Terdokumen data SDMK dan Dara Tenaga Kesehatan 5 buku	5 buku	8,035,350	8,838,885	
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak								Dinas Kesehatan, Pengendalian

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Menular, Nafza dan Jiwa							Penduduk dan Keluarga Berencana
			Konsultasi dr. spesialis jiwa	SKPD		terlaksananya konsultasi dan pemeriksaan penderita jiwa dengan dokter jiwa 3 puskesmas	3 puskesmas	16,465,000	18,111,500	
			PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR	SKPD		Terlaksananya pengendalian faktor resiko penyakit tidak menular 5 kali	5 kali	24,725,160	27,197,676	
			Program surveilans dan imunisasi dan kesehatan Matra							Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Peningkatan surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	SKPD			Terlaksananya pembinaan surveilans, kesehatan matra, dan haji tingkat Kota Pangkalpinang 12 bulan	12 bulan	54,109,200	59,520,120	
			Pelayanan Vaksinasi bagi balita dan anak sekolah	Kota			Terlaksananya pembinaan imunisasi tingkat Kota Pangkalpinang 12 bulan	12 bulan	18,165,000	19,981,500	
			Pelayanan Kesehatan Haji				Terlaksananya pemeriksaan jemaah haji tingkat pertama dan lanjutan serta pembinaannya dan manajemen administrasi kelengkapan jemaah haji 7 kali	7 kali	53,175,000	58,492,500	
			Program upaya kesehatan kerja dan olahraga								Dinas Kesehatan, Pengendalian

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

											Penduduk dan Keluarga Berencana
			Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga	SKPD			Terlaksananya pembinaan upaya kesehatan kerja dan olahraga 11 hari	11 hari	26,011,900	28,613,090	
			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
	Pengembangan Infrastruktur Daerah	Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan Dan Berbasis Smart City	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan								Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Pembangunan Utilitas Jalan	Kota, SKPD			Jumlah panjang utilitas jalan yang dibangun 550 meter	550 meter	700,000,000	770,000,000	
			Pembangunan jalan	Kota			jumlah panjang jalan yang dibangun 16 Km	16 Km	12,760,000,000	14,806,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong- gorong								Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Pembangunan Utilitas/Bangunan Pelengkap Saluran Jalan	Kota			jumlah unit utilitas saluran jalan yang dibangun 0 unit	0 unit	735,000,000	808,500,000	
		Pembangunan saluran drainase/gorong- gorong	Kota			Jumlah panjang saluran yang dibangun 0 meter	0 meter	6,100,000,000	6,500,000,000	
		Pembangunan Box Culvert Jalan A. Yani Dalam	Kota, Tamans ari			Jumlah Unit Bangunan yang dibangun 1 Unit	1 Unit	6,000,000,000	-	
		Pembangunan Drainase Ampui 1	Kota, Pangkal balam			Jumlah Kegiatan Pembangunan yang dilakukan 1 Kegiatan	1 Kegiatan	1,000,000,000	-	
		Normalisasi dan Pembangunan Drainase Lembawai Hilir	Kota			Jumlah Kegiatan yang dilakukan 1 Kegiatan	1 Kegiatan	3,000,000,000	-	
		Pembangunan Drainase Graha	Kota			Jumlah Kegiatan Pembangunan yang	1 Kegiatan	1,000,000,000	-	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

						dilakukan 1 Kegiatan				
		Pembangunan Drainase Air Mawar	Kota, Bukit Intan			Jumlah Kegiatan Pembangunan yang dilakukan 1 Kegiatan	1 Kegiatan	2,500,000,000	-	
		Pembangunan Kolong Linggarjati Hulu	Kota			Jumlah luas kolong yang akan dibangun 0 Ha	0 Ha	10,000,000,000	-	
		Pembangunan Drainase Blok Barat	Kota			Jumlah Kegiatan Pembangunan yang dilakukan 1 Kegiatan	1 Kegiatan	1,000,000,000	-	
		Pembangunan Drainase Air Kujut	Kota			Jumlah Kegiatan Pembangunan yang dilakukan 1 Kegiatan	1 Kegiatan	1,000,000,000	-	
		Pembangunan Drainase Air Asin	Kota			Jumlah Kegiatan Pembangunan yang dilakukan 1 Kegiatan	1 Kegiatan	1,000,000,000	-	
		Pembangunan Fasilitas Saluran Jalan	Kota			jumlah panjang fasilitas saluran jalan yang dibangun 4.067 meter	4.067 meter	3,081,000,000	3,389,100,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong							Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Normalisasi dan Pembangunan Talud Kolong Bacang	Kota, Bukit Intan		Jumlah luas lahan yang akan dibangun 8,96 Ha	8,96 Ha	25,000,000,000	-	
			Pembangunan Talud Sungai Rangkui	Kota, Rangkui		Jumlah luas lahan yang akan dibangun 0 Ha	0 Ha	100,000,000,000	-	
			Normalisasi dan Pembangunan Talud Kolong Akik	Kota		Jumlah luas lahan yang akan dibangun 0 Ha	0 Ha	10,000,000,000	-	
			Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Kota		jumlah panjang turap/talud/bronjong yang dibangun 0 meter	0 meter	800,000,000	880,000,000	
			Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya							Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai dan selokan jalan	Kota			Jumlah panjang saluran sungai dan selokan yang dilakukan normalisasi 0 M2	0 M2	6,000,000,000	6,600,000,000	
		Pemeliharaan Rutin Saluran 7 Kecamatan	Kota			jumlah kecamatan yang mendapatkan pemeliharaan saluran 7 kecamatan	7 kecamatan	2,085,000,000	2,293,500,000	
		Penataan Kolong Teluk Bayur	Kota			Jumlah kegiatan penataan yang dilakukan 1 Kegiatan	1 Kegiatan	180,000,000,000	-	
		Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah								Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin						140,589,231,000	-	
		Program Pembangunan Sarana/Prasarana Fasilitas Umum								Dinas Pekerjaan Umum dan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

										Penataan Ruang
		Pengembangan Fasilitas Umum						12,000,000,000	-	
		Perencanaan Pembangunan Gedung dan Fasilitas Umum						790,000,000	-	
		Program Perencanaan Pengembangan Pekerjaan Umum								Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Penyusunan Rencana Program Infrastruktur Jangka Menengah (RPIJM)						200,000,000	-	
		Program Perencanaan Tata Ruang								Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Survey dan pemetaan	Kota			Jumlah kali kegiatan survey dilakukan 0 kali	0 kali	300,000,000	330,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Sosialisasi Rencana Tata Ruang	Kota			Jumlah kegiatan sosialisasi yang dilakukan 0 kegiatan	0 kegiatan	300,000,000	330,000,000	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Bidang Tata Ruang	Kota			jumlah kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan 0 kegiatan	0 kegiatan	200,000,000	220,000,000	
		Program Pemanfaatan Ruang								Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Bimtek Pemetaan	SKPD			Jumlah kegiatan bimtek yang dilakukan 0 kegiatan	0 kegiatan	200,000,000	220,000,000	
		Survey Pemanfaatan Ruang	Kota			Jumlah kali kegiatan survey pemetaan yang dilakukan 0 kali	0 kali	400,000,000	440,000,000	
		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang								Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Adis Teknis Pelayanan IMB	Kota			jumlah kegiatan advis teknis imb yang dilakukan 0 kegiatan	0 kegiatan	340,000,000	374,000,000	
			Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Pangkalpinang	Kota			Jumlah laporan koordinasi penataan ruang daerah 1 dokumen	1 dokumen	400,000,000	440,000,000	
			Monitoring dan Evaluasi Lingkup Penataan Ruang	Kota			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Lingkup Penataan Ruang 1 Dokumen	1 Dokumen	300,000,000	330,000,000	
			Program pengadaan sarana dan prasarana SDA dan penunjang infrastruktur operasional SDA								Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Biaya Pemeliharaan Operasional Alat Berat	SKPD			jumlah jenis kebutuhan operasional alat berat SDA 8 jenis	8 jenis	2,000,000,000	2,200,000,000	
			Program Rehabilitasi/Pemeliharaan								Dinas Pekerjaan Umum dan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		aan Jalan dan Jembatan								Penataan Ruang
		Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Kota			Jumlah Panjang Jalan yang di pelihara 0 Km	0 Km	3,700,000,000	4,070,000,000	
		Peningkatan Konstruksi Jalan	Kota			jumlah panjang jalan yang mengalami peningkatan konstruksi 25 Km	25 Km	17,124,000,000	18,836,400,000	
		Peningkatan Konstruksi Jalan	Kota			Jumlah panjang jalan yang dilakukan peningkatan konstruksi 22,731 Km	22,731 Km	35,350,000,000	-	
		Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman								
	Meningkatnya Pembangunan Yang Berbasis Kewilayahan	Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial								Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Stimulasi rahabilitasi rumah akibat bencana alam	Kota			Jumlah Rumah rusak yg direhab 30 Unit	30 Unit	600,000,000	3,500,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan Dan Berbasis Smart City	Program Pengembangan Perumahan							Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan	SKPD		Jumlah Dokumen Perencanaan Awal dan PERDA yang disusun 2 Dokumen	2 Dokumen	175,000,000	175,000,000	
			Pembangunan rumah layak huni bagi Masyarakat (PB)	Kota		Jumlah Rumah layak huni yang di bangun 50 Rumah	50 Rumah	3,500,000,000	5,000,000,000	
			Peningkatan Kualitas rumah tidak layak huni bagi Masyarakat (PK)	Kota		Jumlah Rumah tidak layak huni yang direhab 50 Rumah	50 Rumah	2,000,000,000	5,000,000,000	
			Pemutakhiran Data Perumahan	SKPD		Jumlah Dokumen Data Base yang tersusun 1 Dokumen	1 Dokumen	88,000,000	100,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Penyediaan Jasa Pelayanan Site Plan	Kota, SKPD		Jumlah Waktu Pendampingan dan Monitoring yang dilakukan 12 Bulan	12 Bulan	80,000,000	90,000,000	
		Pengkajian dan Penyusunan Rumusan PSU Perumahan	SKPD		Jumlah Kajian yang disusun dan yang dirumuskan 1 Kajian	1 Kajian	188,000,000	188,000,000	
		Penyediaan Jasa Pengelolaan UPT Rusunawa	SKPD		Jumlah Waktu Pelayanan dan Pengelolaan UPT Rusunawa 12 Bulan	12 Bulan	750,962,400	1,000,000,000	
		Pemeliharaan Rutin RUSUNAWA	SKPD		Jumlah Pemeliharaan Rutin atau rehab yang dilaksanakan 4 Block	4 Block	390,000,000	750,000,000	
		Peningkatan Kemudahan Akses dan Jaringan Layanan RUSUNAWA	Kota, Luar Daerah, SKPD, Pangkal balam		Jumlah Penghuni RUSUNAWA 100 KK	100 KK	250,000,000	250,000,000	
		Pembangunan Baru Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat	Kota		Jumlah Tidak Layak Huni yang direhab	130 Unit	5,323,500,000	-	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Berpenghasilan Rendah (DAK)			130 Unit					
		Pembangunan RUTILAHU Kota Pangkalpinang	Kota					3,780,000,000	-	
		Program Lingkungan Sehat Perumahan								Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Penyusunan Dokumen Rencana Kawasan Permukiman (RKP)	SKPD		Jumlah Rencana Kawasan Permukiman (RKP) yang tersusun 1 Dokumen	1 Dokumen	275,000,000	400,000,000		
		Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)	SKPD		Jumlah Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) yang tersusun 1 Dokumen	1 Dokumen	335,000,000	500,000,000		

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Pemutakhiran Data Base Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang	SKPD			Jumlah Data Base yang disusun 1 Dokumen	1 Dokumen	75,000,000	75,000,000	
		Program Pemberdayaan komunitas Perumahan								Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Pendampingan Program Nasional Kota Tanpa Kawasan Kumuh (KOTAKU)	Kota			Jumlah Waktu Monitoring dan pendampingan yang dilakukan 12 Bulan	12 Bulan	150,000,000	200,000,000	
		Program pengelolaan areal pemakaman								Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Penyusunan kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pengelolaan areal pemakaman	SKPD			Jumlah RAPERDA yang menjadi PERDA 1 Perda	1 Perda	100,000,000	150,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Masterplan dan DED TPU	SKPD			Jumlah (Masterplan dan DED TPU) yang diterbitkan 2 Dokumen	2 Dokumen	100,000,000	150,000,000	
		Pengumpulan dan analisis data base jumlah jiwa yang meninggal	Kota			Jumlah Waktu Pendataan dan Penyusunan data base Pekuburan 12 Bulan	12 Bulan	165,000,000	165,000,000	
		Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	Kota			Jumlah sarana dan prasarana pemakaman yang dibangun 2 TPU	2 TPU	250,000,000	250,000,000	
		Program Pembangunan Taman Kota								Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Taman Terbuka Hijau	Kota			Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Terbuka Hijau yang dibangun 2 Taman	2 Taman	400,000,000	400,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Pemeliharaan Alun-alun Taman Merdeka	Kota		Jumlah Waktu Jasa Pemeliharaan Alun-alun Taman Merdeka 12 Bulan	12 Bulan	250,000,000	250,000,000	
		Masterplan dan DED Taman Kecamatan	Kota		Jumlah Masterplan dan DED Taman Tematik yang disusun 2 Dokumen	2 Dokumen	100,000,000	800,000,000	
		Pembangunan RTH di Kelurahan Gedung Nasional	Kota				700,000,000	-	
		Pemeliharaan taman dan ruang terbuka hijau	Kota		Jumlah Waktu Jasa Pemeliharaan Taman dan RTH 12 Bulan	12 Bulan	850,000,000	850,000,000	
		Penebangan dan Pemangkasan pohon	Kota		Jumlah Waktu jasa Penebangan dan Pemangkasan Pohon 12 Bulan	12 Bulan	650,000,000	650,000,000	
		Penyusunan PERDA Penebangan Pohon	SKPD		Jumlah RAPERDA yang menjadi PERDA 1 Dokumen	1 Dokumen	110,000,000	150,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Program Pengembangan FASUM							Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Perencanaan Teknis dan Monitoring Evaluasi Pengembangan Fasilitas Umum Kecamatan Bukit Intan	Bukit Intan			Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis 7 Dokumen	7 Dokumen	55,000,000	55,000,000
			Pembangunan Jalan Setapak	Kota			Jumlah Jalan Setapak yang dibangun 2.000 Meter Persegi	2.000 Meter Persegi	5,000,000,000	15,000,000,000
			Pembangunan Drainase dan Talud	Kota			Jumlah Drainase dan Talud yang dibangun 1.715 Meter Persegi	1.715 Meter Persegi	6,002,500,000	25,000,000,000
			Pemeliharaan Rutin Jalan Setapak	Kota, SKPD			Jumlah Waktu Layanan Jasa Pemeliharaan Rutin Jalan Setapak 12 Bulan	12 Bulan	800,000,000	1,000,000,000

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Pemeliharaan Rutin Drainase	Kota, SKPD		Jumlah Waktu Layanan Jasa Pemeliharaan Drainase 12 Bulan	12 Bulan	800,000,000	1,000,000,000	
		Perencanaan Teknis dan Monitoring Evaluasi Pengembangan Fasilitas Umum Kecamatan Rangkui	Rangkui		Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis 8 Dokumen	8 Dokumen	65,000,000	65,000,000	
		Perencanaan Teknis dan Monitoring Evaluasi Pengembangan Fasilitas Umum Kecamatan Gerugang	Gerugang		Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis 6 Dokumen	6 Dokumen	45,000,000	45,000,000	
		Perencanaan Teknis dan Monitoring Evaluasi Pengembangan Fasilitas Umum Kecamatan Pangkalbalam	Pangkalbalam		Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis 5 Dokumen	5 Dokumen	35,000,000	35,000,000	
		Perencanaan Teknis dan Monitoring Evaluasi Pengembangan	Gabek		Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis 6 Dokumen	6 Dokumen	45,000,000	45,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Fasilitas Umum Kecamatan Gabek								
			Perencanaan Teknis dan Monitoring Evaluasi Pengembangan Fasilitas Umum Kecamatan Taman Sari	Tamansari			Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis 5 Dokumen	5 Dokumen	35,000,000	35,000,000	
			Perencanaan Teknis dan Monitoring Evaluasi Pengembangan Fasilitas Umum Kecamatan Girimaya	Girimaya			Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis 5 Dokumen	5 Dokumen	35,000,000	35,000,000	
			Peningkatan Kualitas PSU Lingkungan Perumahan	Kota			Jumlah Jalan Lingkungan Perumahan, Drainase Lingkungan Perumahan dan RTH Lingkungan Perumahan yang direhab (Rp. 2.500.000 per Meter Persegi) 2.000 Meter	2.000 Meter	400,000,000	2,000,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Pembangunan Plat duiker	Kota		Jumlah Plat duiker yang dibangun 28 Unit	28 Unit	682,500,000	9,600,000,000	
			Perencanaan							
			Program kajian dan penelitian pengembangan pembangunan							Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah
			Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah	SKPD		jumlah dokumen jurnal penelitian daerah yang tersusun 1 Dokumen	1 Dokumen	180,000,000	210,000,000	
	Penguatan Sinergitas dan Pemantapan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Fungsi Koordinasi Serta Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Program Pengembangan data/informasi							Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kota Pangkalpinang	Kota			jumlah dokumen sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Kota Pangkalpinang 1 dokumen	1 dokumen	160,000,000	170,000,000	
			Penyusunan Data Ekonomi Sosial Budaya	Kota			jumlah jenis data ekonomi sosial dan budaya 1 jenis data	1 jenis data	100,000,000	110,000,000	
			Pemutakhiran Data Infrastruktur Daerah	Kota			jumlah dokumen data infrastruktur yang tersedia secara akurat 1 dokumen	1 dokumen	190,000,000	-	
			Pengolahan Data SDA dan LH	Kota			jumlah dokumen data SDA dan LH yang tersedia secara akurat 0 dokumen	0 dokumen	200,000,000	270,000,000	
			Statistik Strategis Infrastruktur Daerah	SKPD			Jumlah dokumen statistik strategis infrastruktur daerah yang dipublikasikan 1 dokumen	1 dokumen	250,000,000	350,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Program Kerjasama Pembangunan								Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah
			Koordinasi Forum Kota Sehat Kota Pangkalpinang*	Kota			jumlah dokumen hasil koordinasi forum kota sehat Kota Pangkalpinang 1 dokumen	1 dokumen	120,000,000	120,000,000	
			Rapat Koordinasi Kepala Bappeda se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kota			Jumlah dokumen hasil rapat koordinasi kepala Bappeda se-provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tersedia 1 dokumen	1 dokumen	200,000,000	-	
			Citynet dan UCLG ASPAC	Luar Daerah			jumlah dokumen kerjasama yang diikuti pemerintah Kota Pangkalpinang 1 dokumen	1 dokumen	150,000,000	210,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Program perencanaan pembangunan daerah								Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah
			Pelaksanaan Pengusulan dan Penyusunan Laporan Penggunaan DAK	SKPD			jumlah dokumen laporan pelaksanaan pengusulan dan penyusunan laporan penggunaan DAK yang tersedia 1 Dokumen	1 Dokumen	160,000,000	170,000,000	
			Bimtek Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi	SKPD			jumlah peserta yang mengikuti bimtek sistem monitoring dan evaluasi 65 peserta	65 peserta	280,000,000	-	
			Survey perencanaan pembangunan daerah	SKPD			jumlah dokumen data/informasi spasial perencanaan pembangunan yang tersedia 1 dokumen	1 dokumen	290,000,000	350,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Penyusunan LAKIP Kota Pangkalpinang	SKPD			jumlah dokumen LAKIP Kota Pangkalpinang yang tersusun 1 dokumen	1 dokumen	230,000,000	240,000,000	
		Monitoring dan Evaluasi Program Strategis Walikota	Kota			jumlah dokumen laporan money dan evaluasi strategis walikota yang tersusun 2 dokumen	2 dokumen	250,000,000	250,000,000	
		Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	SKPD			jumlah dokumen laporan money, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah 4 dokumen	4 dokumen	200,000,000	220,000,000	
		Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Kota			Jumlah dokumen laporan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan gerakan masyarakat hidup sehat 1 laporan	1 laporan	80,000,000	100,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Workshop Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	SKPD			jumlah aparatur yang mengikuti workshop penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah 65 aparatur	65 aparatur	90,000,000	135,000,000	
			Kelompok Kerja Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (Pokja P2KP)	Kota			Jumlah dokumen program dan penataan dan pelestarian kota pusaka (P2KP) yang tersedia 1 dokumen	1 dokumen	160,000,000	200,000,000	
			Kelompok Kerja Perumahan dan Pemukiman	Kota			terlaksananya program pendampingan kota tanpa kumuh (KOTAKU) 1 dokumen	1 dokumen	190,000,000	200,000,000	
			Pengelolaan Sistem E-Planning	SKPD			jumlah jenis data elektronik perencanaan jangka pendek yang tersedia	1 jenis data	120,000,000	130,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

						1 jenis data				
		Kelompok Kerja Pengembangan Kota Hijau (P2KH)	Kota			jumlah dokumen hasil kelompok kerja pengembangan kota hijau (P2KH) yang tersedia 1 Dokumen	1 Dokumen	160,000,000	-	
		Diseminasi Naskah Akademis RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023	SKPD			jumlah dokumen peraturan daerah tentang RPJMD kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 1 Dokumen	1 Dokumen	120,000,000	130,000,000	
		Penyelenggaraan musrenbang RPJMD	SKPD			jumlah pelaksanaan musrenbang RPJMD 2018-2023 1 kali	1 kali	200,000,000	-	
		Analisa Indikator Makro, Keuangan dan Capaian Sasaran Pembangunan	SKPD			jumlah dokumen laporan hasil analisa capaian sasaran pembangunan yang tersedia 1 Dokumen	1 Dokumen	90,000,000	100,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Penyusunan RKPD Perubahan	SKPD			jumlah dokumen perencanaan jangka pendek yang tersusun 1 dokumen	1 dokumen	50,000,000	100,000,000	
		Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL)	SKPD			jumlah dokumen hasil kelompok kerja air minum dan penyehatan lingkungan (Pokja AMPL) yang tersedia 1 Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	200,000,000	
		Penyusunan KLHS RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023	SKPD			jumlah dokumen KLHS RPJMD tahun 2018-2023 yang tersedia 2 dokumen	2 dokumen	250,000,000	-	
		Pengembangan Website	SKPD			jumlah media elektronik perangkat daerah yang dikelola 1 media elektronik	1 media elektronik	50,000,000	50,000,000	
		Penyusunan Evaluasi RKPD	SKPD			Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi yang dihasilkan 4 laporan	4 laporan	50,000,000	100,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Penyusunan RKPD	Kota			jumlah dokumen perencanaan jangka pendek yang tersusun 1 dokumen	1 dokumen	300,000,000	340,000,000	
		Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Kota			jumlah pelaksanaan musrenbang OPD 1 kali	1 kali	200,000,000	250,000,000	
		Program perencanaan sosial dan budaya								Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah
		Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Pangkalpinang	SKPD			jumlah laporan hasil koordinasi penanggulangan kemiskinan 1 laporan	1 laporan	120,000,000	120,000,000	
		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH								Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Tim koordinasi pencegahan dan pemberantasan korupsi Kota Pangkalpinang	SKPD			jumlah laporan hasil koordinasi pemberantasan korupsi Kota Pangkalpinang 1 laporan	1 laporan	150,000,000	160,000,000	
			Perhubungan								
	Pengembangan Infrastruktur Daerah	Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan Dan Berbasis Smart City	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan								Dinas Perhubungan
			Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	SKPD			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 1 Dokumen	1 Dokumen	80,000,000	-	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan	SKPD			Jumlah Dokumen yang Tersusun 3 Dokumen	3 Dokumen	50,000,000	-	
		Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Kota, SKPD			Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 15 Kali	15 Kali	40,000,000	-	
		Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan	Kota, SKPD			Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan di bidang perhubungan 3 Kali	3 Kali	50,000,000	-	
		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ								Dinas Perhubungan
		Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor UPTD.PPTD	Kota			Jumlah Gedung kantor UPTD.PPTD dapat dilakukan Rehabilitasi/Pemeliharaan 1 Buah	1 Buah	110,000,000	275,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	Kota, SKPD		Jumlah Terminal/Pelabuhan yang terpelihara 2 Terminal	2 Terminal	300,000,000	-	
		Rehabilitasi / pemeliharaan Prasarana UPTD.PPTD	Kota, SKPD		Jumlah Jenis Prasarana UPTD.PPTD dapat dilakukan Rehabilitasi/Pemeliharaan 5 Jenis	5 Jenis	85,000,000	-	
		Pemeriharaan Traffic Light dan warning Light	Kota		Jumlah Traffic light dan warning light yang dilakukan pemeliharaan 6 unit	6 unit	50,000,000	-	
		Perawatan Pergantian rambu-rambu jalan	Kota		Jumlah Perawatan/Pergantian Rambu-Rambu Jalan 50 Buah	50 Buah	75,000,000	-	
		Pogram peningkatan pelayanan angkutan							Dinas Perhubungan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang	Kota, SKPD			Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan bagi para sopir/juri mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang 2 Kali	2 Kali	20,000,000	20,000,000	
		Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan	Kota, SKPD			Jumlah Dokumen Data base Pelayanan jasa angkutan 1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	-	
		Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan	Kota, SKPD			Jumlah Fasilitasi Perizinan di bidang perhubungan 12 Kali	12 Kali	20,000,000	-	
		Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	Kota			Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan 1 Kali	1 Kali	50,000,000	-	
		Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan	Kota, SKPD			Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan 8 Kali	8 Kali	20,000,000	-	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan	Kota, SKPD			Jumlah Pelaksanaan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan 4 Kali	4 Kali	20,000,000	20,000,000	
		Penertiban Angkutan Kota	Kota, SKPD			Jumlah Pelaksanaan Penertiban angkutan Kota 10 Kali	10 Kali	30,000,000	-	
		Pengawasan dan Pengendalian parkir	Kota, SKPD			Jumlah Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian parkir 6 Kali	6 Kali	20,000,000	-	
		Pemilihan awak teladan	Kota, SKPD			Jumlah Pelaksanaan pemilihan awak teladan 1 Kali	1 Kali	30,000,000	-	
		Pemilihanan Pelajar Displin Lalin	Kota, SKPD			Jumlah Pelaksanaan Pemilihan pelajar disiplin lalu lintas 1 Kali	1 Kali	30,000,000	-	
		Penertiban Angkutan Lebaran (H-7 dan H+7)	Kota, SKPD			Jumlah Pelaksanaan Penertiban angkutan lebaran (H-7 dan	9 Kali	35,000,000	-	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

						H+7) 9 Kali				
			Peningkatan Kinerja Juru Parkir	Kota, SKPD		Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kinerja Juru Parkir 1 Kali	1 Kali	30,000,000	-	
			Pengawasan dan Penertiban Parkir	Kota, SKPD		Jumlah Pelaksanaan Pengawasan dan penertiban parkir 24 Kali	24 Kali	30,000,000	-	
			Monitoring dan Evaluasi Bina Lalu Lintas	Kota, SKPD		Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi bina lalu lintas 1 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000	-	
			Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	Kota, SKPD		Jumlah Pelaksanaan Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya 4 Kali	4 Kali	20,000,000	20,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal	Kota, SKPD			Jumlah Pelaksanaan Penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal 12 Kali	12 Kali	50,000,000	50,000,000	
		Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum	Kota, SKPD			Jumlah Tempat-tempat pemberhentian angkutan umum yang tertata 4 Lokasi	4 Lokasi	50,000,000	50,000,000	
		Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas								Dinas Perhubungan
		Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Kota, SKPD			Jumlah Pengadaan Rambu-rambu lalu lintas 40 Set	40 Set	100,000,000	150,000,000	
		Pengadaan Traffic Cone	Kota, SKPD			Jumlah Pengadaan Traffic cone 150 Unit	150 Unit	85,126,000	100,000,000	
		Pelayanan Forum Lalu Lintas	Kota, SKPD			Jumlah Pelaksanaan Pelayanan Forum Lalu lintas 3 Kali	3 Kali	30,000,000	111,900,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Pengadaan marka jalan	Kota, SKPD		Jumlah Pengadaan Marka Jalan 100 Meter	100 Meter	200,000,000	200,000,000	
			Operasi Lalu Lintas Gabungan (TNI, POLRI, LLAJ)	Kota, SKPD		Jumlah Pelaksanaan Operasi lalu lintas gabungan (TNI, POLRI,LLAJ) 3 Kali	3 Kali	30,000,000	117,120,000	
			Pengadaan pagar pengaman jalan	Kota, SKPD		Jumlah Pengadaan Pagar pengaman jalan 185 Meter	185 Meter	200,000,000	200,000,000	
			Studi Kelayakan Jalan 1 (satu) arah di Kota Pangkalpinang	Kota, SKPD		Jumlah dokumen Study kelayakan jalan satu arah di kota pangkalpinang 1 Dokumen	1 Dokumen	-	150,000,000	
			Studi Kelayakan Kawasan Tertib Berlalu Linta	Kota, SKPD		Jumlah Dokumen study kelayakan kawasan tertib lalu lintas 1 Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	150,000,000	
			Pengendalian dan Pengamanan lalu lintas	Kota, SKPD		Jumlah Tenaga Kerja Pengendalian dan Pengamanan Lalu	9 Orang	210,000,000	250,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

						Lintas 9 Orang				
		Pembangunan Taman Lalu Lintas	Kota, SKPD			Jumlah Taman Lalu lintas yang di bangun 1 Unit	1 Unit	200,000,000	300,000,000	
		Program Pembangunan Penerangan Jalan Umum								Dinas Perhubung an
		Pemeliharaan dan Perbaikan Lampu Penerangan Jalan Umum	Kota, SKPD			Jumlah Titik Lampu Penerangan jalan umum yang dapat diperbaiki 95 Titik Lampu	95 Titik Lampu	675,000,000	750,000,000	
		Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU)	Kota			Jumlah Pengadaan Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum 150 Titik Lampu	150 Titik Lampu	1,150,000,000	12,000,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Peremajaan Kunci Panel/Pengaman Panel Penerangan Jalan Umum	Kota, SKPD		Jumlah kunci panel/Pengaman Panel Penerangan Jalan Umum yang dapat disediakan 130 Unit	130 Unit	30,000,000	35,000,000	
			Pengadaan KWH Penerangan Jalan Umum	Kota		Jumlah KWH Penerangan Jalan Umum yang dapat disediakan 3 Unit	3 Unit	75,000,000	100,000,000	
			Pengadaan Perlengkapan Kerja Lapangan/Perlengkapan Keselamatan Kerja Penerangan Jalan Umum	Kota, SKPD		Jumlah Jenis Perlengkapan Kerja lapangan/Perlengkapan Keselamatan Kerja Penerangan Jalan Umum Yang dapat tersedia 8 Jenis	8 Jenis	100,000,000	80,000,000	
			Lingkungan Hidup							
	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan	Meningkatnya Iklim Investasi Daerah	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam							Dinas Lingkungan Hidup

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

	Masyarakat Melalui Pembangunan Sektor Strategis		Pemantauan Bahan Perusak Ozon	SKPD			jumlah pemantauan bahan perusak ozon 20 pelaku usaha	20 pelaku usaha	40,000,000	44,000,000	
			Program Kampung Iklim	Kota			jumlah kampung iklim yang dibentuk 1 kampung	1 kampung	42,000,000	46,200,000	
			penyusunan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah(IKPLHD)	SKPD			jumlah dokumen IKPLHD yang tersedia 1 dokumen	1 dokumen	100,000,000	110,000,000	
			penyusunan dokumen daya dukung dan daya tampung (DDDT) Lingkungan hidup	SKPD			jumlah dokumen DDDT yang tersedia 1 dokumen	1 dokumen	200,000,000	220,000,000	
			penyusunan dokumen kajian lingkungan hidup strategis (KLHS)	SKPD			jumlah dokumen KLHS yang tersedia 1 dokumen	1 dokumen	250,000,000	275,000,000	
	Pengembangan Infrastruktur Daerah	Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan								Dinas Lingkungan Hidup

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Dan Berbasis Smart City								
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	SKPD			jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan 1 laporan	1 laporan	5,825,000	6,407,500	
		Biaya pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan (Operasional TPI)	SKPD			jumlah TPA yang mendapatkan pemeliharaan 1 kali	1 kali	86,012,000	94,613,200	
		Pengendalian pencegahan pencemaran sampah liar	SKPD			jumlah pelaksanaan pengendalian pencegahan pencemaran sampah liar 4 kali	4 kali	30,756,000	33,831,600	
		Operasional TPA Sistem Sanitari Landfil	SKPD			jumlah TPA yang beroperasi 1 unit	1 unit	2,168,425,350	2,385,267,885	
		Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	SKPD			jumlah sarana dan prasarana pengelolaan persampahan 10 unit	10 unit	121,514,587	133,666,046	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Persampahan	SKPD		jumlah sarana dan prasarana persampahan yang mendapatkan rehabilitasi 17 unit	17 unit	883,475,600	971,823,160	
		Pemeliharaan Kebersihan Perumahan tampuk Pinang Pura	SKPD		jumlah waktu pemeliharaan kebersihan perumahan tampuk pinang pura 12 bulan	12 bulan	77,342,000	85,076,200	
		Kerjasama Penanganan Kebersihan Kota	SKPD		jumlah pelaksanaan kerjasama penanganan kebersihan kota 2 kali	2 kali	50,000,000	55,000,000	
		Sosialisasi pemilihan dan pengolahan sampah masyarakat	SKPD		jumlah peserta sosialisasi 100 orang	100 orang	50,000,000	55,000,000	
		Sosialisasi sadar Reduce Reuse Recycle 3R bagi siswa/siswi	SKPD		jumlah siswa/siswi peserta sosialisasi 100 orang	100 orang	50,000,000	55,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	SKPD		jumlah prasarana dan sarana persampahan yang mendapatkan peningkatan operasi dan pemeliharaan 85 unit	85 unit	9,031,069,700	9,934,176,670	
		Pemeliharaan kebersihan perumahan RUSUNAWA	SKPD		jumlah waktu pemeliharaan kebersihan perumahan RUSUNAWA 12 bulan	12 bulan	71,576,000	78,733,600	
		Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	SKPD		jumlah masyarakat yang melakukan pengolahan persampahan 70 orang	70 orang	50,000,000	55,000,000	
		Pengadaan Rumah Kompos			2000-06-27	0 0	-	-	
		Pengadaan Alat Angkut Dump Truck	SKPD, Tamansari, Bukit Intan, Gabek,		jumlah dump truck yang dibeli 6 unit	6 unit	2,520,000,000	-	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

				Gerung gang, Girimay a							
			Pengelolaan sampah serta sarana prasarana pendukung	Kota, Girimay a, Gerung gang			Terbangunnya bank sampah 1 unit Terbangunya Rumah Kompos 1 unit	1 unit 1 unit	700,000,000	-	
			Pengadaan Alat Berat Bulldozer	Kota			Jumlah bulldozer yang dibeli 2 unit	2 unit	3,000,000,000	-	
			Pengadaan Truck Compektor	Kota			Jumlah Truck Compektor yang dibeli 1 unit	1 unit	1,500,000,000	-	
			Pengadaan Jembatan Timbang	Kota			Jumlah jembatan timbang 1 set	1 set	500,000,000	-	
			Pengadaan TPS 3R	Kota			Jumlah TPS 3R yang dibangun 1 unit	1 unit	300,000,000	-	
			Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup								Dinas Lingkungan Hidup

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura	Kota		jumlah pelaksanaan koordinasi penilaian kota sehat/adipura 4 kali	4 kali	100,000,000	110,000,000	
		Pengembangan produksi ramah lingkungan	SKPD		jumlah bank sampah yang dibentuk 4 bank sampah	4 bank sampah	40,000,000	44,000,000	
		sosialisasi dampak kerusakan lingkungan	SKPD		jumlah peserta sosialisasi 40 orang	40 orang	50,000,000	55,000,000	
		Pengadaan Alat Pemantau Kualitas Lingkungan					-	-	
		Pemantauan Kualitas Lingkungan	Kota		jumlah sampel air lingkungan yang mendapat pemantauan kualitas lingkungan 225 sampel	225 sampel	255,000,000	280,500,000	
		Pembinaan Program Adiwiyata	Kota		jumlah sekolah yang mendapat pembinaan 10 sekolah	10 sekolah	50,000,000	55,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Penanganan kasus pengaduan masyarakat akibat pencemaran kerusakan lingkungan	Kota		Jumlah kasus pengaduan masyarakat akibat pencemaran kerusakan lingkungan 5 kasus	5 kasus	50,000,000	55,000,000	
		Akreditasi Laboratorium	SKPD		jumlah sertifikat yang dikeluarkan 40 sertifikat	40 sertifikat	25,000,000	27,500,000	
		Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Kota		jumlah perusahaan/pelaku usaha yang di awasi 45 usaha	45 usaha	50,000,000	55,000,000	
		Sosialisasi sumber pencemaran yang berasal dari industri	SKPD		jumlah peserta sosialisasi 40 orang	40 orang	50,000,000	55,000,000	
		Koordinasi Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup	SKPD		jumlah koordinasi penilaian dokumen lingkungan hidup 100 kali	100 kali	50,000,000	55,000,000	
		Penyelenggaraan sekretariat Komisi AMDAL	SKPD		jumlah dokumen Amdal yang dapat diselesaikan 2	2 dokumen	90,000,000	99,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

						dokumen				
		Akselerasi Laboratorium	SKPD			jumlah jenis sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan hidup 2 jenis	2 jenis	14,305,000	15,735,500	
		Sosialisasi Peraturan Perundangan	SKPD			jumlah peserta sosialisasi 70 orang	70 orang	70,000,000	77,000,000	
		pengawasan limbah B3	SKPD			jumlah perusahaan yang diawasi dalam pengelolaan limbah B3 10 perusahaan	10 perusaha an	30,000,000	33,000,000	
		pendapatan dan pemetaan penghasil limbah b3	SKPD			jumlah dokumen hasil pendataan dan pemetaan penghasil limbah B3 2 dokumen	2 dokumen	30,000,000	33,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		pembinaan terhadap sumber pencemaran pada institusi dan non instirtusi	SKPD			jumlah pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemaran pada institusi dan non institusi 2 kali	2 kali	46,200,000	50,820,000	
		penyusunan kebijakan lingkungan hidup	SKPD			jumlah dokumen penyusunan kebijakan lingkungan hidup 1 dokumen	1 dokumen	50,000,000	55,000,000	
		Pengadaan peralatan laboratorium untuk uji kualitas air	SKPD			tersedianya sarana pendukung laboratorium 1 paket Tersedianya peralatan sampling air 1 paket Tersedianya peralatan utama AAS 1 unit	1 paket 1 paket 1 unit	2,500,000,000	-	
		Pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan hidup						-	-	
		Program Rehabilitasi dan Pemulihan								Dinas Lingkungan Hidup

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Cadangan Sumber daya Alam								
		peningkatan sarana dan prasarana sumber daya alam	SKPD			jumlah sarana dan prasarana sumber daya alam yang tersedia 2 buah	2 buah	32,784,500	36,062,950	
		pengendalian dan pengawasan pemanfaatan sumber daya alam	SKPD			jumlah sumber daya alam yang mendapat pengendalian dan pengawasan 1 paket	1 paket	347,155,150	357,422,120	
		Pertanahan								
		Program pembangunan sistem pendaftaran tanah								Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Pembuatan database aset bidang tanah kota Pangkalpinang	SKPD			jumlah database yang dibangun untuk aset bidang tanah 0 database	0 database	250,000,000	275,000,000	
		Pengadaan Alat Ukur	SKPD			Jumlah jenis alat ukur yang disediakan 0 jenis	0 jenis	850,000,000	935,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Pengukuran dan pendataan tanah	Kota			jumlah dokumen tanah yang dikeluarkan 0 dokumen	0 dokumen	350,000,000	385,000,000	
		Program Penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah								Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Pembuatan alas hak dan dan Asset Bidang Pertanahan	Kota, SKPD			jumlah dokumen sertifikasi aset bidang tanah yang dikeluarkan 0 dokumen	0 dokumen	100,000,000	110,000,000	
		Monitoring pelaksanaan perizinan (IPPL dan Izin Lokasi)	Kota, SKPD			jumlah kegiatan monitoring pelaksanaan perizinan yang dilakukan 0 kegiatan	0 kegiatan	100,000,000	110,000,000	
		Pengadaan lahan untuk peningkatan sarana prasarana daerah	Kota			jumlah lahan yang disiapkan untuk peningkatan sarana dan prasaeeana 0 lahan	0 lahan	5,237,442,000	5,761,186,200	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan								Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Kota, SKPD			jumlah konflik pertanahan yang diselesaikan 0 konflik	0 konflik	50,000,000	55,000,000	
			Pengamanan Aset	Kota			Jumlah aset yang dilakukan pengamanan 0 aset	0 aset	2,300,000,000	2,530,000,000	
			Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil								
	Pemantapan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Berstandar, Mudah Dan Terjangkau	Program Penataan Administrasi Kependudukan								Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu	SKPD			Jumlah waktu pengoperasian SIAK 12 bulan	12 bulan	833,606,000	1,028,993,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Sosialisasi kebijakan kependudukan	SKPD		Jumlah peserta sosialisasi Kebijakan kependudukan 404 orang	404 orang	80,000,000	90,000,000	
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	SKPD		Jumlah laporan monev yang disusun 4 laporan	4 laporan	15,000,000	17,500,000	
		Pemutakhiran Dokumen Catatan Sipil	SKPD		Jumlah data dokumen capil yang dimutakhirkan 45.000 data	45.000 data	325,000,000	350,000,000	
		Pelayanan Keliling Pendaftaran Pendudukan	SKPD		Jumlah penduduk yang mengurus dokumen kependudukan 300 orang	300 orang	150,000,000	160,000,000	
		Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	SKPD		Jumlah laporan IKM yang disusun 2 laporan	2 laporan	34,410,000	37,851,000	
		Penyediaan sarana pelayanan publik bidang kependudukan	SKPD		Jumlah jenis sarana pelayanan bidang kependudukan 5	5 jenis	129,596,500	421,406,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

						jenis				
		Penyediaan sarana Pelayanan Publik bidang capil	SKPD			Jumlah jenis sarana pelayanan bidang capil 4 jenis	4 jenis	65,000,000	165,000,000	
		Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan	SKPD			Jumlah masyarakat yang mendapat layanan administrasi kependudukan diluar hari kerja 4.800 orang	4.800 orang	394,132,000	425,000,000	
		Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	SKPD			Jumlah jenis laporan informasi kependudukan 2 jenis	2 jenis	80,000,000	140,000,000	
		Penyusunan Buku Profil Perkembangan Penduduk	SKPD			Jumlah jenis buku profil kependudukan 1 jenis	1 jenis	80,000,000	40,000,000	
		Pemusnahan dokumen arsip kependudukan dan pencatatan sipil	SKPD			Jumlah arsip dokumen kependudukan dan capil yang	25 ML	45,000,000	-	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

						dimusnahkan 25 ML				
			Inovasi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kota		Jeumlah jenis inovasi pelayanan yang dilaksanakan 1 jenis	1 jenis	21,953,000	70,000,000	
			Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Penduduk	Kota		Jumlah OPD yang melaksanakan dokumen PKS 10 MOU	10 MOU	100,000,000	50,000,000	
			Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu (DAK)	SKPD		Ju,lah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 10 orang	10 orang	95,434,000	98,500,000	
			Penyediaan sarana pelayanan publik bidang kependudukan (DAK)	SKPD		Jumlah paket blamko formulir dan ATK operasional bidang kependudukan 2 paket	2 paket	240,500,000	257,750,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Penyediaan sarana Pelayanan Publik bidang capil (DAK)	SKPD			Jumlah paket balnko, formulir dan ATK operasional bidang capil 2 paket	2 paket	101,750,000	185,000,000	
			Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak								Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Pelaksanaan Peringatan Hari Anak	Kota, SKPD			Jumlah peserta Peringatan Hari Anak di Kota Pangkalpinang 200 Orang	200 Orang	60,000,000	100,000,000	
			Pengembangan Forum Anak Skala Kota	Kota, SKPD			Jumlah anak yang mengikuti Forum Anak 80 Orang	80 Orang	70,000,000	77,000,000	
			Pengembangan Kebijakan Kota Layak Anak (KLA)	Kota, SKPD			Jumlah peserta Tim Gugus Tugas Program KLA 170	170 Orang	20,000,000	100,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

							Orang				
			Penyusunan Raperda Tentang Perlindungan Anak	SKPD			Jumlah Raperda Perlindungan Anak 1 Raperda	1 Raperda	55,000,000	-	
			Pengembangan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Kota, SKPD			Jumlah PATBM di Kota Pangkalpinang 9 PATBM	9 PATBM	48,610,000	80,000,000	
	Peningkatan Pemberdayaan Sosial Masyarakat	Meningkatnya Internalisasi Nilai-Nilai Budaya Dalam Kehidupan Masyarakat	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan								Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Pengembangan Pelaku Industri Rumahan	Kota, SKPD			Jumlah IRT Berbasis Perempuan sebagai pelaku industri rumahan 1.680 IRT	1.680 IRT	70,000,000	77,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

	Pemantapan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Berstandar, Mudah Dan Terjangkau	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak								Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Penyusunan Buku Profil Gender Dan Anak	Kota, SKPD			Jumlah Jenis Buku Profil Gender dan Anak 1 Jenis	1 Jenis	70,000,000	-	
			Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A)	Luar Daerah, Kota, SKPD			Jumlah Kasus penanganan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak 70 Kasus	70 Kasus	163,390,000	241,890,000	
			Evaluasi pelaksanaan PUG	Kota, SKPD			Jumlah OPD yang menjadi sasaran evaluasi PUG di Kota Pangkalpinang 31 OPD	31 OPD	30,000,000	33,000,000	
			Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Program Keluarga Berencana								Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan keluarga berencana				Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelayanan keluarga berencana 12 bulan	12 bulan	1,410,562,000	1,551,618,200	
			Rapat koordinasi daerah (RAKORDA) bidang KB	SKPD			terlaksana koordinasi pelaksanaan program KB antar lini maupun antar instansi terkait 60 orang	60 orang	42,000,000	46,200,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Penunjang Pelayanan Keluarga Berencana balai Penyuluhan Lapangan	SKPD			Tersedianya, terpeliharanya dan terlaksananya optimalisasi pelayanan KB di Balai Penyuluh KB 4 balai kb	4 balai kb	323,546,000	355,900,600	
		Bantuan Operasional Keluarga Berencana	SKPD			tersedianya dana BOKB di Balai Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana 12 bulan	12 bulan	273,888,800	301,277,680	
		Distribusi alat dan obat kontrasepsi	SKPD			tercukupinya alat dan obat kontrasepsi 32 faskes	32 faskes	17,800,000	19,580,000	
		Integrasi kampung keluarga berencana				Terlaksananya intergrasi kampung KB 12 bulan	12 bulan	1,240,741,200	1,364,815,320	
		ORIENTASI BAGI PENDIDIK SEBAYA PUSAT INFORMASI KONSELING-KESEHATAN	SKPD			terlatihnya siswa SMA/SMK serta mahasiswa yang dilatih 50 orang	50 orang	73,000,000	80,300,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			REPRODUKSI REMAJA (PIK-R)							
			Penyusunan Parameter Kependudukan Kota Pangkalpinang	SKPD		terlaksananya penyusunan grand design kependudukan 20 buku	20 buku	18,000,000	19,800,000	
			Pembinaan Keluarga Berencana	SKPD		terlaksananya lomba ditingkat kota dan terciptanya kelompok terbaik di Provinsi maupun Nasional 8 bulan	8 bulan	40,000,000	44,000,000	
			Program Kesehatan Reproduksi Remaja							Dinas Kesehatan, Pengendali an Penduduk dan Keluarga Berencana

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Pembinaan duta generasi berencana (genre)	SKPD			terlaksananya pemilihan duta genre dan terpilihnya pemenang lomba 50 orang	50 orang	43,000,000	47,300,000	
			Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri								Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Temu Kader KB dalam rangka Hari Keluarga Nasional (HARGANAS)	SKPD			terlaksananya lomba dan temu kader tingkat provinsi serta acara jambore HARGANAS XXVI se-provinsi Kep. Babel 1 kali	1 kali	75,700,000	83,270,000	
			Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga								Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

Keluarga
Berencana

			Pembinaan dan Pendamping Kelompok Bina Keluarga				Terbinanya kader dan petugas pembina/ pendamping kelompok bina keluarga sekota pangkalpinang 1 bulan	1 bulan	30,000,000	33,000,000	
			Sosial								
	Peningkatan Pemberdayaan Sosial Masyarakat	Meningkatnya Internalisasi Nilai-Nilai Budaya Dalam Kehidupan Masyarakat	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial								Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH) Skala Kota	Kota, SKPD			Jumlah pendamping PKH Kota Pangkalpinang 25 Orang	25 Orang	95,000,000	150,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Pembinaan Kampung Siaga Bencana (KSB)	Kota			Jumlah KSB penerima bantuan/fasilitas 4 KSB	4 KSB	60,000,000	90,800,000	
		Pemeliharaan Barang Logistik/Evakuasi Penanggulangan Bencana	Kota, SKPD			Jumlah paket barang logistik/evakuasi penanggulangan bencana 200 Paket	200 Paket	70,000,000	70,000,000	
		Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang Menyangkut Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	Kota, SKPD			Jumlah personil TAGANA yang mendapatkan peningkatan kapasitas berkaitan dengan kesiapsiagaan bencana 67 Orang	67 Orang	474,500,000	550,000,000	
		Penguatan Masyarakat di Daerah Rawan Bencana dan Konflik Sosial	Kota, SKPD			Jumlah peserta sarasehan pencegahan bencana dan konflik sosial 100 Orang	100 Orang	76,400,000	85,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Penguatan Akses Jaminan Sosial Keluarga	Kota			Jumlah kk pekerja sektor Informal/ mandiri dan keluarga miskin penerima PKH yang memperoleh jaminan sosial 300 kk	300 kk	45,000,000	150,000,000	
			Permuktahiran Data PMKS	Kota, SKPD			Jumlah sistem pengembangan permuktahiran data PMKS 1 Sistem	1 Sistem	62,800,000	85,000,000	
			Pemulangan, Penjemputan Dan Pemakaman Orang Terlantar	Luar Daerah, Kota			Jumlah orang terlantar/PMKS yang mendapatkan pelayanan pemulangan, penjemputan dan pemakaman 30 Orang	30 Orang	33,000,000	36,300,000	
	Pemantapan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Berstandar,	Program Rehabilitasi Sosial								Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Mudah Dan Terjangkau								Perlindungan Anak
		Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas	Kota			Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan bantuan dan pendampingan sosial 150 Orang	150 Orang	200,000,000	220,000,000	
		Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia	Kota			Jumlah lansia yang mendapatkan bantuan dan pendampingan sosial 50 Orang	50 Orang	65,668,000	72,500,000	
		Pelayanan Pengangkatan Anak/Adopsi	Kota			Jumlah anak yang di adopsi 20 Orang	20 Orang	25,000,000	30,000,000	
		Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Dan Korban Penyalahgunaan NAPZA, HIV/AIDS	Kota			Jumlah tuna sosial dan korban NAPZA luar panti yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial 80	80	44,000,000	48,400,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Anak	Kota		Jumlah anak luar panti yang mendapatkan bantuan dan pelayanan sosial 35 Orang	35 Orang	70,000,000	77,000,000	
			Program penguatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial							Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Pelayanan Teknis Rumah Perlindungan Sosial (RPS)	Kota, SKPD		Jumlah PMKS yang mendapatkan layanan RPS 60 Orang	60 Orang	40,000,000	50,000,000	
			Pelaksanaan Patroli Sosial Dan Pelayanan Psikososial Bagi PMKS	Kota		Jumlah patroli sosial dan pelayanan psikososial bagi PMKS 48 Kali	48 Kali	187,977,000	250,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Peringatan Hari Disabilitas	Kota, SKPD		Jumlah peserta acara Peringatan Hari Disabilitas 100 Orang	100 Orang	45,000,000	70,000,000	
			Peringatan Hari Lanjut Usia	Kota, SKPD		Jumlah peserta acara Peringatan Hari Lanjut Usia 70 Orang	70 Orang	55,000,000	70,000,000	
			Penyusunan Raperda Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	SKPD		Jumlah Raperda Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas 1 Raperda	1 Raperda	40,000,000	-	
			Strategi Peningkatan Peran Keluarga Dan Masyarakat Terhadap Pencegahan Dan Penyalahgunaan NAPZA	Kota, SKPD		Jumlah peserta sosialisasi pencegahan dan penyalahgunaan NAPZA bagi keluarga/masyarakat 100 Orang	100 Orang	40,000,000	70,000,000	
			Program penanganan fakir miskin							Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

										Perlindungan Anak
			Monitoring Dan Evaluasi Kualitas Pengembangan KUBE	Kota		Jumlah KUBE yang menjadi sasaran monev di Kota Pangkalpinang 72 KUBE	72 KUBE	30,000,000	65,000,000	
			Pemuktahiran Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin/BDT	Luar Daerah, Kota		Jumlah Penduduk Miskin dan Rentan yang masuk Program BDT 13.000 kk	13.000 kk	141,184,000	330,000,000	
			Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	Kota, SKPD		Jumlah Laporan Monev BPNT 7 Laporan	7 Laporan	40,000,000	60,000,000	
			Program pemberdayaan sosial							Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Pelaksanaan Hari Pahlawan	SKPD			Jumlah peserta Puncak Peringatan Hari Pahlawan di Kota Pangkalpinang 400 Orang	400 Orang	75,000,000	95,000,000	
		Pemberdayaan Kelembagaan Keluarga (LK3) Sakinah	Kota, SKPD			Jumlah LK3 yang mendapatkan pembinaan 8 LK3	8 LK3	20,000,000	29,700,000	
		Pusat Pelayanan Sosial Terpadu	Kota, SKPD			Jumlah Kasus Sosial yang mendapatkan penanganan 24 Kasus	24 Kasus	35,000,000	65,000,000	
		Satuan Bhakti Pekerja Sosial (SHAKTI PEKSOS)	SKPD			Jumlah SHAKTI PEKSOS 20 Orang	20 Orang	480,000,000	486,000,000	
		Bulan Bhakti Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSNN) Skala Kota	Luar Daerah, Kota			Jumlah peserta Rangkaian kegiatan Bulan Bhakti HKSNN di Kota Pangkalpinang 400 Orang	400 Orang	140,000,000	245,000,000	
		Penguatan Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Kota, SKPD			Jumlah Personil PSKS 49 Orang	49 Orang	155,000,000	220,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Pemberdayaan Sosial Dan Kelembagaan Masyarakat (Operasional Petugas SLRT)	SKPD			Jumlah Petugas SLRT 60 Orang	60 Orang	40,000,000	85,000,000	
			Tenaga Kerja								
	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan Sektor Strategis	Meningkatnya Produktivitas Dan Daya Saing Masyarakat Yang Kreatif Dan Inovatif	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja								Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
			Monitoring Penempatan Tenaga AKL, AKAD, dan TKA	Kota			jangka waktu penyediaan data informasi pasar kerja bagi tenaga AKL, AKAD dan TKA 12 bulan	12 bulan	33,000,000	35,000,000	
			Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	Kota			jumlah pencari kerja yang terampil 16 orang	16 orang	40,000,000	-	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Program Peningkatan Kesempatan Kerja							Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
			Aplikasi IPK dan Bursa Kerja Online , entri data pencari kerja	Kota		jangka waktu penyediaan data informasi pasar kerja Kota Pangkalpinang 12 bulan	12 bulan	164,230,000	185,000,000	
			Prgram Pengembangan Hubungan Industrial dan Jamsostek							Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
			Rapat koordinasi Dewan pengupahan Kota Pangkalpinang	Kota		jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan 4 kali	4 kali	34,000,000	50,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Mediasi Penyelesaian Perselisihan hubungan Industrial	Kota			jumlah perselisihan hubungan industrial yang di mediasi 75 kasus	75 kasus	62,107,000	75,000,000	
		Rakor Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit dan Survey Lapangan/ Reaksi Cepat	Kota			jumlah rekomendasi yang dihasilkan dari rapat koordinasi 4 rekomendasi	4 rekomend asi	72,871,000	80,000,000	
		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah								
	Meningkatny a Iklim Investasi Daerah	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif								Dinas Koperasi, UMKM dan Perdaganga n
		Fasilitasi kemudahan formalisasi badan usaha Usaha Kecil Menengah	Kota			Jumlah IUMKM yang terfasilitasi kemudahan formalisasi badan usaha 350 UMKM	350 UMKM	16,000,000	17,600,000	
		Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah	Kota			Jumlah UMKM yang terfasilitasi pengembangan UMKM 35 usaha mikro dan kecil	35 usaha mikro dan kecil	10,000,000	11,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah							Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
			Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Kota		Jumlah pertemuan kelompok mitra KUMKM 2 kali	2 kali	-	61,600,000	
			Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Kota		Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan 60 orang	60 orang	34,000,000	37,400,000	
			Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi							Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
			Penilaian Koperasi Berprestasi	Kota		Jumlah kegiatan penilaian koperasi berprestasi 1 kegiatan	1 kegiatan	36,000,000	79,750,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Pelatihan Akutansi dan Manajemen Pengelolaan Koperasi	Kota			Jumlah peserta sosialisasi pelatihan akuntansi dan manajemen koperasi 40 orang	40 orang	-	77,000,000	
		Pembinaan kelembagaan, manajemen, keuangan, permodalan dan kewirausahaan koperasi	Kota			Jumlah kelembagaan koperasi yang terbina 60 koperasi	60 koperasi	32,000,000	35,200,000	
		Peningkatan gerakan masyarakat sadar koperasi	Kota			Jumlah peserta sosialisasi peningkatan Gemaskop 60 orang	60 orang	-	46,400,000	
		Penyuluhan Perkoperasian pada Kelompok Ekonomi Produktif Masyarakat	Kota			Jumlah kegiatan penyuluhan perkoperasian kelompok ekonomi produktif 2 kegiatan	2 kegiatan	-	52,250,000	
		Pelatihan Pengawas Koperasi	Kota			Jumlah peserta pelatihan pengawas koperasi 40 orang	40 orang	45,000,000	49,500,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Kota			Jumlah kegiatan penilaian KSP/USP koperasi 1 kegiatan	1 kegiatan	10,000,000	11,000,000	
		Peningkatan Pemahaman Prinsip-prinsip dan Jati Diri Koperasi	Kota			Jumlah peserta sosialisasi peningkatan pemahaman prinsip-prinsip dan jati diri koperasi 60 orang	60 orang	40,000,000	49,500,000	
		Bintek Perubahan Anggaran Dasar Koperasi	Kota			Jumlah peserta Bintek PAD koperasi 40 orang	40 orang	45,000,000	49,500,000	
		Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Kota			Jumlah kegiatan pengawasan dan pemeriksaan koperasi 2 kegiatan	2 kegiatan	-	13,750,000	
		Penanaman Modal								
		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi								Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

dan Tenaga Kerja

		Bimbingan sosialisasi ketentuan pelaksanaan penanaman modal	Kota			jumlah pengusaha dan calon pengusaha 50 orang	50 orang	52,309,000	57,539,900	
		Penyusunan laporan perizinan penanaman modal	SKPD			jumlah data perusahaan penanaman modal 400 perusahaan	400 perusahaan	51,906,000	57,096,600	
		Survey Indeks Pelayanan Perizinan	Kota			jumlah perusahaan yang disurvei 200 perusahaan	200 perusahaan	39,951,000	43,946,000	
		Penyusunan Kebijakan Penanaman Modal (RAPERDA Pemberian Insentif dan Kemudahan dalam Penanaman MODal)	Kota, SKPD			jumlah rancangan peraturan daerah yang disusun 1 rancangan peraturan daerah	1 rancangan peraturan daerah	75,000,000	-	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi								Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
			Promosi Investasi Daerah	Kota			jumlah bahan promosi investasi 1 bahan promosi	1 bahan promosi	50,000,000	-	
	Pengembangan Infrastruktur Daerah	Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan Dan Berbasis Smart City	Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah								Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
			Penyusunan Laporan Potensi dan Peluang Investasi Daerah	SKPD			jumlah buku laporan potensi dan peluang investasi 20 buku laporan	20 buku laporan	60,000,000	70,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

	Pemantapan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Berstandar, Mudah Dan Terjangkau	Program peningkatan pelayanan perijinan								Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
			Survey lapangan perizinan	Kota			terselenggaranya survey perizinan 350 izin	350 izin	20,627,000	100,000,000	
			Penyelenggaraan pelayanan perizinan lingkup perizinan I	SKPD			terselenggaranya perizinan lingkup perizinan I 100 persen	100 persen	163,000,000	225,000,000	
			Penyelenggaraan pelayanan perizinan lingkup perizinan II	SKPD			terselenggaranya perizinan lingkup perizinan II 100 persen	100 persen	137,000,000	225,000,000	
			Penyelenggaraan pelayanan perizinan lingkup perizinan III	SKPD			terselenggaranya perizinan lingkup perizinan III 100 persen	100 persen	137,000,000	225,000,000	
			Kebudayaan								

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

	Peningkatan Pemberdayaan Sosial Masyarakat	Meningkatny a Internalisasi Nilai-Nilai Budaya Dalam Kehidupan Masyarakat	Program pengembangan, pelestarian dan perlindungan cagar budaya, permuseuman, seni budaya, sejarah dan tradisi								Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n
			Pengembangan, Pelestarian dan Perlindungan Cagar Budaya dan Permuseuman	Kota			Jumlah Jenis Pengembangan, Pelestarian dan Perlindungan Cagar Budaya dan Permuseuman 1 Jenis	1 Jenis	72,000,000	79,200,000	
			Pengembangan, Pelestarian dan Perlindungan Seni dan Budaya Daerah	Luar Daerah, Kota			Jumlah Jenis Pengembangan, Pelestarian dan Perlindungan Seni dan Budaya Daerah 4 Jenis	4 Jenis	735,000,000	808,500,000	
			Pelestarian Nilai Sejarah dan Tradisi	Luar Daerah, Kota			Jumlah Jenis Pelestarian Nilai Sejarah dan Tradisi 1 Jenis	1 Jenis	70,000,000	77,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

Kepemudaan dan Olahraga										
Pengembangan Infrastruktur Daerah	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Program peningkatan peran serta kepemudaan								Dinas Pariwisata
		Pelatihan dan Pelaksanaan Paskibraka	SKPD			Jumlah Paskibraka Kota Pangkalpinang 36 orang	36 orang	530,780,000	550,000,000	
		Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda	SKPD			Jumlah pemuda yang mengikuti fasilitasi 20 orang	20 orang	126,940,000	120,000,000	
		Pembinaan dan pemsayarakatan Olahraga								Dinas Pariwisata
		Pengembangan olahraga rekreasi	SKPD			Jumlah pelaksanaan olahraga rekreasi 40 kali	40 kali	148,292,500	360,000,000	
		Penyediaan jasa penunjang sarana dan prasarana olahraga	SKPD			Jumlah petugas sarana dan prasarana olahraga yang tersedia 10 orang	10 orang	151,002,500	190,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat	SKPD			Atlet yang berprestasi pada cabang olahraga O2SN dan LSP yang dikirim ke tingkat propinsi 120 orang	120 orang	263,000,000	455,000,000	
			Penyelenggaraan kompetisi olahraga	SKPD			Jumlah atlet yang berprestasi yang di kirim ke tingkat propinsi 134 orang	134 orang	1,000,000,000	500,000,000	
			Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat	SKPD			Jumlah atlet berprestasi di cabang olahraga tradisional 20 orang	20 orang	53,280,000	96,000,000	
			Persandian								
	Pemantapan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Berstandar, Mudah Dan Terjangkau	Program Peningkatan Persandian Daerah								Dinas Komunikasi dan Informatika
			Pengelolaan Berita Sandi dan Berita Lainnya	SKPD			Berita sandi dan berita lainnya 2 Jenis	2 Jenis	45,000,000	50,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Pegelolaan Sarana dan Prasarana Persandian	SKPD			Sarana dan prasarana persandian 1 jenis	1 jenis	40,000,000	40,000,000	
			Sosialisasi Peningkatan Pemanfaatan Persandian	SKPD			Peserta memahami pemanfaatan persandian 75 orang	75 orang	85,000,000	85,000,000	
			Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian	SKPD			Instrumen dan laporan monev penyelenggaraan persandian 1 Laporan	1 Laporan	50,000,000	50,000,000	
			Pengendalian dan Pengawasan Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Informatika (Telematika)	SKPD			Laporan hasil pengendalian dan pengawasan telematika 1 Laporan	1 Laporan	60,000,000	60,000,000	
			Pangan								
	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan	Meningkatnya Iklim Investasi Daerah	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)								Dinas Pangan dan Pertanian
			Pengembangan perbenihan/perbibitan	SKPD			jumlah jasa perawatan tanaman	2 orang	43,548,000	45,800,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

	Sektor Strategis					2 orang					
			Analisis dan penyusunan pola konsumsi Pangan melalui PPH	SKPD			jumlah jenis laporan yang tersusun 1 jenis	1 jenis	15,000,000	18,000,000	
			Monitoring, evaluasi dan pelaporan data statistik pertanian/perkebunan	SKPD			jumlah laporan data statistik yang tersusun 1 laporan	1 laporan	21,812,000	24,000,000	
			Uji Mutu dan Keamanan Pangan	SKPD			jumlah pelaksanaan uji mutu dan keamanan pangan 1 kali	1 kali	30,000,000	31,500,000	
			Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM)	SKPD			jumlah jenis laporan 1 jenis	1 jenis	13,070,000	15,500,500	
			Penyusunan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	SKPD			jumlah jenis peta kewaspadaan pangan 1 jenis	1 jenis	15,000,000	17,000,000	
			Lomba Cipta Menu Pangan Bergizi dan seimbang dan Pangan	SKPD			jumlah pelaksanaan lomba cipta menu B2SA Berbasis Pangan Lokal 1 kali	1 kali	40,000,000	45,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian	SKPD			jumlah laporan hasil monitoring evaluasi pelaporan kebijakan subsidi pertanian 1 laporan	1 laporan	5,000,000	20,000,000	
			Statistik								
	Pemantapan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Berstandar, Mudah Dan Terjangkau	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah								Dinas Komunikasi dan Informatika
			Forum Data Statistik	SKPD			Laporan Rekomendasi Pengolahan Data Statistik 1 Laporan	1 Laporan	75,000,000	75,000,000	
			Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Sektoral	SKPD			Dokumen induk data statistik Kota Pangkalpinang 1 Dokumen	1 Dokumen	200,000,000	200,000,000	
			Monitoring dan Evaluasi Statistik	SKPD			Instrumen dan Laporan Monev Statistik 1 Laporan	1 Laporan	50,000,000	50,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Kearsipan							
			Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah							Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Akuisisi /Penyusutan / Pemusnahan Arsip	Kota		Jumlah meter linear arsip yang didata dalam JRA 48 Meter Linear	48 Meter Linear	40,000,000	78,000,000	
			Bimbingan dan Supervisi Penataan Arsip di Unit Pencipta Arsip Binaan	Kota		Jumlah unit kearsipan yang dibimbing penataan arsip dinamisnya 5 unit kearsipan	5 unit kearsipan	36,916,000	75,000,000	
			Pengawasan dan Audit Kearsipan Internal	Kota		Jumlah unit kearsipan yang diaudit 35 unit kearsipan	35 unit kearsipan	30,785,000	165,000,000	
			Pendataan dan Penataan Dokumen/ Arsip Daerah	Kota		Jumlah meter linear box arsip yang dikelola 100 Meter Linear	100 Meter Linear	85,000,000	132,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Penelusuran Arsip	Luar Daerah, Kota, SKPD		Jumlah arsip tokoh/ peristiwa sejarah yang tersimpan 3 arsip	3 arsip	35,000,000	54,900,000	
		Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Kearsipan	Kota		Jumlah peserta bimtek yang terlatih 100 orang	100 orang	50,000,000	70,000,000	
		Lomba Pengelola Kearsipan	Kota		Jumlah pelaksanaan lomba 1 kali	1 kali	46,000,000	55,000,000	
		Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan							Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	SKPD		Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip kantor 1 kali	1 kali	40,000,000	52,000,000	
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi							Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Rapat Koordinasi Peningkatan Pelayanan Kearsipan	Luar Daerah, Kota			Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi 1 kali	1 kali	42,500,000	80,000,000	
			Komunikasi dan Informatika								
	Pengembangan Infrastruktur Daerah	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Program kerjasama informasi dengan massa media								Dinas Komunikasi dan Informatika
			Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui media elektronik	SKPD			Informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui media elektronik 1 jenis	1 jenis	75,000,000	75,000,000	
			Pengelolaan konten website pemerintah	SKPD			Konten website 1 jenis	1 jenis	200,000,000	200,000,000	
			Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui media cetak	SKPD			Informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui media cetak 1 jenis	1 jenis	100,000,000	100,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Pengelolaan Layanan Aduan Masyarakat	SKPD			Laporan Tindak Lanjut Aduan Masyarakat 1 Laporan	150,000,000	150,000,000	
		Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan Dan Berbasis Smart City	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa							Dinas Komunikasi dan Informatika
			Pengadaan Sarana penunjang sistem kominfo	SKPD			Sarana Penunjang Sistem Informasi dan Komunikasi 4 jenis	150,000,000	150,000,000	
			Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi telematika	SKPD			Aplikasi sistem informasi dan telematika 3 jenis	125,000,000	125,000,000	
			Pemeliharaan Sarana Penunjang Sistem Informasi dan Komunikasi	SKPD			Perbaikan dan pemeliharaan sarana penunjang sistem informasi dan	25,000,000	30,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

							komunikasi 1 jenis				
			Pemeliharaan Rutin berkala Peralatan jaringan Fiber Optic	SKPD			Jaringan fiber optic 1 jenis	1 jenis	25,000,000	25,000,000	
			Pengelolaan dan operasional jaringan hot spot	SKPD			Bandwidth jaringan internet 1 paket	1 paket	175,000,000	175,000,000	
			Pengembangan portal induk dan OPD	SKPD			Portal induk dan OPD 1 portal	1 portal	90,000,000	100,000,000	
			Penyusunan DED IT	SKPD			DED IT Pemkot 1 dokumen	1 dokumen	125,000,000	-	
			Pelatihan Operator Aplikasi IT	SKPD			Operator dan admin IT 100 orang	100 orang	85,000,000	85,000,000	
	Pemantapan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Berstandar, Mudah Dan Terjangkau	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi								Dinas Komunikasi dan Informatika

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Sosialisasi dan pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	SKPD			Kelompok Informasi Masyarakat 7 KIM	7 KIM	75,000,000	75,000,000	
			Pembinaan dan Monitoring Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	SKPD			Instrumen dan Laporan Monev KIM 1 Laporan	1 Laporan	50,000,000	50,000,000	
			Peningkatan Kualitas Kelembagaan Perangkat Daerah								Dinas Komunikasi dan Informatika
			Penyusunan dan Pengelolaan Data Informasi Publik	SKPD			Dokumen Data Informasi Publik 1 dokumen	1 dokumen	260,000,000	260,000,000	
			Perpustakaan								
	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Layanan Pendidikan	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan								Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Pengadaan Perangkat Teknologi Informasi Pelayanan Perpustakaan	SKPD			Jumlah perangkat teknologi informasi pelayanan perpustakaan yang tersedia 1 set	1 set	50,000,000	-	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Pengadaan Perabot Kerja, Penyimpanan dan Perlengkapan Lainnya Perpustakaan	SKPD		Jenis perabot kerja, penyimpanan dan perlengkapan lainnya perpustakaan 15 jenis	15 jenis	1,000,000,000	-	
		Pemeliharaan dan Pengolahan Bahan Pustaka	SKPD		Jumlah bahan pustaka yang terpelihara 1.200 eksemplar	1.200 eksemplar	48,500,000	68,400,000	
		Pengembangan Koleksi Perpustakaan	SKPD		Jumlah koleksi bahan pustaka yang tersedia 500 eksemplar	500 eksemplar	50,000,000	250,000,000	
		Renovasi/ Rehabilitasi Gedung Layanan Perpustakaan	SKPD		Jumlah gedung yang direnovasi 1 unit	1 unit	1,920,000,000	-	
		Promosi dan Publikasi Perpustakaan	Kota, SKPD		Jumlah media promosi perpustakaan 3 media promosi	3 media promosi	50,106,500	108,000,000	
		Pengembangan Minat dan Budaya Baca	Kota, SKPD		Jumlah pelaksanaan lomba peningkatan budaya baca 1 kali	1 kali	85,836,500	144,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Pengembangan Layanan Perpustakaan Keliling	Kota		jumlah kunjungan perpustakaan keliling 600 kunjungan	600 kunjungan	64,550,000	90,000,000	
			Pengembangan Layanan Perpustakaan Umum	SKPD		Jumlah pengunjung perpustakaan 7.500 orang	7.500 orang	109,000,000	216,000,000	
			Pengembangan Koleksi Perpustakaan (DAK)	SKPD		Jumlah koleksi bahan pustaka yang tersedia 1.060 eksemplar	1.060 eksemplar	120,500,800	150,000,000	
			Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat	Kota		Jumlah perpustakaan umum/sekolah/khusus/sekolah/masyarakat yang terbina 17 perpustakaan	17 perpustakaan	17,057,000	36,000,000	
			Pertanian							
	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan	Meningkatnya Iklim Investasi Daerah	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan							Dinas Pangan dan Pertanian

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

Masyarakat Melalui Pembangunan Sektor Strategis		Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan	SKPD			jumlah pelaksanaan kegiatan penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan 1 kali	1 kali	16,148,000	18,000,000	
		Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan								Dinas Pangan dan Pertanian
		Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	SKPD			jumlah THL/TBPP yang mendapat peningkatan kesejahteraan 9 orang	9 orang	45,152,000	47,377,600	
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak								Dinas Pangan dan Pertanian
		Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan penyakit menular ternak	SKPD			jumlah jenis sarana dan prasarana pencegahan penyakit menular ternak yang di beli 1 jenis	1 jenis	20,000,000	25,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	SKPD		jumlah pelayanan kesehatan hewan yang diberikan 700 pelayanan	700 pelayanan	20,000,000	25,000,000	
		Pengawasan dan pembinaan kesehatan masyarakat veteriner (Kesmavet)	SKPD		jumlah pelayanan kesehatan masyarakat veteriner yang diberikan 500 pelayanan	500 pelayanan	20,000,000	25,000,000	
		Program peningkatan produksi hasil peternakan							Dinas Pangan dan Pertanian
		Pembibitan dan perawatan ternak	SKPD		jumlah jasa perawatan ternak 5 orang	5 orang	200,000,000	210,000,000	
		Pembinaan dan pengawasan pemotongan ternak (operasional RPH)	SKPD		jumlah UPT yg beroperasi 1 unit	1 unit	214,500,000	225,225,000	
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan peningkatan produksi hasil peternakan	SKPD		jumlah laporan hasil monitoring evaluasi pelaporan 1 laporan	1 laporan	20,000,000	25,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

Dinas
Pangan dan
Pertanian

			Pembangunan/Perbaikan Balai/Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak, Pusat Kesehatan Hewan, Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Penyediaan Sarana Pendukungnya							
			Perbaikan Balai/Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak	SKPD, Gerunggang			jumlah bangunan yang direhab 1 Paket	1 Paket	80,000,000	-
			Pembangunan Rumah Potong Hewan Ruminansia	SKPD, Bukit Intan			jumlah bangunan yang dibangun 1 unit	1 unit	100,000,000	-
			Perbaikan Rumah Potong Hewan Ruminansia	SKPD, Bukit Intan			jumlah bangunan yang direhab 1 paket	1 paket	195,000,000	-
			Sarana Pendukung Rumah Potong Hewan Ruminansia	SKPD, Bukit Intan			jumlah alat pemotong hewan yang dibeli 1 paket	1 paket	20,000,000	-
			Perbaikan Pusat Kesehatan Hewan	SKPD, Gabek			jumlah bangunan yang di rehab 1 unit	1 unit	195,000,000	-

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Sarana Pendukung Pusat Kesehatan Hewan	SKPD, Gabek			jumlah meubelair yang dibeli 1 paket	1 paket	75,000,000	-	
		Meningkatnya Produktivitas Dan Daya Saing Masyarakat Yang Kreatif Dan Inovatif	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani								Dinas Pangan dan Pertanian
			Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	SKPD			jumlah peserta yang mengikuti pelatihan agribisnis 50 orang	50 orang	19,238,000	25,000,000	
			Pelatihan pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan TABULAPOT - TABULAKAR	SKPD			jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan TABULAPOT - TABULAKAR 25 orang	25 orang	16,950,000	25,000,000	
			Pariwisata								
	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Program Pengembangan Kemitraan								Dinas Pariwisata

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

	dan Kesehatan Masyarakat		Pengembangan dan penguatan informasi dan database	SKPD		Jumlah bahan-bahan promosi pariwisata 4 jenis	4 jenis	45,000,000	220,000,000	
			Fasilitasi sadar wisata dan kampanye Sapta Pesona terhadap masyarakat sekitar daerah wisata	SKPD		Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sadar wisata 50 orang	50 orang	25,000,000	50,000,000	
			Pendataan arus kunjungan wisatawan	SKPD		Jumlah jenis data hasil pendataan 2 jenis	2 jenis	6,000,000	13,000,000	
			Sosialisasi tentang cara pendaftaran izin retribusi tempat rekreasi dan olahraga	SKPD		Jumlah peserta mengikuti sosialisasi 50 orang	50 orang	35,000,000	60,000,000	
			Penyusunan standar kelayakan usaha jasa pariwisata	SKPD		Jumlah dokumen standar usaha jasa pariwisata 1 dokumen	1 dokumen	25,000,000	50,000,000	
			Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan	SKPD		Jumlah objek usaha yang dilakukan pemantauan dan evaluasi 50 objek	50 objek	15,000,000	15,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan Sektor Strategis	Meningkatny a Produktivitas Dan Daya Saing Masyarakat Yang Kreatif Dan Inovatif	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata								Dinas Pariwisata
			Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	SKPD			Jumlah media website yang terkelola 1 media	1 media	7,000,000	10,000,000	
			Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata	SKPD			Jumlah jenis pelayanan informasi dan promosi pariwisata 6 jenis	6 jenis	200,000,000	225,000,000	
			Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	SKPD			Jumlah pelaksanaan promosi pariwisata yang diikuti/ diselenggarakan 4 kali	4 kali	232,414,000	800,000,000	
			Program Pengembangan Destinasi Pariwisata								Dinas Pariwisata

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Pengembangan objek pariwisata unggulan	SKPD		Jumlah objek wisata unggulan yang dipelihara 7 objek	7 objek	327,386,700	330,000,000	
		Pembuatan Gazebo	SKPD		Jumlah gazebo yang di bangun 10 unit	10 unit	100,000,000	100,000,000	
		Pembangunan Kios Cenderamata	SKPD		Jumlah kios cenderamata yang dibangun 20 unit	20 unit	2,065,223,040	2,065,223,040	
		Pembangunan Plaza Pusat Jajanan/ Kuliner	SKPD		Jumlah bangunan plaza pusat jajanan/kuliner 1 unit	1 unit	2,405,000,000	2,405,000,000	
		Pembangunan Menara Pandang (Viewing Deck)	SKPD		Jumlah menara pandang yang dibangun 1 unit	1 unit	2,377,247,600	2,377,247,600	
		Pembangunan Gapura Identitas	SKPD		Jumlah gapura yang di bangun 1 unit	1 unit	200,000,000	200,000,000	
		Pembuatan Jalur Pejalan Kaki/ Pedestrian	SKPD		Jumlah jalur pejalan kaki/pedestrian 350 meter	350 meter	192,500,000	192,500,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Pembangunan Talud dan Brojongan	SKPD		Jumlah talud dan brojongan yang dibangun 5.000 meter kubik	5.000 meter kubik	25,000,000,000	25,000,000,000	
		Kelautan dan Perikanan							
	Meningkatnya Iklim Investasi Daerah	Program Pengembangan Perikanan Budidaya							Dinas Pangan dan Pertanian
		Pengembangan Balai Benih Ikan Lokal	Bukit Intan		Jumlah unit UPT BBIL yang beroperasi 1 unit	1 unit	280,986,000	295,035,300	
		Sosialisasi Peraturan Perikanan Budidaya dan Kelembagaan Koperasi Budidaya Perikanan	Bukit Intan		jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perikanan budidaya kelembagaan koperasi budidaya perikanan 30 orang	30 orang	12,500,000	15,000,000	
		Program Pengembangan Perikanan Tangkap							Dinas Pangan dan Pertanian
		Sosialisasi Program Kartu Pelaku usaha	SKPD		Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi	30 orang	15,000,000	20,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			kelautan dan perikanan (KUSUKA)			30 orang				
			Penyediaan Jasa Pengelolaan UPT TPI/PPI	SKPD, Pangkal balam		Jumlah UPT TPI yang beroperasi 1 unit	1 unit	315,000,000	330,750,000	
			Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (UPTD) Kabupaten/Kota							Dinas Pangan dan Pertanian
			Rehabilitasi kolam atau bak induk/calon induk	SKPD, Bukit Intan		luas kolam yang dibangun 1.175 M2	1.175 M2	2,350,000,000	-	
			Paket Pakan Mandiri	SKPD, Bukit Intan		jumlah gedung yang dibangun 1 paket	1 paket	250,000,000	-	
			Penyediaan Calon Induk Unggul beserta Pakan	SKPD, Bukit Intan		jumlah jenis indukan ikan yang di beli 4 paket	4 paket	160,000,000	-	
		Meningkatnya Produktivitas Dan Daya Saing Masyarakat	Program Pengembangan Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan							Dinas Pangan dan Pertanian

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

	Yang Kreatif Dan Inovatif									
		Lomba masak serba ikan	SKPD			jumlah kecamatan yang mengikuti lomba 7 kecamatan	7 kecamatan	25,382,200	150,000,000	
		Validasi Data Statistik Perikanan	SKPD			jumlah dokumen hasil validasi 1 dokumen	1 dokumen	22,500,000	23,625,000	
		Perdagangan								
	Meningkatnya Iklim Investasi Daerah	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan		Upaya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	12 kegiatan					Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
		Pengawasan UTTP Kota Pangkalpinang	Kota			Jumlah Pemilik UTTP yang Diawasi 150 orang	150 orang	-	110,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Pengawasan dan Pengendalian peredaran minuman beralkohol	Kota		Jumlah kecamatan yang mendapatkan pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol 7 kecamatan	7 kecamatan	-	68,514,050	
		Pengawasan bahan berbahaya (B2) di Kota Pangkalpinang	Kota		Jumlah pelaksanaan pengawasan bahan berbahaya 1 kali	1 kali	-	55,000,000	
		Pengawasan Tertib Niaga Di Kota Pangkalpinang	Kota		Jumlah kecamatan yang mendapatkan pengawasan tertib niaga 7 kecamatan	7 kecamatan	-	293,643,130	
		Operasionalisasi pengembangan kemetrolgian	SKPD		Jumlah unit peralatan UTTP yang di Tera/Tera ulang 5.300 unit	5.300 unit	300,000,000	385,000,000	
		Daerah Tertib Ukur	Kota		Jumlah kecamatan yang di tertib ukur 7 kecamatan	7 kecamatan	-	165,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Study Kooperatif	SKPD		Jumlah unit alat ukur yang diuji 1 unit	1 unit	-	137,500,000	
		Peningkatan Alat Standar Metrologi	SKPD		Jumlah unit alat standar metrologi yang ditingkatkan 10 unit	10 unit	-	1,100,000,000	
		Penilaian Angka Kredit	SKPD		Jumlah JFT bidang metrologi yang dinilai 16 orang	16 orang	-	55,000,000	
		Standar Mutu Metrologi	SKPD		Jumlah unit alat standar yang dikalibrasi 165 unit	165 unit	-	165,000,000	
		Bimbingan Teknis Peraturan	Kota		Jumlah peserta pemilik UTP yang mengetahui peraturan 350 orang	350 orang	-	110,000,000	
		Penyidikan Tindak Pidana Metrologi	SKPD		Jumlah kegiatan penyidikan tindak pidana metrologi 150 orang	150 orang	-	55,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor							Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
			Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan industri	Kota		Jumlah event promosi dagang yang diikuti 1 event	1 event	300,000,000	383,177,300	
			Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri							Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
			Monitoring dan Evaluasi Stok dan Harga Bahan Pokok serta barang Strategis Lainnya	Kota		Jumlah laporan dokumen 1 dokumen	1 dokumen	75,000,000	110,000,000	
			Pasar Murah	Kota		Jumlah kecamatan yang mengadakan 7 kecamatan	7 kecamatan	-	60,500,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Pembuatan dan penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional	SKPD			Jumlah pembuatan dan penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional 1 peraturan	1 peraturan	-	82,500,000	
			Peningkatan konsumen cerdas di Kota Pangkalpinang	Kota			Jumlah peserta sosialisasi konsumen cerdas 40 orang	40 orang	-	109,277,300	
	Pengembangan Infrastruktur Daerah	Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan Dan Berbasis Smart City	Program Penertiban dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar								Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
			Operasionalisasi dan peningkatan pelayanan UPT Pasar	SKPD			Jumlah operasionalisasi dan peningkatan UPT Pasar 4 pasar	4 pasar	739,591,635	847,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Pengadaan marking peraturan dan papan nama pasar	Kota, SKPD		Jumlah unit marking peraturan dan papan nama pasar 8 unit	8 unit	-	55,000,000	
			Peningkatan pengaman pasar	Kota, SKPD		Jumlah jasa peningkatan pengamanan pasar 12 orang	12 orang	-	293,643,130	
			Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang	Kota		Jumlah waktu penataan tempat berusaha bagi pedagang 12 bulan	12 bulan	-	104,500,000	
			Pendataan pedagang pasar Kota Pangkalpinang	Kota		Jumlah waktu pendataan pedagang pasar 3 bulan	3 bulan	-	16,500,000	
			Perindustrian							
	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Iklim Investasi Daerah	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah							Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
	Melalui Pembangunan Sektor Strategis		Pelatihan industri makanan olahan khas daerah	Kota		Jumlah peserta pelatihan industri makanan olahan khas daerah 25	25 orang	-	55,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

						orang				
		Pelatihan pengembangan industri kreatif pemanfaatan limbah industri pertukangan	Kota			Jumlah peserta pelatihan pengembangan industri kreatif pemanfaatan limbah industri pertukangan 25 orang	25 orang	-	55,000,000	
		Pelatihan pembinaan diversifikasi produk kerajinan dari daun mengkuang	Kota			Jumlah peserta pelatihan pembinaan diversifikasi produk kerajinan dari daun mengkuang 25 orang	25 orang	-	55,000,000	
		Peningkatan daya saing (Uji Nutrisi Produk)	Kota			Jumlah peserta peningkatan daya saing (Uji Nutrisi Produk) 50 orang	50 orang	-	165,000,000	
		Pembinaan UPL pada industri kecil Kota Pangkalpinang	Kota			Jumlah IKM yang mengikuti pembinaan UPL pada industri kecil 8 IKM	8 IKM	30,000,000	33,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Pembinaan dan peningkatan mutu dan desain batik Pangkalpinang	Kota		Jumlah kelompok yang dibina dan ditingkatkan mutu desain batik 4 kelompok	4 kelompok	-	137,500,000	
		Pendampingan industri Kota Pangkalpinang	SKPD		Jumlah Kegiatan pendampingan industri Kota Pangkalpinang 2 kegiatan	2 kegiatan	140,000,000	192,500,000	
		Pendamping dekranasda Kota Pangkalpinang	SKPD		Jumlah kegiatan pendamping dekranasda Kota Pangkalpinang 3 kegiatan	3 kegiatan	-	220,000,000	
		Pembentukan TIM komuikasi pembangunan kawasan industri	SKPD		Jumlah kegiatan pembentukan TIM pembangunan kawasan industri 1 kegiatan	1 kegiatan	-	55,000,000	
		Forum komunikasi pembangunan kawasan industri	SKPD		Jumlah kegiatan forum pembangunan kawasan industri 1 kegiatan	1 kegiatan	-	93,500,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

						kegiatan				
			Program Pembangunan Data Industri Kecil dan Menengah							Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
			Penerapan gugus kendali mutu	SKPD		Jumlah dokumen akademisi Ripida Kota Pangkalpinang 1 dokumen	1 dokumen	-	93,500,000	
			Penerapan gugus kendali mutu	SKPD		Jumlah kegiatan pemetaan industri Kota Pangkalpinang 1 kegiatan	1 kegiatan	-	165,000,000	
			Pembentukan TIM penyusunan Rapida Kota Pangkalpinang	SKPD		Jumlah kegiatan pembentukan TIM penyusunan Ripida Kota Pangkalpinang 1 kegiatan	1 kegiatan	60,000,000	66,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Penyusunan FGD Ripida Kota Pangkalpinang	SKPD			Jumlah kegiatan penyusunan FGD Ripida Kota Pangkalpinang 1 kegiatan	1 kegiatan	-	93,500,000	
			Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat								
	Peningkatan Pemberdayaan Sosial Masyarakat	Meningkatny a Internalisasi Nilai-Nilai Budaya Dalam Kehidupan Masyarakat	Program bina ideologi dan wawasan kebangsaan								Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Peningkatan nilai - nilai wawasan kebangsaan	SKPD			Jumlah pelaksanaan peningkatan nilai- nilai wawasan kebangsaan 3 Kali	3 Kali	461,840,000	484,932,000	
			Pemberdayaan tim terpadu	SKPD			Jumlah pelaksanaan pemberdayaan tim terpadu 6 Kali	6 Kali	229,680,000	241,164,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Pemberdayaan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba	SKPD			Jumlah pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba 1 Kali	1 Kali	74,165,000	77,873,000	
		Koordinasi kewaspadaan dini di daerah	SKPD			Jumlah pelaksanaan koordinasi kewaspadaan dini di daerah 1 Kali	1 Kali	309,196,000	324,665,000	
		Program pengembangan wawasan kebangsaan								Satuan Polisi Pamong Praja
		Pelaksanaan peringatan HUT Pol PP	SKPD			Jumlah Pelaksanaan peringatan HUT Pol PP 1 kali	1 kali	62,350,000	80,000,000	
		Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)								Satuan Polisi Pamong Praja
		Pelaksanaan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	SKPD			Jumlah pelaksanaan pemberantasan penyakit masyarakat	24 kali	55,000,000	80,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

							(pekat) 24 kali				
	Pengembangan Infrastruktur Daerah	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Program pembinaan politik dalam negeri								Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Sosialisasi dan advokasi partisipasi politik masyarakat	SKPD			Jumlah peserta yang ikut sosialisasi dan advokasi partisipasi politik masyarakat 40 Orang	40 Orang	40,000,000	42,000,000	
			Verifikasi data bantuan keuangan parpol	SKPD			Jumlah pelaksanaan verifikasi data bantuan keuangan parpol 2 Kali	2 Kali	60,000,000	63,000,000	
			Pemantauan dan perkembangan politik di daerah	SKPD			Jumlah pelaksanaan pemantauan dan perkembangan politik di daerah 4 Kali	4 Kali	200,000,000	210,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Pembinaan dan pemberdayaan Ormas	SKPD			Jumlah pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan Ormas 12 Kali	12 Kali	90,000,000	94,500,000	
	Penguatan Sinergitas dan Pemantapan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Fungsi Koordinasi Serta Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Program Rehabilitasi/rekonstruksi sarana dan prasarana pasca bencana								Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Pengumpulan, pengelolaan dan pelaporan data	SKPD			Jumlah jenis pengumpulan, pengelolaan dan pelaporan data 3 jenis	3 jenis	25,000,000	55,000,000	
			Peningkatan kapasitas petugas pendata pasca bencana	Kota			Jumlah orang untuk peningkatan kapasitas petugas pendata pasca bencana 25 orang	25 orang	50,000,000	82,500,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Program penyediaan logistik/peralatan dan tanggap darurat penanggulangan bencana							Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Penyediaan sarana dan prasarana penunjang penanggulangan bencana	SKPD		Jumlah peralatan penunjang yang dibeli 15 jenis/barang	15 jenis/barang	100,000,000	165,000,000	
			Penyusunan/Pendataan Laporan Barang Logistik	Kota		Jumlah dokumen data logistik dan peralatan 2 dokumen	2 dokumen	8,000,000	11,000,000	
			Pengambilan serta pendistribusian logistik dan peralatan penanggulangan bencana	Luar Daerah		Jumlah waktu pengambilan serta pendistribusian logistik dan peralatan penanggulangan bencana 12 bulan	12 bulan	50,000,000	110,000,000	
			Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana							Badan Penanggulangan Bencana Daerah

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Tanggap darurat dan evakuasi korban penanggulangan bencana alam	SKPD		Jumlah personil tanggap darurat dan evakuasi korban penanggulangan bencana alam 121 personil	121 personil	3,338,846,000	4,015,825,000	
	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Melalui Reformasi Birokrasi		Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah							Satuan Polisi Pamong Praja
			Pemantauan dan pengawasan pelanggaran atas peraturan daerah dan keputusan kepala daerah	SKPD		Jumlah waktu pelaksanaan Pemantauan dan pengawasan pelanggaran atas peraturan daerah dan keputusan kepala daerah 10 bulan	10 bulan	100,000,000	110,000,000	
			Sosialisasi/Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	SKPD		Jumlah produk hukum pemerintah daerah yang disosialisasikan 1	1 produk hukum	-	-	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

						produk hukum				
		Operasi Yustisi Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah	SKPD			Jumlah pelanggar perda dan peraturan kepala daerah yang dilakukan operasi yustisi 3 kasus	3 kasus	-	-	
		Pengelolaan Barang Bukti Hasil Penyitaan	SKPD			Jumlah barang bukti hasil penyitaan yang dikelola 10 barang bukti	10 barang bukti	-	-	
		Penyelidikan dan Penyidikan Pelanggaran Perda dan Peraturan Kepala Daerah	SKPD			Jumlah pelanggar perda dan peraturan kepala daerah yang dilakukan penyelidikan dan penyidikan 10 orang	10 orang	-	-	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Penegakan Disiplin Aparatur Pol PP dan Aparatur Pemerintah Kota Pangkalpinang	SKPD			Jumlah waktu penegakan disiplin aparat pol pp dan aparat pemerintah kota pangkalpinang 10 bulan	10 bulan	40,000,000	50,000,000	
			Forum Koordinasi Penegakan Peraturan Daerah	SKPD			Jumlah pelaksanaan forum koordinasi penegakan peraturan daerah 2 kali	2 kali	-	-	
			Pembuatan Peraturan Daerah	SKPD			Jumlah Perda yang dibuat 1 perda	1 perda	-	-	
	Pemantapan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Berstandar, Mudah Dan Terjangkau	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan								Satuan Polisi Pamong Praja
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	SKPD			Jumlah pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan 12 kali	12 kali	25,118,000	50,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Pengamanan Pemilu	SKPD		Jumlah pelaksanaan pengamanan pemilu 1 kali	1 kali	35,378,000	50,000,000	
		Monitoring Pasca Pelaksanaan Pemilu	SKPD		Jumlah Monitoring Pasca Pelaksanaan Pemilu 1 kali	1 kali	35,378,000	50,000,000	
		Pembinaan Kepada Kelompok Masyarakat Penyelenggara Keamanan Lingkungan	SKPD		Jumlah peserta Pembinaan kepada kelompok masyarakat penyelenggara keamanan lingkungan 84 orang	84 orang	24,890,000	50,000,000	
		Penyiapan Tenaga Kerja Pengendalian dan Kenyamanan Lingkungan	SKPD		Jumlah penyiapan tenaga kerja pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 35 orang	35 orang	-	-	
		Pengamanan Pemilu Kepala Daerah	SKPD		Jumlah pengamanan pemilu kepala daerah 1 kali	1 kali	-	-	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Rekrutmen Tenaga Sukarela Perlindungan Masyarakat	SKPD		Jumlah tenaga sukarela perlindungan masyarakat (LINMAS) yang direkrut 84 orang	84 orang	-	-	
			Pembinaan Bagi Kelompok Masyarakat Dalam Rangka Antisipasi Penanggulangan Banjir	SKPD		Jumlah peserta pembinaan kelompok masyarakat dalam rangka antisipasi penanggulangan banjir 84 orang	84 orang	-	-	
			Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran							Satuan Polisi Pamong Praja
			Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran	SKPD		Jumlah Pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran yang dilaksanakan 2 kali	2 kali	-	-	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Rekrutmen Tenaga Sukarela Pertolongan Bencana Kebakaran	SKPD			jumlah PHL sukarela pertolongan bencana kebakaran yang direkrut 10 orang	10 orang	-	-	
		Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran	SKPD			Jumlah masyarakat yang mendapat penyuluhan 100 orang	100 orang	-	-	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	SKPD			Jumlah jenis sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran yang dibeli 8 jenis	8 jenis	-	-	
		Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	SKPD			Jumlah sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran yang direhabilitasi 3 pos jaga	3 pos jaga	-	330,000,000	
		Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	SKPD			Jumlah waktu pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	12 bulan	4,549,955,500	5,300,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

						12 bulan				
		Pendataan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (APK)	SKPD			Jumlah waktu Pendataan Pemeriksaan alat pemadam kebakaran (APK) 12 bulan	12 bulan	-	110,000,000	
		Sosialisasi Pencegahan Bahaya Kebakaran	SKPD			Jumlah pelaksanaan sosialisasi pencegahan bahaya kebakaran 2 kali	2 kali	50,000,000	110,000,000	
		Pelaksanaan HUT Pemadam Kebakaran	SKPD			Jumlah Pelaksanaan HUT Pemadam Kebakaran 1 kali	1 kali	15,000,000	50,000,000	
		Pengadaan Sumur Bor	SKPD			Jumlah Sumur bor yang dibuat 1 unit	1 unit	-	-	
		Pengadaan Baju Anti Api	SKPD			Jumlah Baju Anti Api yang dibeli 2 unit	2 unit	-	-	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Pengadaan Motor Perantara	SKPD		Jumlah motor perantara yang dibeli 3 unit	3 unit	-	-	
		Simulasi Penanggulangan Bahaya Kebakaran	SKPD		Jumlah Simulasi Penanggulangan bahaya kebakaran yang dilaksanakan 3 kali	3 kali	-	-	
		Pengadaan Mobil Tangga Pemadam Kebakaran	SKPD		Jumlah mobil tangga pemadam kebakaran yang dibeli 1 unit	1 unit	-	-	
		Pengadaan Mobil Suplay Kebakaran	SKPD		Jumlah mobil supplay kebakaran yang dibeli 1 unit	1 unit	-	1,100,000,000	
		Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran	SKPD		Jumlah mobil pemadam kebakaran yang dibeli 1 unit	1 unit	-	-	
		Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Kebakaran	SKPD		Jumlah waktu Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan	10 bulan	-	-	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

						kebakaran 10 bulan				
			Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal							Satuan Polisi Pamong Praja
			Kerjasama dengan Aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	SKPD		Jumlah waktu kerjasama dengan aparat keamanan dalam tehnik pencegahan kejahatan 12 bulan	12 bulan	55,000,000	100,000,000	
			Penataan dan Pengawasan Pedagang Kaki Lima (PKL)	SKPD		Jumlah pelaksanaan penataan dan pengawasan PKL (Pedagang kaki Lima) 48 kali	48 kali	-	200,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Operasional Penertiban Pelanggaran PERDA dan Pedagang Kaki Lima (PKL)	SKPD			Jumlah waktu operasional penertiban pelanggaran perda dan pedagang kaki lima (PKL) 12 bulan	12 bulan	55,000,000	100,000,000	
		Pelaksanaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	SKPD			Jumlah waktu pelaksanaan keamanan dan ketertiban masyarakat 12 bulan	12 bulan	2,500,000,000	3,300,000,000	
		Pemetaan Daerah Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman	SKPD			Jumlah lokasi pemetaan daerah gangguan ketertiban umum dan ketentraman 20 lokasi	20 lokasi	-	-	
		Pengamanan Hari Besar Nasional dan Keagamaan	SKPD			Jumlah pelaksanaan pengamanan hari besar nasional dan keagamaan 15 kali	15 kali	-	-	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Patroli Kawasan Wilayah Kota Pangkalpinang	SKPD			Jumlah pelaksanaan patroli kawasan wilayah kota pangkalpinang 24 kali	24 kali	45,000,000	50,000,000	
			Pengamanan Aset Kota Pangkalpinang	SKPD			Jumlah waktu pengamanan aset kota pangkalpinang 12 bulan	12 bulan	-	1,400,000,000	
			Pengamanan / Pengawasan Pemimpin Daerah Serta Orang-orang Penting	SKPD			Jumlah pengamanan /pengawasan pimpinan daerah serta orang-orang penting 12 kali	12 kali	-	-	
			Pengamanan Unjuk Rasa	SKPD			Jumlah pengamanan unjuk rasa yang dilakukan 6 kali	6 kali	-	70,000,000	
			Penunjang urusan lainnya								
	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Program Peningkatan Pelayanan Kemasyarakatan								Rangkui

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

	dan Kesehatan Masyarakat		Peningkatan pelayanan hubungan kemasyarakatan	Rangkui			Jumlah lomba yg ada di pelayanan hubungan kemasyarakatan 3 Lomba	3 Lomba	145,000,000	250,000,000	
			Program Peningkatan Pelayanan Kemasyarakatan								Gerunggan g
			Peningkatan pelayanan hubungan kemasyarakatan	Gerung gang			Junlah Kegiatan Peningkatan Hubungan Kemasyarakatan 1 kegiatan	1 kegiatan	93,347,800	120,000,000	
			Program Peningkatan Pelayanan Kemasyarakatan								Tamansari
			Peningkatan pelayanan hubungan kemasyarakatan	Tamans ari			Jumlah jenis kegiatan peningkatan pelayanan hubungan kemasyarakatan 2 Jenis	2 Jenis	145,085,500	159,594,050	
			Program Peningkatan Pelayanan Kemasyarakatan								Pangkalbal am

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Peningkatan pelayanan hubungan kemasyarakatan	Pangkalbalam			Jumlah Jenis Kegiatan Peningkatan Hubungan Kemasyarakatan 2 kegiatan	2 kegiatan	72,818,000	83,740,700	
		Penyusunan buku profil kecamatan	Pangkalbalam			jumlah buku profil 5 kelurahan	5 kelurahan	25,000,000	27,000,000	
		Publikasi/Penyebaran Informasi melalui Media Cetak	Pangkalbalam			jumlah bulan informasi 12 bulan	12 bulan	5,000,000	7,500,000	
		Program Peningkatan Pelayanan Kemasyarakatan								Girimaya
		Peningkatan pelayanan hubungan kemasyarakatan	Girimaya					60,517,500	60,517,500	
		Penyusunan buku profil kecamatan	Girimaya					55,000,000	-	
		Publikasi/Penyebaran Informasi melalui Media Cetak	Girimaya					10,000,000	-	
		Program Peningkatan Pelayanan Kemasyarakatan								Gabek

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Peningkatan pelayanan hubungan kemasyarakatan	Gabek			Jumlah pelaksanaan pelayanan hubungan kemasyarakatan 1 kali	1 kali	70,500,000	82,500,000	
			Program Peningkatan Pelayanan Kemasyarakatan								Bukit Intan
			Peningkatan pelayanan hubungan kemasyarakatan	Bukit Intan			Jumlah Jenis Kegiatan Peningkatan Hubungan Kemasyarakatan 1 Kegiatan	1 Kegiatan	84,500,000	95,000,000	
	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan	Meningkatnya Iklim Investasi Daerah	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan								Sekretariat Daerah
	Masyarakat Melalui Pembangunan Sektor Strategis		Lomba Administrasi PKK dan UP2K	Kota			terlaksananya penilaian administrasi PKK dan UP2K 6 kelompok	6 kelompok	40,000,000	44,000,000	
			Program Peningkatan Pengembangan BUMD, Perencanaan, Pengkajian,								Sekretariat Daerah

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi							
			Regulasi/kebijakan umum dalam Pengelolaan BUMD	Kota			Tersedianya Regulasi/kebijakan umum dalam Pengelolaan BUMD 2 Dokumen	2 Dokumen	121,000,000	133,100,000
			Pengawasan dan Pengendalian BUMD	Kota			Tersedianya laporan pengawasan dan pengendalian pengelolaan BUMD 4 Dokumen Laporan Triwulan	4 Dokumen Laporan Triwulan	110,000,000	121,000,000
			Revisi PERDA PT. Pangkalpinang Makmur Abadi Sejahtera (MAS)	Kota			Tersedianya Kajian Akademis Pengembangan BUMD Perusahaan Daerah 1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	110,000,000
			Program Kebijakan Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan							Sekretariat Daerah

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif	Kota			Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan dibidang Ekonomi Kretif yang ditindak Lanjuti 1 Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan	60,000,000	66,000,000	
			Percepatan Pelaksanaan berusaha	Kota			Terlaksananya kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan percepatan berusaha di Kota Pangkalpinang 12 Dokumen Laporan	12 Dokumen Laporan	140,000,000	154,000,000	
	Peningkatan Pemberdayaan Sosial Masyarakat	Terwujudnya Masyarakat Yang Religius	Program peningkatan kualitas pemahaman,pengamalan dan pembinaan kerukunan agama								Sekretariat Daerah
			Kajian agama dalam kehidupan masyarakat	Kota			jumlah masyarakat yang terlibat 1.800 Orang	1.800 Orang	748,090,000	822,899,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Pembinaan Al-Qur'an berkelanjutan	Kota			jumlah santri binaan 700 orang	700 orang	-	132,000,000	
		Pelaksanaan urusan haji	Kota			terlaksananya fasilitasi urusan haji 2 Kegiatan	2 Kegiatan	116,350,000	127,985,000	
		Peringatan dan Perayaan Isra' dan Mikraj Nabi Muhammad SAW	Kota			jumlah peserta kegiatan 1 kegiatan	1 kegiatan	98,040,000	107,844,000	
		Pawai Ta'aruf dan Safari Ramadhan	Kota			jumlah masjid yang dikunjungi / disantuni 14 masjid	14 masjid	122,620,000	134,882,000	
		Kajian Ramadhan	Kota			jumlah hari kegiatan 12 hari	12 hari	-	40,150,000	
		Nuzulul Qur'an	Kota			jumlah peserta kegiatan 3.000 orang	3.000 orang	-	240,867,000	
		Pelaksanaan Sholat Idhul fitri dan Idhul Adha	Kota			terlaksananya perayaan sholat idul fitri dan idul adha 2 Kegiatan	2 Kegiatan	144,160,000	158,576,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Perayaan tahun baru Hijriyah	Kota		terlaksananya perayaan tahun baru hijriyah 2 Kegiatan	2 Kegiatan	195,700,000	215,270,000	
		Perayaan Maulid Nabi Muhammmad SAW	Kota		jumlah peserta kegiatan 3.000 Orang	3.000 Orang	227,071,000	249,778,100	
		Tadarusan Al-Qur'an dan Ceramah Agama Islam Bulanan	Kota		jumlah yang disantuni 1.200 orang	1.200 orang	215,100,000	236,610,000	
		Peningkatan Pemahaman Bacaan Al-Qur'an	Kota		jumlah santri TPA/TKA yang diwisuda 2.400 orang	2.400 orang	2,921,314,000	3,213,445,400	
		Penyelenggaraan Lomba dan Pembinaan MTQ/STQ	Kota		persentase jumlah cabang/ golongan yang juara terhadap cabang / golongan yang diperlombakan di tingkat provinsi 70 %	70%	935,276,350	605,000,000	
		Program Pembinaan Keagamaan Masyarakat							Rangkui

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Pelaksanaan MTQ/ STQ Tingkat Kecamatan	Rangkui			Jumlah Kegiatan MTQ 1 Kegiatan	1 Kegiatan	175,000,000	250,000,000	
		Program Pembinaan Keagamaan Masyarakat								Gerunggan g
		Pelaksanaan MTQ/ STQ Tingkat Kecamatan	Gerung gang			Jumlah Pelaksanaan Kegiatan STQ/MTQ 1 kegiatan	1 kegiatan	100,000,000	160,000,000	
		Program Pembinaan Keagamaan Masyarakat								Tamansari
		Pelaksanaan MTQ/ STQ Tingkat Kecamatan	Tamans ari			Jumlah Pelaksanaan STQ/MTQ 1 Kali	1 Kali	90,000,000	99,000,000	
		Program Pembinaan Keagamaan Masyarakat								Pangkalbal am
		Pelaksanaan MTQ/ STQ Tingkat Kecamatan	Pangkal balam			Jumlah Pelaksanaan Kegiatan STQ/MTQ 1 kegiatan	1 kegiatan	150,000,000	-	
		Program Pembinaan Keagamaan Masyarakat								Girimaya

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Pelaksanaan MTQ/ STQ Tingkat Kecamatan	Girimay a					150,000,000	165,165,000	
		Program Pembinaan Keagamaan Masyarakat								Gabek
		Pelaksanaan MTQ/ STQ Tingkat Kecamatan	Gabek			Jumlah pelaksanaan MTQ/STQ 1 kali	1 kali	150,000,000	243,936,000	
		Program Pembinaan Keagamaan Masyarakat								Bukit Intan
		Pelaksanaan MTQ/ STQ Tingkat Kecamatan	Bukit Intan			Jumlah Pelaksanaan Kegiatan STQ/MTQ 1 Kegiatan	1 Kegiatan	195,500,000	230,000,000	
	Meningkatny a Internalisasi Nilai-Nilai Budaya Dalam Kehidupan Masyarakat	Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat								Sekretariat Daerah
		Pemutakhiran Data UKS	Kota			Terlaksananya Pemutakhiran Data Uks 100 %	100%	45,415,000	49,956,500	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Peringatan Hari Jadi Kota Pangkalpinang	Kota			terlaksananya kegiatan peringatan hari jadi kota 1 Kali	1 Kali	375,000,000	412,500,000	
		Monitoring UKS	Kota			Terlaksananya Kegiatan Monitoring UKS 100 %	100%	92,925,000	102,217,500	
		Pembinaan dan Pengembangan UKS	Kota			Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan UKS 100 %	100%	200,000,000	270,000,000	
		Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial masyarakat	Kota			Data Monitoring dan Evaluasi bantuan Sosial Masyarakat 100 %	100%	82,308,000	90,196,000	
		Pelaksanaan dan Sosialisasi Hibah Bansos	Kota			Terlaksananya Sosialisasi Tentang Kesejahteraan Sosial 100 %	100%	136,000,000	149,600,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Pengelolaan data dan informasi pelayanan kesejahteraan sosial	Kota			Terlaksananya Pengelolaan Data monitoring dan evaluasi bantuan sosial masyarakat 100 %	100%	85,000,000	93,500,000	
		Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat								Rangkui
		Kecamatan Sayang Ibu (KSI)	Rangkui			jumlah org mengikuti KSI 60 orang	60 orang	60,000,000	90,000,000	
		Peringatan Hari Jadi Kota Pangkalpinang	Rangkui			Jumlah Lomba di peringatan hari jadi kota pangkalpinang 3 jenis	3 jenis	120,000,000	180,000,000	
		Pembinaan dan Pengembangan UKS	Rangkui			Jumlah peserta UKS 30 Orang	30 Orang	35,000,000	60,000,000	
		Pembinaan PKK	Rangkui			Jumlah waktu pelaksanaan Kegiatan Pembinaan PKK 12 Bulan	12 Bulan	115,000,000	160,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

Rangkui

		Program Peningkatan Kinerja Aparat Kelurahan								
		Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Pintu Air	Rangkui			Jumlah Waktu peningkatan Pelayanan ADM Kelurahan Pintu Air 12 Bulan	12 Bulan	190,000,000	200,000,000	
		Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Bintang	Rangkui			Jumlah Waktu Peningkatan Pelayanan ADM Kelurahan Bintang 12 Bulan	12 Bulan	190,000,000	200,000,000	
		Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Gajah Mada	Rangkui			Jumlah Waktu Peningkatan Pelayanan ADM Kelurahan gajah mada 12 bulan	12 bulan	190,000,000	200,000,000	
		Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Masjid Jamik	Rangkui			Jumlah Waktu Peningkatan Pelayanan ADM Kelurahan Masjid Jamik 12 Bulan	12 Bulan	190,000,000	200,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Asam	Rangkui			Jumlah Waktu Peningkatan Pelayanan ADM Kelurahan Asam 12 Bulan	12 Bulan	190,000,000	200,000,000	
		Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Melintang	Rangkui			Jumlah Waktu Peningkatan Pelayanan ADM Kelurahan Melintang 12 Bulan	12 Bulan	190,000,000	200,000,000	
		Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Parit Lalang	Rangkui			Jumlah Waktu Peningkatan Pelayanan ADM Kelurahan Parit Lalang 12 Bulan	12 Bulan	190,000,000	200,000,000	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi Tingkat Kelurahan Pintu Air	Rangkui			Jumlah Waktu Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi Tingkat Kelurahan 12 Bulan	12 Bulan	240,000,000	350,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi Tingkat Kelurahan Gajah Mada	Rangkui			Jumlah Waktu Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi Tingkat Kelurahan 12 Bulan	12 Bulan	240,000,000	350,000,000	
		Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Keramat	Rangkui			Jumlah Waktu Peningkatan Pelayanan ADM Kelurahan Keramat 12 Bulan	12 Bulan	190,000,000	200,000,000	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi Tingkat Kelurahan Masjid Jamik	Rangkui			Jumlah Waktu Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi Tingkat Kelurahan 12 Bulan	12 Bulan	240,000,000	350,000,000	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi Tingkat Kelurahan Melintang	Rangkui			Jumlah Waktu Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi Tingkat Kelurahan 12 Bulan	12 Bulan	240,000,000	350,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi Tingkat Kelurahan Asam	Rangkui			Jumlah Waktu Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi Tingkat Kelurahan 12 Bulan	12 Bulan	240,000,000	350,000,000	
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi Tingkat Kelurahan Parit Lalang	Rangkui			Jumlah Waktu Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi Tingkat Kelurahan 12 Bulan	12 Bulan	240,000,000	350,000,000	
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi Tingkat Kelurahan Bintang	Rangkui			Jumlah Waktu Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi Tingkat Kelurahan 12 Bulan	12 Bulan	240,000,000	350,000,000	
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi Tingkat Kelurahan Keramat	Rangkui			Jumlah Waktu Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi Tingkat Kelurahan 12 Bulan	12 Bulan	240,000,000	350,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Pemeliharaan Lingkungan Kelurahan Gajah Mada	Rangkui			Jumlah waktu Partisipasi Masyarakat dalam rangka Pemeliharaan Lingkungan Kelurahan 12 Bulan	12 Bulan	50,000,000	100,000,000	
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Pemeliharaan Lingkungan Kelurahan Pintu Air	Rangkui			Jumlah waktu Partisipasi Masyarakat dalam rangka Pemeliharaan Lingkungan Kelurahan 12 Bulan	12 Bulan	50,000,000	100,000,000	
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Pemeliharaan Lingkungan Kelurahan Masid Jamik	Rangkui			Jumlah waktu Partisipasi Masyarakat dalam rangka Pemeliharaan Lingkungan Kelurahan 12 Bulan	12 Bulan	50,000,000	100,000,000	
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Pemeliharaan Lingkungan Kelurahan Melintang	Rangkui			Jumlah waktu Partisipasi Masyarakat dalam rangka Pemeliharaan Lingkungan Kelurahan 12 Bulan	12 Bulan	50,000,000	100,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Pemeliharaan Lingkungan Kelurahan Bintang	Rangkui			Jumlah waktu Partisipasi Masyarakat dalam rangka Pemeliharaan Lingkungan Kelurahan 12 Bulan	12 Bulan	50,000,000	100,000,000	
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Pemeliharaan Lingkungan Kelurahan Keramat	Rangkui			Jumlah waktu Partisipasi Masyarakat dalam rangka Pemeliharaan Lingkungan Kelurahan 12 Bulan	12 Bulan	50,000,000	100,000,000	
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Pemeliharaan Lingkungan Kelurahan Parit Lalang	Rangkui			Jumlah waktu Partisipasi Masyarakat dalam rangka Pemeliharaan Lingkungan Kelurahan 12 Bulan	12 Bulan	50,000,000	100,000,000	
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Pemeliharaan Lingkungan Kelurahan Asam	Rangkui			Jumlah waktu Partisipasi Masyarakat dalam rangka Pemeliharaan Lingkungan Kelurahan 12 Bulan	12 Bulan	50,000,000	100,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Program Peningkatan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat							Rangkui
			Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kota di Kecamatan			Jumlah peserta Musrenbang 150 Orang	150 Orang	40,000,000	60,000,000	
			Pemberdayaan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat	Rangkui		Jumlah Jenis Pemberdayaan Masyarakat 7 Jenis	7 Jenis	30,000,000	40,000,000	
			Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat			Jumlah waktu Pembinaan keamanan dan ketertiban Masyarakat 12 Bulan	12 Bulan	30,000,000	75,000,000	
			Pelaksanaan Gotong Royong			Jumlah pelaksanaan gotong royong 12 Bulan	12 Bulan	25,000,000	50,000,000	
			Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat							Gerunggan
			Kecamatan Sayang Ibu (KSI)	Gerunggan		Jumlah Kegiatan Kecamatan Sayang	2 kegiatan	17,740,000	25,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

						Ibu 2 kegiatan				
			Peringatan Hari Jadi Kota Pangkalpinang	Gerung gang		Jumlah Kegiatan Peringatan Hari Jadi Kota Pangkalpinang 1 kegiatan	1 kegiatan	17,100,000	50,000,000	
			Pembinaan PKK	Gerung gang		Jumlah waktu Kegiatan Pembinaan PKK 12 bulan	12 bulan	85,000,000	120,000,000	
			Program Peningkatan Kinerja Aparat Kelurahan							Gerunggan g
			Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Bukit Merapin	Gerung gang		Jumlah waktu peningkatan pelayanan administrasi kelurahan Bukit Merapin 12 bulan	12 bulan	184,241,000	270,000,000	
			Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Air Kepala Tujuh	Gerung gang		Jumlah waktu peningkatan pelayanan administrasi kelurahan Air Kepala	12 bulan	181,341,000	270,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

						Tujuh 12 bulan				
			Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Bukit Sari	Gerung gang		Jumlah waktu peningkatan pelayanan administrasi kelurahan Bukit Sari 12 bulan	12 bulan	194,948,000	270,000,000	
			Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Tua Tunu Indah	Gerung gang		Jumlah waktu peningkatan pelayanan administrasi kelurahan Tua Tunu Indah 12 bulan	12 bulan	199,201,000	270,000,000	
			Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Kacang Pedang	Gerung gang		Jumlah waktu peningkatan pelayanan administrasi kelurahan Kacang Pedang 12 bulan	12 bulan	194,948,000	270,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan organisasi tingkat Kelurahan Taman Bunga	Gerung gang		Jumlah Waktu Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi Tingkat Kelurahan Taman Bunga 12 bulan	12 bulan	232,266,400	300,000,000	
			Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Taman Bunga	Gerung gang		Jumlah waktu peningkatan pelayanan administrasi kelurahan Taman Bunga 12 bulan	12 bulan	194,948,000	270,000,000	
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Pemeliharaan Lingkungan Kelurahan Air Kepala Tujuh	Gerung gang		Jumlah Waktu Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Pemeliharaan Lingkungan Kelurahan Air Kepala Tujuh 12 bulan	12 bulan	84,671,000	95,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi Tingkat Kelurahan Kacang Pedang	Gerung gang			Jumlah Waktu Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi Tingkat Kelurahan Kacang Pedang 12 bulan	12 bulan	84,671,000	300,000,000	
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Pemeliharaan Lingkungan Kelurahan Taman Bunga	Gerung gang			Jumlah Waktu Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Pemeliharaan Lingkungan Kelurahan Taman Bunga 12 bulan	12 bulan	84,671,000	95,000,000	
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Pemeliharaan Lingkungan Kelurahan Bukit Merapin	Gerung gang			Jumlah Waktu Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Pemeliharaan Lingkungan Kelurahan Bukit Merapin 12 bulan	12 bulan	84,671,000	95,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Pemeliharaan Lingkungan Kelurahan Tua Tunu	Gerung gang			Jumlah Waktu Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Pemeliharaan Lingkungan Kelurahan Tua Tunu Indah 12 bulan	12 bulan	84,671,000	95,000,000	
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Pemeliharaan Lingkungan Kelurahan Kacang Pedang	Gerung gang			Jumlah Waktu Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Pemeliharaan Lingkungan Kelurahan Kacang Pedang 12 bulan	12 bulan	232,266,400	95,000,000	
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Pemeliharaan Lingkungan Kelurahan Bukit Sari	Gerung gang			Jumlah Waktu Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Pemeliharaan Lingkungan Kelurahan Bukit Sari	12 bulan	84,671,000	95,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

						12 bulan				
			Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan organisasi tingkat Kelurahan Bukit Merapin	Gerung gang		Jumlah Waktu Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi Tingkat Kelurahan Bukit Merapin 12 bulan	12 bulan	256,652,800	300,000,000	
			Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan organisasi tingkat Kelurahan Air Kepala Tujuh	Gerung gang		Jumlah Waktu Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi Tingkat Kelurahan Air Kepala Tujuh 12 bulan	12 bulan	224,137,600	300,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan organisasi tingkat Kelurahan Bukit Sari	Gerung gang			Jumlah Waktu Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi Tingkat Kelurahan Bukit Sari 12 bulan	12 bulan	224,137,600	300,000,000	
			Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan organisasi tingkat Kelurahan Tua Tunu Indah	Gerung gang			Jumlah Waktu Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi Tingkat Kelurahan Tua Tunu Indah 12 bulan	12 bulan	232,266,400	300,000,000	
			Program Peningkatan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat								Gerunggan g
			Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kota di Kecamatan				Jumlah Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan 1 kegiatan	1 kegiatan	28,401,000	45,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat			Jumlah Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 1 Kegiatan	1 Kegiatan	15,406,000	30,000,000	
		Pelaksanaan Gotong Royong			Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Gotong Royong 10 kegiatan	10 kegiatan	8,528,000	15,000,000	
		Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat							Tamansari
		Kecamatan Sayang Ibu (KSI)	Tamansari		Jumlah Pelaksanaan Acara Kecamatan Sayang Ibu(KSI) 1 Kali	1 Kali	15,000,000	16,500,000	
		Peringatan Hari Jadi Kota Pangkalpinang	Tamansari		Jumlah pelaksanaan Peringatan Hari Jadi Kota Pangkalpinang 1 Kali	1 Kali	20,000,000	22,000,000	
		Monitoring UKS	Tamansari		Jumlah UKS yang dimonitoring 22 UKS	22 UKS	16,000,000	17,600,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Pembinaan PKK	Tamansari		Jumlah Kelompok PKK yang mendapat pembinaan 12 Bulan	12 Bulan	100,304,000	110,334,400	
			Program Peningkatan Kinerja Aparat Kelurahan							Tamansari
			Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Opas Indah	Tamansari		Jumlah waktu peningkatan pelayanan administrasi Kelurahan Opas Indah 12 Bulan	12 Bulan	150,000,000	165,000,000	
			Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Gedung Nasional	Tamansari		Jumlah waktu peningkatan pelayanan administrasi kelurahan Gedung Nasional 12 Bulan	12 Bulan	150,000,000	165,000,000	
			Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Batin Tikal	Tamansari		Jumlah waktu peningkatan pelayanan administrasi Kelurahan Batin Tikal 12 Bulan	12 Bulan	150,000,000	165,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi Tingkat Kelurahan Opas Indah	Tamansari			Jumlah waktu pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan organisasi tingkat Kelurahan Opas Indah 12 Bulan	12 Bulan	250,000,000	330,000,000	
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi Tingkat Kelurahan Gedung Nasional	Tamansari			Jumlah waktu pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan organisasi tingkat Kelurahan Gedung Nasional 12 Bulan	12 Bulan	250,000,000	330,000,000	
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi Tingkat Kelurahan Batin Tikal	Tamansari			Jumlah waktu pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan organisasi tingkat Kelurahan Batin Tikal 12 Bulan	12 Bulan	250,000,000	330,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Rawa Bangun	Tamansari		Jumlah waktu peningkatan pelayanan administrasi Kelurahan Rawa Bangun 12 Bulan	12 Bulan	150,000,000	165,000,000	
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Pemeliharaan Lingkungan Kelurahan Opas Indah	Tamansari		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan Kelurahan Opas Indah 12 Bulan	12 Bulan	30,000,000	33,000,000	
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi Tingkat Kelurahan Kejaksaan	Tamansari		Jumlah waktu pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan organisasi tingkat Kelurahan Kejaksaan 12 Bulan	12 Bulan	250,000,000	330,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Kejaksaan	Tamansari		Jumlah waktu peningkatan pelayanan administrasi Kelurahan Kejaksaan 12 Bulan	12 Bulan	150,000,000	165,000,000	
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Pemeliharaan Lingkungan Kelurahan Gedung Nasional	Tamansari		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan Kelurahan Gedung Nasional 12 Bulan	12 Bulan	30,000,000	33,000,000	
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Pemeliharaan Lingkungan Kelurahan Kejaksanaan	Tamansari		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan Kelurahan Kejaksaan 12 Bulan	12 Bulan	30,000,000	33,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi Tingkat Kelurahan Rawabangun	Tamansari		Jumlah waktu pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan organisasi tingkat kelurahan Rawa Bangun 12 Bulan	12 Bulan	250,000,000	330,000,000	
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Pemeliharaan Lingkungan Kelurahan Rawa Bangun	Tamansari		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan Kelurahan Rawa Bangun 12 Bulan	12 Bulan	30,000,000	33,000,000	
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Pemeliharaan Lingkungan Kelurahan Batin Tikal	Tamansari		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan Kelurahan Batin Tikal 12 Bulan	12 Bulan	30,000,000	33,000,000	
			Program Peningkatan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat							Tamansari

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kota di Kecamatan			Jumlah pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan 1 Kali	1 Kali	30,000,000	33,000,000	
			Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat			Jumlah Kelurahan yang mengadakan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat 5 Kelurahan	5 Keluraha n	15,000,000	16,500,000	
			Pelaksanaan Gotong Royong			Jumlah Pelaksanaan Gotong -royong 48 Kali	48 Kali	20,000,000	22,000,000	
			Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat							Pangkalbal am
			Kecamatan Sayang Ibu (KSI)	Pangkal balam		Jumlah Kegiatan Kecamatan Sayang Ibu 2 kegiatan	2 kegiatan	17,250,000	19,837,500	
			Peringatan Hari Jadi Kota Pangkalpinang	Pangkal balam		Jumlah Kegiatan Peringatan Hari Jadi Kota Pangkapinang 2 kegiatan	2 kegiatan	30,360,000	34,914,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Pembinaan dan Pengembangan UKS	Pangkalbalam			jumlah kegiatan UKS 1 kegiatan	1 kegiatan	8,625,000	9,918,750	
		Pembinaan PKK	Pangkalbalam			Jumlah Kegiatan Pembinaan PKK 8 kegiatan	8 kegiatan	75,000,000	86,250,000	
		Program Peningkatan Kinerja Aparat Kelurahan								Pangkalbalam
		Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Ampui	Pangkalbalam			Jumlah waktu peningkatan pelayanan administrasi kelurahan 12 bulan	12 bulan	150,000,000	164,000,000	
		Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Lontong Pancur	Pangkalbalam			Jumlah waktu peningkatan pelayanan administrasi kelurahan 12 bulan	12 bulan	150,000,000	164,000,000	
		Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Ketapang	Pangkalbalam			jumlah waktu peningkatan administrasi kelurahan 12 bulan	12 bulan	150,000,000	164,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi Tingkat Kelurahan Ampui	Pangkal balam			jumlah waktu pelaksanaan peremberdayaan lembaga kemasyarakatan 12 bulan	12 bulan	250,000,000	300,000,000	
		Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Pasir Garam	Pangkal balam			jumlah waktu peningkatan administrasi kelurahan 12 bulan	12 bulan	150,000,000	164,000,000	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi Tingkat Kelurahan Ketapang	Pangkal balam			jumlah waktu pelaksanaan peremberdayaan lembaga kemasyarakatan 12 bulan	12 bulan	250,000,000	300,000,000	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi Tingkat Kelurahan Lontong Pancur	Pangkal balam			jumlah waktu pelaksanaan peremberdayaan lembaga kemasyarakatan 12 bulan	12 bulan	250,000,000	300,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Rejosari	Pangkalbalam			jumlah waktu peningkatan administrasi kelurahan 12 bulan	12 bulan	150,000,000	164,000,000	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Pemeliharaan Lingkungan Kelurahan Ketapang	Pangkalbalam			jumlah waktu pelaksanaan peningkatan partisipasi masyarakat 12 bulan	12 bulan	35,000,000	41,750,000	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Pemeliharaan Lingkungan Kelurahan Rejosari	Pangkalbalam			jumlah waktu pelaksanaan peningkatan partisipasi masyarakat 12 bulan	12 bulan	35,000,000	41,750,000	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Pemeliharaan Lingkungan Kelurahan Ampui	Pangkalbalam			jumlah waktu pelaksanaan peningkatan partisipasi masyarakat 12 bulan	12 bulan	35,000,000	41,750,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi Tingkat Kelurahan Rejosari	Pangkalbalam			jumlah waktu pelaksanaan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan 12 bulan	12 bulan	285,000,000	330,000,000	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Pemeliharaan Lingkungan Kelurahan Pasir Garam	Pangkalbalam			jumlah waktu pelaksanaan peningkatan partisipasi masyarakat 12 bulan	12 bulan	35,000,000	41,750,000	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Pemeliharaan Lingkungan Kelurahan Lontong Pancur	Pangkalbalam			jumlah waktu pelaksanaan peningkatan partisipasi masyarakat 12 bulan	12 bulan	35,000,000	41,750,000	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi Tingkat Kelurahan Pasir Garam	Pangkalbalam			jumlah waktu pelaksanaan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan 12 bulan	12 bulan	250,000,000	300,000,000	
		Program Peningkatan Kegiatan								Pangkalbalam

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Pemberdayaan Masyarakat							
			Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kota di Kecamatan			Jumlah Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan 1 kegiatan	1 kegiatan	24,000,000	26,450,000	
			Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat			Jumlah Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 1 kegiatan	1 kegiatan	20,000,000	30,000,000	
			Pelaksanaan Gotong Royong			Jumlah waktu Kegiatan Pelaksanaan Gotong Royong 11 bulan	11 bulan	7,475,000	8,596,250	
			Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat							Girimaya
			Kecamatan Sayang Ibu (KSI)					17,500,000	-	
			Peringatan Hari Jadi Kota Pangkalpinang					25,000,000	-	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Pembinaan dan Pengembangan UKS	Girimaya					8,000,000	-	
		Pembinaan PKK						86,100,000	-	
		Program Peningkatan Kinerja Aparat Kelurahan								Girimaya
		Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Batu Intan	Girimaya					131,344,500	-	
		Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Bukit Besar	Girimaya					139,025,500	-	
		Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Semabung Baru	Girimaya					143,026,500	-	
		Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Sriwijaya	Girimaya					134,029,000	-	
		Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Pasar Padi	Girimaya					143,026,500	-	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi Tingkat Kelurahan Batu Intan	Girimaya					210,333,200	-	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi Tingkat Kelurahan Bukit Besar	Girimaya					340,000,000	-	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi Tingkat Kelurahan Semabung Baru	Girimaya					340,000,000	-	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi Tingkat Kelurahan Sriwijaya	Girimaya					340,000,000	-	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi Tingkat Kelurahan Pasar Padi	Girimaya					340,000,000	-	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Pemeliharaan Lingkungan Kelurahan Batu Intan	Girimaya					60,000,000	-	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Pemeliharaan Lingkungan Kelurahan Bukit Besar	Girimay a					60,000,000	-	
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Pemeliharaan Lingkungan Kelurahan Semabung Baru	Girimay a					60,000,000	-	
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Pemeliharaan Lingkungan Kelurahan Sriwijaya	Girimay a					60,000,000	-	
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Pemeliharaan Lingkungan Kelurahan Pasar Padi	Girimay a					60,000,000	-	
			Program Peningkatan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat								Girimaya

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kota di Kecamatan						18,789,000	-	
		Sosialisasi Pembinaan RT/RW, LPM, Karang Taruna, Dan Organisasi Kemasyarakatan Lainnya	Girimaya					15,000,000	15,000,000	
		Pelaksanaan Gotong Royong						14,261,500	14,261,500	
		Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat								Gabek
		Kecamatan Sayang Ibu (KSI)	Gabek			Jumlah pelaksanaan KSI 2 kali	2 kali	19,825,000	27,500,000	
		Peringatan Hari Jadi Kota Pangkalpinang	Gabek			Jumlah pelaksanaan peringatan hari jadi Kota Pangkalpinang 1 kali	1 kali	25,500,000	30,250,000	
		Pembinaan PKK	Gabek			Jumlah kelompok pkk kelurahan yang dibina 6 kelurahan	6 kelurahan	57,558,000	77,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

Gabek

			Program Peningkatan Kinerja Aparat Kelurahan							
			Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Gabek Satu	Gabek		Jumlah waktu penyediaan jasa administrasi kelurahan 12 bulan	12 bulan	180,000,000	165,000,000	
			Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan organisasi tingkat Kelurahan Air Selemba	Gabek		Jumlah waktu terlaksananya pemberdayaan lembaga kemasy. & oraganisasi tingkat kelurahan 12 bulan	12 bulan	300,000,000	374,000,000	
			Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan organisasi tingkat Kelurahan Selindung	Gabek		Jumlah waktu terlaksananya pemberdayaan lembaga kemasy. & oraganisasi tingkat kelurahan 12 bulan	12 bulan	300,000,000	374,000,000	
			Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan organisasi tingkat Kelurahan Jerambah Gantung	Gabek		Jumlah waktu terlaksananya pemberdayaan lembaga kemasy. & oraganisasi tingkat	12 bulan	300,000,000	374,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

						kelurahan 12 bulan					
			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka pemeliharaan lingkungan Kelurahan Gabek Satu	Gabek		Jumlah waktu terlaksananya peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka pemeliharaan lingkungan kelurahan 12 bulan	12 bulan	60,000,000	66,000,000		
			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka pemeliharaan lingkungan Kelurahan Gabek Dua	Gabek		Jumlah waktu terlaksananya peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka pemeliharaan lingkungan kelurahan 12 bulan	12 bulan	60,000,000	66,000,000		

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka pemeliharaan lingkungan Kelurahan Selindung Baru	Gabek			Jumlah waktu terlaksananya peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka pemeliharaan lingkungan kelurahan 12 bulan	12 bulan	60,000,000	66,000,000	
			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka pemeliharaan lingkungan Kelurahan Air Selemba	Gabek			Jumlah waktu terlaksananya peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka pemeliharaan lingkungan kelurahan 12 bulan	12 bulan	60,000,000	66,000,000	
			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka pemeliharaan lingkungan Kelurahan Selindung	Gabek			Jumlah waktu terlaksananya peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka pemeliharaan lingkungan kelurahan	12 bulan	60,000,000	66,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

						12 bulan				
			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka pemeliharaan lingkungan Kelurahan Jerambah Gantung	Gabek		Jumlah waktu terlaksananya peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka pemeliharaan lingkungan kelurahan 12 bulan	12 bulan	60,000,000	66,000,000	
			Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Gabek Dua	Gabek		Jumlah waktu penyediaan jasa administrasi kelurahan 12 bulan	12 bulan	180,000,000	165,000,000	
			Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Selindung Baru	Gabek		Jumlah waktu penyediaan jasa administrasi kelurahan 12 bulan	12 bulan	180,000,000	165,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Air Selemba	Gabek			Jumlah waktu penyediaan jasa administrasi kelurahan 12 bulan	12 bulan	180,000,000	165,000,000	
		Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Selindung	Gabek			Jumlah waktu penyediaan jasa administrasi kelurahan 12 bulan	12 bulan	180,000,000	165,000,000	
		Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Jerambah Gantung	Gabek			Jumlah waktu penyediaan jasa administrasi kelurahan 12 bulan	12 bulan	180,000,000	165,000,000	
		Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan organisasi tingkat Kelurahan Gabek Satu	Gabek			Jumlah waktu terlaksananya pemberdayaan lembaga kemasy. & oraganisasi tingkat kelurahan 12 bulan	12 bulan	300,000,000	374,000,000	
		Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan organisasi tingkat Kelurahan Gabek Dua	Gabek			Jumlah waktu terlaksananya pemberdayaan lembaga kemasy. & oraganisasi tingkat	12 bulan	300,000,000	374,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

						kelurahan 12 bulan				
			Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan organisasi tingkat Kelurahan Selindung Baru	Gabek		Jumlah waktu terlaksananya pemberdayaan lembaga kemasy. & oraganisasi tingkat kelurahan 12 bulan	12 bulan	300,000,000	374,000,000	
			Program Peningkatan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat							Gabek
			Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kota di Kecamatan			Jumlah pelaksanaan musrenbang 1 kali	1 kali	30,000,000	38,500,000	
			Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat			Jumlah peserta pembina trantib 100 orang	100 orang	25,500,000	39,050,000	
			Pelaksanaan Gotong Royong			Jumlah pelaksanaani gotong	24 kali	12,800,000	18,480,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

						royong 24 kali				
										Bukit Intan
			Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat							
			Kecamatan Sayang Ibu (KSI)	Bukit Intan			Jumlah Kegiatan Kecamatan Sayang Ibu 2 Kegiatan	2 Kegiatan	25,500,000	28,500,000
			Peringatan Hari Jadi Kota Pangkalpinang	Bukit Intan			Jumlah Kegiatan Peringatan Hari Jadi Kota Pangkalpinang 1 Kegiatan	1 Kegiatan	30,000,000	38,000,000
			Monitoring UKS	Bukit Intan			Jumlah waktu kegiatan Sosialisasi UKS 12 Bulan	12 Bulan	12,500,000	15,500,000
			Pembinaan PKK	Bukit Intan			Jumlah Kegiatan Pembinaan PKK 8 Kegiatan	8 Kegiatan	72,500,000	80,500,000
			Program Peningkatan Kinerja Aparat Kelurahan							Bukit Intan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Air Itam	Bukit Intan			Jumlah Waktu Peningkatan pelayanan administrasi kelurahan Air Itam 12 Bulan	12 Bulan	127,966,500	142,500,000	
			Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Pasir Putih	Bukit Intan			Jumlah Waktu Peningkatan pelayanan administrasi kelurahan Pasir Putih 12 Bulan	12 Bulan	127,966,500	132,500,000	
			Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Sinar Bulan	Bukit Intan			Jumlah Waktu Peningkatan pelayanan administrasi kelurahan Sinar Bulan 12 Bulan	12 Bulan	106,116,500	132,500,000	
			Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Temberan	Bukit Intan			Jumlah Waktu Peningkatan pelayanan administrasi kelurahan Temberan 12 Bulan	12 Bulan	127,966,500	132,500,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Semabung Lama	Bukit Intan			Jumlah Waktu Peningkatan pelayanan administrasi kelurahan Semabung Lama 12 Bulan	12 Bulan	127,966,500	144,500,000	
		Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Air Mawar	Bukit Intan			Jumlah Waktu Peningkatan pelayanan administrasi kelurahan Air Mawar 12 Bulan	12 Bulan	127,966,500	132,500,000	
		Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Bacang	Bukit Intan			Jumlah Waktu Peningkatan pelayanan administrasi kelurahan Bacang 12 Bulan	12 Bulan	127,966,500	132,500,000	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi Tingkat Kelurahan Pasir Putih	Bukit Intan			Jumlah Waktu Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan organisasi tingkat kelurahan Pasir Putih	12 Bulan	300,000,000	325,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

						12 Bulan				
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi Tingkat Kelurahan Sinar Bulan	Bukit Intan			Jumlah Waktu Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan organisasi tingkat kelurahan Sinar Bulan 12	12	300,000,000	315,000,000	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi Tingkat Kelurahan Temberan	Bukit Intan			Jumlah Waktu Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan organisasi tingkat kelurahan Temberan 12 Bulan	12 Bulan	280,000,000	305,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi Tingkat Kelurahan Semabung Lama	Bukit Intan			Jumlah Waktu Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan organisasi tingkat kelurahan Semabung Lama 12 Bulan	12 Bulan	340,000,000	380,000,000	
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Pemeliharaan Lingkungan Kelurahan Sinar Bulan	Bukit Intan			Jumlah Waktu Peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka pemeliharaan lingkungan kelurahan Sinar Bulan 12 Bulan	12 Bulan	45,000,000	55,000,000	
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Pemeliharaan Lingkungan Kelurahan Pasir Putih	Bukit Intan			Jumlah Waktu Peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka pemeliharaan lingkungan kelurahan Pasir Putih 12 Bulan	12 Bulan	45,000,000	55,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi Tingkat Kelurahan Air Itam	Bukit Intan			Jumlah Waktu Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan organisasi tingkat kelurahan Air Itam 12 Bulan	12 Bulan	300,000,000	325,000,000	
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi Tingkat Kelurahan Air Mawar	Bukit Intan			Jumlah Waktu Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan organisasi tingkat kelurahan Air Mawar 12 Bulan	12 Bulan	280,000,000	305,000,000	
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi Tingkat Kelurahan Bacang	Bukit Intan			Jumlah Waktu Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan organisasi tingkat kelurahan Bacang 12 Bulan	12 Bulan	300,000,000	325,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Pemeliharaan Lingkungan Kelurahan Temberan	Bukit Intan			Jumlah Waktu Peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka pemeliharaan lingkungan kelurahan Temberan 12 Bulan	12 Bulan	45,000,000	55,000,000	
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Pemeliharaan Lingkungan Kelurahan Air Mawar	Bukit Intan			Jumlah Waktu Peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka pemeliharaan lingkungan kelurahan Air Mawar 12 Bulan	12 Bulan	45,000,000	55,000,000	
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Pemeliharaan Lingkungan Kelurahan Semabung Lama	Bukit Intan			Jumlah Waktu Peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka pemeliharaan lingkungan kelurahan Semabung Lama 12 Bulan	12 Bulan	45,000,000	55,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Pemeliharaan Lingkungan Kelurahan Bacang	Bukit Intan			Jumlah Waktu Peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka pemeliharaan lingkungan kelurahan Bacang 12 Bulan	12 Bulan	45,000,000	55,000,000	
			Program Peningkatan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat								Bukit Intan
			Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kota di Kecamatan				Jumlah Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan 1 Kegiatan	1 Kegiatan	29,500,000	31,500,000	
			Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat				Jumlah Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 1 Kegiatan	1 Kegiatan	25,500,000	27,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Pelaksanaan Gotong Royong				Jumlah waktu pelaksanaan Kegiatan Gotong Royong 12 bulan	12 bulan	12,500,000	15,000,000	
	Pengembangan Infrastruktur Daerah	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa								Sekretariat Daerah
			Lomba Kader Umum PKK	Kota			Terlaksananya lomba kader umum PKK 3 kader	3 kader	20,000,000	22,000,000	
			Lomba Pelaksanaan Visual Asam Asetat	Kota			terlaksananya Lomba Visual Asam Asetat 3 kelompok	3 kelompok	15,000,000	16,500,000	
			Lomba Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR)	Kota			terlaksananya Lomba PAAR 3 kelompok	3 kelompok	30,000,000	33,000,000	
			Peran serta perempuan PKK dalam pembangunan melalui hari kesatuan Gerak PKK	Kota			terlaksananya kegiatan HUT HKG Kota Pangkalpinang dan Jambore PKK Tk	2 kali	120,000,000	132,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

						Nasional 2 kali				
		Peran serta perempuan pedesaan / kelurahan	Kota			terlaksananya lomba HATINYA PKK 3 kelompok	3 kelompok	15,000,000	16,500,000	
		Monitoring perkembangan kelurahan dan profil kelurahan tingkat kota	Kota			tersusunnya profil kelurahan 42 laporan lomba kelurahan tingkat Kota 3 kelurahan	42 laporan 3 kelurahan	100,000,000	110,000,000	
		Partisipasi masyarakat pedesaan melalui dasa wisma	Kota			terlaksananya lomba dasawisma 3 kelompok	3 kelompok	15,000,000	16,500,000	
		Pemberdayaan Masyarakat melalui Kegiatan PKK	Kota			terlaksananya pembinaan POKJA PKK 4 POKJA	4 POKJA	100,000,000	110,000,000	
		Rakon PKK Tingkat Provinsi	Kota			Terlaksananya Rakon Tk Provinsi 7 kali	7 kali	90,000,000	99,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Kegiatan PKK Kecamatan dan Kelurahan	Kota			meningkatnya pengawasan pelaporan dan evaluasi terhadap kegiatan - kegiatan yang terkait dengan PKK 1 laporan	1 laporan	40,000,000	44,000,000	
			Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG)	Kota			terlaksananya lomba penerapan teknologi tepat guna 3 kelompok	3 kelompok	100,000,000	110,000,000	
			Bulan bhakti gotong royong masyarakat	Kota			terlaksananya lomba gotong royong 3 kelompok	3 kelompok	120,000,000	132,000,000	
	Penguatan Sinergitas dan Pemantapan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Fungsi Koordinasi Serta Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Program Peningkatan Kerjasama Daerah								Sekretariat Daerah

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Tata Laksana kerjasama daerah	Kota		Terlaksananya hubungan kerjasama daerah 10 kerjasama	10 kerjasama	82,500,000	90,750,000	
		APEKSI	Kota		keikutsertaan pemerintah daerah dalam kegiatan APEKSI 5 kali	5 kali	195,000,000	220,000,000	
		Pengelolaan Izin PDLN	Kota		Terfasilitasinya izin PDLN 3 izin PDLN	3 izin PDLN	40,000,000	44,000,000	
		Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah	Kota		Terlaksananya monitoring dan evaluasi kerja sama 1 laporan	1 laporan	25,000,000	27,500,000	
		Program Peningkatan Komunikasi dan Informasi serta Media Massa dan Protokol							Sekretariat Daerah
		Penyediaan Jasa Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Daerah	Kota		Jumlah acara/kegiatan pemerintah daerah yang didokumentasikan 500 acara/kegiatan	500 acara/ke giatan	150,000,000	165,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Protokol dan Acara	Kota		Jumlah acara/kegiatan pemerintah daerah yang difasilitasi protokol 500 acara/kegiatan	500 acara/kegiatan	300,000,000	330,000,000	
			Publikasi/Penyebaran Informasi Melalui Media Elektronik dan Media Daring Lingkup Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang	Kota		Bentuk publikasi/penyebaran informasi pemerintahan dan pembangunan melalui media informasi elektronik 60 kegiatan	60 kegiatan	200,000,000	220,000,000	
			Publikasi/Penyebaran Informasi Melalui Media Cetak Lingkup Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang	Kota		Bentuk publikasi/penyebaran informasi pemerintahan dan pembangunan melalui media informasi cetak 60 kegiatan	60 kegiatan	1,000,000,000	1,320,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Peliputan dan Pemberitaan Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota			Terlaksananya peliputan dan pemberitaan 500 kegiatan	500 kegiatan	100,000,000	110,000,000	
		Penyediaan Jasa Komunikasi dan Informasi Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang	Kota			Tersedianya jasa komunikasi dan informasi 12 bulan	12 bulan	350,000,000	385,000,000	
		Peningkatan Kerjasama dengan Unsur pers	Kota			terlaksananya kerjasama dengan media massa 5 media massa	5 media massa	150,000,000	165,000,000	
		Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Lingkup Sekretariat Daerah	Kota			Tersedianya informasi publik Sekretariat Daerah 1 dokumen	1 dokumen	50,000,000	55,000,000	
		Program Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah								Sekretariat Daerah

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan	Kota			Terlaksananya kegiatan unit layanan pengadaan yaitu proses pelelangan kota pangkalpinang 1 Paket	1 Paket	2,300,000,000	2,530,000,000	
			Bimbingan dan rapat kerja unit layanan pengadaan	Kota			terlaksananya Bimtek 1 kali bimtek terlaksananya rapat koordinasi 2 kali rapat kerja	1 kali bimtek 2 kali rapat kerja	150,000,000	165,000,000	
			Monitoring evaluasi pembangunan	Kota			Tersedianya Laporan Fisik dan Keuangan APBD Kota Pangkalpinang 1 laporan fisik dan keuangan	1 laporan fisik dan keuangan	275,000,000	302,500,000	
			Monitoring pengendalian pembangunan	Kota			terfasilitasinya pengendalian / pengawasan pembangunan daerah 100 %	100%	525,000,000	577,500,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Tata kelola Pengadaan Barang/jasa	Kota		terwujudnya tata kelola pengadaan barang/jasa 1 kali	1 kali	125,000,000	137,500,000	
		Asistensi Pembinaan Pengadaan Barang/jasa	Kota		terlaksananya pembinaan pengadaan barang/jasa 2 kali	2 kali	125,000,000	137,500,000	
		pengembangan LPSE	Kota		Terselenggaranya sistem pengadaan barang/ jasa secara elektronik 80 %	80%	620,000,000	682,000,000	
		Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah							Sekretariat DPRD
		Pembahasan rancangan peraturan daerah	SKPD		jumlah rancangan peraturan daerah yang dibahas 20 raperda	20 raperda	6,857,000,000	7,542,700,000	
		Pelayanan Tenaga Ahli	SKPD		jumlah laporan analisis tim ahli/tenaga ahli yang disusun 108 laporan	108 laporan	840,210,000	924,231,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Publikasi DPRD	SKPD			jumlah jenis jasa mass media yang digunakan 3 jenis	3 jenis	465,320,000	511,852,000	
		Rapat-rapat dan konsultasi Keluar daerah	SKPD			jumlah rapat-rapat konsultasi keluar daerah yang diikuti 60 Kali	60 Kali	14,748,640,000	15,794,676,304	
		Peningkatan Kualitas Jasmani pimpinan dan Anggota DPRD	SKPD			jumlah sarana dan prasarana olahraga anggota dprd 1 paket	1 paket	160,000,000	176,000,000	
		Pelaporan alat kelengkapan DPR	SKPD			jumlah jenis laporan alat kelengkapan dprd 1 jenis	1 jenis	471,475,000	518,622,500	
		Pengamanan Penyaluran aspirasi	SKPD			jumlah penyaluran aspirasi masyarakat yang mendapat pengamanan 2 kali	2 kali	10,000,000	11,000,000	
		Pergantian Antar Waktu (PAW)	SKPD			jumlah PAW anggota dprd yang dilaksanakan 1 kali	1 kali	51,450,000	56,595,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Raperda Inisiatif DPRD	SKPD		jumlah rapat inisiatif yang di sahkan 2 raperda	2 raperda	59,950,000	65,945,000	
		Rapat-rapat paripurna Istimewa	SKPD		jumlah rapat-rapat paripurna yang dilaksanakan 2 kali	2 kali	244,095,000	268,504,500	
		Kegiatan Reses	SKPD		jumlah kegiatan reses yang dilaksanakan 18 kali	18 kali	60,000,000	66,000,000	
		Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	SKPD		jumlah orientasi pendalamn tugas yang diikuti 6 kali	6 kali	4,153,373,400	4,568,710,740	
		Program Pembinaan Organisasi Kelurahan							Rangkui
		Lomba Kelurahan	Rangkui		jumlah peserta lomba 8 Kelurahan	8 Kelurahan	15,000,000	40,000,000	
		Rapat Koordinasi Lembaga Kemasyarakatan	Rangkui		jumlah peserta rapat koordinasi lembaga kemasyarakatan 100 Orang	100 Orang	25,000,000	60,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Pembinaan Kelurahan Terbaik	Rangkui			jumlah kelurahan terbaik 1 Kelurahan	1 Kelurahan	15,000,000	50,000,000	
		Program Pembinaan Organisasi Kelurahan								Gerunggan
		Lomba Kelurahan	Gerunggan			Jumlah Kegiatan lomba Kelurahan 1 kegiatan	1 kegiatan	9,760,000	22,000,000	
		Rapat Koordinasi Lembaga Kemasyarakatan	Gerunggan			Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi Lembaga Kemasyarakatan 1 kegiatan	1 kegiatan	8,800,000	22,000,000	
		Program Pembinaan Organisasi Kelurahan								Tamansari
		Lomba Kelurahan	Tamansari			Jumlah Pelaksanaan Lomba Kelurahan 5 Kali	5 Kali	15,000,000	16,500,000	
		Rapat Koordinasi Lembaga Kemasyarakatan	Tamansari			Jumlah Pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi 3 Kali	3 Kali	45,000,000	49,500,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Pembinaan Kelurahan Terbaik	Tamansari		Jumlah Kelurahan yang mendapat pembinaan 1 Kelurahan	1 Kelurahan	10,000,000	11,000,000	
		Program Pembinaan Organisasi Kelurahan							Pangkalbalam
		Lomba Kelurahan	Pangkalbalam		Jumlah Kegiatan lomba Kelurahan 1 kegiatan	1 kegiatan	6,325,000	7,273,750	
		Rapat Koordinasi Lembaga Kemasyarakatan	Pangkalbalam		jumlah kegiatan rapat koordinasi 1 kali	1 kali	25,000,000	28,750,000	
		Program Pembinaan Organisasi Kelurahan							Girimaya
		Lomba Kelurahan	Girimaya				10,000,000	-	
		Rapat Koordinasi Lembaga Kemasyarakatan					14,000,000	-	
		Pembinaan Kelurahan Terbaik					16,709,500	-	
		Program Pembinaan Organisasi Kelurahan							Gabek

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Lomba Kelurahan	Gabek		Jumlah kelurahan yang mengikuti lomba kelurahan 6 kelurahan	6 kelurahan	10,000,000	13,750,000	
			Rapat Koordinasi Lembaga Kemasyarakatan	Gabek		Jumlah peserta rapat koordinasi lembaga kemasyarakatan 100 orang	100 orang	18,550,000	24,750,000	
		Meningkatnya Kinerja Pemerintah Melalui Reformasi Birokrasi	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan							Sekretariat Daerah
			Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	Kota		Adanya persamaan persepsi tentang HAM 100 Orang	100 Orang	35,000,000	38,500,000	
			Penyusunan Pedoman dan Ketentuan pelaksanaan dari peraturan undang-undang bidang organisasi	Kota		tersusunnya produk hukum bidang organisasi 5 Produk Hukum	5 Produk Hukum	60,000,000	66,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Bantuan Penyelesaian Kasus Kasus Hukum	Kota			Tersedianya mediasi penyelesaian kasus hukum 3 Kasus	3 Kasus	240,000,000	264,000,000	
		Harmonisasi Raperda Kota Pangkalpinang	Kota			Tersusunnya produk hukum daerah yang bermuatan HAM 5 Raperda	5 Raperda	28,000,000	30,800,000	
		Penyusunan dan Pengelolaan Peraturan / Keputusan Walikota	Kota			Tersusunnya Produk hukum daerah berupa Peraturan/Keputusan Walikota 300 Perkada	300 Perkada	122,000,000	134,200,000	
		Penyusunan dan Pembahasan Peraturan Daerah	Kota			Tersusunnya Produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah 15 Perda	15 Perda	250,000,000	275,000,000	
		Penyusunan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang	Kota			tersusunnya perwako tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah 1 Dokumen	1 Dokumen	70,000,000	77,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Penyuluhan hukum bagi pelajar	Kota			Terlaksananya Penyuluhan Hukum bagi pelajar 100 Orang	100 Orang	40,000,000	55,000,000	
		Pembinaan kelurahan sadar hukum (KADARKUM)	Kota			Terlaksananya pembinaan kelurahan sadar hukum 100 Orang	100 Orang	40,000,000	44,000,000	
		Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Kota			Terselenggaranya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 150 Perkada	150 Perkada	97,500,000	93,500,000	
		Penyusunan Sambutan Walikota	Kota			Terdokumentasi sambutan Walikota Pangkalpinang terhadap Raperda Kota 10 Raperda	10 Raperda	25,000,000	27,500,000	
		Publikasi produk hukum daerah	Kota			Terselenggaranya dokumentasi peraturan perundang-undangan 100 Buku	100 Buku	40,000,000	46,750,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

Sekretariat
Daerah

			Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan							
			Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik	Kota			meningkatnya inovasi unit pelayanan publik dalam memberikan pelayanan 20 unit pelayanan publik	20 unit pelayana n publik	75,000,000	82,500,000
			Reformasi birokrasi Pemerintah Kota Pangkalpinang	Kota			tersusunnya laporan kegiatan reformasi birokrasi Kota Pangkalpinang 1 Laporan	1 Laporan	150,000,000	165,000,000
			Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kota			tersusunnya hasil kajian pemberdayaan kapasitas kelembagaan mengenai susunan dan bentuk organisasi unit pelaksana teknis badan dan dinas Daerah 1 Kajian	1 Kajian	125,000,000	137,500,000

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Rapat Koordinasi pemerintahan	Kota		terlaksananya rapat koordinasi dengan SKPD pelaksana urusan pemerintahan dan OTDA 4 Kali	4 Kali	100,000,000	110,000,000	
		Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Kota		tersedianya data survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Pemerintah Kota Pangkalpinang 1 Dokumen	1 Dokumen	75,000,000	82,500,000	
		Penataan dan Penyelesaian Batas Wilayah	Kota		Terlaksananya penataan dan penyelesaian batas wilayah 1 Laporan	1 Laporan	70,000,000	77,000,000	
		Asistensi Penyusunan LPPD	Kota		terlaksananya asistensi penyusunan LPPD 1 kali	1 kali	52,000,000	57,200,000	
		Desk Pemilu	Kota		terlaksananya koordinasi dengan tim desk pemilu 1 laporan	1 laporan	90,000,000	99,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Penyusunan LKPJ Akhir Tahun Anggaran	Kota			Buku LKPJ 160 Buku	160 Buku	80,000,000	88,000,000	
		Inventarisasi unsur rupabumi	Kota			terlaksananya inventarisasi unsur rupabumi 1 Laporan	1 Laporan	110,000,000	121,000,000	
		Penyusunan LPPD dan IPPD akhir tahun anggaran	Kota			buku LPPD dan IPPD 38 Buku	38 Buku	155,000,000	170,500,000	
		Analisa jabatan dan analisa beban kerja	Kota			tersusunnya dokumen analisa jabatan dan analisa beban kerja 1 Dokumen	1 Dokumen	125,000,000	137,500,000	
		Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan								Sekretariat Daerah
		Kebijakan penanggulangan dampak inflasi dan deflasi	Kota			Terlaksananya kebijakan pemerintah dalam menanggulangi inflasi dan deplasi di Kota Pangkalpinang 4 Dokumen Laporan	4 Dokumen Laporan	370,000,000	363,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Pendataan industri rumah tangga di kawasan pemukiman	Kota			Terlaksananya Penataan dan Pengembangan Industri Rumah Tangga di kawasan Pemukiman 1 Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan	100,000,000	110,000,000	
			Monitoring dan Pengawasan Gas Elpiji	Kota			Terlaksananya Bidang Produktifitas Energi 1 Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan	75,000,000	126,500,000	
			Program Penyusunan Database Hasil-Hasil Pembangunan								Rangkui
			Penyusunan buku profil kecamatan				Jumlah buku Profil 5 Buku	5 Buku	15,000,000	40,000,000	
			Program Penyusunan Database Hasil-Hasil Pembangunan								Tamansari
			Penyusunan buku profil kecamatan				Jumlah jenis dokumen profil kecamatan dan kelurahan 6 Jenis	6 Jenis	20,000,000	22,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

Bukit Intan

			Program Penyusunan Database Hasil-Hasil Pembangunan								
			Penyusunan buku profil kecamatan				Jumlah Jenis buku profil kecamatan dan kelurahan 8 Kegiatan	8 Kegiatan	60,500,000	66,500,000	
	Pemantapan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Berstandar, Mudah Dan Terjangkau	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah								Sekretariat Daerah
			Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan	Kota			Tersedianya makan dan minum dialog/audiensi 1 Tahun	1 Tahun	600,000,000	660,000,000	
			Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri	Kota			Jumlah kunjungan yang difasilitasi 60 Penerima	60 Penerima	700,000,000	550,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Kota		tersedianya koordinasi yang diselenggarakan 1 Tahun	1 Tahun	1,500,000,000	1,650,000,000	
		Penyediaan Makanan dan Minuman Harian Rumah Jabatan	Kota		Tersedianya makan dan minum harian rumah jabatan KDH dan WKDH 1 Tahun	1 Tahun	650,000,000	1,650,000,000	
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah							Sekretariat Daerah
		Penyusunan standar satuan harga	Kota		Tersedianya standar satuan harga barang 80 buku	80 buku	175,000,000	192,500,000	
		Program Pengembangan dan Pembinaan Lembaga Ekonomi dan Keuangan							Sekretariat Daerah
		Penyelenggaraan Forum CSR	Kota		Terlaksananya Fasilitasi dan koordinasi Penyelenggaraan	100%	110,000,000	121,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

						Forum CSR 100 %				
			Program Pengembangan Pemanfaatan Teknologi Informasi							Sekretariat Daerah
			Pengelolaan Website Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah	, Kota()		Tersedianya website 1 website	1 website	105,000,000	115,500,000	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana LPSE	Kota		Tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan LPSE kota pangkalpinang 1 paket	1 paket	108,000,000	118,800,000	
			Pengelolaan E-LHKPN	Kota		meningkatnya kepatuhan pelaporan LHKPN secara elektronik 100 %	100%	84,000,000	92,400,000	
			Program Peningkatan dan Pengembangan							Badan Keuangan Daerah

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Pengelolaan Keuangan Daerah							
			Penyusunan Analisa Standar Belanja	SKPD		jumlah perwako analisa standart belanja yang disusun 1 perwako	1 perwako	226,968,500	280,000,000	
			Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	SKPD		jumlah erda tentang pelaksanaan pertanggungjawab 1 perda	1 perda	883,056,250	1,103,820,312	
			Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	SKPD		jumlah perwako tentang pertanggungjawaban pelaksanaan apbd 1 perwako	1 perwako	125,681,250	157,101,566	
			Pencetakan Massal, Penyerahan SPPT PBB dan Pelaksanaan Pekan Panutan PBB	SKPD		jumlah sppt pbb yang tercetak 50.000 wp	50.000 wp	231,999,500	240,000,000	
			Update pajak daerah	SKPD		jumlah update pajak daerah 1 data	1 data	134,900,000	145,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Pemeliharaan sistem pajak daerah	SKPD			jumlah waktu pemeliharaan sistem pajak daerah 12 bulan	12 bulan	549,525,000	620,000,000	
		Pengembangan Aplikasi PPAS dan Draf RKA	SKPD			jumlah jenis aplikasi ppas dan fraft rka 1 aplikasi	1 aplikasi	76,065,000	185,000,000	
		Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Kas Daerah secara Elektronik	SKPD			jumlah aplikasi pengelolaan kas daerah dibuat 1 aplikasi	1 aplikasi	66,000,000	70,000,000	
		Penyusunan perubahan Raperda tentang Penyertaan Modal Bank Sumsel Babel	SKPD			jumlah perda yang dirubah tentang penyertaan modal bank sumsel babel yang disusun 1 perda	1 perda	82,648,500	161,920,000	
		Rakor Keuangan	SKPD			jumlah peserta rakor keuangan 60 peserta	60 peserta	92,273,500	120,000,000	
		Penyusunan Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	SKPD			jumlah perda tentang pengelolaan keuangan daerah 1	1 perda	178,122,000	161,920,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

						perda				
		Bimtek pengelolaan keuangan bagi penatausahaan	SKPD			Jumlah peserta bimtek pengelolaan keuangan bagi penatausahaan 60 peserta	60 peserta	75,000,000	93,750,000	
		Tindak lanjut penyelesaian kerugian daerah	SKPD			Jumlah Dokumen Laporan Tindak Lanjut Penyelesaian Kerugian Daerah 1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	110,000,000	
		Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	SKPD			jumlah waktu intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendaptan daerah 12 bulan	12 bulan	590,040,000	600,000,000	
		Penyelesaian Dokumen SPP dan SPM	SKPD			jumlah dokumen spp dan ppas yang disusun 9.000 spp/spm	9.000 spp/spm	110,000,000	121,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Penyusunan KUA dan PPAS	SKPD			jumlah laporan kua dan pas yang diselesaikan 1 laporan	1 laporan	551,210,000	487,350,000	
		Pengembangan kapasitas pengelolaan keuangan daerah	SKPD			jumlah tapd yang studi pembelajaran 25 orang	25 orang	198,246,400	200,000,000	
		Up Date Komputerisasi Gaji	SKPD			jumlah data gaji pegawai yang terupdate 4.000 pegawai	4.000 pegawai	352,000,000	387,200,000	
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	SKPD			jumlah laporan monitoring evaluasi dan pelaporan yang disusun 1 laporan	1 laporan	30,000,000	37,500,000	
		Implementasi pentausahaan belanja daerah	SKPD			jumlah 2p2d yang dicetak 900 2p2d	900 2p2d	200,500,000	220,500,000	
		Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan redistribusi	SKPD			jumlah perda tentang pajak dan retribusi daerah yang disusun 1 perda	1 perda	57,260,000	65,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	SKPD			jumlah perda tentang apbd yang disusun 1 perda	1 perda	400,031,500	680,000,000	
		Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	SKPD			jumlah perwako tentang penjabaran apbd yang disusun 1 perwako	1 perwako	320,044,500	350,000,000	
		Penyusunan profil pendapatan	SKPD			jumlah profil pendapatan yang disusun 1 laporan	1 laporan	10,000,000	30,000,000	
		Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	SKPD			jumlah perda tentang perubahan apbd yang disusun 1 perda	1 perda	376,511,500	580,050,000	
		Sosialisasi Pajak Daerah	SKPD			jumlah pelaksanaan sosialisasi pajak daerah 1 kali	1 kali	90,000,000	150,000,000	
		Penyusunan Peraturan Kebijakan Perumusan dan Perencanaan Anggaran	SKPD			jumlah perwako perumusan dan perencanaan anggaran disusun 4 perwako	4 perwako	352,786,480	364,496,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Sosialisasi Kebijakan Perumusan dan Perencanaan Anggaran	SKPD			jumlah peserta sosialisasi kebijakan perumusan dan perencanaan anggaran disusun 60 peserta	60 peserta	81,405,500	153,000,000	
		Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	SKPD			jumlah perwako tentang penjabaran perubahan apbd yang disusun 1 perwako	1 perwako	315,788,000	403,150,000	
		Pengembangan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah	SKPD			jumlah waktu pengembangan sistem pengelolaan keuangan daerah 12 bulan	12 bulan	586,440,800	593,260,000	
		Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Sistem Informasi Keuangan Daerah	SKPD			jumlah waktu pemeliharaan sarana dan prasarana sisd 12 bulan	12 bulan	53,091,500	55,000,000	
		Peningkatan Kapasitas SDM Sistem Informasi Keuangan Daerah	SKPD			jumlah sdm sistem informasi keuangan daerah yang dilatih	15 orang	105,600,000	150,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

						15 orang					
			Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah								
	Penguatan Sinergitas dan Pemantapan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Melalui Reformasi Birokrasi	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH		Jumlah Kegiatan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	17 Kegiatan					Inspektorat Daerah
			Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	SKPD			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Internal Berkala 31 Laporan	31 Laporan	584,450,000	759,785,000	
			Pemantauan Kegiatan Pengawasan terhadap Evaluasi Periodik dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	SKPD			Jumlah Jenis Laporan Hasil Pemantauan Kegiatan Pengawasan terhadap Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Jenis	-	-	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

						(PMPRB) 1 Jenis				
			Unit Pemberantasan / Pengendalian Pungutan Liar dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang	SKPD		Jumlah Jenis Laporan hasil unit pemberantasan/pen gendalian pungutan liar 1 Jenis	1 Jenis	316,200,000	411,060,000	
			Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	SKPD		Jumlah Jenis Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 1 Jenis	1 Jenis	-	-	
			Sosialisasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS)	SKPD		Jumlah Jenis Laporan Sosialisasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan 1 Jenis	1 Jenis	-	-	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

		Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS)	SKPD			Jumlah Jenis Laporan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan 1 Jenis	1 Jenis	-	-	
		Inventarisasi dan Gelar Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal	SKPD			Jumlah Jenis Laporan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan OPD Pemerintah Kota Pangkalpinang 1 Jenis	1 Jenis	-	-	
		Verifikasi LHKASN	SKPD			Jumlah Pelaksanaan Pendataan Hasil Kekayaan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara 1 Kali	1 Kali	-	-	
		Sosialisasi Klinik Konsultasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kota Pangkalpinang	SKPD			Jumlah Jenis Laporan Sosialisasi Klinik Konsultasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kota Pangkalpinang 1	1 Jenis	-	-	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

						Jenis				
			Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	SKPD		Jumlah Jenis Laporan Tindak lanjut Hasil Pengawasan 1 Jenis	1 Jenis	167,000,000	217,100,000	
			Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	SKPD		Jumlah Jenis Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif 1 Jenis	1 Jenis	50,000,000	65,000,000	
			penyelesaian TPTGR Oleh majelis Pertimbangan dan Sekretariat TPTGR keuangan & barang daerah	SKPD		Jumlah Pelaksanaan Penyelesaian TPTGR oleh Majelis Pertimbangan dan Sekretariat TPTGR Keuangan dan Barang Daerah 4 kali	4 kali	159,905,000	207,876,500	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Maturitas Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang	SKPD			Jumlah Jenis Laporan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Daerah 1 Jenis	1 Jenis	32,940,000	42,822,000	
			Monitoring Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	SKPD			Jumlah Pelaksanaan Monitoring Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 4 Kali	4 Kali	32,940,000	42,822,000	
			Pemutakhiran Data Hasil Pengawasan Internal	SKPD			Jumlah Jenis Laporan Pemutakhiran Data Hasil Pengawasan Internal 1 Jenis	1 Jenis	28,140,000	36,582,000	
			Pemutakhiran Data Hasil Pengawasan Eksternal	SKPD			Jumlah Jenis Laporan Pemutakhiran Data Hasil Pengawasan Eksternal 1 Jenis	1 Jenis	56,280,000	73,164,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Seleksi Ijazah ASN	SKPD			Jumlah Pelaksanaan Seleksi Ijazah ASN 1 Kali	1 Kali	-	-	
			Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan		Jumlah Kegiatan Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	3 Kegiatan					Inspektorat Daerah
			Diklat Sertifikat JFA dan P2UPD	SKPD			Jumlah orang yang mengikuti Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional (JFA) dan P2UPD 3 Orang	3 Orang	55,600,000	72,280,000	
			Peningkatan Kompetensi APIP	SKPD			Jumlah orang yang mengikuti Peningkatan Kompetensi APIP 40 Orang	40 Orang	159,000,000	206,700,000	
			Pelatihan Substantif	SKPD			Jumlah Pelaksanaan Pelatihan Substantif 4 Kali	4 Kali	15,000,000	19,500,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

Keuangan										
	Pemantapan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Berstandar, Mudah Dan Terjangkau	Peningkatan Manajemen Aset dan Investasi Daerah							Badan Keuangan Daerah
			Peningkatan manajemen aset/ barang daerah	SKPD			jumlah peserta yang mengikuti bimtek manajemen aset 216 peserta	216 peserta	306,700,000	310,000,000
			Inventarisasi Barang Milik Daerah	SKPD			jumlah dokumen inventarisasi barang milik daerah 216 dokumen	216 dokumen	222,000,000	223,000,000
			Percepatan Persertifikatan Tanah Milik Daerah	SKPD			jumlah sertifikat tanah yang diterbitkan 50 sertifikat	50 sertifikat	275,000,000	300,000,000
			Pengamanan Aset Milik Daerah	SKPD			jumlah aset daerah persil bidang tanah yang diamankan 60 persil	60 persil	224,500,000	225,000,000

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Pengaplikasian dan pendampingan SIMDA Aset	SKPD			jumlah upb yang disamping salam mengaplikasikan simda aset 216 upb	216 upb	119,644,000	150,000,000	
			Entry Data Barang Inventaris/ Barang Milik Daerah untuk Buku Besar Aset	SKPD			jumlah dokumen barang inventaris/barang daerah dalam buku besar 1 dokumen	1 dokumen	75,000,000	125,000,000	
			Penghapusan dan pelelangan Barang Milik Daerah	SKPD			jmlah dokumen penghapusan barang milik daerah 50 dokumen	50 dokumen	336,450,000	340,000,000	
			Penilaian Aset Daerah	SKPD			jumlah dokumen penilaian aset daerah 1 dokuemen	1 dokuemen	70,000,000	125,000,000	
			Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan								
	Pengembangan Infrastruktur Daerah	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur								Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

Manusia
Daerah

		Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	Kota			Jumlah pelaksanaan pembinaan karir ASN 4 Kali	4 Kali	100,000,000	200,000,000	
		Pengelolaan administrsi pensiunan PNS	Kota			Jumlah SK pensiun yang diterbitkan 150 Orang	150 Orang	60,000,000	125,000,000	
		Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	Kota			Jumlah PNS Pemkot Pangkalpinang yang menerima bantuan biaya tugas belajar 5 Orang	5 Orang	180,000,000	450,000,000	
		Penyelesaian karpeg, karis, karsu, taperrum, askes dan taspen	Kota			Jumlah karpeg, karis/karsu, taperum, askes dan taspen yang diterbitkan 300 Kartu	300 Kartu	30,000,000	45,000,000	
		Pengelolaan dan Pengembangan Website Kepegawaian	SKPD			Jumlah website yang dikelola dan dikembangkan 1	1 Web	50,000,000	75,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

						Web				
		Pengelolaan Administrasi CPNS menjadi PNS	Kota			Jumlah pelaksanaan pengangkatan CPNS menjadi PNS 1 Kali	1 Kali	25,000,000	75,000,000	
		Peningkatan dan Pembinaan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Kota			Jumlah penyelesaian kasus ASN yang indisipliner 5 Kasus	5 Kasus	25,000,000	75,000,000	
		Penataan dan pengelolaan Administrasi Kenaikan pangkat Otomatis PNS	Kota			Jumlah SK pangkat PNS yang diterbitkan 611 Orang	611 Orang	120,000,000	150,000,000	
		Penelolaan Administrasi dalam Jabatan Fungsional	Kota			Jumlah PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional 100 Orang	100 Orang	30,000,000	75,000,000	
		Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)	Kota			Jumlah pelaksanaan seleksi jabatan pimpinan tinggi yang terfasilitasi 1 Kali	1 Kali	115,000,000	150,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Pengembangan / Pembangunan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah (SAPK)	SKPD			Jumlah sistem aplikasi kepegawaian yang dikembangkan 1 Sistem	1 Sistem	230,000,000	350,000,000	
			Seleksi Penerimaan CPNS dari Pelamar Umum	Kota			Jumlah pelaksanaan penerimaan CPNS dari pelamar umum 1 Kali	1 Kali	5,000,000	900,000,000	
			Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Memiliki Masa Kerja 10, 20, 30 Tahun	Kota			Jumlah PNS yang menerima penghargaan 200 Orang	200 Orang	20,000,000	35,000,000	
			Penyusunan Formasi Pegawai	Kota			Jumlah data formasi pegawai yang disusun 1 Dokumen	1 Dokumen	23,000,000	30,000,000	
	Penguatan Sinergitas dan Pemantapan Reformasi Birokrasi	Meningkatny a Fungsi Koordinasi Serta Sinkronisasi Penyelengga raan Pemerintah n	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (teknis)								Badan Kepegawai an dan Pengemban gan Sumber Daya Manusia Daerah

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Pelatihan Dasar Bagi CPNS Daerah	Kota			Jumlah CPNS yang mengikuti pelatihan dasar bagi CPNS daerah 80 orang	80 orang	800,201,683	1,000,000,000	
			Program Pendidikan Kedinasan								Badan Kepegawai an dan Pengemban gan Sumber Daya Manusia Daerah
			Pendidikan Penjurangan Struktural Bagi PNS	Kota			Jumlah PNS yang mengikuti diklat penjurangan struktural 5 Orang	5 Orang	180,000,000	1,000,000,000	
		Meningkatny a Kinerja Pemerintah Melalui Reformasi Birokrasi	Program Peningkatan Pelayanan Korpri								Badan Kepegawai an dan Pengemban gan Sumber Daya Manusia Daerah

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

			Pembinaan pegawai KORPRI	Kota			Jumlah pelaksanaan peringatan hari KORPRI 1 Kali Jumlah pembuatan kartu KORPRI 1.000 Lembar	1 Kali 1.000 Lembar	90,000,000	120,000,000	
	TOTAL								1,349,182,216,964	920,234,793,174	

BAB VI

KINERJA PELAYANAN PEMERINTAH DAERAH

6.1 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

6.1.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berkenaan dengan penerapan akuntabilitas di daerah, ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemerintahan di daerah diselenggarakan berdasarkan sejumlah asas, dimana salah satunya adalah asas akuntabilitas. Dengan demikian, Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah harus mampu menerapkan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerapkan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan, pelaksanaan, hingga proses evaluasi. Prinsip Good Governance atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, dan berorientasi hasil.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja maka setiap instansi pemerintah dituntut untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama dilingkungan instansi masing-masing. Tuntutan demikian sangat beralasan karena sering kali terjadi ketidakselarasan dalam penetapan indikator kinerja sehingga menyebabkan hasil yang disajikan tidak sesuai dengan perencanaan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan dan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD.

Tujuan perumusan dan penetapan IKU adalah:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2019 sebagaimana disajikan pada Tabel VII.1.

6.1.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja utama yang mencerminkan keberhasilan atas penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Indikator Kinerja Kunci disusun oleh Tim Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) berdasarkan usulan Indikator Kinerja Kunci yang diterima dari menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non departemen yang dilakukan setiap bulan Desember. IKK disusun untuk menilai aspek pada tataran pengambil kebijakan daerah dan aspek pada tataran pelaksana kebijakan daerah untuk masing-masing urusan pemerintahan.

Penetapan Indikator Kinerja Kunci Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2019 sebagaimana disajikan pada Tabel VII.2.

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja				Stand ar	Interprest asi
		2013	2014	2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
1.1.	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi						
1.1.1.	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian						
1.1.1.1	Pertumbuhan PDRB	5,78	4,27	4,24	5,17	6,7%	>
1.1.1.2	Laju inflasi	8,71	6,81	4,66	7,78	5,80	>
1.1.1.3	PDRB per kapita	26.24 Juta	44,77 Juta			31 juta	>
1.1.1.4	PDRB ADHK (juta Rupiah)	1.546.93 2,00	7.247.4 97,00	7.555.8 91	7.946	1.900. 000	>
1.1.1.5	PDRB ADHB (juta Rupiah)	4.930.81 6,00	9.359,7 0	10.234. 675	11.131.5 63	4.900. 000	>
1.1.1.7	Kemiskinan						
	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	0,9699	0,94			0,97	<
	Persentase penduduk miskin	4,15	4,04	4,97	5,02	4,5	=
	Jumlah penduduk miskin	7.840	7.810	10.000	10.120	6	>
	Garis kemiskinan	475.480	509.24 6	527.66 8	604.011		
	Indeks kedalaman kemiskinan (P1)	0,62	0,42	0,47	0,70	0,37	>

	Indeks Keparahan kemiskinan (P2)	0,07	0,08	0,07	0,16	3,15	<
	Tingkat kemiskinan kota						
1.1.1.8	Perkembangan wilayah	7	7	7	7	7	=
	Kecamatan	42	42	42	42	42	=
	kelurahan						
1.1.1.8	Angka Kriminalitas yang tertangani						
1.2.	Fokus Kesejahteraan Sosial						
1.2.1	Pendidikan						
1.2.1.1	Angka melek huruf	96,44	99,26	98,6	99,41	100 %	<
1.2.1.2	Angka rata-rata lama sekolah	10,05	9,52	9,67	9,9	12	<
1.2.1.3	APK SD	122,98	122,78	121,55	124,92	100 %	>
1.2.1.4	APK SLTP	116,47	107,45	107,45	113,71	100 %	>
1.2.1.5	APK SLTA	113,18	97,59	105,39	108,23	100 %	>
1.2.1.6	Angka Pendidikan yang ditamatkan:						
1.2.1.6.1	SD/MI	100		99,58	100	100 %	<
1.2.1.6.2	SMP/MTs	100		100	100	100 %	=
1.2.1.6.3	SMA/SMK/MA	100		99,89	100	100 %	<
1.2.1.7	APM SD	99,23	101,37	101,00	103,14	98,90 %	>

1.2.1.8	APM SLTP	74,75	75,78	66,90	75,94	76,00 %	<
1.2.1.9	APM SLTA	65,98	55,24	62,99	63,42	75,00 %	<
1.2.2	Kesehatan						
1.2.2.1	AKB/1000 KH	13	12	14	26	7	>
	Angka kematian balita	3.48	3,16	7	6	7	<
	Kematian ibu	125	49	97	122	110	<
	Penderita Penyakit malaria	0,39	0,31	5,90	1,34	0,32	>
	Prevelensi HIV	0,02	0,07	0,05	0,03	0,02	>
	Penderita DBD						
1.2.2.2	Angka Usia Harapan Hidup	70,95	72,31	72,51	72,57	71,09	>
1.2.2.3	Persentase Balita Gizi Buruk	0,11	0,18	0,09	0,10	1,5	<
1.2.3.	Pertanahan						
1.2.3.1.	Persentase penduduk yang memiliki lahan						
1.2.4.	Ketenagakerjaan						
1.2.4.1.	Rasio Penduduk yang bekerja	0,91	0,94	0,89		0,975	>
	Tingkat partisipasi angkatan kerja	60,04	64,90	67,40	67,41	97,5	<
	Tingkat pengangguran	6,66	8,84	10,64		2,25	>
	Penduduk usia kerja	90.218	92.779	98.815		100	<
	Penduduk yang bekerja		88.575	88.302		98.000	
1.3.	Fokus Seni Budaya dan Olahraga						
1.3.1	Kebudayaan						

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH**2019**

1.3.1.1.	Jumlah grup kesenian	62	62	63	51	7	>
1.3.1.2.	Jumlah gedung	1	1	1	1	1	=
1.3.2	Pemuda dan Olahraga						
1.3.2.1.	Jumlah klub olahraga	10	10	10	10	28	<
1.3.2.2.	Jumlah gedung olahraga	1	1	1	1	20	<

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja				Stand ar	Inter prest asi
		2013	2014	2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	ASPEK PELAYANAN UMUM						
2.1	Fokus Layanan Urusan Wajib						
2.1.1	Urusan Pendidikan						
2.1.1.1	Pendidikan dasar						
2.1.1.1.1	Angka partisipasi sekolah 7-12	114,3 0	100	101	103	99,50	>
2.1.1.1.2	Angka partisipasi sekolah 13-15	108,4 5	63,71	66,8 9	75,97	95,00	<
2.1.1.1.3	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	242	241	270	274	255	>
2.1.1.1.4	Rasio Guru terhadap murid	19	17	20	21	15	>
2.1.1.1.5	Rasio guru/murid per kelas rata- rata	15	35	32	32	11	>
2.1.1.2	Pendidikan menengah						
2.1.1.2.1.	Angka partisipasi sekolah SLTA	65,98	25,97	28,1 2	30,34	85	<
2.1.1.2.2	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	409	434	444	468	440	>
2.1.1.2.3	Rasio Guru terhadap murid	12	14	12	14	32	<
2.1.1.2.4	Rasio guru/murid per kelas rata- rata		35	32	32	11	>
2.1.1.2.3	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	100	100	100	100	100	=
2.1.1.3.	Fasilitas Pendidikan						

2.1.1.3.1.	Sekolah Pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	85	90	86	88	87	>
2.1.1.3.2.	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	48	49	49	49	51	<
2.1.1.4	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):						
2.1.1.4.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	35,2	34,6	-	-	65	<
2.1.1.5.	Angka Putus Sekolah:						
2.1.1.5.1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,09	0,09	0,18	0,07	0,09	>
2.1.1.5.2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,54	0,63	0,53	0,60	0,33	>
2.1.1.5.3	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	0,70	1,32	0,38	0,47	0,43	>
2.1.1.5.4	Angka Kelulusan:						
2.1.1.5.5	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	99,21	99,44	95,59	100	<
2.1.1.5.6	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100	89,16	100	98,26	98,50	>
2.1.1.5.7	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	100	106,15	99,89	100	99,08	>
2.1.1.5.8	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	99,14	104,12	100	111,35	100	>
2.1.1.5.9	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	114,75	120,47	125,02	123,84	86,05	>
2.1.1.5.10	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	50,53	58,42	75,56	77,02	100	<
2.1.2	Urusan Kesehatan						
2.1.2.1	Rasio posyandu per satuan balita	0,59	0,69	0,55	0,57	6,40	<
2.1.2.2	Rasio puskesmas, poliklinik, puskesmas per satuan penduduk	0,87	0,87	0,86	0,84	0,2	>
2.1.2.3	Rasio Rumah Sakit Per satuan penduduk	0,016	0,016	0,015	0,015	0,02	<
2.1.2.4	Rasio dokter per satuan penduduk	0,71	1,11	0,74	0,75	0,47	>

2.1.2.4	Rasio Tenaga Medis Persatuan Penduduk	1,23	1,14	1,02	1,03	0,82	>
2.1.2.5	Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang di Tangani	78,25	91,12	81,17	71,08	80	>
2.1.2.6	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	93,94	95,70	95,35	94,50	96	<
2.1.2.7	Cakupan Kelurahan Universal Child Immunization	100	100	100	100	100	=
2.1.2.8	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan (persen)	100	100	100	100	100	=
2.1.2.9	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC (persen)	221 org	169 org	226 org	177 org	100	
2.1.2.10	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	53	17	39	51 org	100	<
2.1.2.11	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100	13,87	81,61		100	<
2.1.2.12	Cakupan Kunjungan Bayi	88,87	99,30	99,30	99,9	90	>
2.1.2.13	Cakupan Puskesmas	180	128,6	128,6	128,6	100	>
2.1.2.14	Cakupan Pembantu Puskesmas	52,80	52,80	52,80	52,80	53,53	<
2.1.3	Urusan Pekerjaan Umum						
2.1.3.1	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	65	65	70	74	99,91	<
2.1.3.2	Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk	0,97		1,31			<
2.1.3.3	Persentase Realisasi Rumah Tinggal Bersanitasi	91,97	83,64	88,79	87,98	72	>
2.1.3.4	Rasio tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk			1,5996	1,656	0,18	>

2.1.3.5	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk	1,802	1,875	2,006	1,965	3,59	<
2.1.3.6	Rasio Rumah Layak Huni					310,76	>
2.1.3.7	Rasio Pemukiman Layak Huni					0	=
2.1.3.8	Panjang Jalan dilalui Roda Empat					80	>
2.1.3.9	Jumlah pemukiman yang belum dilalui roda empat					3,75	<
2.1.3.10	Panjang Jalan Kota dalam Kondisi Baik (40 KM/jam)						=
2.1.3.11	Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase Minimal 1,5 M						=
2.1.3.12	Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar					2673,82	<
2.1.3.13	Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar						
2.1.3.14	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (m)						
2.1.3.15	Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota						
2.1.3.16	Lingkungan Pemukiman						
2.1.4	Perumahan						
2.1.4.1	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kota Pangkalpinang	91,97	100	93,33	89	77	>
2.1.4.2	Konsumsi Listrik Rumah Tangga di Kota Pangkalpinang (KWH)					176	<
2.1.4.3	Rumah tangga ber-Sanitasi	77,46	90,27	89,85	90	96	<
2.1.4.4	Lingkungan pemukiman kumuh						

2.1.4.5	Rumah layak huni						
2.1.5	Urusan Penataan Ruang						
2.1.5.1	Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah				8,79	12,75	<
2.1.5.2	Rasio Bangunan Ber IMB persatuan bangunan					1150	<
2.1.5.3	Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya						
	Rasio rencana kawasan strategis yang tersusun						
2.1.6	Urusan Perencanaan Pembangunan						
2.1.6.1	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah	ada	ada	ada	ada	ada	=
2.1.6.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang Telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah	ada	ada	ada	ada	ada	=
	Tingkat Capaian sasaran RPJMD					80	
	Jumlah kerja sama pembangunan daerah						
2.1.6.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang Telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota	ada	ada	ada	ada	ada	=
2.1.6.4	Penjabaran Progam RPJMD dalam RKPD	100	100	100	100	100	=
2.1.7	Urusan Perhubungan						
2.1.7.1	Jumlah Arus masuk Penumpang Angkutan Umum (kapal laut) (orang)					170.000	

2.1.7.2	Jumlah Arus Keluar Penumpang Angkutan Umum (kapal laut) (orang)					210.000	
2.1.7.3	Rasio Ijin trayek	325	368	410	324	0,0011	>
2.1.7.4	Terminal Angkutan Umum Di Kota Pangkalpinang	3	3	3	3	2	>
2.1.7.5	Angkutan Darat						<
2.1.7.6	Kepemilikan KIR Angkutan Umum	542	428	697	630	0,36	<
2.1.7.7	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	6 bulan	6 bulan	6 bulan	6 bulan	22 menit	>
2.1.7.8	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	60.000	60.000	60.000	60.000	65	<
2.1.7.9	Pemasangan Rambu-rambu			10	11	0,94	>
2.1.8	Urusan Lingkungan Hidup						
2.1.8.1	Persentase Penanganan Sampah	83,77	83,87	85,02	89,97	98	<
2.1.8.2	Persentase Penduduk Berakses Air Minum						
2.1.8.3	Persentase Luas pemukiman yang tertata						
2.1.8.4	Pencemaran Status Mutu Air						
2.1.8.5	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air						
	Jumlah hari dengan kualitas baik						=
	Capaian luas kawasan lindung terhadap luas wilayah						
2.1.8.6	Cakupan Pengawasan Pelaksanaan AMDAL			9	10	100	<
2.1.8.7	Tempat Pembuangan Sampah Per Satuan Penduduk	2.855	1.645	1.058	820	6	<

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

2.1.8.8	Penegakan Hukum Lingkungan			4	7	100	<
2.1.9	Urusan Pertanahan						
2.1.9.1	Persentase luas lahan bersertifikat					100	
2.1.9.2	Penyelesaian Kasus Tanah Negara					100	
2.1.9.3	Penyelesaian izin lokasi						
2.1.10	Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil						
2.1.10.1	Rasio Penduduk ber Kartu Tanda Penduduk (KTP) per Satuan Penduduk				80,34	97	<
2.1.10.2	Rasio Bayi Berakte Kelahiran	67,55	98,66	97,35	97,35	100	<
2.1.10.3	Rasio Pasangan Berakte Nikah				1,76		=
2.1.10.4	Kepemilikan KTP	46.632		13,17	14,49	97	<
2.1.10.5	Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 Penduduk		566/1000	307/1000	99,35	970/1000	<
2.1.10.6	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	=
No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja				Standar	Interpretasi
		2013	2014	2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.11	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
2.1.11.1	Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	55,04	57	58	37,51	56	>
2.1.11.2	Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta				49	46	<
2.1.11.3	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)		0,08	0,03	0,02	0	>

2.1.11.4	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur						=
2.1.11.5	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan				60,75		>
2.1.11.6	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan		90,19	87,87	88,88	100	<
	Indeks pemberdayaan gender	56,10	55,44	55,22			
	Indek pembangunan gender	92,30	92,74	93,09	93,02		
2.1.12	Urusan Keluarga Berencana						
2.1.12.1	Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga	0,80	1,17	1,19	1,11	1,52	<
2.1.12.2	Rasio Akseptor KB	79,00	60,71	70,19	71,52	85,32	<
2.1.12.3	Cakupan Peserta KB Aktif	72,27	73,7	71,63	74,61	85,32	<
2.1.12.4	Rasio Keluarga Prasejahtera dan Sejahtera - I						<
	Laju pertumbuhan penduduk			2,10	2,10		<
2.1.13.	Urusan Sosial						
2.1.13.1	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi				53	6,08	=
2.1.13.2	PMKS yg memperoleh bantuan sosial (%)		3,19	0,89	0,51	61,61	<
2.1.13.3	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (%)		33	23	67	29,55	>
2.1.14	Urusan Ketenagakerjaan						
2.1.14.1	Angka partisipasi angkatan kerja					66,5	

2.1.14.2	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun					1000	
2.1.14.3	Tingkat partisipasi angkatan kerja	60,4	64,9	67,4		67,1 4	<
2.1.14.4	Pencari kerja yang ditempatkan	36,70	63,80		39,73	1	>
2.1.14.5	Tingkat pengangguran terbuka	6,66	8,84	10,6 4	10,64	2,25	<
2.1.14.6	Keselamatan dan perlindungan					41,0 4	<
	Rasio daya serap tenaga kerja						
2.1.14.7	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah					73,7 4	
No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja				Standar	Interpretasi
		2013	2014	2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.15	Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah						
2.1.15.1	Persentase Koperasi Aktif di Kota Pangkalpinang	74,30	73,90	73,5 0	65,69	77,8	<
2.1.15.2	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	99,02	98,87	98,9 4	98,90	100, 4	<
2.1.15.3	Jumlah BPR/LKM				1.961	207, 85	<
2.1.15.4	Usaha Mikro dan Kecil		98,97	98,9 4	98,9	97,3	>
	Persentase wirausaha baru		3,13	2,49	2,58	550	
2.1.16	Urusan Penanaman Modal						
2.1.16.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	4	3	-	-		=

2.1.16.2	Jumlah Investor Non PMA/PMDN di Kota Pangkalpinang	-	287	302	306		=
2.1.16.3	Nilai Investasi Kota Pangkalpinang Atas Dasar Harga Berlaku (milyar Rupiah)		108.43 2.156. 627	111. 780. 082. 640	119.954 .239.57 2	128. 000. 000. 000	<
2.1.16.4	Investasi PMA dan PMDN di Kota Pangkalpinang					372	
	Laju pertumbuhan Investasi					9,57	
2.1.17	Urusan Kebudayaan						
2.1.17.1	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	4	5	8	6	2	>
	Cakupan pelestarian dan pemanfaatan nilai budaya	100	100	100	100	100	=
2.1.17.2	Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	3	3	3	3	2	>
2.1.17.4	Rasio Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	1	1	1	1	100	<
2.1.18	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga						
2.1.18.1	Jumlah Organisasi Pemuda	47	47	47	47	50	<
	Cakupan pembinaan lembaga kepemudaan	75	75	75	75	100	<
2.1.18.2	Jumlah Organisasi Olahraga	0	1	1	1	28	>
	Cakupan pembinaan cabang olah raga	50	60	60	70		=
2.1.18.3	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	6	4	3	3	2	>
2.1.18.4	Jumlah Kegiatan Olahraga	6	12	6	5	8	<
2.1.18.5	Gelanggang/Balai Remaja	1	1	1	1	0	<
2.1.18.6	Jumlah Lapangan Olahraga	37	37	37	37	0,1	>
2.1.19	Kesatuan Bangsa&Politik Dlm Negeri						

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

2.1.19.1	Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas, dan OKP	1	1	1	1	1	=
2.1.20	Urusan Otda, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian						
	Cakupan tindak lanjut LHP					100	=
	Rasio kemandirian daerah					WDP	=
	Tingkat partisipasi pemilih						
2.1.20.1	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk		118	88	175	9	>
2.1.20.2	Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk					9	
2.1.20.4	Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Kelurahan					1,36	
2.1.20.5	Pertumbuhan ekonomi	5,78	4,27	4,24	5,17	6	<
2.1.20.6	Kemiskinan	4,15	4,04	4,97	5,02	4	>
2.1.20.7	Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan administrasi pemerintah					3,04	
2.1.20.8	Penegakkan Perda					100	
2.1.20.9	Cakupan Patroli Petugas Satpol PP					100	
2.1.20.10	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kota Pangkalpinang					90	
2.1.20.11	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	100	100	100	100	100	=
2.1.20.12	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (MK)	100	100	100	100	100	=
2.1.20.13	Cakupan Prasarana Perkantoran Kelurahan Yang Baik					100	

2.1.20.14	Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah						
2.1.20.15	Indek Kepuasan Layanan Masyarakat						
2.1.21	Urusan Ketahanan Pangan						
2.1.21.1	Regulasi ketahanan pangan			1	2	Tidak	
2.1.21.2	Ketersediaan pangan utama		2581,4	2388,76	2205,82	122,61	>
	Penguatan cadangan ketahanan pangan				17	40	
2.1.22	Urusan Pemberdayaan Masyarakat						
2.1.22.1	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)					52	
2.1.22.2	Rata-rata Kelompok Binaan PKK					50	
2.1.22.3	Jumlah LSM	7	9	12	7	17	<
2.1.22.4	LPM Berprestasi				11,36	18	<
2.1.22.5	PKK Aktif				63,22	100	<
2.1.22.6	Persentase Posyandu Aktif	64,91	67,24	74,36	77,39	100	<
2.1.22.7	Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat				80 org	58	
2.1.22.8	Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat					34	
2.1.23	Urusan Statistik						
2.1.23.1	Penyediaan Buku Pangkalpinang Dalam Angka			ada	ada	ada	=
2.1.23.2	Buku Produk Domestik Bruto					ada	
2.1.24	Urusan Kearsipan						

2.1.24.1	Pengelolaan Arsip Secara Baku	100 ml	100 ml	108 ml	80 ml	100	>
2.1.24.2	Peningkatan SDM Pengelolaan Arsip	-	-	1 orang	2 orang	40	<
2.1.25	Urusan Komunikasi dan Informatika						
2.1.25.1	Jumlah Provider Telekomunikasi Yang Ada di Pangkalpinang				12	5	<
2.1.25.2	Jumlah Jaringan Komunikasi					0	
2.1.25.3	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk						=
2.1.25.4	Jumlah surat kabar nasional/lokal	7	7	7	7	6	>
2.1.25.5	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	10	10	10	10	7	>
2.1.25.6	Web site milik pemerintah daerah	1	1	1	1	1	=
2.1.25.7	Pameran/expo					2	
2.1.26	Urusan Perpustakaan						
2.1.26.1	Jumlah Perpustakaan	1	1	1	1	95	<
2.1.26.2	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per tahun	5503	5674	14.429	22.122	0,05	>
2.1.26.3	Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan	35.083	36.254	37.048	39.534	0,54	>
2.2	Pelayanan Urusan Pilihan						
2.2.1	Pertanian						
2.2.1.1	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	7,15	5,49	4,13	2,69	7,25	<
2.2.1.2	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	5,01	4,99	4,99	4,98	9	<
	Pertumbuhan sector pertanian		-1,5	5,06	3,67	3,5-4,5	<
2.2.1.3	Kontibusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB		5,01	4,99	4,99	7,18	<

2.2.1.4	Kontibusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB					0,055	
	Pertumbuhan sector perkebunan					8	
	Pertumbuhan sector perternakan					18-20	
2.2.1.5	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB						
2.2.2	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral						
2.2.2.1	Pertambangan Tanpa Izin						
2.2.2.2	Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB						
2.2.3	Urusan Pariwisata						
2.2.3.1	Kunjungan Wisata	43,86	34,80	35,20	56,96	94	<
2.2.3.2	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	1,02	1,01	1,05	1,01	2	<
	Pertumbuhan sector Pariwisata	-	-	-	-	18-20	
2.2.4	Urusan Kelautan dan Perikanan						
	Pertumbuhan sector perikanan					3	
2.2.4.1	Produksi Perikanan (ton)	19.086	19.097	2878,88	3533,42	23.596	<
2.2.4.2	Konsumsi Ikan	45,45	44,51	45,45	49,68	11.750	<
2.2.4.3	Cakupan Bina Kelompok Nelayan					82	
2.2.4.4	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan (ton)		18.065,62	1.896,00	2.088,50	32	<
2.2.5	Urusan Perdagangan						
2.2.5.1	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB		25,65	25,64	26,39	38,84	<
	Pertumbuhan sector perdagangan		5,47	3,86	4,12	19	<

2.2.5.2	Ekspor Bersih Perdagangan (juta rupiah)				1290	2200	
2.2.6	Urusan Perindustrian						
2.2.6.1	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB					7,62	
	Pertumbuhan sector perindustrian					4,25	
3	ASPEK DAYA SAING DAERAH						
3.1.	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah						
3.1.1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per kapita				682	648	<
3.1.2	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita			723	817		
3.1.3	Produktivitas total daerah						
3.2	Pertanian						
3.2.1	Nilai tukar petani					99,85	
3.3.	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur						
3.3.1	Luas Wilayah Produktif				11880	0,26	
3.3.2	Rasio Panjang Jalan dan Jumlah kendaraan					2,65	
3.3.3	Jumlah Orang / Barang yang terangkut Angkutan Umum	601.989	597.039	595.812	591.300	1900	>
3.3.4	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	600.369	595.353	594.517	587.660	1900	>
3.3.5	Jumlah Bank Pemerintah dan Swasta di Kota Pangkalpinang					72	
3.3	Penataan Ruang						
3.3.1	Ketaatan terhadap RTRW						
3.3.2	Luas wilayah produktif						

3.3.3	Luas wilayah industri					826	
3.3.4	Luas wilayah banjir						
3.3.5	Luas wilayah kekeringan						
3.3.6	Luas wilayah perkotaan	118,41	118,41	118,41	118,41	118,41	=
3.4	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian						
3.4.1	Jenis dan jumlah bank dan cabang					72	
3.4.2	Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang					10	
3.4.3	Jenis, kelas, dan jumlah restoran					87,19	
3.4.4	Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel					32,44	
3.5	Lingkungan Hidup						
3.5.1	Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih					100	
3.6	Komunikasi dan Informatika						
3.6.1	Rasio ketersediaan daya listrik					34	
3.6.2	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik				122.287	100	
3.6.3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon						
3.7	Fokus Iklim Berinvestasi						
3.7.1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian						
3.7.1.1	Angka kriminalitas	321				34,03	
3.7.1.2	Jumlah demo					1	

3.7.1.3	Lama proses perijinan					3	
	Cakupan penyelesaian perda						
3.7.1.4	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah					22	
3.7.1.5	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha					6	
3.7.1.6	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa						
3.8	Fokus Sumber Daya Manusia						
3.8.1	Ketenagakerjaan						
3.8.1.1	Rasio lulusan S1 , S2 dan S3					22	
3.8.1.2	Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)					55	

BAB VII

PENUTUP

7.1 Penutup

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2019 merupakan Dokumen Perencanaan tahunan dengan prioritas pembangunan terarah dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2007-2025 Tahap III dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022. Disamping itu prioritas pembangunan daerah secara prinsip tetap mengacu pada sasaran-sasaran pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2015-2019, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pangkalpinang Tahun 2014-2034, memperhatikan Program Pembangunan Nasional 9 Agenda Nawa Cita, serta percepatan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan kesepakatan-kesepakatan pembangunan SDG's. Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat arah kebijakan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan. Oleh karena itu, untuk implementasinya diperlukan koordinasi antar instansi di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang dan partisipasi masyarakat serta seluruh pelaku pembangunan (stakeholder) melalui Forum Gabungan Perangkat Daerah serta musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan terutama sinkronisasi dan penyelarasan rencana program dan kegiatan yang telah ditentukan.

Dokumen RKPD Kota Pangkalpinang tahun 2019 ini dimaksudkan sebagai acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dan juga sebagai acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) penyelenggaraan urusan pemerintahan baik urusan wajib maupun urusan pilihan, sekaligus mendorong masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya, serta dijadikan pedoman dalam rangka

melakukan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dimaksud. Keberhasilan dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional, diantaranya sangat tergantung dengan sinergitas kebijakan antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Pusat. Sinkronisasi kebijakan diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai kewenangan masing-masing yang diorientasikan melalui pencapaian strategi pembangunan dengan prinsip money follow program. Dengan demikian usulan kegiatan yang diajukan telah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sehingga selain kerangka pendanaannya diusulkan ke APBD Kota Pangkalpinang maupun ke Pemerintah Pusat melalui APBN baik dalam bentuk usulan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Dalam kerangka pendanaan program dan kegiatan melalui APBD Kota Pangkalpinang maka Dokumen RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun 2019 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Keberhasilan pembangunan di Kota Pangkalpinang selain dilaksanakan jajaran Pemerintah Kota juga ditentukan oleh dukungan masyarakat untuk menjawab tantangan dan mengurangi permasalahan yang ada. Adapun Kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2019, tidak hanya memuat kegiatan– kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
2. Perangkat Daerah dan seluruh stakeholders pembangunan termasuk masyarakat luas, dunia usaha, berkewajiban dan berperan serta untuk melaksanakan program– program RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2019 dengan sebaik-baiknya
3. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergisitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maupun dari APBN, maka setiap Perangkat Daerah perlu membuat Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2019 sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dengan mempedomani RKPD ini.

4. Pelaksanaan Forum SKPD serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD ditujukan untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat serta merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan.
5. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019, Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Penelitian Daerah Kota Pangkalpinang berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan menganalisa terhadap penjabaran dan sinergisitas RKPD tahun 2019 ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dan Kebijakan Umum APBD 2019 serta Prioritas dan Pagu Indikatif PD Tahun 2019.

Plt. WALIKOTA PANGKALPINANG,

MUHAMMAD SOPIAN